



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Informasi Umum

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 273,45 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang adalah 95 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu sekitar 2 jam. Secara topografi, Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 250 – 650 meter di atas permukaan laut. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara, dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Kota yang didirikan pada Tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi **“Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 10 (sepuluh) kelurahan, dan 27 (dua puluh tujuh) desa, berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah Utara, Kabupaten Solok di sebelah Selatan dan Barat, serta dengan Kabupaten Sijunjung di sebelah Timur dengan rincian:

- a) Kecamatan Silungkang, terdiri dari 5 (lima) desa;
- b) Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 5 (lima) desa;
- c) Kecamatan Barangin, terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa;
- d) Kecamatan Talawi, terdiri dari 11 (sebelas) desa.

Kelurahan di Kota Sawahlunto berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kelurahan Tanah Lapang;
- b) Kelurahan Pasar;
- c) Kelurahan Air Dingin;
- d) Kelurahan Aur Mulyo;
- e) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- f) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- g) Kelurahan Lubang Panjang;
- h) Kelurahan Durian I;



- i) Kelurahan Durian II;
- j) Kelurahan Saringan.

Desa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) desa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Desa Silungkang Oso;
- 2) Desa Silungkang Duo;
- 3) Desa Silungkang Tigo;
- 4) Desa Muara Kalaban;
- 5) Desa Taratak Bancah;
- 6) Desa Lunto Barat;
- 7) Desa Lunto Timur;
- 8) Desa Pasar Kubang;
- 9) Desa Kubang Tengah;
- 10) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 11) Desa Santur;
- 12) Desa Talago Gunung;
- 13) Desa Kolok Mudik;
- 14) Desa Kolok Nan Tuo;
- 15) Desa Lumindai;
- 16) Desa Balai Batu Sandaran;
- 17) Desa Talawi Mudik;
- 18) Desa Talawi Hilir;
- 19) Desa Bukik Gadang;
- 20) Desa Batu Tanjung;
- 21) Desa Kumbayau;
- 22) Desa Tumpuk Tengah;
- 23) Desa Datar Mansiang;
- 24) Desa Rantih;
- 25) Desa Salak;
- 26) Desa Sikalang;
- 27) Desa Sijantang Koto.

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga



memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2018-2023, yaitu Bapak Deri Asta dan Bapak Zohirin Sayuti dengan Visi “ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera ”.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98). Secara rinci Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
12. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Sekretariat Daerah
17. Sekretariat DPRD
18. Kecamatan Talawi
19. Kecamatan Barangin
20. Kecamatan Lembah Segar
21. Kecamatan Silungkang



22. Inspektorat Daerah
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, meskipun Rumah Sakit Umum Daerah bukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan secara struktur organisasi merupakan bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun dalam pelaporan keuangan dilakukan secara terpisah.

Kota Sawahlunto memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**1. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (PT. WWS)**

Direktur : Epy Kusnadi, SH  
Komisaris : Afridarman, SE

**2. PT. Lembu Betina Subur (PT. LBS)**

Direktur : Hilmed, S.Pt, MM  
Komisaris : Hilmed, S.Pt, MM

**3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto**

Direktur : Arifman, ST, MIL  
Ketua Dewan Pengawas : Dr. dr. Ambun Kadri, M.KM

**4. Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM)**

Direktur : Novi Suhendrik, A.Md  
Dewan Pengawas : Asisten Administrasi Pembangunan  
(Drs. Marwan, M.Pd) selaku Pelaksana Harian

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

### **a. Maksud**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.



Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana laporan yang dihasilkan menjadi 7 jenis laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan umum pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto secara spesifik bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Tersedianya informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi laporan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang



berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun secara manual dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini disebabkan karena aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan masih dalam tahap pengembangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca Daerah;  
Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah juga harus menginformasikan



tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

4) Laporan Operasional (LO);

Yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang setara dalam kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas disusun menggunakan metode langsung sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan yang menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah daerah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan harus memuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

### 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;



- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Pasal 320 menyatakan Laporan Keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 13) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Dearah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- 14) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
- 15) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 103);
- 16) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 17) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 73).

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I**      Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab yaitu: Informasi Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II**      Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga sub bab yaitu Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III**      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan terdiri dari dua sub bab yaitu: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.



- BAB IV Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat sub bab yaitu Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VII Penutup.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



## 2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 2020 kondisi perekonomian global terpengaruh dengan merebaknya wabah *Covid-19* dan kondisi ini juga berlanjut sampai tahun 2021. Dampak wabah *covid-19* tidak hanya pada perekonomian global tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2022 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksi masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi nasional dan global.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Prediksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022**

No	Indikator Ekonomi Makro	Prediksi	
		2022	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	4,53
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,43
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,05	2,01
4	Gini rasio	0,280	0,278
5	IPM	73,89	74,41
6	Tingkat inflasi (%)	2,29	2,28
7	PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa)	62,93	66,03

Sumber Data: Barenlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi) 2021

Untuk mencapai target indikator makro Kota Sawahlunto tahun 2022 tersebut, terdapat sebelas rekomendasi prioritas daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai-nilai agama
2. Optimalisasi status WT BOS sebagai warisan dunia dan geopark nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemanfaatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk komoditi unggulan daerah serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. Peningkatan mutu pendidikan
5. Peningkatan kualitas perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan pembangunan tingkat kota, perangkat daerah dan pemerintah terdepan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
7. Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran.



8. Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas.
9. Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.
10. Peningkatan perlindungan sosial.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Sawahlunto tidak terlepas dari terkendalinya kasus pasien positif corona mulai akhir semester II tahun 2021 yang ditandai dengan penurunan yang signifikan kasus Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 diperkirakan naik dari perkiraan awal, yakni sebesar 3,28%.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Sawahlunto tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2022 tetap ditujukan untuk mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan yang sejahtera serta melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata Dalam Mewujudkan Wisata Tambang yang Berbudaya dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal dalam arti fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Sawahlunto.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi PDRB perkapita, indeks gini, persentase tingkat kemiskinan.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil daerah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitupun sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB.

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga



pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah sebesar 2.829.590,03 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 2,49 persen atau naik sebesar 68.665,85 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2017 – 2021, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara.

Berikut capaian nilai PDRB ADHK per lapangan usaha, laju pertumbuhan dan kontribusinya pada periode 2017 – 2021:

**Tabel 2.2**  
**PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

No	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	207.654,66	211.585,43	217.981,59	219.533,32	235.288,04
		Laju Pertumbuhan (%)	2,20	1,89	3,02	0,71	7,18
		Kontribusi (%)	8,25	7,97	7,79	7,95	8,32
2	Pertambangan dan Penggalan	Nilai (Juta rupiah)	161.365,58	169.660,23	188.594,40	205.352,34	147.378,42
		Laju Pertumbuhan (%)	(7,56)	5,14	11,16	8,89	(28,23)
		Kontribusi (%)	6,41	6,39	6,74	7,44	7,44
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	318.901,57	323.282,84	313.187,26	303.849,59	318.768,95
		Laju Pertumbuhan (%)	5,84	1,37	(3,12)	(2,98)	4,91
		Kontribusi (%)	12,67	12,17	11,20	11,01	11,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	50.107,79	54.651,56	57.970,38	54.396,42	57.240,64
		Laju Pertumbuhan (%)	10,60	9,07	6,07	(6,17)	5,23
		Kontribusi (%)	1,99	2,06	2,07	1,97	2,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	8.942,48	9.642,44	10.326,26	10.294,16	10.845,12
		Laju Pertumbuhan (%)	6,69	7,83	7,09	(0,31)	5,35
		Kontribusi (%)	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	266.154,27	283.258,78	302.061,64	286.329,09	295.423,02
		Laju Pertumbuhan (%)	8,45	6,43	6,64	(5,21)	3,18
		Kontribusi (%)	10,57	10,67	10,80	10,37	10,44
7	Perdagangan Besar	Nilai (Juta rupiah)	397.072,49	420.304,73	443.168,27	440.089,10	458.365,75



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
	& Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Laju Pertumbuhan (%)	7,25	5,85	5,44	(0,69)	4,15
		Kontribusi (%)	15,77	15,83	15,85	15,94	16,20
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	226.211,88	241.737,27	262.482,13	233.712,10	243.867,65
		Laju Pertumbuhan (%)	8,89	6,86	8,58	(10,96)	4,35
		Kontribusi (%)	8,99	9,10	9,39	8,46	8,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	43.407,61	47.111,15	50.854,36	45.715,95	50.005,43
		Laju Pertumbuhan (%)	5,09	8,53	7,95	(10,10)	9,38
		Kontribusi (%)	1,72	1,77	1,82	1,66	1,77
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	203.091,34	223.761,16	242.274,05	262.117,01	280.666,77
		Laju Pertumbuhan (%)	9,53	10,18	8,27	8,19	7,08
		Kontribusi (%)	8,07	8,43	8,66	9,49	9,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	82.925,58	83.736,97	85.913,53	86.692,88	94.920,34
		Laju Pertumbuhan (%)	1,53	0,98	2,60	0,91	9,49
		Kontribusi (%)	3,29	3,15	3,07	3,14	3,35
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	41.576,63	44.662,12	47.283,00	47.346,67	49.685,83
		Laju Pertumbuhan (%)	3,70	7,42	5,87	0,13	4,94
		Kontribusi (%)	1,65	1,68	1,69	1,71	1,76
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	3.272,14	3.438,59	3.649,43	3.534,17	3.655,43
		Laju Pertumbuhan (%)	6,66	5,09	6,13	(3,16)	3,43
		Kontribusi (%)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan dan Pertahanan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	296.518,09	313.643,29	326.390,70	324.352,15	331.138,48
		Laju Pertumbuhan (%)	5,69	5,78	4,06	(0,62)	2,09
		Kontribusi (%)	11,78	11,81	11,67	11,75	11,70
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	69.651,85	74.013,47	80.700,00	84.258,65	88.342,02
		Laju Pertumbuhan (%)	9,83	6,26	9,03	4,41	4,85
		Kontribusi (%)	2,77	2,79	2,89	3,05	3,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	27.676,73	29.463,29	31.118,42	33.066,55	35.496,93
		Laju Pertumbuhan (%)	9,99	6,46	5,62	6,26	7,35



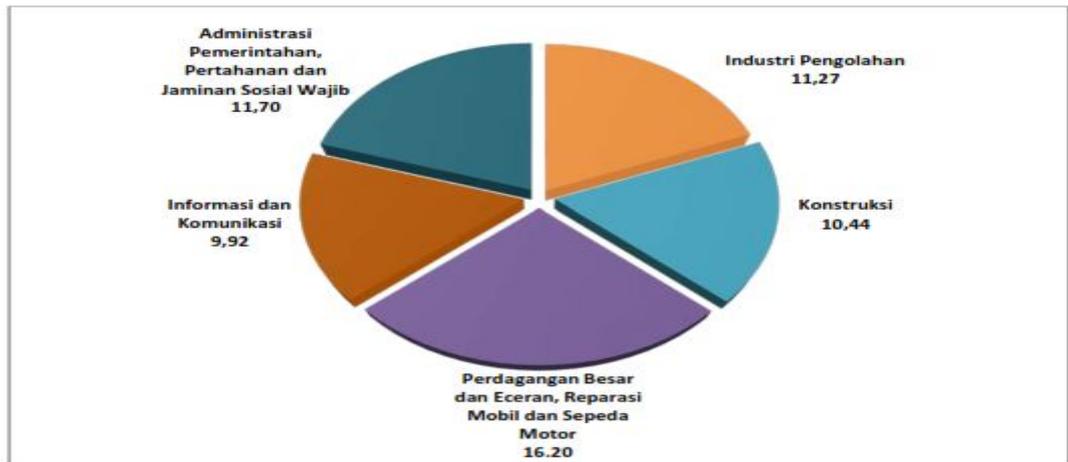
No	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Kontribusi (%)	1,10	1,11	1,11	1,20	1,25
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	112.619,48	121.666,45	132.581,00	120.284,03	128.501,21
		Laju Pertumbuhan (%)	8,63	8,03	8,97	(9,28)	6,83
		Kontribusi (%)	4,47	4,58	4,74	4,36	4,54
<b>PDRB ADHK Kota Sawahlunto</b>		<b>Nilai (Juta rupiah)</b>	<b>2.517.150,17</b>	<b>2.655.619,77</b>	<b>2.796.536,42</b>	<b>2.760.924,18</b>	<b>2.829.590,03</b>
		<b>Laju Pertumbuhan (%)</b>	<b>5,74</b>	<b>5,50</b>	<b>5,31</b>	<b>(1,27)</b>	<b>2,49</b>
		<b>Kontribusi (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pada tabel diatas terlihat bahwa perekonomian Kota Sawahlunto yang tumbuh sebesar 2,49 persen pada tahun 2021 didukung oleh hampir semua lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Pengendalian yang berkontraksi sebesar 28,23 persen. Lapangan usaha dengan capaian pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 9,49 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,38 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,35 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,18 persen, Informasi dan Komunikasi 7,08 persen.

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Sawahlunto tahun 2021, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah: pertama, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 458.365,75 juta rupiah atau sebesar 16,20 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 331.138,48 juta rupiah atau sebesar 11,70 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 318.768,95 juta rupiah atau 11,27 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 295.423,02 juta rupiah atau 10,44 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 280.666,77 juta rupiah atau sebesar 9,92 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Berikut disajikan kontribusi lapangan usaha yang dominan berdasarkan PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2021 pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2.1**  
**Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2021 (%)**



Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Sementara, besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) Kota Sawahlunto dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 3.165.214,99 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.850.697,74 juta rupiah pada tahun 2021. Namun terjadi pengecualian pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.656.590,97 juta rupiah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.679.850,22 juta rupiah. Peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) Kota Sawahlunto ini sejalan dengan peningkatan dan penurunan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sawahlunto.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2021, lima lapangan usaha yang dominan adalah : lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto dan kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

No	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (Juta rupiah)	303.116,60	312.007,01	325.395,50	326.254,20	345.211,69
		Kontribusi (%)	9,58	9,16	8,84	8,92	8,96
2	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (Juta rupiah)	163.456,56	171.097,20	198.822,71	176.111,13	146.011,23
		Kontribusi (%)	5,16	5,03	5,40	4,82	3,79
3	Industri Pengolahan	Nilai (Juta rupiah)	404.956,76	415.867,46	392.312,53	395.495,23	432.174,39
		Kontribusi (%)	12,79	12,22	10,66	10,82	11,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (Juta rupiah)	58.172,95	63.654,79	72.288,64	68.590,83	72.673,29
		Kontribusi (%)					



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lapangan Usaha	Satuan	Perkembangan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
			1,84	1,87	1,96	1,88	1,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (Juta rupiah)	11.649,49	12.972,09	14.330,30	14.314,83	15.250,27
		Kontribusi (%)	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40
6	Konstruksi	Nilai (Juta rupiah)	351.905,79	381.627,67	415.400,36	403.286,34	422.983,56
		Kontribusi (%)	11,12	11,21	11,29	11,03	10,98
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Nilai (Juta rupiah)	468.021,05	510.433,17	553.593,38	547.822,20	564.865,95
		Kontribusi (%)	14,79	14,99	15,04	14,98	14,67
8	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (Juta rupiah)	268.809,90	295.266,52	326.940,02	300.659,50	319.458,45
		Kontribusi (%)	8,49	8,67	8,88	8,22	8,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (Juta rupiah)	67.261,26	73.951,36	82.406,43	75.255,42	84.016,91
		Kontribusi (%)	2,13	2,17	2,24	2,06	2,18
10	Informasi dan Komunikasi	Nilai (Juta rupiah)	213.016,78	241.581,40	274.872,29	295.510,95	322.463,99
		Kontribusi (%)	6,73	7,10	7,47	8,08	8,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (Juta rupiah)	111.517,00	115.369,44	121.243,11	124.283,45	139.513,41
		Kontribusi (%)	3,52	3,39	3,39	3,40	3,62
12	Real Estat	Nilai (Juta rupiah)	56.708,73	61.185,70	64.826,29	65.438,51	69.189,40
		Kontribusi (%)	1,79	1,80	1,76	1,79	1,80
13	Jasa Perusahaan	Nilai (Juta rupiah)	4.524,13	4.878,82	5.358,88	5.233,12	5.465,47
		Kontribusi (%)	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pemerintahan dan Pertahanan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (Juta rupiah)	377.875,69	404.331,97	443.891,28	476.947,57	500.860,58
		Kontribusi (%)	11,94	11,88	12,06	13,04	13,01
15	Jasa Pendidikan	Nilai (Juta rupiah)	96.302,33	105.336,58	120.753,32	126.737,94	133.095,48
		Kontribusi (%)	3,04	3,09	3,28	3,47	3,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (Juta rupiah)	36.125,21	39.255,93	43.368,01	47.200,00	51.988,85
		Kontribusi (%)	1,14	1,15	1,18	1,29	1,35
17	Jasa Lainnya	Nilai (Juta rupiah)	171.794,76	195.701,73	224.047,18	207.449,74	225.474,83
		Kontribusi (%)	5,43	5,75	6,09	5,67	5,86
<b>PDRB ADHB Kota</b>		<b>Nilai (Juta rupiah)</b>	<b>3.165.214,99</b>	<b>3.404.518,84</b>	<b>3.679.850,23</b>	<b>3.656.590,96</b>	<b>3.850.697,75</b>
<b>Sawahlunto</b>		<b>Kontribusi (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

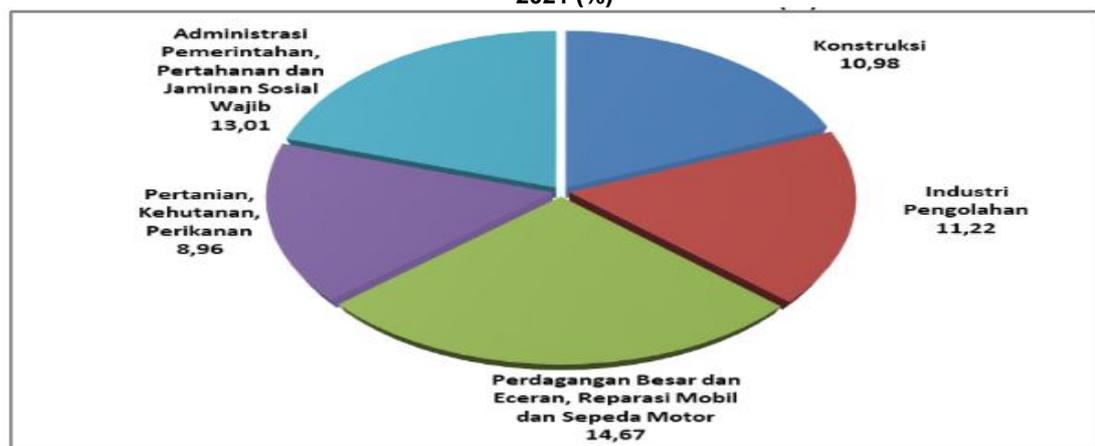
Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari tabel diatas terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2017 – 2021 didominasi sektor tersier (sektor yang produksinya dalam bentuk jasa) dengan komposisi

kisaran 59,14 – 62,75 persen. Hal ini terlihat dari jumlah distribusi PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan seterusnya. Sebaliknya, sektor primer (sektor yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah) memiliki kontribusi relatif kecil dengan kisaran 12,76 – 14,74 persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian). Sedangkan kontribusi sekunder (sektor yang berkaitan dengan manufaktur) memiliki kontribusi kisaran 24,11 – 26,12 persen, yang terlihat dari kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Konstruksi.

Kontribusi lima lapangan usaha Kota Sawahlunto berdasarkan PDRB ADHB tahun 2021 dapat juga dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2.2**  
**Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021 (%)**



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pengeluaran kecuali komponen Perubahan Inventori yang mengalami kontraksi sebesar 48,64 persen dan pertumbuhan hampir semua lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 28,23 persen yang juga menjadi salah satu penyebab tertekannya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021. Penyebab lainnya adalah belum optimalnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kontribusinya kisaran 50 persen pembentuk PDRB dari *demand side* serta belum optimalnya pertumbuhan 5 (lima) lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB dari *supply side*, sehingga ekonomi Kota Sawahlunto tidak tumbuh signifikan sebagaimana daerah lainnya yang tumbuh rata-rata diatas 3 persen, kecuali Kabupaten



Kepulauan Mentawai yang tumbuh sebesar 2,89 persen dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2,18 (Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022). Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto periode 2017 – 2021:

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021 (%)**

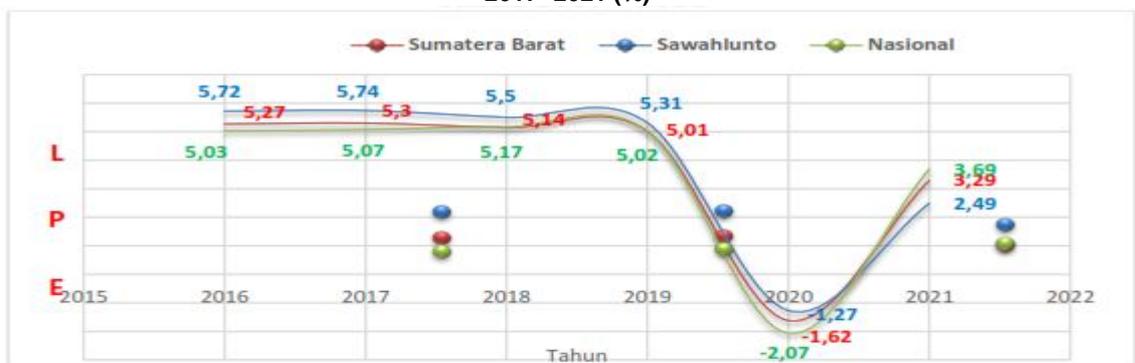


Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Dari grafik diatas diketahui, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2017 – 2021 , capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,74 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen. Minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 dikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home*, himbauan di rumah saja, dll yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibat terjadinya kontraksi ekonomi.

Ekonomi Kota Sawahlunto selama periode lima tahun terakhir (2017 – 2021) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional kecuali tahun 2021, hal ini terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017- 2021 (%)**



Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022



Berdasarkan grafik di atas terlihat periode 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sebelum pandemi covid-19 (tahun 2016 – 2019), pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas angka 5,30 persen, sedangkan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh di bawah angka 5,30 persen. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen. Kondisi ini juga lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dari Provinsi Sumatera Barat yang pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto justru berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

b. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK). Untuk menghitung laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator

Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode PDB (PDRB) deflator selama kurun waktu 2017 – 2021:

**Tabel 2.4**  
**Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator**  
**Tahun 2017 – 2021**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	3.165,21	3.404,52	3.679,85	3.656,59	3.850,70
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.517,15	2.655,62	2.796,54	2.760,92	2.829,59
PDRB Deflator (Df)	1,26	1,28	1,32	1,32	1,36
<u>Deflator PDRB (n - (n-1))</u>					
Deflator PDRB n-1	0,0189	0,0195	0,0264	0,0065	0,0275
Inflasi Kota Sawahlunto (%)	1,89	1,95	2,64	0,65	2,75

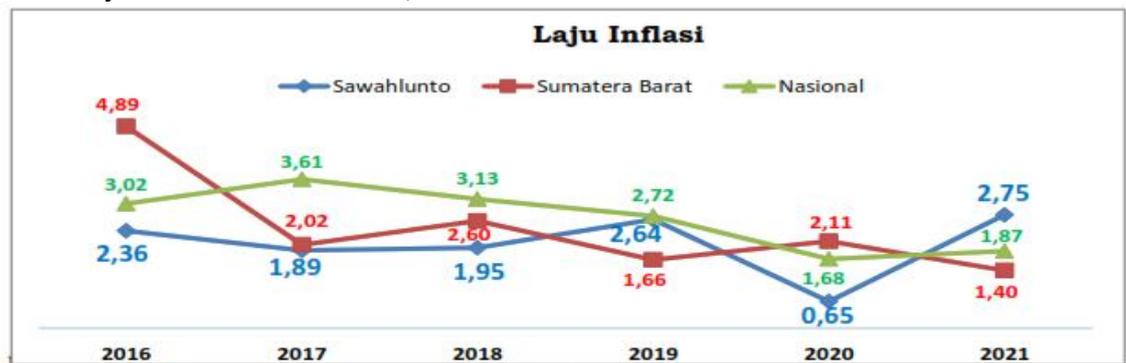
*Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2022 (data olahan)*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2017–2021, laju inflasi di Kota Sawahlunto cukup terkendali di bawah tiga persen. Pada saat terjadi wabah Covid-19 tahun 2020, laju inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen dan seiring mulai bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021, laju inflasi Kota Sawahlunto juga melonjak naik hingga 2,75 persen dan ini merupakan laju inflasi tertinggi di kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir.



Tinggi rendahnya laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017-2021 tentu berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.5**  
**Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021**



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Berdasarkan grafik diatas, laju inflasi Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari laju inflasi Kota Sawahlunto. Pada grafik di atas juga terlihat bahwa laju inflasi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berada di bawah batas bawah kisaran target Bank Indonesia sebesar 2 persen, sedangkan laju inflasi Kota sawahlunto berada di atas target Bank Indonesia (di atas 2 persen). Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2021 menjadi salah satu penyebab tertekannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang hanya mencapai 2,49 persen dan merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan terendah kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah (daerah). Semakin besar nilai PDRB Per Kapita suatu wilayah semakin makmur wilayah tersebut. PDRB Per Kapita menunjukkan PDRB Per Satu Orang atau PDRB Per Kepala yang diperoleh dengan cara membagi PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Meningkat dan menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB serta bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah (daerah) tersebut.



Berikut disajikan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan variabel pembentuknya pada periode 2017 – 2021 pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dan Variabel Pembentuknya**  
**Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.165.215	3.404.519	3.679.850	3.656.591	3.850.698
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	7,74	7,56	8,09	-0,63	5,31
Jumlah Penduduk (Jiwa)	61.398	61.898	62.524	65.138	65.687
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	0,81	1,01	4,18	0,99
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	51,55	55,00	58,61	56,29	58,62
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	6,64	6,69	6,56	-3,96	4,14

*Sumber data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu tahun 2017 - 2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,63 persen per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 mencapai Rp55,00 juta per jiwa, meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun 2017 dengan nilai Rp51,55 per jiwa. Nilai PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019 kembali meningkat dengan capaian Rp58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56 persen dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp58,61 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96 persen disebabkan turunnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63 persen sebagai dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18 persen. Dan tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14 persen seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 5,31 persen dan jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 persen.

Berikut perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021 pada tabel berikut:



Tabel 2.6  
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021 (juta/jiwa)

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kabupaten</b>					
Kepulauan Mentawai	45,12	47,06	50,12	53,19	54,80
Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,1	28,04	29,29
Solok	31,96	34,10	36,21	34,62	35,72
Sijunjung	34,45	36,31	38,15	38,99	40,31
Tanah Datar	32,97	35,13	37,53	35,12	36,31
Padang Pariaman	46,32	49,45	50,95	41,72	42,62
Agam	36,83	39,24	41,61	38,62	39,96
Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,61	40,59	41,99
Pasaman	28,30	29,87	31,47	30,02	31,12
Solok Selatan	29,55	30,97	32,25	30,54	31,26
Dharmasraya	38,45	40,14	41,18	44,99	46,52
Pasaman Barat	32,06	33,52	34,32	35,46	36,51
<b>Kota</b>					
Padang	57,27	61,24	65,13	68,51	71,36
Solok	50,57	53,43	56,48	55,29	57,10
<b>Sawahlunto</b>	<b>51,55</b>	<b>55,00</b>	<b>58,61</b>	<b>56,29</b>	<b>58,62</b>
Padang Panjang	56,74	60,35	64,19	61,92	64,09
Bukit Tinggi	58,78	62,21	65,89	71,391	74,24
Payakumbuh	42,78	45,88	49,88	49,08	51,64
Pariaman	49,75	52,68	56,12	53,20	55,18

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

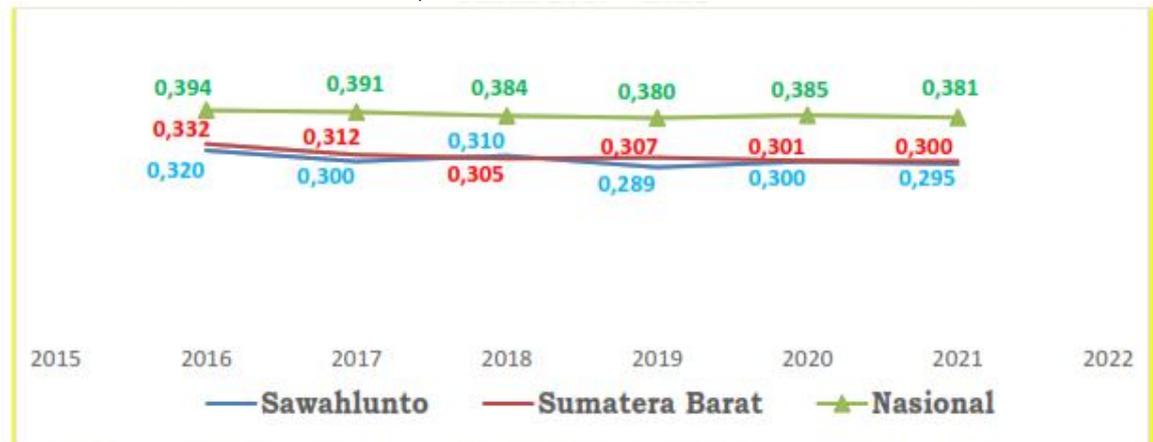
Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada pada posisi keempat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang.

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini (koefisien gini) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Indeks Gini merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017 – 2021 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pengeluaran antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.6**  
**Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021**



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

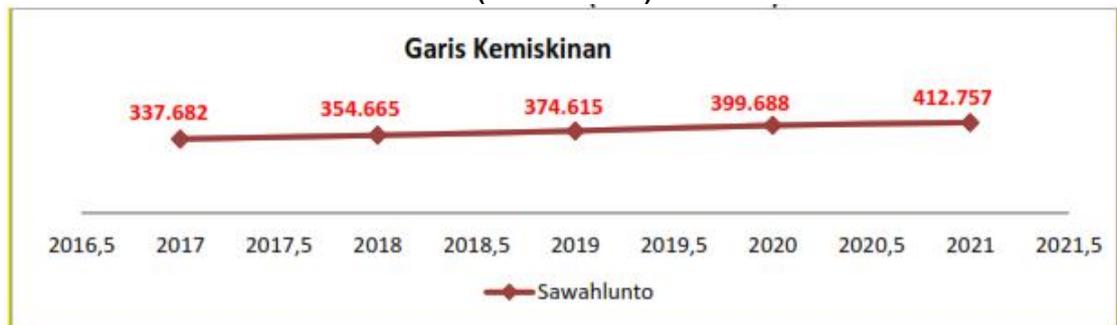
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sebesar 0,300. Kemudian meningkat menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan selanjurnya turun kembali menjadi 0,289 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,300 dan turun lagi menjadi 0,295 pada tahun 2021. Meskipun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,001 persen per tahun.

Berdasarkan klasifikasi nilai Indeks gini, ketimpangan pengeluaran di Kota Sawahlunto secara umum tergolong “sedang”, kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2021 yang tergolong rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indeks gini Kota Sawahlunto berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2018 dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat.

e. Persentase Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto periode 2017 – 2021:

**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2017 – 2021 (Periode Maret)**



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2022 (data olahan)

Garis kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada periode Maret tahun 2017 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada level Rp337.682,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini kemudian meningkat sebesar 5,03 persen pada tahun 2018 periode Maret yang berada pada level Rp354.665,00 per kapita per bulan. Kemudian pada periode Maret tahun 2019 Garis Kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp374.615,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,62 persen. Garis kemiskinan ini terus meningkat sampai periode Maret tahun 2021 menjadi Rp412.757,00 per kapita per bulan, meningkat 3,27 persen dibandingkan dengan periode Maret tahun 2020 yang berada pada level Rp399.588,00 per kapita per bulan.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini sudah berangsur membaik, dan diharapkan kembali ke kondisi normal. Kondisi makro ekonomi Kota Sawahlunto tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Sawahlunto yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.



Kebijakan keuangan Kota disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Dearah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja dan aspek Pembiayaan.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah tahun 2022 diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah ditargetkan antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan, optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah, akurasi data terkait dasar perhitungan pembagian dana perimbangan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pencapaian target pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatn daerah melalui:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perekaman dan pemungutan pajak.
2. Pemberian reward dan punishment.
3. Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak melalui media massa, media cetak, dan tatap muka.
4. Penyesuaian ZNT sebagai perhitungan NJOP PBB-P2.
5. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
6. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.



7. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak.
8. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan.
9. Meningkatkan pengeloan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
11. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*.
12. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.
13. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
14. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

#### **2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
  - b) Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan dampak pandemi Covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan daerah dan retribusi daerah.
  - c) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
  - d) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.



- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.  
Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
  - 3) Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) Pendapatan dari jasa giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
    - b) Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.
    - c) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD.

#### **2.2.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 memperhatikan kebijakan berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji dan kebutuhan lainnya.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto.
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah.
- 4) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.



- 5) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Sawahlunto.
- 7) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

A. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Target pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada:

- a. Untuk DBH berdasarkan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
- b. Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- c. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Perimbangan tersebut didasarkan pada Pendapatan Tahun Anggaran 2021.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 untuk Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan berdasarkan penerimaan tahun 2021.



### C. Dana Desa

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan target Penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didukung dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 971.2-937-2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

## 2) Transfer Antar Daerah

### A. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tersebut berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau



dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2022.

B. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-140-2022 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-604-2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara triwulan melalui sebagaimana berikut:

- (1) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/022/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2022.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/023/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2021.



- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/024/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2022.
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/034/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2022.
- (5) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/037/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2022.
- (6) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/048/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2022.
- (7) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/049/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2022.
- (8) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/052/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2022.
- (9) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/053/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2022.



### **2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal berikut: penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

#### **1) Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2) Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Untuk tahun 2022, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pemerintah Kota Sawahlunro adalah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.



Belanja daerah menurut urusan Pemerintah Daerah tersebut diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Umum
- b. Ketertiban dan Keamanan
- c. Ekonomi
- d. Perlindungan Lingkungan Hidup
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata
- h. Pendidikan, dan
- i. Perlindungan Sosial

Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah daerah juga berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu serta dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah daerah memberi dukungan yang lebih besar bagi perekonomian dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan alokasi Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- b. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal.
- d. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
- e. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*.
- f. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat.
- g. Efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran.
- h. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



- i. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pengalokasian penggunaan anggaran untuk keperluan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Untuk menagani dampak ekonomi, pemerintah daerah memastikan bahwa bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat telah tersedia. Yang tidak kalah penting, dunia usaha yang menjadi denyut nadi perekonomian mengalami kebuntuan. Oleh karena itu wajar kiranya pemerintah daerah memberikan stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19 terutama bagi pelaku usaha UMKM.

#### **2.2.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

##### **1) Belanja Pegawai**

- a) Belanja pegawai digunakan untuk mengangarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Belanja pegawai merupakan belanja yang bersifat mengikat dimana harus dialokasikan dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan, disamping itu kebijakan belanja pada perubahan KUA tahun 2022 juga untuk mencukupi kekurangan belanja gaji dan tunjangan pada APBD awal.
- b) Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d) Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan:



- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
  - Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga kerja.
  - Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang



Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ Tahun 2021 Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- (7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 di perhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (10) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang dimaksud dengan memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan



Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR).

## **2) Belanja Barang dan Jasa**

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang /jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - (1) Penganggaran Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai sesuai dengan ketentuan:
    - (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
    - (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
    - (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
    - (d) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
    - (e) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
    - (f) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
    - (g) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58



Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerja. Belanja Jasa terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- Honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/39/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/207/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/39/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/207/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi, meliputi:
- Penganggaran Jaminan Kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang menerima gaji/upah dari APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Tahun 2014 tentang Desa dimana selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, program jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Sawahlunto berupa program Jaminan Kesehatan Kota dan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri dalam negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.
  - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit



- akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
  - (g) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
  - (h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Kota Sawahlunto, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundangan diprioritaskan pelaksanaannya di kota yang bersangkutan dan apabila terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Kota Sawahlunto dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan covid-19 atau melalui virtual berbasis teknologi informasi.



- (i) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Belanja Pemeliharaan  
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (4) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas, digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, serta Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto nomor 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asa kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

### **3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2022 mempunyai kewajiban untuk membayar bunga utang atas pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).



Tagihan kewajiban atas bunga utang terdiri dari Bunga, yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu jatuh tempo pada setiap tanggal 15 Mei dan tanggal 15 November pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, Pemerintah menetapkan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Bank penatausahaan atas pinjaman dimaksud dan pembayaran bunga utang disetor ke Rekening Menteri Keuangan, Rekening Pembangunan Daerah dalam rupiah dengan Nomor 519.000102980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

#### **4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

- a) Permendagri 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- c) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial. Belanja bantuan sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- e) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran bantuan



sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga.

- f) Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto menganggarkan belanja hibah meliputi : Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- g) Sementara, penganggaran belanja bantuan sosial meliputi belanja bantuan sosial kepada individu berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- h) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

#### **2.2.2.2 Belanja Modal**

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis lainnya.
- 2) Penganggaran belanja modal meliputi : belanja modal tanah, peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

Penganggaran belanja modal pada tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Sawahlunto berpedoman pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



- 4) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- 5) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- 6) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- 7) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;

#### **2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga**

- 1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 3) Belanja tidak terduga berupa bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tahun 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan lain diluar kendali pemerintah daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### **2.2.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 meliputi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Sementara, belanja bantuan keuangan berupa belanja bantuan keuangan umum daerah Kota kepada desa.



**1) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa**

- a) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa tahun 2022 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto dimana jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan tersebut.
- c) Sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - 5) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
  - 6) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
- d) Memperhatikan bahwa realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa tidak cukup signifikan, maka yang akan dijadikan acuan dasar perhitungan pembagian secara proporsional adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto sebagai berikut:



- (1) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (3) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (4) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

- a) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN.
- c) Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota dalam APBD Tahun berjalan setelah dikurangi DAK.
- d) Sesuai Pasal 72 ayat 6, ditegaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Pusat dapat melakukan Penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- e) Penganggaran alokasi dana desa yang diterima dari APBN yang dianggarkan kedalam APBD tahun anggaran 2021 digunakan untuk



- membiyai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa adan perangkat Desa.
  - (2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- g) Alokasi Dana Desa yang telah disepakati KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022. Alokasi Dana Desa dimaksud akan menjadi pagu indikatif Desa pada tahun anggaran 2022.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutupi defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

#### **2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 memperhatikan hal berikut:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2021 untuk menghindari adanya pengeluaran tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.



2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 memperhatikan hal berikut:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan Internasional Bank For Reconstruc & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga tahun 2030. Pembayaran cicilan pokok utang dialokasikan sebesar Rp1.166.666.669,00.
- 2) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat. Pemberian pinjaman daerah yang merupakan investasi pemerintah daerah ada UPTD Dana Bergulir sebesar Rp500.000.000,00.
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp3.000.000.000,00.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.



3. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
4. Mengalokasikan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun berkenaan.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan perubahan kebutuhan daerah dan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan dari pemerintah serta pencapaian tujuan program pembangunan, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 mengalami 3 (tiga) kali pergeseran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal dan 1 (satu) kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7  
Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sawahlunto  
Tahun Anggaran 2022

Kode Rek.	Uraian	Awal	Pergeseran III	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>64.812.610.293,00</b>	<b>64.812.610.293</b>	<b>69.315.857.768</b>	<b>4.503.247.475</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.025.500.000,00	7.025.500.000	7.303.500.000	278.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.366.610.293,00	5.366.610.293	4.649.762.464	(716.847.829)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.150.000.000,00	15.150.000.000	15.164.985.676	14.985.676
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.270.500.000,00	37.270.500.000	42.197.609.628	4.927.109.628
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>548.428.802.834,00</b>	<b>549.028.802.834</b>	<b>554.692.189.893</b>	<b>6.263.387.059</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	523.263.794.498,00	523.263.794.498	525.076.266.264	1.812.471.766
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00	25.765.008.336	29.615.923.629	4.450.915.293
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.873.318.590,00</b>	<b>3.873.318.590</b>	<b>2.749.130.631</b>	<b>(1.124.187.959)</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.873.318.590,00	3.873.318.590	2.749.130.631	(1.124.187.959)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>617.114.731.717,00</b>	<b>617.714.731.717</b>	<b>626.757.178.292</b>	<b>9.642.446.575</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>498.384.910.992,00</b>	<b>475.757.369.589</b>	<b>496.963.954.630</b>	<b>(1.420.956.362)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	265.948.581.039,00	265.948.581.039	266.594.395.382	645.814.343
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.738.410.829,00	189.110.869.426	209.902.972.852	(1.835.437.977)
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.000.000	891.962.272	(358.037.728)
5.1.05	Belanja Hibah	14.897.274.124,00	14.897.274.124	15.657.174.124	759.900.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.550.645.000,00	4.550.645.000	3.917.450.000	(633.195.000)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>114.637.166.815,00</b>	<b>138.933.983.068</b>	<b>125.329.087.114</b>	<b>10.691.920.299</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.875.862.224,00	19.457.788.977	20.015.325.023	3.139.462.799
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.090.561.912,00	53.798.096.412	43.272.346.412	12.181.784.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.566.542.679,00	65.573.897.679	61.937.215.679	(4.629.327.000)



Kode Rek.	Uraian	Awal	Pergeseran III	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.200.000,00	104.200.000	104.200.000	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.818.738.600,00</b>	<b>2.749.463.750</b>	<b>2.255.914.994</b>	<b>(1.562.823.606)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600,00	2.749.463.750	2.255.914.994	(1.562.823.606)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>57.408.448.000,00</b>	<b>57.408.448.000</b>	<b>58.260.946.000</b>	<b>852.498.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.239.217.000,00	1.239.217.000	1.195.342.000	(43.875.000)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	56.169.231.000,00	56.169.231.000	57.065.604.000	896.373.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>674.249.264.407,00</b>	<b>674.849.264.407</b>	<b>682.809.902.738</b>	<b>8.560.638.331</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(57.134.532.690,00)</b>	<b>(57.134.532.690)</b>	<b>(56.052.724.446)</b>	<b>1.081.808.244</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58.801.199.359,00</b>	<b>58.801.199.359</b>	<b>60.719.391.115</b>	<b>1.918.191.756</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.715.232.575,00	46.715.232.575	38.719.707.745	(7.995.524.830)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.085.966.784,00	12.085.966.784	21.999.683.370	9.913.716.586
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>58.801.199.359,00</b>	<b>58.801.199.359</b>	<b>60.719.391.115</b>	<b>1.918.191.756</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.666.666.669,00</b>	<b>1.666.666.669</b>	<b>4.666.666.669</b>	<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669	1.166.666.669	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000	500.000.000	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.666.666.669,00</b>	<b>1.666.666.669</b>	<b>4.666.666.669</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>57.134.532.690,00</b>	<b>57.134.532.690</b>	<b>56.052.724.446</b>	<b>(1.081.808.244)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan bersifat teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didorong oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Disamping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Disamping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Strategi pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah kemudahan dalam pelayanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik..
2. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.  
Fokus kebijakan Tahun 2022 ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain:
  - a. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
  - b. Memberikan bantuan permodalan untuk mengantisipasi rentenir dan tengkulak.
  - c. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman.
  - d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan recovery ekonomi.
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan objek wisata.
5. Peningkatan daya saing produk unggulan.

#### 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp626.757.178.292,00 yang terdiri dari:

- |                                  |   |    |                    |
|----------------------------------|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | : | Rp | 69.315.857.768,00  |
| b. Pendapatan Transfer           | : | Rp | 554.692.189.893,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | : | Rp | 2.749.130.631,00   |

Sementara dari segi realisasi, Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp620.647.226.213,62, dengan rincian sebagai berikut:

- |   |   |    |                    |
|---|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | : | Rp | 66.920.994.265,62  |
| b. Pendapatan Transfer                  | : | Rp | 551.073.826.548,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | : | Rp | 2.652.405.400,00   |

Untuk Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.682.809.902.738,00 dengan rincian sebagai berikut:



a. Belanja Operasi	:	Rp	496.963.954.630,00
b. Belanja Modal	:	Rp	125.329.087.114,00
c. Belanja Tidak Terduga	:	Rp	2.255.914.994,00
d. Transfer	:	Rp	58.260.946.000,00

Dari sisi Pengeluaran, pada Tahun Anggaran 2022 jumlah Realisasi Belanja adalah sebesar Rp643.653.414.741,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi	:	Rp	468.731.239.357,00
b. Belanja Modal	:	Rp	116.514.679.424,00
c. Belanja Tidak Terduga	:	Rp	294.991.005,00
d. Transfer	:	Rp	58.112.504.955,00

Sementara untuk jumlah Anggaran Pembiayaan Netto sesuai dengan APBD 2022 adalah sebesar Rp56.052.724.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	60.719.391.115,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	4.666.666.669,00

Dengan jumlah Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp35.121.134.786,76 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	38.757.801.454,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	3.636.666.668,00

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.114.946.259,38.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp626.757.178.292,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp69.315.857.768,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp554.692.189.893,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.749.130.631,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp682.809.902.738,00.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2022 akan didanai dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp60.719.391.115,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp38.719.707.744,76 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp21.999.683.370,00 dan dikurangi dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.666.666.669,00 yang diperuntukkan bagi Penyertaan Modal sebesar Rp3.000.000.000,00, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.166.666.668,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500.000.000,00.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>			
1	Pendapatan Asli Daerah	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54
2	Pendapatan Transfer	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48
	<b>Jumlah Pendapatan TA 2021 (A)</b>	<b>626.757.178.292,00</b>	<b>620.647.226.213,62</b>	<b>99,03</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Daerah</b>			
1	Belanja Operasi	496.963.954.630,00	468.731.239.357,00	94,32
2	Belanja Modal	125.329.087.114,00	116.514.679.424,00	92,97
3	Belanja Tak Terduga	2.255.914.994,00	294.991.005,00	13,08
4	Transfer	58.260.946.000,00	58.112.504.955,00	99,75
	<b>Jumlah Belanja Daerah TA 2021 (B)</b>	<b>682.809.902.738,00</b>	<b>643.653.414.741,00</b>	<b>94,27</b>
<b>C.</b>	<b>Surplus/(Defisit) TA 2021 (A - B)</b>	<b>(56.052.724.446,00)</b>	<b>( 23.006.188.527,38)</b>	<b>41,04</b>
<b>D.</b>	<b>Pembiayaan</b>			



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	60.719.391.115,00	38.757.801.454,76	63,83
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.666.666.669,00	3.636.666.668,00	77,93
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>56.052.724.446,00</b>	<b>35.121.134.786,76</b>	<b>62,66</b>
<b>E</b>	<b>SILPA (C+D)</b>	-	<b>12.114.946.259,38</b>	

Untuk Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

### 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

#### 3.2.1 Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran berjalan dengan relatif baik. Pada sisi Pendapatan pada APBD-P Tahun Anggaran 2022 dengan target sebesar Rp626.757.178.292,00 dapat direalisasikan sebesar Rp620.647.226.213,62 atau sebesar 99,03%. Sementara dari sisi Belanja dengan target sebesar Rp682.809.902.738,00 dapat direalisasikan sebesar Rp643.653.414.741,00 atau 94,27%. Walaupun secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Capaian kinerja berdasarkan jenis pendapatan Tahun Anggaran 2022 dimuat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.615.923.629	34.258.971.260,00	4.643.047.631,00	115,68
2	Pajak Daerah	7.303.500.000	7.434.059.921,40	130.559.921,40	101,79
3	Lain-lain PAD yang Sah	42.197.609.628	42.466.462.022,22	268.852.394,22	100,64
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.076.266.264	516.814.855.288,00	(8.261.410.976,00)	98,43
5	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.749.130.631	2.652.405.400,00	(96.725.231,00)	96,48
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.164.985.676	13.477.268.009,00	(1.687.717.667,00)	88,87
7	Retribusi Daerah	4.649.762.464	3.543.204.313,00	(1.106.558.151,00)	76,20
	<b>Jumlah</b>	<b>626.757.178.292,00</b>	<b>620.647.226.213,62</b>	<b>(6.109.952.078,38)</b>	<b>99,03</b>



Sementara untuk capaian kinerja pendapatan berdasarkan objek Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Objek Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.875.000,00	82.500.000,00	75.625.000	1.200,00
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	139.594.941,00	89.594.941	279,19
3	Pajak Hotel	170.000.000,00	255.030.245,80	85.030.246	150,02
4	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	32.000.000,00	45.000.000,00	13.000.000	140,63
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.000.000,00	5.586.600,00	1.586.600	139,67
6	Pajak Restoran	837.000.000,00	985.966.047,60	148.966.048	117,80
7	Pajak Reklame	39.500.000,00	45.912.393,00	6.412.393	116,23
8	Pendapatan Bagi Hasil	29.015.923.629,00	33.658.971.260,00	4.643.047.631	116,00
9	Pendapatan BLUD	34.036.234.628,00	38.183.078.019,00	4.146.843.391	112,18
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000,00	1.678.826.713,00	178.826.713	111,92
11	Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	3.735.969.454,00	35.969.454	100,97
12	Dana Desa	20.098.731.000,00	20.098.731.000,00	-	100,00
13	Dana Insentif Daerah (DID)	5.044.116.000,00	5.044.116.000,00	-	100,00
14	Bantuan Keuangan	600.000.000,00	600.000.000,00	-	99,99
15	Dana Perimbangan	499.933.419.264,00	491.672.008.288,00	(8.261.410.976)	98,35
16	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	(96.725.231)	96,48
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.100.000.000,00	13.432.282.333,00	(1.667.717.667)	88,96
18	Retribusi Jasa Umum	1.459.812.464,00	1.289.541.700,00	(170.270.764)	88,34
19	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	800.000.000,00	596.643.117,00	(203.356.883)	74,58
20	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	74.030.951,00	(25.969.049)	74,03
21	Jasa Giro	650.000.000,00	470.516.220,36	(179.483.780)	72,39
22	Retribusi Jasa Usaha	3.139.550.000,00	2.229.490.331,00	(910.059.669)	71,01
23	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	64.985.676,00	44.985.676,00	(20.000.000)	69,22
24	Pendapatan Bunga	5.500.000.000,00	3.250.591.108,00	(2.249.408.892)	59,10
25	Pajak Parkir	1.000.000,00	511.000,00	(489.000)	51,10
26	Retribusi Perizinan Tertentu	50.400.000,00	24.172.282,00	(26.227.718)	47,96
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.000.000,00	264.745.133,86	(335.254.866)	44,12
28	Pajak Hiburan	156.000.000,00	61.170.000,00	(94.830.000)	39,21
29	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	757.500.000,00	24.850.000,00	(732.650.000)	3,28



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
30	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	-	(51.000.000)	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	-	(510.000.000)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>626.757.178.292,00</b>	<b>620.647.226.213,62</b>	<b>(6.109.952.078)</b>	<b>99,03</b>

Capaian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2022**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pendapatan			
		Pendapatan	Realisasi	Selisih +/-	%
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.388.307.092,00	1.447.184.220,00	58.877.128,00	104,24
2	Rumah Sakit Umum Daerah	33.000.000.000,00	37.092.076.499,00	4.092.076.499,00	112,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.125.000,00	379.992.223,00	175.867.223,00	186,16
4	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	501.000.000,00	504.562.088,00	3.562.088,00	100,71
5	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	102.200.000,00	88.373.000,00	(13.827.000,00)	86,47
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25.000.000,00	43.600.000,00	18.600.000,00	174,40
7	Dinas Perhubungan	239.900.000,00	142.022.500,00	(97.877.500,00)	59,20
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	735.540.000,00	667.657.500,00	(67.882.500,00)	90,77
9	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	257.000.000,00	138.385.000,00	(118.615.000,00)	53,85
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.522.400.000,00	707.828.000,00	(814.572.000,00)	46,49
11	Sekretariat Daerah	146.300.000,00	57.899.100,00	(88.400.900,00)	39,58
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	588.635.406.200,00	579.377.646.083,62	(9.257.760.116,38)	98,43
	<b>Jumlah</b>	<b>626.757.178.292,00</b>	<b>620.647.226.213,62</b>	<b>(6.109.952.078,38)</b>	<b>99,03</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar 99,03%, menurun secara persentase bila dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,93%. Namun, jika dibandingkan secara jumlah, pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.606.362.026,17 atau 3,78% dari penerimaan pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp598.040.864.187,45. Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih terdapat kendala-kendala sebagaimana berikut:



1. Terbatasnya potensi PAD yang dimiliki daerah.
2. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak dan Retribusi relatif masih rendah.
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih secara manual dan tunai.
4. Ketergantungan penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan pemungutan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dengan cara persuasif dan memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah.
3. Menggunakan aplikasi e-Retribusi yang disediakan oleh pihak Bank Nagari yang berbasis WEB dengan menggunakan POS Android untuk penagihan dan pemungutan retribusi daerah sebagai bentuk upaya pengelolaan retribusi secara digital dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terciptanya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas transaksi retribusi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga tersedia Eksekutife Report untuk Pejabat Pemerintah Daerah.
4. Melakukan sosialisasi berkesinambungan terkait Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB sektor Perkotaan).
5. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
6. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
7. Melakukan pendataan baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat terpungut secara optimal.

### **3.2.2 Belanja**

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp643.653.414.741,00 atau sebesar 94,27% dari anggaran sebesar Rp682.809.902.738,00. Komposisi realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 secara garis besar dibagi empat, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.5**  
**Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Belanja Operasi	496.963.954.630,00	468.731.239.357,00	28.232.715.273,00	94,32
2	Belanja Modal	125.329.087.114,00	116.514.679.424,00	8.814.407.690,00	92,97
3	Belanja Tak Terduga	2.255.914.994,00	294.991.005,00	1.960.923.989,00	13,08
4	Belanja Transfer	58.260.946.000,00	58.112.504.955,00	148.441.045,00	99,75
	<b>Jumlah</b>	<b>682.809.902.738,00</b>	<b>643.653.414.741,00</b>	<b>39.156.487.997,00</b>	<b>94,27</b>

Serapan anggaran belanja dari masing-masing komposisi belanja sesuai urutan terbesar adalah belanja transfer sebesar 99,75%, belanja operasi sebesar 94,32%, belanja modal sebesar 92,97%, dan belanja tak terduga sebesar 13,08%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka jumlah realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	Dinas Pendidikan	122.837.257.716,00	117.616.366.596,00	5.220.891.120,00	95,75
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.840.037.877,00	56.583.274.961,00	3.256.762.916,00	94,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah	67.327.721.738,00	65.089.820.114,00	2.237.901.624,00	96,68
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.254.208.004,00	88.331.781.857,00	6.922.426.147,00	92,73
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	19.021.836.327,00	18.147.902.014,00	873.934.313,00	95,41
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.740.986.157,00	8.514.452.945,00	226.533.212,00	97,41
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	7.614.337.650,00	7.046.295.273,00	568.042.377,00	92,54
8	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	15.130.038.930,00	14.814.741.930,00	315.297.000,00	97,92
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.890.383.261,00	3.607.176.703,00	283.206.558,00	92,72
10	Dinas Perhubungan	8.391.970.244,00	8.177.179.411,00	214.790.833,00	97,44
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	34.668.556.116,00	32.326.730.868,00	2.341.825.248,00	93,25



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.561.973.399,00	6.199.861.400,00	362.111.999,00	94,48
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	7.548.648.075,00	7.136.845.865,00	411.802.210,00	94,54
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.464.687.387,00	3.355.600.061,00	109.087.326,00	96,85
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.891.353.629,00	19.260.439.042,00	1.630.914.587,00	92,19
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	756.936.300,00	669.817.403,00	87.118.897,00	88,49
17	Sekretariat Daerah	43.500.453.568,00	39.064.191.632,00	4.436.261.936,00	89,80
18	Inspektorat	6.801.236.903,00	6.459.430.374,00	341.806.529,00	94,97
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.124.885.491,00	5.891.947.268,00	232.938.223,00	96,20
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	74.939.789.655,00	71.544.904.323,00	3.394.885.332,00	95,47
21	Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.168.232.107,00	5.545.172.074,00	623.060.033,00	89,90
22	Sekretariat DPRD	30.572.140.922,00	27.180.598.550,00	3.391.542.372,00	88,91
23	Kecamatan Barangin	8.255.302.106,00	7.872.912.184,00	382.389.922,00	95,37
24	Kecamatan Lembah Segar	11.361.713.128,00	10.881.093.327,00	480.619.801,00	95,77
25	Kecamatan Silungkang	2.674.270.453,00	2.636.154.936,00	38.115.517,00	98,57
26	Kecamatan Talawi	2.797.658.371,00	2.739.143.510,00	58.514.861,00	97,91
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	802.009.850,00	681.121.270,00	120.888.580,00	84,93
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.871.277.374,00	6.278.458.850,00	592.818.524,00	91,37
<b>JUMLAH</b>		<b>682.809.902.738,00</b>	<b>643.653.414.741,00</b>	<b>39.156.487.997,00</b>	<b>94,27</b>

### 3.2.3 Surplus/Defisit

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2022 mengalami defisit dari kegiatan sebesar Rp23.006.188.527,38.

### 3.2.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan neto Tahun 2022 adalah sebesar Rp35.121.134.786,76. yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp38.757.801.454,76 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.636.666.668,00.

### 3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.114.946.259,38 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada Kas Daerah Rp. 1.025.873.629,40
2. Kas pada BLUD RSUD Rp. 10.090.642.931,98



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

3.	Kas pada Bendahara Penerima RSUD	Rp.	464.046,00
4.	Kas BLUD Puskesmas		92.913.685,00
5.	Kas JKN Puskesmas	Rp.	650.047.260,00
6.	Kas/Sisa PAUD	Rp.	60.000.000,00
7.	Kas/Sisa Dana BOS	Rp.	195.004.707,00
<b>Total SiLPA TA 2022</b>		<b>Rp.</b>	<b>12.114.946.259,38</b>



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Sawahlunto ) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2020.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Permendagri ini juga memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan agar dalam penyajian laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan kekayaan daerah.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

##### **a. Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

##### **b. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sawahlunto yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.



## 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

### a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

#### 1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

#### 2) Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

#### 3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### 1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:



- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d) Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

## 2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat diverifikasi, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa hanya untuk kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.



**3) Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

**4) Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

**1) Materialitas**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

**2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan



manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

**3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

**4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

**a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah mencakup basis kas (*cash basis*) maupun basis akrual (*accrual basis*). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

**b. Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

**c. Realisasi (*Realization*)**

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

**d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.



Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**e. Periodisitas (*Periodicity*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

**f. Konsistensi (*Consistency*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan.

**h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



#### 4.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) yang pada saat ini dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
- b. Seluruh Kepala OPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto disusun berdasarkan kompilasi/konsolidasi data/laporan keuangan BUD, OPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang sekaligus berperan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan
- b. Seluruh Kepala OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan OPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain: jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki BUMD dan juga telah mencantumkan Laporan Iktisar Dana Desa.



Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos- pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah dan BLUD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.5 Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.



Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Berikut pengakuan pada pos-pos berikut:

1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang diberi kewenangan.



Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **4.6.1 Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

###### **4.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau kelompok usaha masyarakat;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

###### **4.6.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer mencakup:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
  - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dana Alokasi umum



- c. Dana Alokasi Khusus
  - d. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana penyesuaian, dana desa dan lain sejenisnya.
2. Transfer antar Daerah, terdiri dari:
    - a. Pendapatan bagi hasil
    - b. Bantuan keuangan

#### **4.6.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

Adapun pengakuan dan pengukuran pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pengakuan**

1. Pengakuan Pendapatan – LRA
  - a. kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
  - b. kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.
  - c. kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterima oleh Dinas Kesehatan.
  - d. kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pihak Lainnya.



- e. kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.

2. Pengakuan Pendapatan – LO

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2. Pengukuran Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara self assessment dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT.
- c. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (official assessment) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD



atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Kota Sawahlunto.

- d. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.
- e. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- g. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.6.2 Akuntansi Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari



rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran OPD (DPA/DPPA-OPD). Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

#### **4.6.2.1 Belanja Operasi**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) bunga, (4) hibah, dan (5) bantuan sosial.

#### **4.6.2.2 Belanja Modal**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya termasuk aset tak berwujud dan aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah.
2. Perolehan aset tersebut diniatkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun masyarakat dan bukan untuk dijual.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan



perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), ditambahkan pada nilai perolehan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya tersebut tidak dianggarkan dalam Belanja Modal.

#### **4.6.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

#### **4.6.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain meliputi belanja transfer bagi hasil pendapatan berupa sebagaimana berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan seperti Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- b. Transfer bantuan Keuangan seperti Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;
2. khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan PPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
3. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **B. Pengukuran**

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto



berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 4.6.3 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi beban menurut ekonomi terdiri dari:

- 1) Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
- 2) Beban Transfer, terdiri dari : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### A. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:



1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan metode pendekatan aset untuk pengakuan beban persediaan.

B. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

#### 4.6.4 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pokok Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



### 3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan**

Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

#### **4.6.5 Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui dan mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari kas di Kas Daerah, kas pada Bendahara Penerimaan, kas pada Bendahara Pengeluaran dan kas pada BLUD.

Adapun pengakuan dan pengukuran kas dapat dijelaskan sebagai berikut:



A. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:

1. penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:

1. uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. pembayaran tagihan pihak ketiga;
3. transfer belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
4. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah;
5. pemberian pinjaman; dan
6. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

B. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

#### 4.6.6 Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

##### 1. Piutang Pendapatan Daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Piutang Pajak Daerah, merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan pajak daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan retribusi daerah;
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. maupun retribusi, hasil kerja sama investasi dengan pihak ketiga, serta karena transfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya terdiri dari : piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Pendapatan Lainnya;
5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah;
6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Pusat;
7. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Provinsi;
8. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

## **2. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

Piutang atas Kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI atau pihak auditor resmi lainnya kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.



### 3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

### 4. Beban dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

Adapun pengakuan dan pengukuran piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Pengakuan piutang per jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan

- a. Piutang Pajak, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.
- b. Piutang retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang retribusi atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disetarakan yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diakui apabila telah terbit akta notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan deviden kepada pemegang saham, dimana Pemerintah Kota Sawahlunto termasuk salah satu pemegang sahamnya.
- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.  
Pengakuan ini meliputi: piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.
- e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Piutang ini merupakan hak pemerintah daerah atas dana transfer yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun pelaporan. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan belum tercatat pada piutang transfer pemerintah pusat, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang transfer oleh pemerintah daerah. Piutang ini dapat dirinci menjadi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.



- f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, contohnya Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur sampai dengan akhir tahun oleh Pemerintah Pusat belum disalurkan ke pemerintah daerah.
  - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
    - 1) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak  
Apabila alokasi definitif menurut gubernur/kepala daerah telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
    - 2) Piutang Transfer Lainnya  
Akun ini digunakan bila ada piutang transfer yang tidak dapat dikelompokkan kepada akun yang ada di atas.
  2. Piutang Lainnya, dibagi atas:
    - a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
    - b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dapat dirinci menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
    - c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
    - d. Uang Muka  
Piutang ini terjadi apabila terdapat uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun hal yang mengharuskan uang muka tidak terealisasi sebagaimana harusnya hak daerah.
  3. Penyisihan Piutang, dilakukan untuk seluruh jenis piutang baik piutang pendapatan maupun piutang lainnya serta seluruh rincian objeknya. Piutang Lainnya yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar pada pos Aset Lainnya
- B. Pengukuran
- Pengukuran piutang pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar yang diterbitkan.



### C. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

#### 4.6.7 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Adapun pengakuan, pengukuran, dan pencatatan persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:



- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- 3) pada akhir periode akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*Stock opname*).

Pengakuan beban persediaan pada Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun Beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode periodik), pada akhir periode laporan dihitung nilai akhir persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada/tersisa dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Selanjutnya dihitung jumlah beban persediaan dengan cara saldo awal ditambah dengan pembelian dikurangi saldo akhir persediaan.

Khusus Persediaan Obat-obatan, pengakuan Persediaan terbatas hanya sampai persediaan yang ada di Puskesmas-puskesmas, tidak termasuk persediaan yang ada pada Sub Unit di bawah Puskesmas. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

B. Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebagai berikut : 1) sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, 2) sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

C. Pencatatan Persediaan

Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



#### 4.6.8 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai Net Realizable Value diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

2. Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah. Tambahan invrstasi permanen

Adapun pengakuan, pengukuran, dan penilaian investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya



perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

B. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi non permanen:  
Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada

C. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

2. Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.



Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### **4.6.9 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Tanah**

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

##### **2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### **3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya, namun tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.



#### **4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain meliputi: jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih instalasi pembangkit listrik, dan jaringan.

#### **5. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, dan tanaman, biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suau ruangan kantor yang bukan miliknya.

#### **6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya. Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

#### **7. Akumulasi Penyusutan**

Merupakan Akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa



penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kriteria pengakuan aset tetap berwujud adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan aset tetap dapat dikukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan
5. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*) sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan & mesin selain alat angkutan dan alat berat nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - c) Jalan, irigasi dan jaringan yang nilai satuan minimum kapitalisasi adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Terhadap seluruh Aset Tetap tersebut hingga saat ini **telah disusutkan** baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban dengan menggunakan **metode garis lurus**.
4. Aset tetap tanah disajikan didalam neraca sebesar biaya perolehannya dan untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutannya.
5. Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk



pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal.
- b) Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
- c) Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- d) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dengan syarat harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- e) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.6.10 Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
  - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI kepada



bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu kemitraan dengan pihak lain Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan pihak ketiga meliputi: sewa, kerjasama pemanfaatan, bagung guna serah, dan bangun serah guna.

3. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: (1) *goodwill*, (2) lisensi, (3) *franchise*, (4) hak cipta, (5) paten, dan (6) aset tidak berwujud lainnya yang terdiri dari *software* komputer dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pengakuan sesuatu sebagai Aset Tidak Berwujud, jika dan hanya jika : kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas, dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi/hibah, dan warisan budaya/sejarah (*intangible heritage assets*).

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

5. Aset Lain-Lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa, beli, hibah) serta aset yang tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan atau diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.



#### 4.6.11 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang dicatat sebesar nilai nominal, pada setiap tanggal pelaporan, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam dua pos, yaitu:

##### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang dibagi menjadi:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan utang transfer pemerintah daerah yang terdiri dari: Utang Taspen, Utang Iuran Jaminan Kesehatan, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Tapirumu, Utang Iuran Wajib Pegawai, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya, Utang Jaminan.
- b. Utang Bunga yang terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah, Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan bukan Bank, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terdiri dari: Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bagian Lancar Utang Pemerintah pusat, Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya, Bagian Lancar Utang Pemerintah Kota/ Kota;
- d. Pendapatan diterima Dimuka yang terdiri dari: Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III, Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya;
- e. Utang Belanja yang terdiri dari: Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Subsidi, Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Belanja Lain-lain;



- f. Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah, utang Transfer, Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:
    - a. Utang Dalam Negeri yang terdiri dari Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Dalam Negeri Lainnya;
    - b. Utang Jangka Panjang Lainnya yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya dan sebagainya yang sejenis.

Adapun pengakuan dan pengukuran kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan dari sebab yang lain.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer
2. Utang Bunga  
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah *selisih* antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan.

5. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

6. Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp620.647.226.213,62 atau sebesar 99,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp626.757.178.292,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp598.040.864.187,45, maka terdapat kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari segi jumlah sebesar Rp.22.606.362.026,17 atau 3,78%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022, yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp15.445.657.994,17 atau 30,01% dari tahun 2021 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp12.926.378.432,00 atau sebesar 2,40% dari Tahun Anggaran 2021. Kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 antara lain pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan. Sementara, kenaikan Pendapatan Transfer pada Tahun 2022, antara lain pada pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54	51.475.336.271,45
2	Pendapatan Transfer	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35	538.147.448.116,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48	8.418.079.800,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>626.757.178.292,00</b>	<b>620.647.226.213,62</b>	<b>99,03</b>	<b>598.040.864.187,45</b>

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>66.920.994.265,62</b>	<b>51.475.336.271,45</b>



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp66.920.994.265,62 atau sebesar 96,54% dari anggaran Rp69.315.857.768,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.475.336.271,45, maka terdapat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp15.445.657.994,71 atau 30,01%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Realisasi Tahun 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Daerah	7.303.500.000,00	7.434.059.921,40	101,79	5.993.540.247,00
2	Retribusi Daerah	4.649.762.464,00	3.543.204.313,00	76,20	2.731.399.922,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.164.985.676,00	13.477.268.009,00	88,87	10.806.423.680,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	42.197.609.628,00	42.466.462.022,22	100,64	31.943.972.422,45
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>69.315.857.768,00</b>	<b>66.920.994.265,62</b>	<b>96,54</b>	<b>51.475.336.271,45</b>

#### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pajak Daerah</b>	<b>7.434.059.921,40</b>	<b>5.993.540.247,00</b>

Pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp7.434.059.921,40 atau sebesar 101,79% dari anggaran yang ditetapkan Rp7.303.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.993.540.247,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.440.519.674,40 atau 24,03%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	255.030.245,80	150,02	168.914.129,00
2	Pajak Restoran	837.000.000,00	985.966.047,60	117,80	617.303.460,00
3	Pajak Hiburan	156.000.000,00	61.170.000,00	39,21	-
4	Pajak Reklame	39.500.000,00	45.912.393,00	116,23	42.613.818,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	3.735.969.454,00	100,97	3.434.721.546,00
6	Pajak Parkir	1.000.000,00	511.000,00	51,10	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	74.030.951,00	74,03	10.651.360,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.500.000.000,00	1.678.826.713,00	111,92	1.057.891.430,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	596.643.117,00	74,58	661.444.504,00
	<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>7.303.500.000,00</b>	<b>7.434.059.921,40</b>	<b>101,79</b>	<b>5.993.540.247,00</b>



Pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terdapat 9 (sembilan) objek pajak daerah, berbeda pada tahun 2021 yang hanya terdiri dari 8 (delapan) objek pajak daerah, yaitu penambahan pada pajak parkir. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak parkir tersebut merupakan objek pajak baru yang berada di Meer Von Kandih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Dari 9 (sembilan) objek pajak daerah yang dianggarkan Tahun 2022 yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan, dengan realisasi sebesar Rp.3.735.969.454,00 atau 100,97%, meskipun secara persentase paling besar adalah Pajak Hotel sebesar 150,02%.

Berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 2022, dari 9 (sembilan) objek pajak daerah terdapat 8 (delapan) objek pajak daerah yang mengalami kenaikan penerimaan dan 1 (satu) objek pajak yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun 2022 adalah sebesar Rp255.030.245,80 atau 150,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp170.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak hotel mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp86.116.116,80 atau 50,98%. Hal ini disebabkan karena telah dicabutnya pemberlakuan PPKM dan meningkatkannya event-event dan pelatihan yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto, sehingga meningkatkan tingkat hunian hotel.

b. Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun 2022 adalah sebesar Rp985.966.047,60 atau 117,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp837.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak restoran mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp368.662.587,60 atau 59,72%. Hal ini disebabkan karena sudah mulai meningkatnya kunjungan dan omset penjualan di restoran/rumah makan/kantin/warung/katering pasca pandemi covid-19.

c. Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 adalah sebesar Rp61.170.000,00 atau 39,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp156.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak hiburan mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar 100%. Penerimaan tersebut merupakan pajak hiburan pada Meer Von Kandih dan atas penjualan tiket *road race* yang dilaksanakan selama Tahun 2022.

d. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2022 adalah sebesar Rp45.912.393,00 atau 116,23% dari anggaran Rp.39.500.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2021, penerimaan pajak reklame mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp3.298.575,00 atau 7,74%. Hal



ini disebabkan karena wajib pajak reklame memperpanjang masa berlakunya pajak serta meningkatnya objek pajak yang baru.

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.735.969.454,00 atau 100,97% dari target Rp.3.700.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp301.247.908,00 atau 8,77%. Pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengguna tenaga listrik dan kenaikan tarif dasar listrik. Untuk pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Kota Sawahlunto sudah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Solok dengan Nomor: 134.4/HUK-HAM/2020 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

f. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2022 adalah sebesar Rp511.000,00 atau 51,10% dari target yang ditetapkan Rp1.000.000,00. Penerimaan sebesar Rp511.000,00 merupakan pajak parkir di Meer Von Kandih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang termasuk sebagai objek pajak baru.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp74.030.951,00 atau 74,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Namun, jika dibandingkan dengan Tahun 2021, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami **kenaikan** sebesar Rp63.379.591,00 atau 595,04%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga permintaan mineral bukan logam dan batuan meningkat.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.678.826.713,00 atau 111,92% dari target Rp1.500.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan PBB-P2 tahun 2021 sebesar Rp620.935.283,00 atau 58,70%. Peningkatan ini terjadi karena telah dilakukannya pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) dan pencantuman piutang PBB-P2 pada SPPT sehingga memudahkan didalam upaya penagihan piutang PBB-P2.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi BPHTB untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp596.643.117,00 atau 74,58% dari target yang ditetapkan Rp800.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi



Tahun 2021 yakni sebesar Rp64.801.387,00 atau -9,80%. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi dibawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

#### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>3.543.204.313,00</b>	<b>2.731.399.922,00</b>

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.543.204.313,00 atau 76,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.649.762.464,00 yang terdiri dari realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.289.541.700,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.229.490.331,00, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp24.172.282,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.399.922,00, maka terdapat kenaikan penerimaan pada Tahun 2022 sebesar Rp811.804.391,00 atau sebesar 29,72%. Adapun rincian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Sawahlunto**  
**Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Retribusi Daerah 2022		(% )	Jumlah Retribusi 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.459.812.464,00</b>	<b>1.289.541.700,00</b>	<b>88,34</b>	<b>996.783.700,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	352.072.464,00	356.182.700,00	101,17	299.936.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	138.500.000,00	124.303.000,00	89,75	132.436.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	181.200.000,00	176.200.000,00	97,24	169.400.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	589.840.000,00	537.933.500,00	91,20	363.876.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	52.522.500,00	35,02	1.035.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.200.000,00	42.400.000,00	87,97	30.100.000,00
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.139.550.000,00</b>	<b>2.229.490.331,00</b>	<b>71,01</b>	<b>1.669.419.922,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.304.950.000,00	1.322.054.331,00	101,31	1.173.842.422,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.000.000,00	3.600.000,00	15,65	1.800.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	55.862.000,00	85,94	57.182.500,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.746.600.000,00	847.974.000,00	48,55	436.595.000,00
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>24.172.282,00</b>	<b>47,96</b>	<b>65.196.300,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	65.196.300,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000,00	-	-	-



No.	Uraian	Retribusi Daerah 2022		(%)	Jumlah Retribusi 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00	24.172.282,00	48,34	-
	<b>Jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>4.649.762.464,00</b>	<b>3.543.204.313,00</b>	<b>76,20</b>	<b>2.731.399.922,00</b>

**A. RETRIBUSI JASA UMUM, realisasi sebesar Rp1.289.541.700,00, terdiri dari:**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp356.182.700,00 atau 101,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp352.072.464,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar Rp56.246.000,00 atau 18,75%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kunjungan pasien yang berobat.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di 6 (enam) Puskesmas yaitu Puskesmas Talawi, Puskesmas Kolok, Puskesmas Sungai Durian, Puskesmas Lunto, Puskesmas Kampung Teleng dan Puskesmas Silungkang.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp124.303.000,00 atau 89,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp138.500.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi Tahun 2021 yakni sebesar Rp8.133.000,00 atau -6,14%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi sampah Pasar Silungkang, sampah Pasar Sapan dan sampah Pasar Sawahlunto. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola retribusi sampah warga, kantor maupun rumah makan yang mendapatkan pelayanan persampahan di 4 (empat) Kecamatan.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp176.200.000,00 atau 97,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp181.200.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat **kenaikan** sebesar Rp6.800.000,00 atau 4,01%. Hal ini disebabkan kenaikan nilai kontrak Parkir



Lapangan Pasar Sawahlunto, parkir RSUD, Parkir Pasar (memakai badan jalan) dan parkir pasar talawi.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi parkir lapangan pasar. Sedangkan Dinas perhubungan mengelola parkir RSUD, Parkir Pasar (memakai badan jalan) dan parkir pasar Talawi.

4. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Realisasi Pelayanan Pasar untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp537.933.500,00 atau 91,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.589.840.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat **kenaikan penerimaan** sebesar Rp174.057.500,00 atau 47,83%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pembayaran pada pelayanan pasar Sawahlunto dan tunggakan sewa toko. Retribusi ini dikelola oleh OPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Pelayanan Pasar Talawi, Pasar Sapan, Pasar Sawahlunto, Pelayanan Lapangan Pasar Sawahlunto, Tunggakan Sewa Toko se-Kota Sawahlunto, dan Pasar Silungkang.

5. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp52.522.500,00 atau 35,02% dari target yang ditetapkan Rp150.000.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Tahun 2021 yakni sebesar Rp51.487.500,00 atau 4.974,64%. Retribusi ini dikelola oleh OPD Dinas Perhubungan. Peningkatan ini disebabkan pelayanan retribusi yang telah didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

6. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Realisasi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp42.400.000,00 atau 87,97% dari target yang ditetapkan Rp.48.200.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Tahun 2021 yakni sebesar Rp12.300.000,00 atau 40,86%. Hal ini disebabkan karena permintaan layanan penyedotan kakus meningkat pada tahun 2022.

Retribusi ini dikelola oleh 2 OPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi WC yang ada di Pasar. Sementara pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola penyedotan kakus di rumah warga.



**B. RETRIBUSI JASA USAHA, realisasi sebesar Rp2.229.490.331,00, terdiri dari:**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.322.054.331,00 atau 101,31% dari target yang ditetapkan Rp1.304.950.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan Tahun 2021 yakni sebesar Rp148.211.909,00 atau 12,63%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan Sewa Tanah dan Bangunan, meliputi: sewa tanah, sewa rumah dinas, sewa konstruksi baleho, sewa lapangan *road race* kandih, sewa kantor kas Bank Nagari, dan sewa Mess Pemerintah Kota Sawahlunto di Kota Padang. Kemudian juga peningkatan penerimaan atas pemanfaatan laboratorium Lingkungan Hidup, sewa kendaraan bermotor, dan sewa tenda dan kursi. Di dalam penerimaan retribusi pemakaian kekayaan ini juga termasuk pembayaran Kontribusi Hotel Parai kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai hasil kerjasama pemanfaatan BMD Tahun 2021 sebesar Rp82.500.000,00.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari Sewa Tanah dan Bangunan, Pemanfaatan Laboratorium, Sewa Kendaraan Bermotor, dan Sewa Pemakaian Alat.

Retribusi ini dikelola oleh 6 (enam) SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Adapun rincian pengelolaan retribusi kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut :

URAIAN	SKPD	TARGET	REALISASI
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>BPKAD</b>	<b>680.225.000,00</b>	<b>675.362.854,00</b>
<b>Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>		<b>680.225.000,00</b>	<b>675.362.854,00</b>
<b>Sewa Tanah dan bangunan</b>		<b>380.225.000,00</b>	<b>353.912.854,00</b>
- Sewa SKB		50.000.000,00	5.850.000,00
- Hotel Parai		76.625.000,00	82.500.000,00
- Sewa Rumah Dinas		220.000.000,00	215.984.643,00
- Rest Area Muaro Kalaban		12.500.000,00	12.500.000,00
- Sewa Tanah		15.000.000,00	17.674.100,00
- Sewa Gedung Kantor Kec. Lembah Segar		1.500.000,00	-
- Sewa Gedung Kantor Kec. Barangin		600.000,00	100.000,00
- Sewa kontruksi baleho		5.000.000,00	17.100.000,00
<b>Kendaraan Bermotor</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>325.505.000,00</b>
Sewa Kendaraan Dinas		300.000.000,00	318.625.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>DP2LH</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>351.883.088,00</b>
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>		<b>335.000.000,00</b>	<b>351.883.088,00</b>
<b>Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>		<b>325.000.000,00</b>	<b>341.798.088,00</b>



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	SKPD	TARGET	REALISASI
Retribusi Penyewaan Bangunan (sewa rusunawa )		325.000.000,00	341.798.088,00
<b>Laboratorium</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.003.000,00</b>
Labor Lingkungan Hidup		10.000.000,00	10.085.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor</b>	<b>DPU</b>	<b>104.125.000,00</b>	<b>216.225.000,00</b>
Backhoe Loader		30.625.000,00	77.875.000,00
Dum Truk		4.500.000,00	9.750.000,00
Excavator		42.000.000,00	61.400.000,00
Babyroller		7.000.000,00	7.200.000,00
Motor Grader		20.000.000,00	60.000.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>
<b>Bus sekolah</b>		<b>13.300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>
Bus sekolah		13.300.000,00	13.300.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
Sewa Lapangan Road Race Kandi		30.000.000,00	18.000.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Penyewaan Bangunan</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>142.300.000,00</b>	<b>52.312.500,00</b>
Sewa cafetaria sederhana		3.500.000,00	3.500.000,00
Sewa foto copy babe		2.500.000,00	2.500.000,00
Sewa Kantor kas bank nagari		12.500.000,00	12.500.000,00
Sewa mess Pemda		100.000.000,00	31.900.000,00
Sewa Kantor BSM		12.000.000,00	-
<b>Kendaraan Bermotor</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>
Bus Subsidi BBM		6.000.000,00	700.000,00
Bus Visi Misi		800.000,00	800.000,00
<b>Retribusi Pemakaian Alat</b>		<b>5.000.000,00</b>	-
Sewa Orgen/sounnd system		3.000.000,00	-
Sewa tenda kursi		2.000.000,00	412.500,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.322.054.331,00</b>

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Realisasi Tempat Khusus Parkir untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.600.000,00 atau 15,65% dari target yang ditetapkan Rp23.000.000,00. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan retribusi parkir di kawasan wisata.



3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah potong Hewan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp55.862.000,00 atau 85,94% dari target yang ditetapkan Rp.65.000.000,00 dan mengalami **penurunan** dibandingkan realisasi Tahun 2021 yakni sebesar Rp1.320.500,00 atau -2,31%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pemotongan hewan pada Rumah Potong Hewan Air Dingin.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang terdiri dari RPH Talawi, RPH Air Dingin dan pemotongan Hajat

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp847.974.000,00 atau 48,55% dari target yang ditetapkan Rp1.746.600.000,00 dan mengalami **kenaikan** dibandingkan realisasi Tahun 2021 yakni sebesar Rp411.379.000,00 atau 94,22%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pengunjung di sejumlah tempat rekreasi di Kota Sawahlunto, antara lain: Museum Kereta Api, Gudang Ransum, Info Box/Lubang Mbah Suro, Alat Peraga IPTEK Centre, Museum Budaya, Puncak Cemara, Taman SatwaKandih, dan Kebun Buah Kandi.

Retribusi ini dikelola 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Puncak Cemara, Camping Ground, Taman Satwa Kandih), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (Kebun Buah) dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum (Gudang Ransum, Museum Kereta Api, Info Box, Lubang Mbah Suro, alat peraga IPTEK Center, Museum Budaya).

C. **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, realisasi sebesar Rp24.172.282,00**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan (Trayek), dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum untuk tahun 2022 tidak terealisasi sama sekali dari target yang ditetapkan sebesar Rp.400.000. Hal ini disebabkan karena tidak adanya yang melakukan pengurusan izin trayek.

2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp24.172.282,00 atau 48,34% dari target yang ditetapkan Rp50.400.000,00. Untuk Tahun 2021 tidak terdapat objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perubahan nomenklatur retribusi Izin Mendirikan Bangunan.



Dari Tabel 5.4 di atas dapat dilihat, bahwa sebagian besar objek retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan penerimaan dibandingkan Tahun Anggaran 2021, dimana dari 12 (dua belas) objek retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2022, hanya 2 (dua) objek retribusi yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jumlah total Retribusi Daerah Tahun 2021 yang diuraikan di dalam CaLK Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdapat perbedaan sebesar Rp160.000,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022, untuk denda retribusi perizinan tertentu pada Laporan Realisasi Anggaran terletak pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sehingga jumlah sebesar Rp160.000,00 dipindahkan dari kelompok Retribusi Daerah ke kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

#### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>13.477.268.009,00</b>	<b>10.806.423.680,00</b>

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp13.477.268.009,00 atau 88,87% dari anggaran Rp15.164.985.676,00 yang merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Nagari dan BPR Gajah Tongga. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.10.806.423.760,00, maka terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.670.844.329,00 atau 24,72%.

Adapun rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
		Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	%	
1	Deviden Bank Nagari	15.100.000.000,00	13.432.282.333,00	88,96	10.765.479.513,00
2	Deviden BPR Gajah Tongga	44.985.676,00	44.985.676,00	100,00	19.203.232,00
3	Bagian Laba Hotel Parai	20.000.000,00	-	-	21.740.935,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.164.985.676,00</b>	<b>13.477.268.009,00</b>	<b>88,87</b>	<b>10.806.423.680,00</b>



Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.477.268.009,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Deviden Bank Nagari Tahun Buku 2021 sebesar Rp13.432.282.333,00 yang diterima pada tanggal 28 April Tahun 2022.
2. Deviden BPR Gajah Tongga yang diterima tanggal 6 April 2022 sebesar Rp44.985.676,00, merupakan deviden Gajah Tongga tahun 2020 sebesar Rp23.265.755,00 dan deviden Gajah Tongga Tahun 2021 sebesar Rp21.719.921,00.

Sementara deviden dari Hotel Parai untuk tahun buku 2020 dan 2021 tidak diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen yang dilaporkan oleh PT. El John Tirta Emas Wisata Unit Usaha Parai City Garden Hotel, mengalami kerugian sebesar Rp308.592.822,00 dan berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PT. El John Tirta Emas Wisata Unit Usaha Parai City Garden Hotel juga mengalami kerugian sebesar Rp84.916.868,00.

#### 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>42.466.462.022,22</b>	<b>31.943.972.422,45</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp42.466.462.022,22 atau 100,64% dari anggaran sebesar Rp42.197.609.628,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp31.943.972.422,45, maka penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp10.522.489.599,77 atau 32,94%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah penerimaan pendapatan BLUD, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, dan jasa giro bank. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagaimana berikut:

**Tabel 5.6**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	757.500.000,00	24.850.000,00	3,28	230.191.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.875.000,00	82.500.000,00	1.200,00	-
3	Jasa Giro	650.000.000,00	470.516.220,36	72,39	451.818.316,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.000.000,00	5.586.600,00	139,67	-
5	Pendapatan Bunga	5.500.000.000,00	3.250.591.108,00	59,10	5.286.874.479,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	%	
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.000.000,00	264.745.133,86	44,12	719.335.749,54
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	139.594.941,00	279,19	304.221.104,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	160.000,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000,00	-	-	8.230.583,91
10	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	-	-	50.000,00
11	Pendapatan BLUD	34.036.234.628,00	38.183.078.019,00	112,18	22.266.854.430,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	2.588.802.850,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	5.093.810,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	32.000.000,00	45.000.000,00	140,63	82.340.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.197.609.628,00</b>	<b>42.466.462.022,22</b>	<b>100,64</b>	<b>31.943.972.422,45</b>

Dari 11 (sebelas) objek Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, terdapat 5 (lima) objek dengan penerimaan melebihi target yang telah ditentukan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Lain-Lain PAD Yang Sah	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (1.200%)	82.500.000,00	Merupakan Kontribusi Hotel Parai kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai hasil kerjasama pemanfaatan BMD untuk tahun anggaran 2022
2	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (139,67%)	5.586.600,00	Berupa pendapatan bunga dari pinjaman dana kemitraan/BDC sebanyak 1 orang nasabah atas nama Nursam.
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (279,19%)	139.594.941,00	Berupa denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik.
4	Pendapatan BLUD (112,18%)	38.183.078.019,00	Berupa pendapatan jasa giro, pendapatan BLUD RSUD, pendapatan sewa aula, pendapatan lainnya.
5	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (140,63%)	45.000.000,00	Berupa pendapatan denda pembuatan dokumen kependudukan dan hasil eksekusi atas pelanggaran perda
<b>Jumlah</b>		<b>38.455.759.560,00</b>	



Sementara penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp24.850.000,00 (3,28%) merupakan hasil penjualan aset tetap lainnya berupa penjualan hasil pertanian dan hasil penjualan aset lainnya yaitu penjualan buku Pariwisata dan penjualan produk tenun songket daerah, yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- Jasa Giro dengan realisasi sebesar Rp470.516.220,36 (72,39%) merupakan jasa giro rekening kas daerah dan jasa giro rekening bendahara.
- Pendapatan Bunga dengan realisasi sebesar Rp3.250.591.108,00 (59,10%) merupakan bunga deposito Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari.
- Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp264.745.133,86 (44,12%) merupakan pembayaran atas temuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan target sebesar Rp510.000.000,00 dan Pendapatan dari Pengembalian dengan terget sebesar Rp51.000.000,00 tidak terealisasi sama sekali dikarenakan tidak adanya kejadian yang menyebabkan adanya eksekusi atas jaminan dan tidak adanya pengembalian belanja pada Tahun 2022.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>551.073.826.548,00</b>	<b>538.147.448.116,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 adalah sebesar R551.073.826.548,00 atau 99,35% dari anggaran yang ditetapkan Rp554.692.189.893,00. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp538.147.448.116,00, maka terdapat kenaikan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp12.926.378.432,00. atau 2,40%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Pemerintah Pusat</b>	<b>516.814.855.288,00</b>	<b>509.421.068.591,00</b>

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp516.814.855.288,00 atau 98,43% dari anggaran



Rp525.076.266.264,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp509.421.068.591,00, maka terdapat kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.393.786.697,00 atau 1,45%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022. Untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didukung dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 971.2-937-2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat**  
**Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>499.933.419.264,00</b>	<b>491.672.008.288,00</b>	<b>98,35</b>	<b>442.021.996.681,00</b>
A	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	28.544.050.903,00	36.873.646.167,00	129,18	28.949.393.592,00
B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.124.424.361,00	340.799.183.261,00	99,90	341.393.550.000,00
C	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	81.827.919.000,00	74.358.095.142,00	90,87	36.226.376.563,00
D	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	48.437.025.000,00	39.641.083.718,00	81,84	35.452.676.526,00
2	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>5.044.116.000,00</b>	<b>5.044.116.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.290.036.000,00</b>
3	<b>Dana Desa</b>	<b>20.098.731.000,00</b>	<b>20.098.731.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.109.035.910,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>525.076.266.264,00</b>	<b>516.814.855.288,00</b>	<b>98,43</b>	<b>509.421.068.591,00</b>

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 sebesar Rp516.814.855.288,00 berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp491.672.008.288,00, Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.044.116.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp20.098.731.000,00.

Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp491.672.008.288,00 atau 98,35% dari anggaran Rp499.933.419.264,00, meliputi: Dana



Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp36.873.646.167,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp340.799.183.261,00, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp74.358.095.142,00, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 39.641.083.718,00.

Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 hanya sebesar Rp 39.641.083.718,00 atau 81,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp48.437.025.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapatnya sisa DAK Non Fisik tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan dengan penyaluran pada Tahun 2022, antara lain: sisa Dana BOP Museum sebesar Rp15.407.592,00, sisa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp3.289.527,468,00, sisa BOKKB sebesar Rp642.662.500,00, sisa PK2UMK sebesar Rp59.691.014,00, sisa Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebesar Rp79.583.070,00, sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) sebesar Rp169.400.650,00, dan sisa dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) sebesar Rp202.187.445,00. Kemudian, untuk penyaluran dana DAK Non Fisik TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD disalurkan berdasarkan kebutuhan sesuai hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan item yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana pada Tahun Anggaran 2021 termasuk kedalam kelompok akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana BOS tersebut merupakan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang berjumlah Rp7.517.696.707,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendapatan DAK Non Fisik-Dana BOS sebesar Rp7.517.696.707,00 Tahun 2022 tersebut merupakan Hibah Dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah, yaitu sejumlah Rp5.043.795.610,00 kepada 55 (lima puluh lima) Sekolah Dasar Negeri dan sejumlah Rp2.473.901.097,00 kepada 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama Negeri. Adapun rincian penerimaan Hibah Dana BOS Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada uraian berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2022	Jumlah Penerimaan Tahun 2021
1	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	100.800.000,00	105.210.000,00
2	SDN 04 SILUNGKANG TIGO	136.800.000,00	139.950.000,00
3	SDN 05 MUARO KALABAN	130.299.015,00	144.270.000,00
4	SDN 07 MUARO KALABAN	43.200.000,00	44.460.000,00
5	SDN 08 SILUNGKANG DUO	77.388.519,00	82.440.000,00
6	SDN 09 MUARO KALABAN	41.554.864,00	45.720.000,00
7	SDN 10 TARATAK BANCAH	53.419.220,00	55.890.000,00
8	SDN 11 MUARO KALABAN	166.500.000,00	172.530.000,00
9	SDN 12 SILUNGKANG DUO	44.100.000,00	44.730.000,00
10	SDN 13 SILUNGKANG OSO	72.900.000,00	74.160.000,00
11	SDN 01 PASAR KUBANG	85.500.000,00	94.950.000,00
12	SDN 02 LUNTO TIMUR	213.200.000,00	136.350.000,00
13	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	167.400.000,00	171.810.000,00
14	SDN 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	111.600.000,00	112.230.000,00
15	SDN 06 KUBANG TANGAH	25.210.705,00	54.000.000,00
16	SDN 10 TANAH LAPANG	140.400.000,00	142.920.000,00
17	SDN 11 PONDOK BATU	39.600.000,00	43.380.000,00
18	SDN 12 KUBANG BARAT	52.091.343,00	59.040.000,00
19	SDN 13 PASAR REMAJA	258.994.998,00	264.870.000,00
20	SDN 15 LUNTO TIMUR	64.800.000,00	71.730.000,00
21	SDN 17 AIR DINGIN	49.319.150,00	49.500.000,00
22	SDN 02 SAPAN	139.493.985,00	139.500.000,00
23	SDN 03 LUBANG PANJANG	143.100.000,00	150.030.000,00
24	SDN 05 KOLOK MUDI K	83.700.000,00	90.630.000,00
25	SDN 06 LUMINDAI	136.571.210,00	139.590.000,00
26	SDN 07 TALAGO GUNUNG	26.100.000,00	27.360.000,00
27	SDN 11 KAMPUNG SURIAN	65.692.234,00	64.440.000,00
28	SDN 12 SAPAN	44.958.868,00	49.410.000,00
29	SDN 13 SUNGAI DURIAN	143.099.914,00	154.440.000,00
30	SDN 14 TALAGO GUNUNG	78.300.000,00	72.000.000,00
31	SDN 15 LUMINDAI	77.629.100,00	77.310.000,00
32	SDN 16 KOTO TUO	61.200.000,00	65.610.000,00
33	SDN 17 PASAR BARU DURIAN	46.800.000,00	103.020.000,00
34	SDN 19 SANTUR	186.292.900,00	193.230.000,00
35	SDN 25 BALAI BATU SANDARAN	48.600.000,00	54.000.000,00
36	SDN 27 TALAGO GUNUNG	45.000.000,00	48.150.000,00
37	SDN 28 SANTUR	132.200.000,00	55.350.000,00
38	SDN 29 LUMINDAI	72.000.000,00	70.110.000,00
39	SDN 01 TALAWI MUDI K	123.303.235,00	127.980.000,00
40	SDN 02 TALAWI HILIR	151.200.000,00	159.120.000,00
41	SDN 03 TUMPUK TANGAH	180.800.000,00	98.280.000,00
42	SDN 04 RANTIH	42.300.000,00	104.190.000,00
43	SDN 05 TIGO TANJUNG	67.123.925,00	66.870.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2022	Jumlah Penerimaan Tahun 2021
44	SDN 06 BUKIK GADANG	60.291.083,00	60.030.000,00
45	SDN 07 TALAWI HILIR	78.918.058,00	77.310.000,00
46	SDN 08 KUMBAYAU	78.830.000,00	81.360.000,00
47	SDN 09 TALAWI HILIR	108.833.653,00	118.350.000,00
48	SDN 11 SIKALANG	59.322.750,00	57.510.000,00
49	SDN 12 TALAWI MUDIK	73.379.690,00	82.620.000,00
50	SDN 13 SALAK	104.198.996,00	105.030.000,00
51	SDN 14 KUMBAYAU	40.500.000,00	39.240.000,00
52	SDN 15 KUMANIH ATEH	57.600.000,00	65.160.000,00
53	SDN 16 SIKALANG	66.600.000,00	70.380.000,00
54	SDN 18 BATU KUALI	50.400.000,00	52.290.000,00
55	SDN 19 SIJANTANG KOTO	94.378.195,00	104.670.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.043.795.610,00</b>	<b>5.134.710.000,00</b>

No	Sekolah Menengah Pertama Negeri	Jumlah Penerimaan Tahun 2022	Jumlah Penerimaan Tahun 2021
1	SMPN 5 SAWAHLUNTO	218.900.000,00	225.830.000,00
2	SMPN 3 SAWAHLUNTO	377.300.000,00	398.860.000,00
3	SMPN 6 SAWAHLUNTO	399.400.000,00	259.380.000,00
4	SMPN 4 SAWAHLUNTO	172.700.000,00	164.230.000,00
5	SMPN 1 SAWAHLUNTO	440.000.000,00	435.380.000,00
6	SMPN 8 SAWAHLUNTO	136.400.000,00	132.550.000,00
7	SMPN 2 SAWAHLUNTO	536.701.097,00	593.560.000,00
8	SMPN 7 SAWAHLUNTO	102.300.000,00	116.930.000,00
9	SMPN 9 SAWAHLUNTO	90.200.000,00	91.740.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.473.901.097,00</b>	<b>2.418.460.000,00</b>

Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.044.116.000,00 disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menyampaikan Laporan Rencana Penggunaan DID tahun yang bersangkutan, dan tahap II dengan menyampaikan Laporan Realisasi Tahap I dengan realisasi penyerapan minimal 70% (tujuh puluh persen).

Selanjutnya, Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp20.098.731.000,00 diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dari Pemerintah Pusat melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan per triwulan.



#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>34.258.971.260,00</b>	<b>28.726.379.525,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp34.258.971.260,00 atau sebesar 115,68% dari target Rp29.615.923.629,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.532.591.735,00 atau 19,26% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer antar daerah Tahun 2021 sebesar Rp28.726.379.525,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp33.658.971.260,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Bantuan Keuangan sebesar Rp600.000.000,00 berupa bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-140-2022 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-604-2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke Pemerintah Kota Sawahlunto diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara triwulan melalui sebagaimana berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/022/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2022;
2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode Desember Tahun 2021;
3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/024/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2022;
4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/034/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak



- Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2022;
5. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/037/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2022;
  6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/048/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2022;
  7. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/049/Pjk-Bapenda/2021 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2022;
  8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/052/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2022;
  9. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/053/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil	29.015.923.629,00	33.658.971.260,00	116,00
2	Bantuan Keuangan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.615.923.629,00</b>	<b>34.258.971.260,00</b>	<b>115,68</b>



### 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>2.652.405.400,00</b>	<b>8.418.079.800,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.652.405.400,00 atau 96,48% dari anggaran Rp2.749.130.631,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp8.418.079.800,00, maka terdapat penurunan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp5.765.674.400,00 atau 68,49%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Sawahlunto hanya berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berupa pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD, sedangkan pada Tahun 2021 selain berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dana BOS masuk kedalam kelompok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Sawahlunto Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.9**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu</b>	<b>2.749.130.631,00</b>	<b>2.652.405.400,00</b>	<b>96,48</b>
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48
<b>Jumlah</b>		<b>5.498.261.262,00</b>	<b>5.304.810.800,00</b>	<b>96,48</b>



## 5.1.2 Belanja Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Daerah</b>	<b>643.653.414.741,00</b>	<b>599.185.054.472,27</b>

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar Rp643.653.414.741,00 atau 94,27% dari anggaran Rp682.809.902.738,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp44.468.360.268,73 atau 7,42%. Kenaikan belanja daerah tahun 2022 terjadi pada belanja operasi dan belanja modal. Rincian belanja daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.10**  
**Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Operasi	496.963.954.630,00	468.731.239.357,00	94,32	444.009.727.121,27
2	Belanja Modal	125.329.087.114,00	116.514.679.424,00	92,97	85.611.045.938,00
3	Belanja Tak Terduga	2.255.914.994,00	294.991.005,00	13,08	2.655.984.000,00
4	Belanja Transfer	58.260.946.000,00	58.112.504.955,00	99,75	66.908.297.413,00
<b>Jumlah</b>		<b>682.809.902.738,00</b>	<b>643.653.414.741,00</b>	<b>94,27</b>	<b>599.185.054.472,27</b>

### 5.1.2.1. Belanja Operasi

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>468.731.239.357,00</b>	<b>444.009.727.121,27</b>

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp468.731.239.357,00 atau 94,32% dari anggaran Rp496.963.954.630,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp24.721.512.235,73 atau 5,57%. Perbandingan realisasi belanja operasi Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.11**  
**Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Pegawai	266.594.395.382,00	259.237.850.902,00	97,24	240.644.834.014,00
2	Belanja Barang dan Jasa	209.902.972.852,00	190.660.034.017,00	90,83	186.235.989.165,00
3	Belanja Bunga	891.962.272,00	891.962.272,00	100,00	796.043.279,27
4	Belanja Hibah	15.657.174.124,00	14.110.242.166,00	90,12	13.936.860.663,00



No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
5	Belanja Bantuan Sosial	3.917.450.000,00	3.831.150.000,00	97,80	2.396.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>496.963.954.630,00</b>	<b>468.731.239.357,00</b>	<b>94,32</b>	<b>444.009.727.121,27</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	<u><b>Tahun 2022 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>259.237.850.902,00</b>	<b>240.644.834.014,00</b>

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 mencapai Rp259.237.850.902,00 atau 97,24% dari anggaran Rp266.594.395.382,00. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar Rp240.644.834.014,00, maka terdapat penambahan belanja pegawai sebesar Rp18.593.016.888,00 atau 7,73%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan belanja gaji pegawai BLUD. Rincian belanja pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.12**  
**Rincian Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	104.511.813.433,00	103.481.456.543,00	99,01
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.307.157.226,00	10.065.835.879,00	97,66
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.626.354.705,00	4.457.334.150,00	96,35
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.457.039.928,00	7.182.518.590,00	96,32
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.419.477.363,00	1.361.880.000,00	95,94
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.316.140.110,00	6.184.016.132,00	97,91
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	597.673.517,00	540.582.532,00	90,45
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.329.511,00	1.442.505,00	61,92
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	8.261.760.311,00	7.747.028.592,00	93,77
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	243.202.088,00	211.180.573,00	86,83
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	703.832.582,00	632.233.170,00	89,83



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50.479.495.144,00	48.586.960.950,00	96,25
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	11.334.067.878,00	10.883.825.994,00	96,03
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.091.680.000,00	2.986.680.000,00	96,60
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	208.742.750,00	149.595.947,00	71,67
16	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	170.742.508,00	95.558.960,00	55,97
17	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.111.714.000,00	23.431.099.800,00	93,31
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	223.000.000,00	215.750.000,00	96,75
19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	21.950.050,00	21.840.000,00	99,50
20	Belanja Honorarium	4.825.770.500,00	4.676.757.900,00	96,91
21	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	564.550.000,00	555.400.000,00	98,38
22	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	100,00
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.338.400,00	35.019.640,00	96,37
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	54.749.520,00	45.262.500,00	82,67
25	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	38.682.000,00	85,71
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	100,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.041.200,00	65.041.200,00	100,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	100,00
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	277.200.000,00	73,33
31	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	982.912,00	881.272,00	89,66
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.189.612.340,00	2.170.572.166,00	99,13
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	100,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	9.450.000,00	-	-
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.416.196,00	4.116.000,00	93,20
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.037.000,00	98.280.000,00	99,24
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.896.132,00	4.345.200,00	88,75
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.477.228,00	1.490.548,00	60,17
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.920,00	38,40



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.152.716,00	29.151.270,00	100,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.241.520,00	976.320,00	78,64
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.917.480,00	1.416.966,00	73,90
44	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	53.308.250,00	47.121.501,00	88,39
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	34.413.804,00	20.426.304,00	59,35
46	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	98.280.000,00	88,64
47	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
48	Belanja Pegawai BLUD	17.362.178.680,00	17.197.933.478,00	99,05
<b>Jumlah</b>		<b>266.594.395.382,00</b>	<b>259.237.850.902,00</b>	<b>97,24</b>

Untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, pemberian dan pemanfaatannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20110 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar pencairannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/306/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022.
- 2) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/198/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022.
- 3) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/283/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan artas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/306/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022.
- 4) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 188.45/323/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan III dan IV Tahun 2022.

Untuk Belanja Jasa Uang Pengabdian DPRD Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp9.450.000,00. Dana ini diperuntukkan apabila terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota Dewan. Selama Tahun 2022 tidak terjadi Pergantian Antar Waktu pada anggota dewan, sehingga dana tersebut tidak terealisasi.



### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>190.660.034.017,00</b>	<b>186.235.989.165,00</b>

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp190.660.034.017,00 atau 90,83% dari anggaran R209.902.972.852,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp186.235.989.165,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.424.044.852,00 atau 2,38%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya belanja barang dan jasa, antara lain: belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dan belanja barang dan jasa BLUD. Rincian belanja barang dan jasa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.13**  
**Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>48.436.939.916,00</b>	<b>44.309.265.378,00</b>	<b>91,48</b>
A	Belanja Barang Pakai Habis	48.436.939.916,00	44.309.265.378,00	91,48
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>88.474.792.292,00</b>	<b>82.022.961.179,00</b>	<b>92,71</b>
A	Belanja Jasa Kantor	66.018.168.524,00	61.023.446.587,00	92,43
B	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.230.264.786,00	13.061.577.339,00	98,72
C	Belanja Sewa Tanah	139.016.020,00	-	-
D	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.547.093.000,00	1.370.142.445,00	88,56
E	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	518.740.000,00	381.050.000,00	73,46
F	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.825.379.723,00	3.298.096.892,00	86,22
G	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	828.000.000,00	715.456.180,00	86,41
H	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.228.985.400,00	2.075.297.082,00	93,11
I	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	110.004.000,00	79.248.525,00	72,04
J	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah	29.140.839,00	18.646.129,00	63,99
<b>3</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>16.548.252.754,00</b>	<b>14.657.583.914,00</b>	<b>88,57</b>
A	Belanja Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	4.456.308.230,00	4.099.319.421,00	91,99
B	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.560.162.000,00	5.573.801.878,00	84,96



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
C	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.531.782.524,00	4.984.462.615,00	90,11
<b>4</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.150.082.144,00</b>	<b>29.235.487.808,00</b>	<b>88,19</b>
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.934.248.600,00	29.047.470.313,00	88,20
B	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	215.833.544,00	188.017.495,00	87,11
<b>5</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>6.991.750.000,00</b>	<b>4.691.463.346,00</b>	<b>67,10</b>
A	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.991.750.000,00	4.691.463.346,00	67,10
<b>6</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>16.301.155.746,00</b>	<b>15.743.272.392,00</b>	<b>96,58</b>
A	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.301.155.746,00	15.743.272.392,00	96,58
<b>Jumlah</b>		<b>209.902.972.852,00</b>	<b>190.660.034.017,00</b>	<b>90,83</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 18 item belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dengan total realisasi sebesar Rp190.660.034.017,00, realisasi tertinggi adalah belanja iuran jaminan/asuransi dengan persentase 98,72% atau sebesar Rp13.061.577.339,00. Belanja ini tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	58.666.838,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	11.984.339.700,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	26.201.653,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.918.046,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	155.958.428,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	117.106.980,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	392.316.500,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7.465.500,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.645.974,00
10	Dinas Perhubungan	16.389.168,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.567.500,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14.883.300,00
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	8.100.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.727.000,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	112.815.480,00
16	Sekretariat Daerah	16.456.500,00



No	SKPD	Jumlah
17	Inspektorat	1.350.000,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	6.902.070,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.845.500,00
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.998.000,00
21	Sekretariat DPRD	5.454.000,00
22	Kecamatan Barangin	2.686.500,00
23	Kecamatan Lembah Segar	3.269.102,00
24	Kecamatan Silungkang	1.404.000,00
25	Kecamatan Talawi	2.106.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.055.506,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.948.094,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
<b>JUMLAH</b>		<b>13.061.577.339,00</b>

Sementara, untuk realisasi belanja terendah/belanja yang tidak terealisasi yaitu belanja sewa tanah sebesar Rp139.016.020,00. Belanja sewa ini diperuntukkan sebagai pembayaran sewa pada PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dan PT. Bukit Asam (PT. BA). Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan berbenturan dengan aturan Kepemilikan Aset Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pada prinsipnya menyatakan “Jika Kuasa Pertambangan berakhir, maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara”.

#### 5.1.2.1.3. Belanja Bunga

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Bunga</b>	<b>891.962.272,00</b>	<b>796.043.279,27</b>

Belanja Bunga Tahun 2022 terealisasi 100% dengan jumlah sebesar Rp891.962.272,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja bunga tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp95.918.992,73 atau sebesar 12,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp796.043.279,27%.



Belanja bunga sebesar Rp891.962.272,00 merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 yang dibayarkan berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S-1053/WPB.03/2022 tanggal 17 Mei 2022 melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/000178/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2022 sebesar Rp364.262.493,00 serta pembayaran bunga utang dan denda kepada Pemerintah berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S-2097/WPB.03/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp527.699.779,00 melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/000411/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 10 November 2022. Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Reconsruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investari. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Hibah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Hibah</b>	<b>14.110.242.166,00</b>	<b>13.936.860.663,00</b>

Tahun Anggaran 2022 Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto terealisasi sebesar Rp14.110.242.166,00 atau sebesar 90,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.657.174.124,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.936.860.663,00 terdapat kenaikan sebesar Rp173.381.503,00 atau 1,24%.

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.14**  
**Belanja Hibah Tahun 2022**

No.	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
a	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri atas:</b>	<b>5.781.610.000,00</b>	<b>5.595.066.483,00</b>	<b>186.543.517,00</b>	<b>96,77</b>



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
a	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.840.400.000,00	4.824.341.140,00	16.058.860,00	99,67
b	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	533.710.000,00	469.885.343,00	63.824.657,00	88,04
c	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	407.500.000,00	300.840.000,00	106.660.000,00	73,83
<b>3</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>8.790.900.000,00</b>	<b>7.430.511.559,00</b>	<b>1.360.388.441,00</b>	<b>84,53</b>
a	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.790.900.000,00	7.430.511.559,00	1.360.388.441,00	84,53
<b>4</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>584.664.124,00</b>	<b>584.664.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
a	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124,00	584.664.124,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.657.174.124,00</b>	<b>14.110.242.166,00</b>	<b>1.546.931.958,00</b>	<b>90,12</b>

Realisasi Belanja hibah Tahun 2022 sebesar Rp14.110.242.166,00 tersebar pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Sekretariat Daerah Kota, dan Dinas Pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.15**  
**Belanja Hibah Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.181.864.124,00
2	Dinas Pariwisata dan Olahraga	1.644.396.640,00
3	Dinas Pendidikan	9.040.911.559,00
4	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	2.243.069.843,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.110.242.166,00</b>

Rincian Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik an. Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	40.833.738,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	52.486.170,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai NASDEM (Nasional Demokrasi)	47.815.152,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai PKS (PARTAI Keadilan Sejahtera)	50.544.098,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	51.046.358,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik an. Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	74.568.868,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai Demokrat	51.280.746,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai PKPI (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia)	80.763.408,00
		Belanja Hibah Bantuan Partai Politik an. Partai PAN (Partai Amanat Nasional)	65.025.928,00
		Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik an. Partai Golkar (Golongan Karya)	70.299.658,00
		Belanja Hibah Uang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto	97.200.000,00
		Belanja Hibah berupa uang dari Pemerintah kepada Kepolisian Resor Sawahlunto an RPL 077 PDHL Polres Sawahlunto	500.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.181.864.124,00</b>
2	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	Belanja Hibah (KONI) uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba dan Sosial.	994.436.040,00
		Belanja Hibah (Pramuka) uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba dan Sosial.	349.960.600,00
		Belanja Hibah tahap II (KONI) uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	300.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.644.396.640,00</b>
3	DINAS PENDIDIKAN	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan : Belanja PAUD dan BOP Kesetaraan	1.610.400.000,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri : Belanja Dana BOS SMP Negeri dan Belanja BOS SD.	7.430.511.559,00
		<b>Jumlah</b>	<b>9.040.911.559,00</b>
4	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	Belanja dana Hibah Tahap I kepada Universitas Negeri Padang (UNP)	1.120.000.000,00
		Belanja hibah uang kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Sawahlunto	48.944.500,00
		Belanja hibah uang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Sawahlunto	303.400.000,00
		Belanja hibah uang kepada Badan, Lembaga kepada Yayasan Shohibul Qur'an Kota Sawahlunto	50.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pemb belanja hibah uang kepada Badan, Lembaga Kota Sawahlunto kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sawahlunto.	112.491.373,00
		Pembayaran belanja hibah uang kepada badan, lembaga yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebanyak 41 mushalla.	307.393.970,00
		Belanja hibah uang kepada Mushalla Surau Kito Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.	150.000.000,00
		Belanja hibah uang kepada Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kota Sawahlunto	150.840.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>2.243.069.843,00</b>
		<b>TOTAL BELANJA HIBAH</b>	<b>14.110.242.166,00</b>

Belanja Hibah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 didasarkan sebagaimana berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
5. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/20/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Hibah berupa Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2022;
7. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/24/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Sawahlunto Periode 2019 sampai dengan 2024.
8. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/44/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor : 188.45/64/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto Periode 2021-2025;



9. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/63/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Universitas Negeri Padang Tahun 2022;
10. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/123/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, LKAAM, PDM Muhammadiyah, Yayasan Sahibuk Qur'an, Mushalla/Surau Kito Siromai Desa Lumindai, Pelaksanaan Didikan Subuh dan Masjid/Mushalla se Kota Sawahlunto Tahun 2022;
11. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/263/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Kepolisian Resor Sawahlunto Tahun 2022;
12. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/264/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/50/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Pramuka Kwarcab 11 Kota Sawahlunto Tahun 2022;
13. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/301/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor Nomor : 188.45/123/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, LKAAM, PDM Muhammadiyah, Yayasan Sahibuk Qur'an, Mushalla/Surau Kito Siromai Desa Lumindai, Pelaksanaan Didikan Subuh dan Masjid/Mushalla se Kota Sawahlunto Tahun 2022;
14. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/302/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Sawahlunto.

#### 5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>3.831.150.000,00</b>	<b>2.396.000.000,00</b>

Belanja Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3.831.150.000,00 atau sebesar 97,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.917.450.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.396.000.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.435.150.000,00 atau 59,90%.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 berupa belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu. Sementara pada Tahun 2021, belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Sawahlunto berupa bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu dan belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan



kepada Keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp3.831.150.000,00 berasal dari realisasi 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana uraian tabel berikut ini:

**Tabel 5.16**  
**Belanja Bantuan Sosial Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022**

No.	SKPD	Realisasi Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	629.850.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.880.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak	321.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.831.150.000,00</b>

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	Belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada individu (PIP Kota) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto Tahun 2022.	499.650.000,00
		Belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada individu (PIP Kota) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto Tahun 2022, atas nama Ezellan Ghifari.	5.250.000,00
		Belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada individu (PIP Kota) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto tahun 2022.	124.950.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>629.850.000,00</b>
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembayaran Tahap I 50% Sub Keg Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Pada Kelompok Penerima Bantuan SEJAHTERA Sebanyak 8 Unit atas nama Eri Edison Cs berdasarkan No Kontrak : 09.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	80.000.000,00
		Pembayaran 50% Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha Kelompok Penerima Bantuan Lintas Sebanyak 2 Unit No Kontrak : 08.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	20.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% Sub Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tumpuk Tengah atas nama ITMA FITRI Cs sebanyak 15 Unit Berdasarkan Kontrak No:01.A/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022.	300.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% Sub Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kelompok Kebersamaan Sebanyak 10 Unit atas nama Rukmini Cs Berdasarkan No Kontrak : 03.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	100.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% Sub Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Kelompok SAKINAH Sebanyak 10 Unit An AWALUDDIN Cs Berdasarkan Kontrak No:05.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 18 Juli 2022.	100.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Pada Kelompok LINTAS An Hernis Cs Sebanyak 2 Unit Dengan Kontrak No :08/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni dengan Add Kontrak No :08.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	20.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran 50% Perbaikan RTLH Pada Kelompok SAKATO Sebanyak 7 unit atas nama Dafli Umri Cs No Kontrak: 07/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add No:07.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	70.000.000,00
		Pembayaran 50% Perbaikan RTLH pada Kelompok SAKINAH Sebanyak 3 Unit atas nama ELFAWATI Cs Kontrak No:05/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 Add Kontrak No:05.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	30.000.000,00
		Pembayaran 50% Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha Kelompok Penerima Bantuan Lintas Sebanyak 4 Unit No Kontrak : 08.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	40.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Pada Kelompok LINTAS An Muhamad Nur Cs Sebanyak 4 Unit Dengan Kontrak No :08/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni dengan Add Kontrak No :08.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	40.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kabupaten/Kota, Pada Kelompok Kebersamaan atas nama Mardias Sebanyak 1 Unit Berdasarkan Kontrak No: 03.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	10.000.000,00
		Pembayaran Tahap I 50% Sub Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh pada Kelompok Penerima Bantuan SAKATO An Zainal, Kontrak No:07.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 50% Perbaikan RTLH pada Kelompok SAKINAH Sebanyak 3 Unit atas nama Sri Madona Cs Kontrak No:05/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 Add Kontrak No:05.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	30.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Kelompok SEJAHTERA Sebanyak 8 Unit atas nama Eri Edison Cs berdasarkan No Kontrak :09/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 22 Juni 2022 dan Add No: 09.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 18 Juli 2022.	80.000.000,00
		Pembayaran 50% RTLH Pada Kelompok MAKMUR Sebanyak 9 Unit atas nama Eka Saputra Cs Berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	90.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Kelompok Kebersamaan Sebanyak 10 Unit atas nama Rukmini Cs Berdasarkan No Kontrak :03/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 dan Add No: 03.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	100.000.000,00
		Pembayaran Tahap 1 RTLH atas nama Aprianto Cs Berdasarkan No Kontrak:02/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 17 Mei 2022 dan Add 1 No:02.A/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 19 Juli 2022 dan Add 2 No:02.B/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERKIM/SWL-2022 tgl 26 Juli 2022.	300.000.000,00
		Pembayaran 50% RTLH Pada Kelompok MAKMUR Sebanyak 2 Unit atas nama Setiyo Budi Cs Berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	20.000.000,00
		Pembayaran 50% RTLH Pada Kelompok SAIYO Sebanyak 19 Unit atas nama Masni Salam Cs Berdasarkan Kontrak No:04/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 dan Add Kontrak No:04.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	190.000.000,00
		Pembayrn 50% RTLH An Rahmad Arif pd Kelompok MAKMUR Sebanyak 1 Unit Berdasarkan Nomor Kontrak:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	10.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran 100% RTLH Kelompok Kebersamaan Sebanyak 1 Unit atas nama Mardias Berdasarkan No Kontrak :03/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 dan Add No: 03.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH pada Kelompok Penerima Bantuan SAKATO atas nama Zainal, Kontrak No:07/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 22 Juni 2022 dan Add No:07.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 50% RTLH Kelompok SEJAHTERA atas nama Danila berdasarkan No Kontrak :09/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 22 Juni 2022 dan Add No: 09.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Kelompok SEJAHTERA atas nama Danila berdasarkan No Kontrak :09/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 22 Juni 2022 dan Add No: 09.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 Tanggal 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 50% RTLH Kelompok Makmur atas nama Wandri berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 100% Perbaikan RTLH pada Kelompok SAKINAH Sebanyak 13 Unit atas nama Awaluddin Cs Cs Kontrak No:05/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 Add Kontrak No:05.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	130.000.000,00
		Pembayaran 100% Perbaikan RTLH Pada Kelompok SAKATO Sebanyak 7 unit atas nama Daffi Umri Cs No Kontrak: 07/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add No:07.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	70.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Pada Kelompok MAKMUR Sebanyak 9 Unit atas nama Eka Saputra Cs Berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	90.000.000,00
		Pembayaran Tahap II 100% RTLH Desa Tumpuk Tengah atas nama ITMA FITRI Cs sebanyak 15 Unit Berdasarkan Kontrak No:01/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 13 Mei 2022 dan Add No:01.A/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	300.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Kelompok Makmur atas nama Wandri berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Pada Kelompok SAIYO Sebanyak 19 Unit atas nama Masni Salam Cs Berdasarkan Kontrak No:04/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 dan Add Kontrak No:04.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	190.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH Pada Kelompok MAKMUR Sebanyak 2 Unit atas nama Setiyo Budi Cs Berdasarkan Kontrak No:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	20.000.000,00
		Pbyrn 50% RTLH 2 Unit No Kontrak :06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dan add I No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022 dan add II No:06.B/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 07 November 2022.	20.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Uraian	Jumlah
		Pembayaran 100% Perbaikan RTLH pada Kelompok SAKINAH Sebanyak 3 Unit atas nama Sri Madona Cs Kontrak No:05/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 20 Juni 2022 Add Kontrak No:05.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022.	30.000.000,00
		Pmbayrn 100% RTLH atas nama Rahmad Arif pd Kelompok MAKMUR Sebanyak 1 Unit Berdasarkan Nomor Kontrak:06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Add Kontrak No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tanggal 18 Juli 2022.	10.000.000,00
		Pembayaran Tahap II RTLH atas nama Aprianto Cs Berdasarkan No Kontrak:02/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 17 Mei 2022 dan Add 1 No:02.A/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERUM/SWL-2022 tgl 19 Juli 2022 dan Add 2 No:02.B/PERKIM-DPKP2LH/DAK-PERKIM/SWL-2022 tgl 26 Juli 2022.	300.000.000,00
		Pembayaran 100% RTLH 2 Unit No Kontrak :06/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 22 Juni 2022 dn add I No:06.A/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 18 Juli 2022 dan add II No:06.B/PERKIM-DPKP2LH/APBD-PERUM/SWL-2022 tgl 07 November 2022.	20.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.880.000.000,00</b>
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Pemberian Bantuan Uang Tunai untuk Lansia Terlantar Non Produktif) bulan Januari s/d April 2022 atas nama Namzurni Cs.	61.200.000,00
		Pembayaran Biaya Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Pemberian Bantuan Uang Tunai untuk Lansia Terlantar Non Produktif) bulan Mei s/d Agustus 2022 atas nama Namzurni Cs.	60.300.000,00
		Pembayaran biaya belanja Bantuan Sosial Uang (Pemberian Bantuan Uang Tunai untuk Lansia Terlantar Non Produktif) untuk 4 (empat) kecamatan bulan September s/d Desember 2022 atas nama Gustina Cs.	64.800.000,00
		Pengembalian belanja bantuan sosial uang (untuk lansia kurang mampu non produktif) bulan September s/d Desember 2022 atas nama Nursyam Kecamatan talawi	-
		Pembayaran Biaya belanja bantuan sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada Tukang Ojek Kota Sawahlunto tahun 2022) atas nama Alfiantri, dkk untuk bulan Oktober, November, Desember.	135.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>321.300.000,00</b>
<b>TOTAL BELANJA SOSIAL</b>			<b>3.831.150.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



3. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45 /132/ WAKO -SWL / 2022 Penetapan Nama-Nama Penerima Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto Tahun 2022;
5. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/148/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Hektar Tahun Anggaran 2022;
6. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/217/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/152/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Hektar Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/152/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Hektar Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/218/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/148/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Hektar Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/275/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/132/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto tahun 2022;



10. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/233/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/75/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu Tahun 2022;
11. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/269/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Tukang Ojek Kota Sawahlunto Tahun 2022;
12. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/274/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/218/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Terhadap Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Sepuluh Hektar Tahun Anggaran 2022.

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>116.514.679.424,00</b>	<b>85.611.045.938,00</b>

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.116.514.679.424,00 atau 92,97% dari anggaran sebesar Rp125.329.087.114,00. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp30.903.633.486,00 atau 36,10%. Adapun realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17**  
**Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.015.325.023,00	17.666.803.013,00	88,27	20.880.045.268,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.272.346.412,00	41.516.117.751,00	95,94	14.804.687.034,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.937.215.679,00	57.231.799.760,00	92,40	49.683.258.936,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.200.000,00	99.958.900,00	95,93	243.054.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.329.087.114,00</b>	<b>116.514.679.424,00</b>	<b>92,97</b>	<b>85.611.045.938,00</b>

Rincian belanja modal Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 5.18  
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022

No.	Belanja Modal	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	16.225.000,00	16.133.850,00	99,44
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.949.000,00	1.240.000,00	63,62
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.276.000.000,00	2.244.656.249,00	98,62
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350.000.000,00	318.497.739,00	91,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	121.600.000,00	121.481.175,00	99,90
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.983.800,00	3.955.000,00	99,28
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.294.531.250,00	1.272.352.760,00	55,45
8	Belanja Modal Alat Kantor	760.536.516,00	681.892.125,00	89,66
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.052.722.665,00	2.534.417.765,00	83,02
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.000.000,00	49.550.000,00	91,76
11	Belanja Modal Alat Studio	181.909.640,00	168.138.300,00	92,43
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.700.000,00	9.626.000,00	99,24
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	104.250.000,00	87.627.000,00	84,05
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.725.827.547,00	3.465.098.418,00	93,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	157.716.000,00	111.453.600,00	70,67
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	512.077.160,00	446.608.838,00	87,22
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.600.000,00	10.590.000,00	99,91
18	Belanja Modal Komputer Unit	5.164.148.390,00	4.990.219.030,00	96,63
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	778.154.355,00	718.612.296,00	92,35
20	Belanja Modal Alat SAR	46.000.000,00	43.964.100,00	95,57
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20.493.500,00	20.233.413,00	98,73
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	372.900.200,00	350.455.355,00	93,98
23	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.147.346.412,00	41.392.222.751,00	95,93
24	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	125.000.000,00	123.895.000,00	99,12
25	Belanja Modal Jalan	47.799.850.679,00	44.597.496.460,00	93,30
26	Belanja Modal Jembatan	434.700.000,00	427.330.000,00	98,30
27	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.605.000.000,00	1.547.730.000,00	96,43
28	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.285.000.000,00	2.248.929.250,00	98,42
29	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	550.000.000,00	544.935.000,00	99,08
30	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.173.605.000,00	2.149.640.250,00	98,90
31	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.089.060.000,00	5.715.738.800,00	80,63



No.	Belanja Modal	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
32	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	29.200.000,00	24.983.950,00	85,56
33	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	75.000.000,00	74.974.950,00	99,97
<b>Jumlah</b>		<b>125.329.087.114,00</b>	<b>116.514.679.424,00</b>	<b>92,97</b>

### 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>294.991.005,00</b>	<b>2.655.984.000,00</b>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Penggunaan Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Dana Tak Terduga yang dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dengan realisasi sebesar Rp294.991.005,00 atau sebesar 13,08% dari anggaran sebesar Rp2.255.914.994,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.655.984.000,00, maka terdapat penurunan realisasi sebesar Rp2.360.992.995,00 atau sebesar -88,89%.

Penggunaan belanja tak terduga tahun 2022 sebesar Rp294.991.005,00 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Jumlah
I	Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya Bencana Alam, antara lain:	122.050.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya bencana Alam an. Nur Asri Cs	32.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan bencana alam an. Efendi Boer, cs	14.300.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan keluarga terdampak bencana an. Afrison Cs	17.250.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan keluarga terdampak bencana an. Yustina Marlina	8.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan keluarga terdampak bencana an. Herli	1.900.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan keluarga terdampak bencana an. Susi Dewi	2.500.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Reladi	10.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Dahliar	8.600.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Burhanuddin	4.500.000,00
10	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Nudiar	10.000.000,00
11	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Fifian Melani	5.000.000,00
12	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya bencana alam an. Agusmat cs	8.000.000,00
<b>2</b>	<b>Pembayaran Belanja Tidak Terduga Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya Pengobatan, terdiri dari:</b>	<b>101.000.000,00</b>
1	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. M.Rayhan Ananta	4.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. Sawaluddin	3.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. Aisyah Mutiara	3.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. Mimi Armida	4.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. Burhanuddin	1.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya pengobatan an. Salmiati	4.000.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan pengobatan an. Sukirno	3.500.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan pengobatan an. Febri Ramadhan Dinata	2.000.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Asniar	2.000.000,00
10	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Rosi Fasila	2.500.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah
11	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Martina Wati	2.500.000,00
12	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Marjohan	3.000.000,00
13	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Nasrul	2.500.000,00
14	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Yusmaizar	3.500.000,00
15	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Amriswan	3.500.000,00
16	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Hendri Mustari	2.000.000,00
17	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Ernalis	3.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Anidar Ismail	4.000.000,00
19	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Adi Pura	3.000.000,00
20	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Hadiman	1.500.000,00
21	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Sri Dewi Anggraini	3.500.000,00
22	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Sepria Weri	3.000.000,00
23	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Meldefita	2.000.000,00
24	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Destri Simon	2.500.000,00
25	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Siti Misni	2.500.000,00
26	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Habib Aqila Adelsi	5.000.000,00
27	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Saparuddin	3.000.000,00
28	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Febri Adrian Refren	2.000.000,00
29	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Ranny Wahyuni	2.000.000,00
30	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Edo Larici	2.000.000,00
31	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Sunoto	3.000.000,00
32	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Taufik	2.000.000,00
33	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Diana Efnita	2.000.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah
34	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Afrizal	1.500.000,00
35	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Sarmi	1.500.000,00
36	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Aprimizur	2.500.000,00
37	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Maiyora Nurul Indri	1.500.000,00
38	Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial biaya pengobatan an. Bujang Gapuk	1.500.000,00
<b>III</b>	<b>Pembayaran Belanja Tidak terduga untuk belanja bantuan sosial tidak terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2022</b>	<b>48.200.000,00</b>
1	Pembayaran Belanja Tidak terduga untuk belanja bantuan sosial tidak terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak tahun 2022	43.500.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak terduga untuk belanja bantuan sosial tidak terencana sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak tahun 2022	4.700.000,00
<b>IV</b>	<b>Pembayaran Belanja Tidak terduga sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan sosial kebakaran rumah an. Dian Novita</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Pengembalian atas kelebihan bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) an. Aswati berdasarkan keputusan Walikota No.188.45/243/WAKO-SWL/2022 tanggal 10 Oktober 2022</b>	<b>17.241.005,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>294.991.005,00</b>

#### 5.1.2.4. Belanja Transfer

	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>58.112.504.955,00</b>	<b>66.908.297.413,00</b>

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 berupa Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp58.112.504.955,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp58.260.946.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja transfer Tahun 2021 sebesar Rp66.908.297.413,00, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp8.795.792.458,00 atau -13,15%.

Rincian Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2022 dimuat pada tabel berikut:



**Tabel 5.20**  
**Rincian Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>1.195.342.000,00</b>	<b>1.046.900.955,00</b>	<b>87,58</b>	<b>885.532.503,00</b>
A	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	730.360.000,00	637.792.686,00	87,33	558.532.503,00
B	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	464.982.000,00	409.108.269,00	87,98	327.000.000,00
2	<b>Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota</b>	<b>57.065.604.000,00</b>	<b>57.065.604.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66.022.764.910,00</b>
A	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kota kepada Pemerintah Desa	57.065.604.000,00	57.065.604.000,00	100,00	66.022.764.910,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58.260.946.000,00</b>	<b>58.112.504.955,00</b>	<b>99,75</b>	<b>66.908.297.413,00</b>

#### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2021 (Rp)</u>
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	637.792.686,00	558.532.503,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	409.108.269,00	327.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.046.900.955,00</b>	<b>885.532.503,00</b>

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.046.900.955,00 berupa Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Desa, masing-masing dengan realisasi sebesar Rp637.792.686 atau 87,33% dan sebesar Rp409.108.269,00 atau 87,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp161.532.503,00 atau sebesar 18,22%.

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan penentuan besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.



- c. Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan:
  - 1) 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
  - 2) 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
2. Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I pada Semester I, penyaluran maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setelah APBDes ditetapkan.
  - b. Tahap II pada Semester II, penyaluran sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi pencairan tahap I dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) untuk dana bagi hasil pajak daerah. Sementara untuk penyaluran tahap II bagi hasil retribusi daerah disalurkan sebesar sisa pagu perubahan APBD setelah dikurangi dengan pencairan tahap I.

Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022**

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>Kecamatan Lembah Segar</b>	<b>110.543.000,00</b>	<b>110.001.264,00</b>	<b>99,51</b>
1	Desa Lunto Timur	22.291.000,00	22.291.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	20.836.000,00	20.294.264,00	97,40
3	Desa Kubang Tengah	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	20.989.000,00	20.989.000,00	100,00
5	Desa Pasa Kubang	21.677.000,00	21.677.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Barangin</b>	<b>167.620.000,00</b>	<b>143.583.249,00</b>	<b>85,66</b>
6	Desa Santur	44.914.000,00	40.602.256,00	90,40
7	Desa Kolok Mudiak	27.982.000,00	10.780.800,00	38,53
8	Desa Kolok Nan Tuo	25.493.000,00	22.969.193,00	90,10
9	Desa Talago Gunung	25.143.000,00	25.143.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	23.175.000,00	23.175.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	20.913.000,00	20.913.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Silungkang</b>	<b>129.480.000,00</b>	<b>126.005.620,00</b>	<b>97,32</b>
12	Desa Silungkang Oso	21.180.000,00	21.180.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	21.775.000,00	21.775.000,00	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	26.488.000,00	26.488.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
15	Desa Muaro Kalaban	37.765.000,00	34.290.620,00	90,80
16	Desa Taratak Bancah	22.272.000,00	22.272.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Talawi</b>	<b>322.717.000,00</b>	<b>258.202.553,00</b>	<b>80,01</b>
17	Desa Talawi Hilir	63.355.000,00	57.209.565,00	90,30
18	Desa Talawi Mudiak	32.379.000,00	12.539.600,00	38,73
19	Desa Bukit Gadang	26.352.000,00	24.085.728,00	91,40
20	Desa Batu Tanjung	30.830.000,00	27.808.660,00	90,20
21	Desa Kumbayau	25.765.000,00	25.765.000,00	100,00
22	Desa Tumpuk Tengah	27.333.000,00	10.521.200,00	38,49
23	Desa Datar Mansiang	18.043.000,00	18.043.000,00	100,00
24	Desa Sijantang Koto	26.697.000,00	10.266.800,00	38,46
25	Desa Salak	27.045.000,00	27.045.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	22.841.000,00	22.841.000,00	100,00
27	Desa Rantih	22.077.000,00	22.077.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>730.360.000,00</b>	<b>637.792.686,00</b>	<b>87,33</b>

**Tabel 5.22**  
**Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022**

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>Kecamatan Lembah Segar</b>	<b>52.583.000,00</b>	<b>52.341.954,00</b>	<b>99,54</b>
1	Desa Lunto Timur	9.271.000,00	9.271.000,00	100,00
2	Desa Lunto Barat	9.271.000,00	9.029.954,00	97,40
3	Desa Kubang Tengah	15.499.000,00	15.499.000,00	100,00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	9.271.000,00	9.271.000,00	100,00
5	Desa Pasa Kubang	9.271.000,00	9.271.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Barangin</b>	<b>136.429.000,00</b>	<b>117.590.146,00</b>	<b>86,19</b>
6	Desa Santur	46.429.000,00	41.971.816,00	90,40
7	Desa Kolok Mudiak	23.507.000,00	10.464.800,00	44,52
8	Desa Kolok Nan Tuo	13.530.000,00	12.190.530,00	90,10
9	Desa Talago Gunung	21.754.000,00	21.754.000,00	100,00
10	Desa Lumindai	16.555.000,00	16.555.000,00	100,00
11	Desa Balai Batu Sandaran	14.654.000,00	14.654.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Silungkang</b>	<b>73.452.000,00</b>	<b>72.171.728,00</b>	<b>98,26</b>
12	Desa Silungkang Oso	15.992.000,00	15.992.000,00	100,00
13	Desa Silungkang Duo	11.445.000,00	11.445.000,00	100,00
14	Desa Silungkang Tigo	11.649.000,00	11.649.000,00	100,00
15	Desa Muaro Kalaban	13.916.000,00	12.635.728,00	90,80
16	Desa Taratak Bancah	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00



No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Talawi</b>	<b>202.518.000,00</b>	<b>167.004.441,00</b>	<b>82,46</b>
17	Desa Talawi Hilir	51.335.000,00	46.355.505,00	90,30
18	Desa Talawi Mudiak	26.927.000,00	11.832.800,00	43,94
19	Desa Bukit Gadang	9.271.000,00	8.473.694,00	91,40
20	Desa Batu Tanjung	9.271.000,00	8.362.442,00	90,20
21	Desa Kumbayau	12.088.000,00	12.088.000,00	100,00
22	Desa Tumpuk Tengah	9.271.000,00	4.770.400,00	51,46
23	Desa Datar Mansiang	9.271.000,00	9.271.000,00	100,00
24	Desa Sijantang Koto	17.159.000,00	7.925.600,00	46,19
25	Desa Salak	19.332.000,00	19.332.000,00	100,00
26	Desa Sikalang	23.378.000,00	23.378.000,00	100,00
27	Desa Rantih	15.215.000,00	15.215.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>464.982.000,00</b>	<b>409.108.269,00</b>	<b>87,98</b>

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Keuangan	57.065.604.000,00	66.022.764.910,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 berupa Belanja Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa yang terealisasi sebesar Rp57.065.604.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp66.022.764.910,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp8.957.160.910,00 atau sebesar -13,57%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Desa (DD)	20.098.731.000,00	20.098.731.000,00	100,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	36.966.873.000,00	36.966.873.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.065.604.000,00</b>	<b>57.065.604.000,00</b>	<b>100,00</b>



Penganggaran dan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa langsung dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Sementara penganggaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota sawahlunto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
2. Penyaluran paling lambat pada minggu ketiga setiap bulannya.
3. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap : tahap I sebesar 1% dari besaran siltap aparaturnya desa untuk seluruh desa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan tagihan premi fasilitasi kesehatan dari BPJS paling lambat tanggal 6 setiap bulannya. Sementara untuk tahap II disalurkan sebesar selisih dari nilai yang seharusnya disalurkan pada setiap bulannya.

Adapun rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.23**  
**Rincian Dana Desa (DD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Kecamatan Lembah Segar</b>	<b>3.667.172.000,00</b>	<b>3.667.172.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Lunto Timur	735.412.000,00	735.412.000,00	100,00
2	Lunto Barat	648.739.000,00	648.739.000,00	100,00
3	Kubang Tengah	961.508.000,00	961.508.000,00	100,00
4	Kubang Utara Sikabu	654.779.000,00	654.779.000,00	100,00
5	Pasar Kubang	666.734.000,00	666.734.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Barangin</b>	<b>4.976.412.000,00</b>	<b>4.976.412.000,00</b>	<b>100,00</b>
6	Santur	770.938.000,00	770.938.000,00	100,00
7	Kolok Mudik	882.008.000,00	882.008.000,00	100,00
8	Kolok Nan Tuo	637.820.000,00	637.820.000,00	100,00
9	Talago Gunung	967.073.000,00	967.073.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	Lumindai	793.075.000,00	793.075.000,00	100,00
11	Balai Batu Sandaran	925.498.000,00	925.498.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Silungkang</b>	<b>3.549.853.000,00</b>	<b>3.549.853.000,00</b>	<b>100,00</b>
12	Silungkang Oso	709.000.000,00	709.000.000,00	100,00
13	Silungkang Duo	647.819.000,00	647.819.000,00	100,00
14	Silungkang Tigo	695.431.000,00	695.431.000,00	100,00
15	Muaro Kalaban	847.266.000,00	847.266.000,00	100,00
16	Taratak Bancah	650.337.000,00	650.337.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Talawi</b>	<b>7.905.294.000,00</b>	<b>7.905.294.000,00</b>	<b>100,00</b>
17	Talawi Hilir	763.637.000,00	763.637.000,00	100,00
18	Talawi Mudiak	763.233.000,00	763.233.000,00	100,00
19	Bukik Gadang	737.507.000,00	737.507.000,00	100,00
20	Batu Tanjung	719.621.000,00	719.621.000,00	100,00
21	Kumbayau	952.190.000,00	952.190.000,00	100,00
22	Tumpuk Tengah	733.209.000,00	733.209.000,00	100,00
23	Datar Mansiang	623.656.000,00	623.656.000,00	100,00
24	Sijantang Koto	636.449.000,00	636.449.000,00	100,00
25	Salak	626.095.000,00	626.095.000,00	100,00
26	Sikalang	691.389.000,00	691.389.000,00	100,00
27	Rantih	658.308.000,00	658.308.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.098.731.000,00</b>	<b>20.098.731.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.24**  
**Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Kecamatan Lembah Segar</b>	<b>6.901.407.000,00</b>	<b>6.901.407.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Lunto Timur	1.460.606.000,00	1.460.606.000,00	100,00
2	Lunto Barat	1.363.717.000,00	1.363.717.000,00	100,00
3	Kubang Tengah	1.369.721.000,00	1.369.721.000,00	100,00
4	Kubang Utara Sikabu	1.331.797.000,00	1.331.797.000,00	100,00
5	Pasar Kubang	1.375.566.000,00	1.375.566.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Kecamatan Barangin</b>	<b>8.608.806.000,00</b>	<b>8.608.806.000,00</b>	<b>100,00</b>
6	Santur	1.349.624.000,00	1.349.624.000,00	100,00
7	Kolok Mudik	1.328.261.000,00	1.328.261.000,00	100,00
8	Kolok Nan Tuo	1.342.954.000,00	1.342.954.000,00	100,00
9	Talago Gunung	1.368.675.000,00	1.368.675.000,00	100,00
10	Lumindai	1.766.220.000,00	1.766.220.000,00	100,00
11	Balai Batu Sandaran	1.453.072.000,00	1.453.072.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Kecamatan Silungkang</b>	<b>6.739.081.000,00</b>	<b>6.739.081.000,00</b>	<b>100,00</b>



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12	Silungkang Oso	1.365.820.000,00	1.365.820.000,00	100,00
13	Silungkang Duo	1.362.383.000,00	1.362.383.000,00	100,00
14	Silungkang Tigo	1.354.633.000,00	1.354.633.000,00	100,00
15	Muaro Kalaban	1.334.300.000,00	1.334.300.000,00	100,00
16	Taratak Bancah	1.321.945.000,00	1.321.945.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Talawi</b>	<b>14.717.579.000,00</b>	<b>14.717.579.000,00</b>	<b>100,00</b>
17	Talawi Hilir	1.316.509.000,00	1.316.509.000,00	100,00
18	Talawi Mudiak	1.327.257.000,00	1.327.257.000,00	100,00
19	Bukik Gadang	1.371.840.000,00	1.371.840.000,00	100,00
20	Batu Tanjung	1.365.591.000,00	1.365.591.000,00	100,00
21	Kumbayau	1.327.630.000,00	1.327.630.000,00	100,00
22	Tumpuk Tengah	1.360.881.000,00	1.360.881.000,00	100,00
23	Datar Mansiang	1.358.240.000,00	1.358.240.000,00	100,00
24	Sijantang Koto	1.321.512.000,00	1.321.512.000,00	100,00
25	Salak	1.309.938.000,00	1.309.938.000,00	100,00
26	Sikalang	1.312.730.000,00	1.312.730.000,00	100,00
27	Rantih	1.345.451.000,00	1.345.451.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.966.873.000,00</b>	<b>36.966.873.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 5.1.3 Surplus/Defisit

	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(23.006.188.527,38)</b>	<b>(1.144.190.284,82)</b>

Jumlah Surplus/Defisit LRA Pemerintah Kota Sawahlunto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Defisit sebesar (Rp23.006.188.527,38), sedangkan pada Tahun 2021 Defisit sebesar (Rp1.144.190.284,82).

### 5.1.4 Pembiayaan Daerah

	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>35.121.134.786,76</b>	<b>39.863.898.029,58</b>

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo,



penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp35.121.134.786,76 atau 62,66% dari anggaran sebesar Rp56.052.724.446,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp39.863.898.029,58, maka terdapat penurunan pembiayaan netto sebesar Rp4.742.763.242,82 atau -11,90%.

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
SilPA Tahun Sebelumnya	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	38.093.710,00	26.460.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>38.757.801.454,76</b>	<b>44.095.564.695,58</b>

Sumber penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penggunaan SiLPA merupakan perkiraan untuk membukukan realisasi penggunaan SiLPA guna menutup defisit anggaran selama tahun berjalan. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.757.801.454,76 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp38.719.707.744,76 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp38.093.710,00.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp38.093.710,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	Jumlah
1	BDC	37.748.710,00
2	DANA BERGULIR	345.000
	<b>Jumlah</b>	<b>38.093.710,00</b>

#### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
Pemberian Pinjaman Daerah	470.000.000,00	65.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>3.636.666.668,00</b>	<b>4.231.666.666,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran kas daerah yang diharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang. Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota



Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.636.666.668,00 atau sebesar 77,93% dari anggaran sebesar Rp4.666.666.669,00. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp4.231.666.666,00, maka terdapat penurunan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp594.999.998,00 atau -14,06%. Hal ini disebabkan perbedaan besaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Nagari dan Pemberian Pinjaman berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Bank Nagari Cabang Sawahlunto sebesar Rp2.000.000.000,00

Penyertaan modal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat dan berdasarkan Surat dari Direktur Utama Bank Nagari Nomor : SR/127/DIR/PD/11-2022 tanggal 21 November 2022 melalui SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

- b. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-1053/WPB.03/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban berdasarkan Surat Tagihan No.S-2097/WPB.03/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah Rp.1.166.666.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp.583.333.334,00; dan
2. SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/4/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.583.333.334,00.

- c. Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Penyertaan Modal berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp470.000.000,00 dilakukan melalui 3 (tiga) kali pencairan, dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D LS Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp90.000.000,00;
2. SP2D LS Nomor : 08.14/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/09/2022 tanggal 29 Septemberr 2022 sebesar Rp185.000.000,00; dan
3. SP2D LS Nomor : 08.14/04.0/5/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp195.000.000,00.



Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto berupa Pemberian Pinjaman–Dana Bergulir kepada Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir dan Peraturan Walikota Sawahlunto 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Bentuk Modal Usaha Kepada Kelompok Masyarakat dan/atau Masyarakat.

#### 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
SiLPA	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu priode tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp12.114.946.259,38, dengan rincian sebagai berikut:

Kas pada Kas Daerah	Rp.	1.025.873.629,40
Kas pada BLUD RSUD	Rp.	10.090.642.931,98
Kas pada Bendahara Penerima RSUD	Rp.	464.046,00
Kas BLUD Puskesmas		92.913.685,00
Kas JKN Puskesmas	Rp.	650.047.260,00
Kas/Sisa PAUD	Rp.	60.000.000,00
Kas/Sisa Dana BOS	Rp.	195.004.707,00
<b>Total SiLPA TA 2022</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.114.946.259,38</b>



## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25**  
**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2022**

URAIAN	2022	2021
Sisa Anggaran Lebih Awal	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
SubTotal (1-2)	0,00	0,00
SiLPA/(SiKPA)	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
SubTotal (3+4)	12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)</b>	<b>12.114.946.259,38</b>	<b>38.719.707.744,76</b>

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp38.719.707.744,76

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2022 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp38.719.707.744,76

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp12.114.946.259,38.

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2022, tidak terdapat koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.



### 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

#### 5.3.1 ASET

	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
<b>ASET</b>	<b>997.472.917.131,35</b>	<b>993.465.115.052,19</b>

Total aset Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp997.472.917.131,35 naik sebesar Rp4.007.802.079,16 atau 0,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp993.465.115.052,19. Kenaikan nilai aset terjadi karena bertambahnya nilai aset tetap dan aset lainnya.

#### 5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp36.160.347.569,89 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Aset lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.625.971.549,11 atau - 34,00% dari nilai aset lancar Tahun 2021 sebesar Rp54.786.319.119,00. Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021 dimuat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.025.873.629,40	32.694.686.312,78
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.507.007,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	10.184.020.662,98	5.291.856.861,98
Kas Dana BOS	255.004.707,00	107.819.559,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	650.047.260,00	617.838.004,00
Kas Lainnya	88.191.383,00	115.659.557,00
Piutang Pajak Daerah	2.160.600.380,00	2.377.501.971,00
Piutang Retribusi Daerah	3.572.813.424,00	3.760.783.024,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	727.841,00	0,00
Piutang Lainnya	1.927.397.913,00	1.146.089.152,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(526.079.588,50)	(1.321.041.479,70)



Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.443.102.248,00)	(3.595.717.628,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(70.508.173,22)	(36.013.094,92)
Beban Dibayar Dimuka	151.154.663,83	177.925.663,96
Persediaan	20.184.205.715,40	13.441.424.208,90
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>36.160.347.569,89</b>	<b>54.786.319.119,00</b>

#### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo Kas per 31 Desember 2022 berada pada Rekening Bank nagari nomor 1100.0101.00066.1 sebesar Rp1.025.873.629,40, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Kas di Kas Daerah	1.025.873.629,40	32.694.686.312,78

Saldo Kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah tahun 2022 sebesar Rp1.025.873.629,40 merupakan sisa dari DAK Non Fisik.

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing adalah nihil.

#### 5.3.1.1.4 Kas di BLUD

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Kas di BLUD	10.184.020.662,98	5.291.856.861,98

Kas di BLUD pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp10.184.020.662,98** terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar **Rp10.090.642.931,98**, Kas di Bendahara Penerima BLUD RSUD sebesar **Rp464.046,00**, dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar **Rp.92.913.685,00**.

**Jumlah kas di BLUD RSUD** per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.090.642.931,98 terdiri atas :



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>
- Kas di Rekening: Bank Nagari 1100.0101.00066.3	10.080.600.140,98	5.291.725.348,98
- Kas di Bendahara Pengeluaran	10.042.791,00	131.513,00
<b>Saldo Kas di BLUD</b>	<b>10.090.642.931,98</b>	<b>5.291.856.861,98</b>

Kas di BLUD tahun 2022 sebesar Rp10.090.642.931,98 berada pada Rekening Kas BLUD pada Bank Nagari dengan nomor rekening 1100.0101.00066.3 sebesar Rp10.080.600.140,98 dan Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.042.791,00 meliputi kas yg diperuntukkan sebagai panjar BBM sebesar Rp10.006.500,00 dan kas tunai di bendahara pengeluaran BLUD sebagai Rp36.291,00.

**Jumlah kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp92.913.685,00** merupakan sisa kas atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan dengan pola BLUD mulai bulan Oktober Tahun 2022. BLUD Puskesmas dibentuk dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk pembentukan BLUD Puskesmas Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor :188.45/92/Wako-Swl/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tanggal 28 Februari 2022, yang terdiri atas 6 (enam) puskesmas, yaitu Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Sei Durian, Puskesmas Silungkang, Puskesmas Kolok, Puskesmas Lunto, dan Pusesmas Talawi.

Kas pada BLUD Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp92.913.685,00 dapat dirinci sebagai berikut:

<b>KAS BLUD PUSKESMAS</b>	<b>No Rekening</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	10.768.606,00	-
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	24.165.376,00	-
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	7.316.765,00	-
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	3.217.029,00	-
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	5.377.819,00	-
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	42.068.090,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>92.913.685,00</b>	<b>-</b>

Rekening kas JKN Puskesmas dan kas BLUD Puskesmas pada Bank Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/306/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/311/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022.



#### 5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp255.004.707,00 terdiri dari Kas Dana BOS Sekolah sebesar Rp195.004.707,00 dan Kas PAUD sebesar Rp60.000.000,00.

Kas Dana BOS Sekolah pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp195.004.707,00 dan Rp107.819.559,00. Kas pada BOS tahun 2022 sebesar Rp195.004.707,00 terdiri dari Kas di Bank Nagari sebesar Rp183.260.091,00 dan Kas tunai di Bendahara BOS sebesar Rp11.744.616,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Rincian Kas pada BOS Tahun 2022 dan 2021**

Sekolah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>82.472.975,00</b>	<b>54.882.142,00</b>
- Kas BOS di Bank Nagari	72.708.232,00	
- Kas tunai di Bendahara BOS	9.764.743,00	
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>112.531.732,00</b>	<b>52.937.417,00</b>
- Kas BOS di Bank Nagari	110.551.859,00	
- Kas tunai di Bendahara BOS	1.979.873,00	
<b>Jumlah</b>	<b>195.004.707,00</b>	<b>107.819.559,00</b>

Rincian Kas pada BOS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.

Sementara, Kas PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp60.000.000,00 merupakan sisa dana BOP PAUD Kinerja pada TK Nurul Huda Kumbayau yang bersumber dari pemerintah pusat.

#### 5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp650.047.260,00.

Kas JKN Puskesmas Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp650.047.260,00 berada pada 6 (enam) Puskesmas. Kas tersebut merupakan kas JKN Puskesmas sebelum ditetapkan sebagai BLUD. Rekening ini belum bisa ditutup dan di nolkan, karena akan ditutup setelah hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa pengelolaan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah



yang belum menerapkan pola pengelola keuangan BLUD setelah ditetapkan sebagai FKTP yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, sisa dana Kapitasi JKN yang ada di bendahara dana kapitasi JKN disetorkan kepada kas umum daerah. Berikut rincian kas JKN/FKTP Puskesmas sebelum ditetapkannya pola pengelolaan keuangan BLUD periode Januari sd September 2022:

<b>KAS JKN/FKTP PUSKESMAS</b>	<b>No Rekening</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00436.8	53.014.016,00	51.773.963,00
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00437.1	45.194.360,00	25.609.901,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00434.4	118.546.805,00	109.817.946,00
Puskesmas Kolok	1100.0101.00438.0	1.844.569,00	1.000.130,00
Puskesmas Lunto	1100.0101.00435.6	18.077.166,00	16.265.809,00
Puskesmas Talawi	1100.0101.00439.3	413.370.344,00	413.370.255,00
<b>Jumlah</b>		<b>650.047.260,00</b>	<b>617.838.004,00</b>

Rekening kas JKN Puskesmas pada Bank Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 188.45/306/WAKO-SWL/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/311/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022.

#### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya

	<b><u>Tahun 2022 (Rp)</u></b>	<b><u>Tahun 2021 (Rp)</u></b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>88.191.383,00</b>	<b>115.659.557,00</b>

Kas Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.191.383,00 merupakan kas yang berada pada 2 (dua) OPD yakni sebesar Rp66.383,00 pada Dinas Pendidikan dan sebesar Rp.88.125.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

Nilai sebesar Rp66.383,00 pada Dinas Pendidikan merupakan pajak restoran atas belanja Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum disetorkan pada akhir Tahun 2022, sehingga masih berada di tangan bendahara BOS masing-masing sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SD / SMP</b>	<b>PAJAK YANG BELUM DISETOR</b>
1	SDN 05 MUARO KALABAN	60.000,00
2	SDN 27 TALAGO GUNUNG	5.883,00
3	SMPN 7 SAWAHLUNTO	500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.383,00</b>



Sementara untuk nilai sebesar Rp.82.125.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup merupakan uang jaminan atas sewa rusunawa pada Bank Nagari atas nama UPTD Rusunawa nomor rekening 1100.0101.00445.9.

Kas lainnya tersebut bukan bagian dari SiLPA, dan tidak dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah, hanya sebagai jaminan atas sewa rusunawa dan pajak restoran BOS yang akan disetorkan pada tahun 2023.

#### 5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Piutang Pajak Daerah	2.160.600.380,00	2.377.501.971,00

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.160.600.380,00, merupakan piutang pajak daerah akibat penambahan piutang pajak daerah tahun anggaran 2022 kecuali piutang BPHTB. Piutang pajak daerah tersebut antara lain: Piutang Pajak Hotel sebesar Rp34.698.709,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp11.640.587,00, Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.900.800,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp312.921.369,00, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.451.808.565,00, dan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp347.630.350,00. Piutang Pajak Daerah ini berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 sebesar Rp Rp1.451.808.565,00 berasal dari saldo piutang awal PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp1.741.643.637,00 ditambah piutang PBB-P2 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.007.185,00, kemudian dikurangkan dengan pelunasan PBB-P2 Tahun 2014 sampai dengan 2021 sebesar Rp64.170.499,00 dan penghapusan piutang PBB-P2 Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp375.671.758,00.

Sementara Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp347.630.350,00 berasal dari saldo awal piutang pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp270.963.000,00 ditambah piutang pajak hiburan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.667.350,00.

Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Sawahlunto yang telah kedaluwarsa dari Tahun 1994 sampai dengan 2013 pada Tahun 2022 sebesar Rp375.671.758,00 dituangkan dalam Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor:188.45/316/WAKO-SWL/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Uraian	Penghapusan (Rp.)
1	Piutang PBB-P2 Tahun 1994	533.505,00
2	Piutang PBB-P2 Tahun 1995	327.708,00
3	Piutang PBB-P2 Tahun 1996	6.024.901,00
4	Piutang PBB-P2 Tahun 1997	16.140.770,00
5	Piutang PBB-P2 Tahun 1998	15.686.031,00
6	Piutang PBB-P2 Tahun 1999	20.590.637,00
7	Piutang PBB-P2 Tahun 2000	47.479.178,00
8	Piutang PBB-P2 Tahun 2001	25.536.130,00
9	Piutang PBB-P2 Tahun 2002	6.236.478,00
10	Piutang PBB-P2 Tahun 2003	3.557.138,00
11	Piutang PBB-P2 Tahun 2004	7.305.046,00
12	Piutang PBB-P2 Tahun 2005	2.261.176,00
13	Piutang PBB-P2 Tahun 2006	3.222.377,00
14	Piutang PBB-P2 Tahun 2007	29.807.604,00
15	Piutang PBB-P2 Tahun 2008	30.592.378,00
16	Piutang PBB-P2 Tahun 2009	47.391.046,00
17	Piutang PBB-P2 Tahun 2010	36.552.005,00
18	Piutang PBB-P2 Tahun 2011	48.853.826,00
19	Piutang PBB-P2 Tahun 2012	3.009.706,00
20	Piutang PBB-P2 Tahun 2013	24.564.118,00
	<b>Jumlah</b>	<b>375.671.758,00</b>

Adapun mutasi piutang pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.28**  
**Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang 2022
	<b>Piutang Pajak Daerah</b>				
1	Piutang Pajak Hotel	43.497.878,00	34.698.709,00	43.497.878,00	34.698.709,00
2	Piutang Pajak Restoran	17.262.221,00	11.640.587,00	17.262.221,00	11.640.587,00
3	Piutang Pajak Reklame	2.380.100,00	1.900.800,00	2.380.100,00	1.900.800,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	301.674.743,00	312.921.369,00	301.674.743,00	312.921.369,00
5	Piutang PBB-P2	1.741.643.637,00	150.007.185,00	439.842.257,00	1.451.808.565,00
6	Piutang Pajak Hiburan	270.963.000,00	76.667.350,00	-	347.630.350,00
7	Piutang BPHTB	80.392,00	-	80.392,00	-
	<b>Jumlah Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2.377.501.971,00</b>	<b>587.836.000,00</b>	<b>804.737.591,00</b>	<b>2.160.600.380,00</b>



### 5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Retribusi	3.572.813.424,00	3.760.783.024,00

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.572.813.424,00 tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.330.062.000,00 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.523.521.500,00, yang berarti terjadi penurunan nilai piutang sebesar Rp193.459.500,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran dan penambahan tunggakan retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan.
2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir sebesar Rp.75.500.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan piutang parkir yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga. Jumlah piutang ini sama dengan nilai piutang Tahun 2021.
3. Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas sebesar Rp2.750.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp16.985.624,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp14.245.724,00, yang berarti terjadi kenaikan nilai piutang sebesar Rp2.739.900,00. Hal ini disebabkan adanya lebih besarnya tunggakan dibandingkan dengan pembayaran piutang retribusi sewa rumah dinas yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
5. Piutang Retribusi Rest Area sebesar Rp.60.000.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tidak terjadi pengurangan pada Tahun 2022.
6. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Retribusi Fasilitas UPT Tekstil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.9.905.000,00.
7. Piutang Retribusi IMB merupakan Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp.27.610.800,00.
8. Piutang Sewa Gedung Cinema 4D sebesar Rp.50.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
9. Piutang Bagi Hasil Pemanfaatan BMD dari Hotel Parai Tahun Anggaran 2022 Rp0,00.



Adapun mutasi piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.29**  
**Mutasi Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang 2022
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.523.521.500,00	114.589.000,00	308.048.500,00	3.330.062.000,00
2	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00	-	-	75.500.000,00
3	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00
4	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	14.245.724,00	4.388.400,00	1.648.500,00	16.985.624,00
5	Piutang Retribusi Gedung (Rest Area)	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	9.905.000,00
7	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00	-	-	27.610.800,00
8	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
9	Piutang Bagi Hasil Hotel Parai	82.500.000,00	-	82.500.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.843.283.024,00</b>	<b>121.727.400,00</b>	<b>392.197.000,00</b>	<b>3.572.813.424,00</b>

#### 5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	727.841,00	0,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp727.841,00 merupakan remunerasi yang diberikan oleh Bank Indonesia atas Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-46/PK/PK.2/2023 Perihal : Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2023.

#### 5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang yang timbul dari piutang ganti rugi atas kekayaan daerah, piutang bunga dan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diterima di kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Lainnya	1.927.397.913,00	1.146.089.152,00



Nilai Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.927.397.913,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.146.089.152,00 yang berarti bahwa terdapat penambahan piutang lainnya sebesar Rp781.308.761,00 (Rp1.927.397.913,00 – Rp1.146.089.152,00) berupa piutang pelayanan kesehatan RSUD, antara lain piutang JPKM, BPJS/JKN, PLN Solok, BPJS bulan Desember 2022, dan Klaim Pending BPJS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.30**  
**Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2022**

No.	Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang 2022
<b>Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD</b>					-
1	JPKM	61.177.069,00	-	-	61.177.069,00
2	BPJS/JKN	814.128.900,00	-	814.128.900,00	-
3	PLN Solok	-	7.448.844,000	-	7.448.844,00
4	BPJS Desember 2022	-	1.600.335.200,00	-	1.600.335.200,00
5	Klaim Pending BPJS	-	258.436.800,00	-	258.436.800,00
6	Ambulance BPJS	14.791.750,00	-	14.791.750,00	-
7	Pens. PT.BA	173.491.433,00	-	173.491.433,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.063.589.152,00</b>	<b>1.866.220.844,00</b>	<b>1.002.412.083,00</b>	<b>1.927.397.913,00</b>

Sementara, untuk rekapitulasi Piutang per Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.31**  
**Rekapitulasi Piutang per OPD Tahun 2022**

No.	OPD	Jumlah
1	RSUD	1.927.397.913,00
2	Dinas Perhubungan	75.500.000,00
3	Dinas Koperasi, UKM	3.339.967.000,00
4	Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Satu P	27.610.800,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.290.336.004,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.660.811.717,00</b>

#### 5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Sawahlunto, terhadap piutang pajak daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022, dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp526.079.588,50.



Adapun jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.32**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Pajak Daerah**

No	Uraian	Saldo Awal Piutang 2022	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun )	kurang lancar ( 1-3 tahun )	diragukan ( 3-5 Tahun )	macet (> 5 Tahun )		
			0,50%	25%	50%	100%		
	<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2.160.600.380,00</b>	<b>2.938.336,50</b>	<b>147.675.166,50</b>	<b>97.304.351,50</b>	<b>278.161.734,00</b>	<b>526.079.588,50</b>	<b>1.634.520.791,50</b>
1	Piutang Pajak Hotel	34.698.709,00	173.493,55				173.493,55	34.525.215,46
2	Piutang Pajak Restoran	11.640.587,00	58.202,94				58.202,94	11.582.384,07
3	Piutang Pajak Reklame	1.900.800,00	8.660,50	162.000,00			170.660,50	1.730.139,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	312.921.369,00	1.564.606,85				1.564.606,85	311.356.762,16
5	Piutang PBB	1.451.808.565,00	750.035,93	79.772.416,50	97.304.351,50	278.161.734,00	455.988.537,93	995.820.027,08
6	Piutang Pajak Hiburan	347.630.350,00	383.336,75	67.740.750,00			68.124.086,75	279.506.263,25
7	Piutang BPHTB	-	-				-	

1. Atas saldo awal Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp34.698.709,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp173.493,55 sehingga nilai Piutang Pajak Hotel menjadi Rp34.525.215,46.
2. Atas saldo awal Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp11.640.587,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp58.202,94 sehingga nilai Piutang Pajak Restoran menjadi Rp11.582.384,07.
3. Atas saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp1.900.800,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp170.660,50 sehingga nilai Piutang Pajak Reklame menjadi Rp1.730.139,50.
4. Atas saldo awal Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2022 sebesar Rp312.921.369,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.564.606,85 sehingga nilai Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Rp311.356.726,16.
5. Atas saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 sebesar Rp1.451.808.565,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp455.988.537,93 sehingga nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Rp995.820.027,08.
6. Atas saldo awal Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp347.630.350,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp68.124.086,75 sehingga nilai Piutang Pajak Hibutan menjadi Rp279.506.263,25.



### 5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.443.102.248,00. Penyisihan piutang retribusi daerah tersebut meliputi penyisihan piutang retribusi pasar dan sampah/kebersihan penyisihan retribusi parkir, penyisihan piutang retribusi sewa kendaraan dinas, penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas, penyisihan piutang retribusi gedung (rest area), penyisihan piutang retribusi textile, penyisihan piutang retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung/IMB, dan penyisihan piutang atas retribusi sewa gedung Cinema 4D.

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.33**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Retribusi Daerah**

No	Uraian	Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun )	kurang lancar ( 1-3 tahun )	diragukan ( 3-5 Tahun )	macet (> 5 Tahun )		
			0,50%	25%	50%	100%		
	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>3.572.813.424,00</b>	<b>35.692,00</b>	<b>22.493.256,00</b>	<b>32.043.500,00</b>	<b>3.388.529.800,00</b>	<b>3.443.102.248,00</b>	<b>129.711.176,00</b>
1	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.330.062.000,00	-	593.950,00	6.949.500,00	3.300.702.000,00	3.308.245.450,00	21.816.550,00
2	Piutang Retribusi Parkir	75.500.000,00	-	-	-	75.500.000,00	75.500.000,00	-
3	Piutang Retribusi Sewa Kendaraan	2.750.000,00	13.750,00	-	-	-	13.750,00	2.736.250,00
4	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	16.985.624,00	21.942,00	3.149.306,00	-	-	3.171.248,00	13.814.376,00
5	Piutang Retribusi Gedung ( Rest Area )	60.000.000,00	-	6.250.000,00	12.500.000,00	-	18.750.000,00	41.250.000,00
6	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	-	9.905.000,00	9.905.000,00	-
7	Piutang Retribusi IMB	27.610.800,00	-	-	12.594.000,00	2.422.800,00	15.016.800,00	12.594.000,00
8	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	37.500.000,00
9	Piutang Bagi Hasil Hotel Parai	-	-	-	-	-	-	-

1. Atas saldo awal Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan Tahun 2022 sebesar Rp3.330.062.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.308.245.450,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan menjadi Rp21.816.550,00. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 5.34**  
**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Objek Retribusi Daerah**

No	Blok	Jumlah Tunggakan Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang				
			Lancar (0-1 Bln) 0,5%	Kurang Lancar(1-3 Bln) = 25%	Diragukan (4-12 Bln) = 50 %	Macet >12 Bln = 100 %	Jumlah Penyisihan
	<b>PASAR SAWAHLUNTO</b>						
1	C LANTAI I	692.067.000	-	443.000	2.225.000	672.667.000	675.335.000
2	C LANTAI II	923.964.000	-	97.500	1.503.000	920.568.000	922.168.500
3	B LANTAI I	611.887.000	-	-	918.000	610.969.000	611.887.000
4	B LANTAI II	247.866.000	-	-	-	247.866.000	247.866.000
5	D KULINER	127.530.000	-	-	-	127.530.000	127.530.000
6	AA LANTAI I	47.599.000	-	26.500	98.000	47.297.000	47.421.500
7	AA LANTAI II	32.475.000	-	19.000	-	32.399.000	32.418.000
8	A LANTAI I	56.138.000	-	-	371.000	55.396.000	55.767.000
9	B LANTAI I	101.501.000	-	-	318.000	100.865.000	101.183.000
10	B LANTAI II	82.082.500	-	-	608.000	80.866.500	81.474.500
11	BLOK G	12.250.000	-	-	190.000	11.870.000	12.060.000
12	BAGONJONG LT I	146.516.000	-	7.950	556.500	144.714.000	145.278.450
13	BAGONJONG LT II	134.470.000	-	-	-	134.470.000	134.470.000
14	PERHUBUNGAN	42.312.000	-	-	-	42.312.000	42.312.000
	<b>PASAR SAPAN</b>						-
15	BLOK A	17.706.000	-	-	-	17.706.000	17.706.000
16	BLOK B LANTAI I	13.937.500	-	-	-	13.937.500	13.937.500
17	BLOK B LANTAI II	4.228.000	-	-	-	4.228.000	4.228.000
18	BLOK C	8.406.000	-	-	162.000	8.082.000	8.244.000
19	BLOK D	21.737.000	-	-	-	21.737.000	21.737.000
20	BLOK E	5.390.000	-	-	-	5.222.000	5.222.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.330.062.000</b>	<b>-</b>	<b>593.950</b>	<b>6.949.500</b>	<b>3.300.702.000</b>	<b>3.308.245.450</b>

- Atas saldo awal Piutang Retribusi Parkir Tahun 2022 sebesar Rp75.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp75.000.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp0,00 karena semua nilai nya termasuk kategori macet.
- Atas Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas tahun 2022 sebesar Rp2.750.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori lancar sebesar Rp13.750,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp2.736.250,00.
- Atas saldo awal Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2022 sebesar Rp16.985.624,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori kurang lancar sebesar Rp3.171.248,00 sehingga nilai Piutang Sewa Rumah Dinas menjadi Rp13.814.376,00.



5. Atas saldo awal Piutang Retribusi Gedung (Rest Area) Tahun 2022 sebesar Rp.60.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp18.750.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Sewa Gedung (Rest Area) menjadi Rp41.250.000,00.
6. Atas saldo awal Piutang Retribusi Textille Tahun 2022 sebesar Rp.9.905.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori macet sebesar Rp.9.905.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Textille menjadi Rp.0,00.
7. Atas saldo awal Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung/IMB Tahun 2022 sebesar Rp.27.610.800,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp15.016.800,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung IMB menjadi Rp12.594.000,00.
8. Atas saldo awal Piutang Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D Tahun 2022 sebesar Rp.50.000.000,00 terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih kategori kurang lancar sebesar Rp.12.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Retribusi Sewa Gedung Cinema 4D menjadi Rp.37.500.000,00.

#### 5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp70.508.173,22. Penyisihan piutang ini merupakan penyisihan piutang pelayanan pada RSUD Kota Sawahlunto meliputi piutang klaim JPKM, PLN Solok, BPJD bulan Desember 2022, dan Klaim Pending BPJS. Atas saldo awal penyisihan piutang pelayanan kesehatan pada RSUD tahun 2022 sebesar Rp1.927.397.913,00 terdapat penyisihan piutang sebesar Rp70.508.173,22 (kategori lancar Rp9.331.104,22, kategori macet Rp61.177.069,00, sehingga nilai piutang lainnya menjadi Rp1.856.889.739,78.

Adapun rincian penyisihan piutang lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.35**  
**Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun ) 0,50%	kurang lancar ( 1-3 tahun ) 25%	diragukan ( 3-5 Tahun ) 50%	macet (> 5 Tahun ) 100%		
1	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>1.927.397.913,00</b>	<b>9.331.104,22</b>	-	-	<b>61.177.069,00</b>	<b>70.508.173,22</b>	<b>1.856.889.739,78</b>
	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	<b>1.927.397.913,000</b>	<b>9.331.104,22</b>	-	-	<b>61.177.069,00</b>	<b>70.508.173,22</b>	<b>1.856.889.739,78</b>
	- JPKM	61.177.069,00				61.177.069,00	61.177.069,00	-
	- PLN Solok	7.448.844,00	37.244,22				37.244,22	7.411.599,78
	- BPJS Desember 2022	1.600.335.200,00	8.001.676,00				8.001.676,00	1.592.333.524,00
	- Klaim Pending BPJS	258.436.800,00	1.292.184,00				1.292.184,00	257.144.616,00



### 5.3.1.1.15 Beba Dibayar Dimuka

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>151.154.663,83</b>	<b>177.925.663,96</b>

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 sebesar Rp151.154.663,83 merupakan beban STNK yang telah dibayar oleh 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RSUD Kota Sawahlunto. Adapun beban dibayar dimuka Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat dirincian sebagai berikut:

**Tabel 5.36**  
**Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

NO	SKPD	STNK	Saldo
1	Dinas Pendidikan	3.661.233,00	3.661.233,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	22.885.150,00	22.885.150,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.319.146,00	6.319.146,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.374.604,00	8.374.604,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	11.831.825,00	11.831.825,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	2.193.817,00	2.193.817,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.063.370,83	5.063.370,83
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.353.954,00	8.353.954,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.963.983,00	1.963.983,00
10	Dinas Perhubungan	3.688.271,00	3.688.271,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.685.567,00	3.685.567,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.783.958,00	2.783.958,00
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1.618.638,00	1.618.638,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.197.558,00	1.197.558,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.350.383,00	2.350.383,00
16	Sekretariat Daerah	32.913.542,00	32.913.542,00
17	Inspektorat	2.010.442,00	2.010.442,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.561.450,00	2.561.450,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.674.188,00	4.674.188,00
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.982.287,00	1.982.287,00
21	Sekretariat DPRD	10.918.929,00	10.918.929,00
22	Kecamatan Barangin	1.275.104,00	1.275.104,00
23	Kecamatan Lembah Segar	1.807.146,00	1.807.146,00
24	Kecamatan Silungkang	1.100.092,00	1.100.092,00
25	Kecamatan Talawi	1.313.796,00	1.313.796,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.253.767,00	1.253.767,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.372.463,00	3.372.463,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>151.154.663,83</b>	<b>151.154.663,83</b>



### 5.3.1.1.16 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Persediaan</b>	<b>20.184.205.715,40</b>	<b>13.441.424.208,90</b>

Nilai persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.184.205.715,40 tersebut merupakan sisa bahan pakai habis pada 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RSUD per 31 Desember 2022. Adapun rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.37**  
**Rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2021**

No	OPD	Saldo 2022	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	55.547.021,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	3.094.064.777,99	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.684.277.961,24	ATK, Barang Cetak, Obat-obatan, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Pembersih, Bahan Makanan Pokok, Labor
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.425.615.579,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Barang diserahkan kepada Pihak Ketiga, Barang diserahkan kepada Masyarakat
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13.413.500,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Bibit Tanaman
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.076.000,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.622.150,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	291.674.136,17	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Perlengkapan Kolam, Bibit Tanaman
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.548.565,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Persediaan Tinta KTP
10	Dinas Perhubungan	6.273.930,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	151.651.420,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	642.000,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Materai dan Benda Pos



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Saldo 2022	Keterangan
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	34.855.450,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.000,00	Barang Cetak
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	62.493.735,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Pembersih
16	Sekretariat Daerah	51.266.400,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih
17	Inspektorat	13.855.800,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Materai dan Benda Pos
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.040.000,00	ATK, Barang Cetak
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.237.700,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Alat Kebersihan, Karcis
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.035.920,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
21	Sekretariat DPRD	28.600.670,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih
22	Kecamatan Barangin	44.500,00	Bahan Pembersih
23	Kecamatan Lembah Segar	989.000,00	ATK, Barang Cetak, Bahan Pembersih
24	Kecamatan Silungkang	926.500,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetak, Bahan Pembersih
25	Kecamatan Talawi	1.704.000,00	ATK, Barang Cetak, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.237.000,00	ATK
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	267.000,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.020.000,00	Materai dan Benda Pos
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.184.205.715,40</b>	

Sementara, perbandingan Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.38**  
**Rekapitulasi Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Persediaan	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Persediaan ATK	258.872.954,00	264.773.923,60
2	Persediaan Peralatan Komputer	87.110.355,00	62.022.240,00
3	Persediaan Barang Cetak	157.008.369,00	119.577.156,00
4	Persediaan Obat-obatan	6.406.610.180,08	6.793.233.088,30
5	Persediaan Bahan Pemeliharaan	-	892.100,00
6	Persediaan Alat Listrik	53.989.131,00	45.377.550,00
7	Persediaan Alat Rumah Tangga	12.758.400,00	11.268.830,00
8	Persediaan Bahan Pembersih	116.662.095,00	43.983.085,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Persediaan	Saldo 2022	Saldo 2021
9	Persediaan Alat Kebersihan	125.500,00	67.152.220,00
10	Persediaan Materai dan Benda Pos	22.690.000,00	20.388.000,00
11	Persediaan Tinta KTP	141.406.575,00	223.990.150,00
12	Persediaan BBM	-	90.000,00
13	Persediaan Perlengkapan Kolam	875.000,00	620.000,00
14	Persediaan Karcis	42.073.500,00	56.011.250,00
15	Persediaan Bibit Tanaman	2.026.750,00	2.832.500,00
16	Persediaan Terpal	-	5.390.000,00
17	Persediaan Souvenir	-	133.911.000,00
18	Persediaan Bahan Makanan Pokok	20.487.950,00	21.020.776,00
19	Persediaan Labor	364.820.342,32	326.879.026,00
20	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.013.998.000,00	322.389.000,00
21	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	11.337.218.014,00	4.737.261.014,00
22	Persediaan Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	145.472.600,00	182.361.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.184.205.715,40</b>	<b>13.441.424.208,90</b>

Dari 18 (delapan belas) jenis persediaan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, nilai persediaan terbesar adalah Persediaan Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp11.337.218.014,00 berada pada 2 (dua) SKPD sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.39**  
**Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Realisasi Fisik/ Non Fisik	Tahun
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Lumindai	298.924.000,00	2021
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kel. Kubang Sirakuk Utara	298.925.000,00	2021
3	Pembangunan MCK di lapangan futsal Desa Bukik Gadang	198.284.000,00	2021
4	Pembangunan MCK Dusun Luak Mani Desa Kubang Tengah	98.782.000,00	2021
5	Pembangunan MCK Mushalla Istighfar Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	98.776.000,00	2021
6	Pembangunan saluran sanitasi dari MCK Nurul Iman ke Lurah Cibodak	198.423.000,00	2021
7	Pembuatan Riol Pemasangan DAM di Lokasi Mushalla Taqwa Sirapung Desa Kolok Mudik	159.555.500,00	2021
8	Lapangan parkir Learning Center Pisang Kalek Desa Balai Batu Sandaran	74.559.500,00	2021
9	Pagar keliling lokasi Makam Syech Tompok Lunto	99.589.500,00	2021
10	Pemasangan DAM Lapangan Sepak Bola Persitago Desa Talago Gunung	199.479.500,00	2021
11	Pembuatan daam di Musholla Nurul Amal RT 01 RW 01 Kelurahan Durian I	49.745.000,00	2021
12	Pembuatan Kanopi Medan Perdamaian Sijantang Koto	78.711.000,00	2021
13	Pembuatan lapangan parkir Masjid Alfalah Muaro Kalaban	149.601.500,00	2021
14	Pembuatan Mushallah/Surau Kito Dusun Siromai Desa Lumindai	148.324.000,00	2021



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Realisasi Fisik/ Non Fisik	Tahun
15	Pembuatan Pagar dan Lapangan Parkir Desa Kolok Mudik	199.491.000,00	2021
16	Pembuatan pagar Mushollah Nurul Ikhlas Padang Datar Desa Talawi Hilir Kec, Talawi	198.380.000,00	2021
17	Pengecoran Halaman Masjid An-Nur Kayu Gadang Desa Santur	54.934.000,00	2021
18	Pengecoran lantai disekitar Venue Panjat Tebing	116.407.000,00	2021
19	Perbaikan Tempat Wuduk Mushalla Sumpahan	49.684.000,00	2021
20	Rehab mesjid Nurul Ikhlas Tanah lapang kelurahan Tanah Lapang	98.942.000,00	2021
21	Pembangunan gedung Posyandu Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai	174.677.500,00	2021
22	Pembangunan Gedung Serba Guna Luak Badai	109.872.000,00	2021
23	Pembangunan Gedung Serba Guna Sumpahan Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	199.697.000,00	2021
24	Pembangunan kantor KAN talawi	574.545.843,00	2021
25	Pembuatan Gedung Pertemuan (GPM) Desa Salak Kec. Talawi	403.733.000,00	2021
26	Perbaikan Atap Kantor KAN Kenagarian Sijantang Desa Salak Kec. Talawi	199.468.000,00	2021
27	Rehab kantor KAN Kanagarian Kolok	198.344.000,00	2021
28	Renovasi Bangunan dan tempat Berwuduk Mushalla Mujadadiyah di Kampung Teleng Kel. Pasar	2.267.329,00	2020
29	Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda Aur Mulyo	5.138.842,00	2020
30	Pembangunan MCK di Dusun Talao Desa Kumbayau	113.004.000,00	2022
31	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Muaro Kalaban (DAK)	602.700.000,00	2022
32	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Santua (DAK)	482.160.000,00	2022
33	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sikalang (DAK)	602.700.000,00	2022
34	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Silungkang Oso (DAK)	542.700.000,00	2022
35	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Durian II (DAK)	422.160.000,00	2022
36	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Pasar (DAK)	362.160.000,00	2022
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Kelurahan Saringan (DAK)	620.700.000,00	2022
38	Pembuatan Drainase di Samping Mushollah Al Mukhsinin Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban	68.295.000,00	2022
39	Pembuatan Riol dibelakang Masjid Baitul Amal Sapan	88.239.000,00	2022
40	Pemasangan Daam Penahan Tebing dan Pembuatan Pagar Mushalah Dusun Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu	91.544.000,00	2022
41	Pembangunan Fasilitas Penunjang Pemandian Mudiak Lughia	148.291.000,00	2022
42	Pembuatan Daam Penahan Tebing di sekitar Mushala Taqwa Sirapung	107.679.000,00	2022
43	Pembuatan Pagar Lapangan Sepak Bola di Santur	98.177.000,00	2022
44	Rehabilitasi Lapangan dan Perbaikan Pagar Lapangan Futsal Kampung Surian Kel. Durian I	171.871.000,00	2022
45	Rehab Lapangan dan Pembuatan Daam besarta Tribun Lapangan Bola Kaki Desa Salak	288.858.000,00	2022
46	Rehab Lapangan Sepak Bola Desa Tumpuk Tengah	122.509.000,00	2022
47	Pembuatan Lapangan Serba Guna di RT 01 RW 01 Kel. Durian I	98.054.000,00	2022
48	Pengecoran Lapangan Pasar Baru Durian	94.755.000,00	2022
49	Lanjutan Pembangunan Kantor KAN Kolok	197.715.000,00	2022
50	Pembangunan Gedung Posyandu Desa Talawi Mudik	98.310.000,00	2022
51	Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Muaro Kalaban	98.269.000,00	2022
52	Pembangunan TPQ Dusun Karang Anyar Desa Santur	172.835.000,00	2022
53	Pembuatan Lapangan Parkir dan Taman Kantor Kecamatan Talawi	78.300.000,00	2022
54	Perbaikan Pentas Karang Taruna Sapan Kel. Durian II	98.310.000,00	2022
55	Rehab Berat Pustu Salak	197.811.000,00	2022
56	Rehabilitasi Bangunan dan Pembuatan Kanopi Posyandu RT 02 RW 02 Kel. Pasar	78.336.000,00	2022
57	Pembangunan Lapangan Futsal Lumindai	284.994.000,00	2022



No	Uraian	Realisasi Fisik/ Non Fisik	Tahun
58	Pembangunan Ruang Serba Guna Desa Kolok Nan Tuo	157.721.000,00	2022
<b>Jumlah</b>		<b>11.326.418.014,00</b>	
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			
1	Terpal ukuran 5 x 7	10.800.000,00	2022
<b>Jumlah</b>		<b>10.800.000,00</b>	
<b>Total Persediaan Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat</b>		<b>11.337.218.014,00</b>	

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat persediaan yang termasuk kedalam kadaluarsa pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Adapun persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto yang kadaluarsa pada Tahun 2022 meliputi obat-obatan, BMHP, vaksin sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 3 dan Lampiran 4**.

#### 5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>104.370.563.330,81</b>	<b>104.963.129.655,56</b>

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, meliputi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp104.370.563.330,81 mengalami penurunan sebesar Rp592.566.324,75 atau 0,56% dari nilai Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 sebesar Rp.104.963.129.655,56. Nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
Investasi Non Permanen	1.388.988.431,25	973.159.832,50
Investasi Permanen	102.981.574.899,56	103.989.969.823,06
<b>Jumlah</b>	<b>104.370.563.330,81</b>	<b>104.963.129.655,56</b>

##### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.388.988.431,25 berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp11.416.351.899,00 dan Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp2.336.341.234,00. Nilai Dana Bergulir tersebut kemudian disisihkan yaitu Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp11.416.351.899,00 dan Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp947.352.802,75. Adapun rincian Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
<b>Dana Bergulir Melalui BLUD</b>	<b>2.336.341.234,00</b>	<b>469.655.000,00</b>	<b>1.866.686.234,00</b>
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	638.341.234,00	(345.000,00)	638.686.234,00
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.698.000.000,00	470.000.000,00	1.228.000.000,00
<b>Dana Bergulir kepada Masyarakat</b>	<b>11.416.351.899,00</b>	<b>(37.748.710,00)</b>	<b>11.454.100.609,00</b>
- Pinjaman Dana Kemitraan BDC	4.377.517.815,00	(37.748.710,00)	4.415.266.525,00
- Pinjaman Sapi Kakao	72.625.000,00		72.625.000,00
- Pinjaman Pemuda	1.002.690.000,00		1.002.690.000,00
- Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin	2.073.204.250,00		2.073.204.250,00
- Pinjaman Ekspeti Gakin	1.066.072.834,00		1.066.072.834,00
- Pinjaman UTT	2.783.242.000,00		2.783.242.000,00
- Pinjaman Kopinkra	41.000.000,00		41.000.000,00
<b>Total Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2022</b>	<b>13.752.693.133,00</b>	<b>431.906.290,00</b>	<b>13.320.786.843,00</b>
<b>Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD</b>	<b>(947.352.802,75)</b>		
<b>Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat</b>	<b>(11.416.351.899,00)</b>		

#### 5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir kepada Masyarakat

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo awal 2022	11.454.100.609,00	11.523.215.609,00
Pengurangan Dana Kemitraan BDC (setoran tahun 2022)	(37.748.710,00)	(69.115.000,00)
Penambahan Investasi Non Permanen Lainnya periode 2022	-	-
<b>Saldo</b>	<b>11.416.351.899,00</b>	<b>11.454.100.609,00</b>
Penyisihan Investasi Non Permanen tidak dapat ditagih (aging schedule)	(11.416.351.899,00)	(11.454.100.609,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Dasar penilaian dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan maka perlu melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana



bergulir yang diragukan tertagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak tanggal jatuh tempo. *Aging Schedule* yang dipakai dimuat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.40**  
***Aging Schedule* Dana Bergulir**

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	≥1 tahun sampai dengan 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Nilai Dana Bergulir kepada masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.416.351.899,00. Nilai ini mengalami pengurangan sebesar Rp37.748.710,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp.11.454.100.609,00. Pengurangan sebesar Rp.37.748.710,00 merupakan pengembalian Pinjaman Dana Kemitraan BDC yang dapat dilihat pada Lampiran 5.

Masing-masing nilai Investasi Non Permanen Lainnya Kota Sawahlunto sebesar Rp.11.416.351.899,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Pinjaman Dana Kemitraan BDC**

Merupakan salah satu pelaksanaan dari program ekonomi kerakyatan yang dimulai sejak Tahun 2002 dan bekerja sama dengan LPWAL (Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan) Padang sebagai fasilitator dalam penyaluran kredit kemasyarakatan dengan membentuk sebuah lembaga pengembangan dan pendampingan manajemen usaha yakni BDC (*Business Development Centre*). Sebagai lembaga independen BDC dikelola LPWAL sejak Tahun 2002 s.d. 2007. Pada Tahun 2008 BDC diserahkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota.

Jenis pinjaman yang diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha dengan kategori usaha sebagai berikut :

- 1) Bidang usaha dagang dan jasa dengan bunga sebesar 12% pertahun dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun.
- 2) Bidang usaha ternak sapi sesuai dengan Protap Pengelolaan Dana Kemitraan Pengembangan Ternak Sapi Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004, yakni dengan sistem bagi hasil dengan pembagian 80% untuk nasabah dan 20% untuk Pemerintah Kota Sawahlunto dengan jangka waktu maksimal selama 2,5 tahun untuk pengembangan dan I tahun untuk penggemukan.



- 3) *Confinancing* adalah program pinjaman lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Bank Nagari dengan cara:
  - a) *Share* dana sebesar 60% dana Pemda dan 40% dana Bank Nagari.
  - b) Pengelolaan pinjaman dilaksanakan oleh Bank Nagari.
  - c) Plafon pinjaman yang diberikan minimal Rp.50.000.000,00 dan maksimal Rp.200.000.000,00.
  - d) Tingkat suku bunga 12% pertahun menurun
  - e) Jangka waktu selama 2 tahun.

Mulai Tahun 2012 sampai sekarang pengelolaan dana kemitraan BDC masih tetap difokuskan pada penagihan pengembalian pinjaman. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan pendapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2010, bahwa Dana Kemitraan BDC Kota Sawahlunto tidak lagi memfasilitasi pencairan dana pinjaman pada nasabah, mengingat masih belum tuntasnya permasalahan alih kelola Dana Kemitraan BDC dari pihak LPWAL kepada Pemerintah Kota Sawahlunto serta permasalahan nasabah mengenai selisih sisa pinjaman nasabah berdasarkan hasil audit Tahun 2008. Nasabah yang telah diberikan pinjaman Dana Kemitraan BDC sejumlah 879 orang dengan jumlah sebesar Rp.17.827.758.000,00 dengan rincian dimuat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.41**  
**Nasabah Dana Kemitraan BDC yang Telah Difasilitasi Pinjaman**

No.	Tahun	Bidang Jasa		Bidang Sapi		Confinancing		Total	
		PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit
1	2002	53	1.019.000.000,00	-	-	-	-	53	1.019.000.000,00
2	2003	113	1.584.000.000,00	11	171.000.000,00	-	-	124	1.755.000.000,00
3	2004	105	1.742.500.000,00	155	2.941.798.000,00	-	-	260	4.684.298.000,00
4	2005	125	1.858.500.000,00	72	1.980.470.000,00	12	819.000.000,00	209	4.657.970.000,00
5	2006	58	847.500.000,00	79	2.292.000.000,00	5	360.000.000,00	142	3.499.500.000,00
6	2007	47	841.000.000,00	22	743.530.000,00	-	-	69	1.584.530.000,00
7	2008	17	465.000.000,00	4	112.460.000,00	-	-	21	577.460.000,00
8	2009	1	50.000.000,00	-	-	-	-	1	50.000.000,00
<b>Total</b>		<b>518</b>	<b>8.407.500.000,00</b>	<b>343</b>	<b>8.241.258.000,00</b>	<b>17</b>	<b>1.179.000.000,00</b>	<b>879</b>	<b>17.827.758.000,00</b>

Permasalahan yang dihadapi oleh Dana Kemitraan BDC adalah:

- 1) Kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal.
- 2) Keberadaan nasabah yang tidak diketahui lagi yang disebabkan pindah domisili dari Kota Sawahlunto.
- 3) *Reschedule* pinjaman yang telah dilakukan selama ini untuk menetapkan besaran minimum angsuran pinjaman nasabah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



- 4) Jaminan yang menjadi jaminan pinjaman hanya berupa alas hak tanah yang tidak terdaftar di notaris dan adanya nasabah yang tidak mempunyai jaminan sama sekali (hanya rekomendasi dari pengelola pinjaman).
- 5) Adanya selisih sisa pinjaman dana kemitraan BDC hasil audit Akuntan Publik dengan rekening koran bank dan hasil LHP BPK RI Tahun 2008, yang belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penagihan pinjaman Dana Kemitraan BDC adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan audit piutang nasabah Dana Kemitraan BDC oleh Akuntan Publik.
2. Memberikan surat pemberitahuan sisa pinjaman sekaligus surat peringatan untuk mengangsur pinjaman.
3. Telah dilakukan *reschedule* pinjaman untuk menetapkan ulang angsuran yang harus dibayar nasabah.

Program Dana Kemitraan/BDC Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	4.415.266.525,00	4.484.381.525,00
Koreksi di Tahun 2022	-	-
Pengembalian ke kas daerah Tahun 2022	(37.748.710,00)	(69.115.000,00)
<b>Saldo</b>	<b>4.377.517.815,00</b>	<b>4.415.266.525,00</b>
Penyisihan Pinjaman Dana Kemitraan/BDC tidak dapat ditagih ( <i>aging schedule</i> )	(4.377.517.815,00)	(4.415.266.525,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nilai Investasi Dana Kemitraan/BDC Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.377.517.815,00. Nilai ini mengalami pengurangan sebesar Rp37.748.710,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Dana Kemitraan/BDC Tahun 2021 sebesar Rp4.415.266.525,00. Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp37.748.710,00 merupakan pengembalian atas Dana Kemitraan/BDC ke kas daerah.

Perhitungan Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak tertagih Kota Sawahlunto sebesar Rp4.377.517.815,00 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.



**b. Pinjaman bagi Petani Coklat/ Sapi Kakao**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	72.625.000,00	72.625.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2022)	-	-
<b>Saldo</b>	<b>72.625.000,00</b>	<b>72.625.000,00</b>
Penyisihan pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak dapat ditagih (aging schedule)	(72.625.000,00)	(72.625.000,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pada Tahun Anggaran 2022, Pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp72.625.000,00.

**c. Pinjaman Pemuda**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2022)	-	-
<b>Saldo</b>	<b>1.002.690.000,00</b>	<b>1.002.690.000,00</b>
Penyisihan Pinjaman Pemuda tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.002.690.000,00)	(1.002.690.000,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu maksimal 2,5 tahun (30 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2022, atas pinjaman pemuda tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp1.002.690.000,00.

**d. Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	2.073.204.250,00	2.073.204.250,00
Pengurangan Investasi karena koreksi catat tahun 2022	(47.600.000,00)	-



<b>Saldo</b>	<b>2.025.604.250,00</b>	<b>2.073.204.250,00</b>
Penyisihan Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.025.604.250,00)	(2.073.204.250,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat ini diberikan dengan jangka waktu pinjaman dua tahun (24 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2022, atas Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp2.025.604.250,00.

**e. Pinjaman Ekspeti Gakin**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2022)	-	-
<b>Saldo</b>	<b>1.066.072.834,00</b>	<b>1.066.072.834,00</b>
Penyisihan Pinjaman Ekspeti Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.066.072.834,00)	(1.066.072.834,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pada Tahun Anggaran 2022, atas Pinjaman Ekspeti Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp1.066.072.834,00.

**f. Pinjaman Usaha Tani Terpadu (UTT)**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	2.783.242.000,00	2.783.242.000,00
Penambahan Investasi karena koreksi catat tahun 2022	4.330.000,00	-
<b>Saldo</b>	<b>2.787.572.000,00</b>	<b>2.783.242.000,00</b>
Penyisihan Pinjaman UTT tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.787.572.000,00)	(2.783.242.000,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Mekanisme pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Pengembangan Ternak diatur dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/149/WAKO-SWL/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Ternak Sapi Program UTI Kota Sawahlunto Tahun 2010.

Pada Tahun Anggaran 2022, atas Pinjaman UTT tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp2.787.572.000,00.

**g. Pinjaman Koperasi Pengrajin Rakyat (Kopinkra)**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	41.000.000,00	41.000.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2022)	-	-
<b>Saldo</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>
Penyisihan Pinjaman Kopinkra tidak dapat ditagih (aging schedule)	(41.000.000,00)	(41.000.000,00)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penyaluran modal kerja KOPINKRA dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2006 dan mekanisme pengelolaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan KOPINKRA Nomor: 197.1/29/Huk• SWL/2006 dan Nomor 034/Kop-SIn/Swl-VIII/2006. Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut ditetapkan bahwa pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu lima tahun dengan tingkat suku bunga 6% per tahun.

Pada Tahun Anggaran 2022, atas Pinjaman Kopinkra tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2022 tetap sebesar Rp.41.000.000,00.

**5.3.1.2.1.2 Dana Bergulir Melalui BLUD**

Nilai Dana Bergulir melalui BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.336.341.234,00, yang diperoleh dari adanya pengurangan Saldo awal sebesar Rp1.866.686.234,00 yang disebabkan adanya pengembalian pinjaman Tahun 2001 - 2006 sebesar Rp345.000,00 dan penambahan dana bergulir periode 2019 pada Tahun 2022 sebesar Rp470.000.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:



	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Saldo awal 2022	1.866.686.234,00	1.725.751.175,00
Penambahan Investasi (setoran tahun 2022) (Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001-2006)	(345.000,00)	75.935.059,00
Penambahan Dana Bergulir periode 2022 (Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019)	470.000.000,00	65.000.000,00
<b>Saldo</b>	<b>2.336.341.234,00</b>	<b>1.866.686.234,00</b>
Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih (aging schedule)	(947.352.802,75)	(893.526.401,50)
<b>Nilai realisasi bersih/ saldo akhir</b>	<b>1.388.988.431,25</b>	<b>973.159.832,50</b>

Dana Bergulir Melalui BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 terdiri dari 2 kelompok, yaitu Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006 dan Dana Bergulir Periode Tahun 2019. Untuk Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006 pengelolaannya bukan melalui BLUD, namun karena pencatatan sudah tergabung kedalam kelompok Dana Bergulir, maka pencatatan selanjutnya termasuk kedalam kelompok Dana Bergulir melalui BLUD.

Nilai Dana Bergulir melalui BLUD sebesar Rp2.336.341.234,00 terdiri dari Dana Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2021 – 2006 sebesar Rp638.341.234,00 dan Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019 sebesar Rp1.698.000.000,00.

**a. Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006**

	Tahun 2022 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
<b>Dana Bergulir Melalui BLUD</b>	<b>2.336.341.234,00</b>	<b>469.655.000,00</b>	<b>1.866.686.234,00</b>
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	<b>638.341.234,00</b>	<b>(345.000,00)</b>	<b>638.686.234,00</b>
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.698.000.000,00	470.000.000,00	1.228.000.000,00

Dana Bergulir dibentuk dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2001, dengan modal awal sebesar Rp.647.141.250,00. Pada Tahun 2006 terdapat tambahan modal dari APBD sebesar Rp.150.000.000,00, sehingga jumlah dana yang dikelola menjadi Rp.797.141.250,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 675 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah yang masih memiliki pinjaman adalah sebanyak 332 orang dengan jumlah Rp.562.751.175,00. Pada tahun 2021 ada pengembalian sebesar Rp.615.000,00 dan ada penambahan karena kurang catat bunga investasi dana bergulir sebesar Rp.76.550.059,00, sehingga sisa pinjaman tahun 2021 menjadi Rp638.686.234,00. Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian pinjaman sebesar Rp345.000,00 dari 4 (empat) orang



nasabah antara lain atas nama Bambang Sbroto, Rosnelty, Mardianis, dan Rosna, sehingga sisa pinjaman Tahun 2022 menjadi Rp638.341.234,00.

Kendala yang dihadapi dalam penagihan piutang dana bergulir adalah:

- Pinjaman di bawah Rp.2.500.000,00 tidak memakai jaminan, sedangkan di atas Rp.2.500.000,00 memakai jaminan berupa BPKB.
- Terdapat selisih sisa pinjaman dana bergulir sebanyak 104 nasabah sebesar Rp.40.158.152,00 dengan asumsi kelebihan bayar nasabah karena bukti penyetoran tidak mencantumkan nama nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah dana bergulir tidak memiliki dokumen pendukung yang cukup seperti SPH dan bukti setoran sudah tidak ada.

**b. Dana Bergulir Periode Tahun 2019**

	Tahun 2022 (Rp.)	Kurang/Tambah (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
<b>Dana Bergulir Melalui BLUD</b>	<b>2.336.341.234,00</b>	<b>469.655.000,00</b>	<b>1.866.686.234,00</b>
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	638.341.234,00	(345.000,00)	638.686.234,00
- <b>Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019</b>	<b>1.698.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>1.228.000.000,00</b>

Sejak Tahun 2019 Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan OPD Perindakopnaker sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Tujuan utama adanya Dana Bergulir ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin penyaluran pinjaman dana bergulir agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018. Dimana pada tahun 2019 ada Perubahan Atas Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis mengenai Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 4 September 2019.

Sampai tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp1.698.000.000,00**.



Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021, Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp.1.228.000.000,00** yang mana pencairannya dilakukan 6 (enam) tahap yaitu:

1. Melalui SP2D Nomor : LS 05211/BTL/SP2D/SWL-2019 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.411.000.000,00
2. Melalui SP2D Nomor : LS 0592/B.TL/SP2D/SWL-2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp384.000.000,00
3. Melalui SP2D Nomor : LS 1735/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 30 Julul 2020 sebesar Rp103.000.000,00
4. Melalui SP2D Nomor : LS 3605/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp157.000.000,00
5. Melalui SP2D Nomor : LS 3716/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp108.000.000,00
6. Melalui SP2D Nomor : LS 1712/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.65.000.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp470.000.000,00** melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/09/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 38 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp185.000.000,00 Tanggal 29 September 2022.
2. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/5/LS/5/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 40 untuk 5 orang peminjam atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp195.000.000,00 tanggal 10 November 2022.
3. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/08/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 37 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2022.

#### **5.3.1.2.1.3 Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat**

Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.416.351.899,00. Penyisihan ini dilakukan terhadap seluruh saldo Dana Bergulir kepada Masyarakat karena sudah termasuk kedalam kategori macet.



#### 5.3.1.2.1.4 Penyisihan Dana Bergulir Melalui BLUD

Penyisihan Dana Bergulir melalui BLUD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp947.352.802,75. Penyisihan ini dilakukan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2001 sampai dengan 2006 sebesar Rp638.341.234,00 dan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2019 sebesar Rp309.011.568,75.

#### 5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
Investasi Permanen	102.981.574.899,56	103.989.969.823,06

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.981.574.899,56 berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp2.000.000.000,00, terdapat pengurangan karena adanya koreksi catat pada PDAM tahun 2022 sebesar Rp577.151.148,00 dan pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto (PT. WWS) sebesar Rp2.431.243.775,50. Hal ini tentunya mengakibatkan saldo Investasi Permanen Kota Sawahlunto Tahun 2022 menjadi Rp102.981.574.899,56. Adapun rincian Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.42**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022**

URAIAN	SALDO 31 DES 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2022
PDAM	9.816.705.746,00		577.151.148,00	9.239.554.598,00
PT WWS	8.445.594.015,55		2.431.243.775,50	6.014.350.240,05
PT BSM	10.593.497,00			10.593.497,00
PT LBS	1.466.076.564,51			1.466.076.564,51
BANK NAGARI	83.601.000.000,00	2.000.000.000,00		85.601.000.000,00
BPR TALAWI	100.000.000,00			100.000.000,00
BPR SILUNGKANG	150.000.000,00			150.000.000,00
BPR PASAR BARU	200.000.000,00			200.000.000,00
BPR KUBANG	200.000.000,00			200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>103.989.969.823,06</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>3.008.394.923,50</b>	<b>102.981.574.899,56</b>

Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Investasi dalam Saham (Penyertaan Modal pada PDAM)**



Penyertaan Modal Kota Sawahlunto kepada PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PDAM per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.239.554.598,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo neraca awal 2022	Rp	9.816.705.746,00
Penambahan investasi Tahun 2022	Rp	-
Penambahan karena laba	Rp	-
Pengurangan karena kerugian tahun 2022	Rp	(577.151.148,00)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>9.239.554.598,00</b>

**b. Penyertaan pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)**

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada PT. WWS sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 20 April 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Wahana Wisata Sawahlunto. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. WWS adalah 100%. Adapun besar penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. PDAM per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.718.336.718,99 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2022	Rp	8.445.594.015,55
Pengurangan investasi karena rugi Tahun 2022	Rp	(2.431.243.775,50)
<b>Saldo akhir Tahun 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>6.014.350.240,05</b>

**c. Investasi Saham Bumi Sawahlunto Mandiri (PT. BSM)**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bumi Sawahlunto Mandiri, maka dilakukan penyertaan modal kepada Bumi Sawahlunto Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. BSM adalah 100%. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto terus mengalami penurunan akibat belum beroperasinya perusahaan daerah ini, sedangkan biaya operasional perusahaan tetap dikeluarkan yang mengakibatkan saldo akhir penyertaan modal tahun anggaran 2022 berjumlah Rp.10.593.497,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2022	Rp	10.593.497,00
Pengurangan karena rugi Tahun 2022	Rp	(0,00)
<b>Saldo akhir 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>10.593.497,00</b>



**d. Investasi dalam Saham pada PT Lembu Betina Subur (LBS)**

Penyertaan modal kepada PT. LBS oleh Pemerintah Kota Sawahlunto didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 200 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri PT. LBS. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT. LBS adalah sebesar 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2022	Rp	1.466.076.564,51
Pengurangan karena rugi Tahun 2022	Rp	(0,00)
<b>Saldo akhir 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>10.593.497,00</b>

PT. LBS tidak beroperasi optimal sejak Tahun 2011. Kondisi ternak sapi tidak berkembang dengan baik, karena kekurangan asupan makanan, sehingga banyak ternak yang mati dan sakit, dan akhirnya banyak yang dijual paksa. Selama Tahun 2015, jumlah sapi yang mati berjumlah enam ekor dan dijual paksa empat ekor. Sementara Tahun 2016, jumlah sapi yang mati berjumlah satu ekor dan dijual paksa tiga ekor.

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Januari 2015 mengganti direksi dari Roni Kristanto,SE kepada Hilmed, S.Pt, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Oleh karena jumlah ternak yang dibiakkan sedikit, Direksi berupaya untuk meningkatkan populasi ternak. Untuk itu, Direksi melakukan peminjaman dana kepada pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak lain. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja pembelian sapi baru sebanyak 13 ekor pada Tahun 2015.

Dalam perjalanannya, usaha ini tidak memberikan dampak yang menggembirakan terhadap perseroan, akhirnya Direksi memutuskan menjual sapi-sapi yang dibeli dan mengembalikan seluruh pinjaman pada Tahun 2015 dan 2016. Di samping itu, sapi-sapi lain juga dijual untuk menutup biaya operasional dan jual paksa karena sakit. Setelah berkonsultasi dengan Komisaris Perseroan dan Pemerintah Kota Sawahlunto, Direksi berkesimpulan bahwa usaha pembibitan sapi yang dijalankan perseroan dipandang tidak layak dan sulit untuk dilanjutkan. Mengingat kemungkinan perseroan sulit untuk dilanjutkan, Direksi tidak membuat program atau rencana kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kegiatan operasi telah dihentikan sejak bulan Juli 2016.

Atas perhitungan investasi pada PT LBS, telah didukung dengan laporan keuangan PT.LBS Tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Hasil audit tersebut, Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dikarenakan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT Lembu Betina Subur tanggal 31



Desember 2016. PT LBS mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp.6.147.944.119,00 atau 87,83% dari jumlah modal disetor.

Pada tanggal 5 Februari 2018 dilaksanakan RUPS-LB PT.LBS dan dilaksanakan konsultasi ke Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahrir dan Rekan. Serta melakukan konsultasi dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associates). Namun terdapat adanya perbedaan pendapat antara Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associate). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian oleh *Economic Development Center* Universitas Andalas tentang Analisis Investasi, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Evaluasi PT LBS dengan hasil bahwa investasi tidak sehat, kesehatan tidak sehat, dan hasil evaluasinya disarankan untuk dibubarkan. Hasil kajian sudah diserahkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto kepada direksi PT. LBS dan saat ini menunggu tindak lanjut dari PT. LBS.

**e. Investasi pada Bank Nagari**

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT. Bank Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2016. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada Bank Nagari adalah sebesar 5%. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto menambah penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Surat dari Direktur Utama Bank Nagari Nomor: SR/127/DIR/PD/11-2022 tanggal 21 November 2022 melalui SP2D LS Nomor: 08.14/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2022	Rp	83.601.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2022	Rp	2.000.000.000,00
<b>Saldo akhir 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>85.601.000.000,00</b>

**f. Investasi Dalam Saham Pada BPR**

Saldo awal investasi Tahun 2022	Rp	650.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2022	Rp	0,00
<b>Saldo akhir 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>650.000.000,00</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada BPR adalah sebagai berikut:

1) BPR Talawi (Kepemilikan saham 5,25%)	Rp 100.000.000,00
2) BPR Gajah Tongga Koto Piliang Silungkang (Kepemilikan saham 3,35%)	Rp 150.000.000,00



- |   |                   |
|---|-------------------|
| 3) BPR Pasar Baru Durian (Kepemilikan saham 20,64%) | Rp 200.000.000,00 |
| 4) BPR Kubang (Kepemilikan saham 33,34%)            | Rp 200.000.000,00 |

Informasi rinci tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

### 5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan kedalam 6 (enam) bidang/golongan yaitu :

1. Aset Tetap Tanah
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan
4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.752.017.921.150,81	Rp1.631.063.755.042,78

Saldo Nilai Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.752.017.921.150,81 dan Rp1.631.063.755.042,78. Terjadi penambahan nilai aset tetap sebesar Rp238.170.611.988,08 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp117.216.445.880,04 sehingga mutasi bersih penambahan saldo nilai aset tetap pada tahun 2022 adalah sebesar Rp120.954.166.108,03 atau sebesar 7,42% .

Dengan rincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.43**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap**

Golongan Aset Tetap	31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Tanah	130.905.851.105,70	1.293.981.000,00	1.015.190.900,00	131.184.641.205,70	0,21%
Peralatan & Mesin	287.713.321.015,71	42.845.381.012,13	19.747850.045,52	310.810.851.982,32	7,43%
Gedung & Bangunan	392.909.599.934,08	72.408.700.006,25	11.290.103.296,61	454.028.196.643,72	13,46%
Jalan, Irigasi & Jaringan	764.019.670.567,95	120.955.289.618,70	60.233.645.346,09	824.741.314.840,56	7,36%
Aset Tetap Lainnya	51.784.205.565,35	510.764.351,00	23.171.571.061,00	29.123.398.855,35	-77,81%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.731.106.853,99	156.496.000,00	1.758.085.230,82	2.129.517.623,17	-75,21%



Golongan Aset Tetap	31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2022	% Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Jumlah	1.631.063.755.042,78	238.170.611.988,08	117.216.445.880,04	1.752.017.921.150,82	6,90%

#### 5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp131.184.641.205,70	Rp130.905.851.105,70

Saldo Aset Tetap Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp131.184.641.205,70 dan Rp130.905.851.105,70. Terjadi penambahan nilai aset tetap Tanah sebesar Rp1.293.981.000,00 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp1.015.190.900,00, sehingga mutasi bersih penambahan nilai aset tetap Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp 278.790.100,00 atau sebesar 0,21%.

Tabel 5.44  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
130.905.851.105,70	1.293.981.000,00	1.015.190.900,00	278.790.100,00	131.184.641.205,70

#### I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.293.981.000,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.45  
Rincian Penambahan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah dari Pihak Ketiga	170.448.000,00
2	Mutasi dari SKPD lain	638.048.000,00
3	Koreksi Pencatatan	196.800.000,00
4	Reklasifikasi	288.685.000,00
	JUMLAH	<b>1.293.981.000,00</b>

1. Penambahan aset tetap Tanah dari hibah pihak ketiga pada PPKD sebesar Rp 170.448.000,00 berasal dari Hibah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talawi berdasarkan Surat Hibah Nomor: /62/KAN-TLW/IV-2022 tanggal 26 April 2022.
2. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp 638.048.000,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.46  
Rincian Mutasi antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesbangpol dan PBD	PPKD	233.800.000,00	BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022
2	PPKD	Kecamatan Talawi	170.448.000,00	BAST No. 134.4/006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
3	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233.800.000,00	BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/2022
JUMLAH			638.048.000,00	

- Penambahan Aset Tetap Tanah karena koreksi sebesar Rp196.800.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik & PBD merupakan hasil tindaklanjut dari review BPK RI terhadap aset yang bernilai Rp 0,00 (nol). Nilai perolehan dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah yang berlokasi di desa Santur, Kecamatan Barangin sesuai dengan Surat Keterangan NJOP nomor: 094/20/BPKAD-ASET/SWL/2022 tanggal 1 Maret 2022.
- Penambahan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi dari KIB D sebesar Rp288.685.000,00 pada Dinas PUPR berupa Pembayaran Biaya Ganti Rugi untuk Ruas Jalan Simpang Kubang Lunto Dusun Polak Datar Kubang Tengah Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp271.578.000,00 dan Ganti Rugi Tanaman pada Ruas Jalan Santur-SMEA Talawi Dan Ruas Jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapur Kota Sawahlunto pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp17.107.000,00

## II. Penjelasan Mutasi Berkurang

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp 1.015.190.900,00 pada tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 5.47  
Rincian Pengurangan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan	377.142.900,00
2	Mutasi ke SKPD lain	638.048.000,00
JUMLAH		1.015.190.900,00

- Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah akibat dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut sebesar Rp377.142.900,00 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, sebagaimana SK Penghapusan Nomor: 188.45/194/WAKO-SWL/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI berupa tanah dan bangunan untuk



pengembangan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Padang dan Pembangunan Workshop Alat Berat.

2. Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antara SKPD tahun 2022 sebesar Rp638.048.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Mutasi dari Badan Kesbangpol BPD ke PPKD sebesar Rp233.800.000,00 dengan BAST No.028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022;
  - b. Mutasi dari PPKD ke Kecamatan Talawi sebesar Rp170.448.000,00 dengan BAST No.134.4/006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022;
  - c. Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp233.800.000,00 dengan BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/2022.

Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa berupaya untuk melaksanakan tertib administrasi tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Sebanyak 211 bidang sudah memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, 27 desa dan 10 kelurahan. Setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk pensertifikatan tanah. Adapun penambahan sertifikat tanah tahun 2022 sebanyak 1 sertifikat.

Tabel. 5.48  
Daftar Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto  
Yang Telah Bersertifikat

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
1	Tanah Kantor Dinas Pendidikan	3.000	1993	Desa Santur	30/12/1993	03.12.02.04.4.00005
2	TK. Pertiwi	260	2002	Kelurahan Durian II	18/12/2002	03.12.02.05.4.00004
3	Tanah Sekolah SDN 19 Santur	3.880	2003	Desa Santur	03/02/2003	03.12.02.03.4.00002
4	Tanah Kantor UPTD SKB	17.360	1996	Desa Talago Gunung	07/09/1996	03.12.02.04.4.00002
5	Tanah Sekolah SDN 2 Sapan	2.220	2003	Kelurahan Durian II	07/02/2003	03.12.02.05.4.00010
6	Tanah Sekolah SMP 2	12.840	1993	Kelurahan Sapan	06/09/1993	03.12.02.07.4.00001
7	Tanah Sekolah SD 12 Sapan	4.130	2003	Kelurahan Durian II	03/02/2003	03.12.02.05.4.00009
8	Gedung Buku/Gudang BPKAD	765	1999	Kelurahan Sapan	31/3/1999	03.12.02.06.4.00003
9	Tanah Sekolah SD 17 Pasar Baru Durian	2.320	2002	Kelurahan Durian I	07/02/2003	03.12.02.06.4.00004
10	Tanah Sekolah SD 11 Kampung Surian	907	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00002
11	Rumah Dinas Guru SD 11 Kampung Surian	640	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00003
12	Tanah Sekolah SD 03 Lubang Panjang	2.280	2003	Kelurahan Lubang Panjang	07/02/2003	03.12.02.07.4.00009



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
13	Rumah Dinas Guru SD 03 Lubang Panjang	202	2003	Kelurahan Lubang Panjang	17/12/2003	03.12.02.07.4.00013
14	Tanah Sekolah SMP 8	6.000	2007	Desa Lumindai	12/02/2007	03.12.02.10.4.00006
15	Tanah sekolah SD 27 Talago Gunung	2.870	2003	Desa Talago Gunung	03/02/2003	03.12.02.04.4.00001
16	Tanah SDN 22 / SD 05 Kolok Mudik	2.800	2003	Desa Kolok Mudik	03/02/2003	03.12.02.02.4.00005
17	Tanah Sekolah SMP 7 SAWAHLUNTO	2.525	1999	Kebun Jati	31/03/1999	03.12.02.10.4.00003
18	Tanah Sekolah SMK 1 SAWAHLUNTO	7.635	1995	Talawi Hilir	28/07/1995	13.12.01.05.4.00002
19	Tanah Bangunan SD 02 TALAWI HILIR	1.945	2002	Desa Talawi Hilir	18/12/2002	03.12.01.05.4.00009
20	Tk. Pertiwi	518	2003	Desa Talawi Hilir	23/09/2003	03.12.01.05.2.00014
21	Tanah Bangunan Sekolah SD 07 TALAWI HILIR	1.790	2002	Desa Talawi Hilir	18/12/2002	03.12.01.05.4.00008
22	Tanah Sekolah SD 09 TALAWI HILIR	3.410	2003	Desa Talawi Hilir	07/02/2003	03.12.01.05.4.00010
23	Tanah Bangunan Kantor UPT TK SD KEC. TALAWI	1.535	1999	Desa Talawi Hilir	31/03/1999	03.12.01.05.4.00006
24	Tanah Sekolah SMP 3 TALAWI	4.480	1990	Desa Talawi Hilir	03/05/1990	03.11.07.02.4.00001
25	Tanah Sekolah SD 05 TIGO TANJUNG	2.145	2003	Desa Batu Tanjung	07/02/2003	03.12.01.04.4.00010
26	Tanah Sekolah SD 18 BATU KUALI	5.090	2003	Desa Batu Tanjung	07/02/2003	03.12.01.04.4.00009
27	Tanah Sekolah SD 04 RANTIH	2.790	2003	Desa Rantih	17/12/2003	03.12.01.11.4.00003
28	Tanah Sekolah SD 06 BUKIT GADANG	1.645	2002	Desa Bukik Gadang	18/12/2002	03.12.01.02.4.00003
29	Tanah Bgn. Rumah guru SD 06 BUKIT GADANG	151	2003	Desa Bukik Gadang	15/11/2003	03.12.01.02.4.00007
30	Tanah Sekolah SD 08 KUMBAYAU	2.690	2003	Desa Kumbayau	07/02/2003	03.12.01.03.4.00003
31	Tanah Kebun Sekolah SMP 5 TALAWI	1.720	2002	Desa Kumbayau	18/12/2002	03.12.01.03.4.00001
32	Tanah Bangunan Sekolah SMP 5 TALAWI	8.020	1996	Desa Kumbayau	21/09/1996	03.12.01.03.4.00002
33	Tanah Sekolah SD 14 KUMBAYAU	2.490	2003	Desa Kumbayau	07/02/2003	03.12.01.03.4.00002
34	Tanah Sekolah SD 11 SIKALANG	2.450	2003	Desa Sikalang	03/02/2003	03.12.01.10.4.00002
35	Tanah Sekolah SD 16 SIKALANG	1.950	2002	Desa Sikalang	18/12/2002	03.12.01.10.4.00001
36	Tanah Bangunan Sekolah SD 12 TALAWI MUDIK	1.400	2002	Desa Talawi Mudik	18/12/2002	03.12.01.01.4.00005
37	Tanah Rumah Dinas SD 12 TALAWI MUDIK	340	2003	Desa Talawi Mudik	15/11/2003	03.12.01.01.4.00006
38	Tanah Bangunan SD 01 TALAWI MUDIK	1.710	2002	Desa Talawi Mudik	18/12/2002	03.12.01.01.4.00004
39	Tanah Sekolah SD 13 SALAK	1.160	2002	Desa Salak	18/12/2002	03.12.01.09.6.00001
40	Tanah Gedung SD 15 KUMANIS ATAS	1.680	2003	Desa Tumpuk Tengah	15/11/2003	03.12.01.06.4.00003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
41	Tanah Bangunan Sekolah Tanah SD 03 TUMPUK TANGAH	2.580	2003	Desa Tumpuk Tengah	17/12/2003	03.12.01.06.4.00005
42	Tanah Bangunan Sekolah SD 19 SIJANTANG KOTO	2.780	2003	Desa Sijantang Koto	07/02/2003	03.12.01.08.4.00001
43	Tanah Sekolah SMP 1	2.910	1995	Kelurahan Aur Mulyo	21/09/1995	03.12.03.03.4.00001
44	Tanah Bangunan Kantor Kepegawaian Daerah SMP 1	348	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.03.03.4.00002
45	Tanah Sekolah SMP 1	800	1995	Mudik Air	21/09/1995	03.12.03.08.4.00001
46	Tanah Sekolah SD 03 AUR TAJUNGKANG	1.000	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.03.03.4.00007
47	Tanah Sekolah SD 07 KUBANG SIRAKUK	2.300	1995	Kubang Sirakuk Bawah	18/01/1995	03.12.03.10.4.00001
48	Tanah Sekolah SMP 4	4.630	1999	Desa Kubang Tengah	31/03/1999	03.12.03.14.4.00003
49	Tanah SD 13 Pasar remeja	1.640	2002	Kelurahan Pasar	18/12/2002	03.12.03.04.4.00002
50	Tanah Bangunan Sekolah SD N 10 TANAH LAPANG	815	2001	Kelurahan Tanah Lapang	20/09/2001	03.12.03.02.4.00002
51	Tanah Sekolah SMP 6 SAWAHLUNTO	5.620	1996	Desa Muaro Kalaban	10/07/1996	03.12.04.01.4.00006
52	Tanah Sekolah SD 09 MUARO KALABAN	514	2001	Desa Muaro Kalaban	20/09/2001	03.12.04.01.4.00008
53	Tanah Kantor Desa Tumpuk Tengah	130	2003	Desa Tumpuk Tengah	15/11/2003	03.12.01.06.4.00001
54	Tanah Kantor Desa Lama Batu Kualii DESA BATU TANJUNG	638	2002	Desa Batu Tanjung	18/12/2002	03.12.01.04.4.00005
55	Tanah Kantor Desa Lama Tigo Tanjung DESA BATU TANJUNG	202	2002	Desa Batu Tanjung	18/12/2002	03.12.01.04.4.00004
56	Tanah Kas Desa (Sawah Asam) DESA BATU TANJUNG	524	2002	Desa Batu Tanjung	18/12/2002	03.12.01.04.4.00007
57	Tanah Eks Ktr Desa Tigo Tanjung	240	2002	Desa Batu Tanjung	18/12/2002	03.12.01.04.4.00008
58	Sebidang Tanah Perumahan DESA BUKIK GADANG	205	2003	Desa Bukik Gadang	15/11/2003	03.12.01.02.4.00006
59	Tanah Lapang DESA BUKIK GADANG	3.150	2003	Desa Bukik Gadang	15/11/2003	03.12.01.02.4.00004
60	Sebidang Tanah Perumahan DESA BUKIK GADANG	1.395	2003	Desa Bukik Gadang	15/11/2003	03.12.01.02.4.00005
61	Sebidang Tanah Perumahan DESA TALAWI HILIR	250	2002	Desa Talawi Hilir	18/12/2002	03.12.01.05.4.00012
62	Tanah Desa DESA RANTIH	238	2003	Desa Rantih	17/12/2003	03.12.01.11.4.00002
63	Tanah Kas desa DESA LUMINDAI	133	2003	Desa Lumindai	15/11/2003	03.12.02.10.4.00004
64	Tanah Desa DESA LUMINDAI	74	2003	Desa Lumindai	15/11/2003	03.12.02.10.4.00005
65	Tanah Desa DESA KOLOK MUDIK	545	2002	Desa Kolok Mudik	18/12/2002	03.12.02.02.4.00001



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
66	Tanah Kantor KELURAHAN LUBANG PANJANG	455	2002	Kelurahan Lubang Panjang	18/12/2002	03.12.02.07.4.00006
67	Tanah Gedung /Veteran KELURAHAN LUBANG PANJANG	323	2003	Kelurahan Lubang Panjang	17/12/2003	03.12.02.07.4.00012
68	Tanah bangunan Kantor KELURAHAN SARINGAN	495	2003	Kebun Jati Kelurahan Saringan	23/09/2003	03.12.02.08.4.00003
69	Tanah Bangunan Kantor KELURAHAN SARINGAN	380	2002	Kelurahan Saringan	18/12/2002	03.12.02.08.4.00001
70	Tanah Bangunan Kantor KELURAHAN DURIAN I	620	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.0001
71	Tanah Ex kel Durian I KELURAHAN DURIAN I	141	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00006
72	Tanah Bangunan Kantor KELURAHAN DURIAN II	1.870	2002	Kelurahan Durian II	18/12/2002	03.12.02.05.4.00005
73	Tanah Bangunan eks Kantor Lurah Sapan KELURAHAN DURIAN II	345	2002	Kelurahan Durian II	18/12/2002	03.12.02.05.4.00006
74	Rumah Dinas Pemda KELURAHAN DURIAN II	838	2003	Sungai Durian	15/11/2003	03.12.02.05.4.00014
75	Tanah Rumah Dinas KANTOR CAMAT BARANGIN	238	2002	Desa Santur	18/12/2002	03.12.02.03.4.00005
76	Tanah Kantor KEL. AIR DINGIN	105	2002	Kelurahan Air Dingin	18/12/2003	03.12.03.01.4.00001
77	Tanah Kantor KEL. TANAH LAPANG	110	2001	Kelurahan Tanah Lapang	29/09/2001	03.12.03.02.4.0001
78	Tanah Eks. Kantor Lurah Sukosari KEL. TANAH LAPANG	135	2001	Tangsi Baru	20/09/2001	03.12.03.02.4.00003
79	Tanah Eks. Ktr.Lurah Pasar KEL. PASAR	350	2001	Kelurahan Pasar	20/09/2001	03.12.03.04.4.00001
80	Tanah Kantor Lurah KEL. PASAR	405	2002	Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	18/12/2002	03.12.03.06.4.00001
81	Tanah Kantor Camat KEL. AUR MULYO	3.265	2003	Kelurahan Aur Mulyo	03/02/2003	03.12.03.03.4.00009
82	Tanah Kantor Camat KTR. CAMAT SILUNGKANG	4.460	1905	Muaro Kalaban	03/02/2003	03.12.04.01.4.00009
83	Sebidang Tanah Perumahan Ex INSPEKTORAT KOTA	1.890	2002	Kelurahan Durian II	18/12/2002	03.12.02.05.4.00007
84	Tanah Bangunan Gedung Permanen PMPKB	2.220	1998	Sapan	30/7/1998	03.12.02.06.4.00002
85	Tanah KECAPIL SOSNAKER	2.140	2003	Kelurahan Durian II	07/02/2003	03.12.02.05.4.00011
86	Tanah LBK KECAPIL SOSNAKER	1.605	2001	Kelurahan Durian II	20/9/2001	03.12.02.05.4.00001
87	Tanah Rmh Dns Wk.Ketua DPRD SEKRETARIAT DPRD	635	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.03.03.4.00006
88	Tanah Rmh Dns Ketua DPRD SEKRETARIAT DPRD	697	2002	Kelurahan Lubang Panjang	18/12/2002	03.12.02.07.4.00007



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
89	Tanah BADAN PB DAN KESBANGPOL	217	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.03.03.4.00003
90	Tanah Mes Pemda di Padang SETDAKO	441	1999	Ulak Karang Padang	21/09/1999	03.01.01.05.4.00009
91	Tanah Perumahan SETDAKO	669	2003	Kelurahan Durian II	15/11/2003	03.12.02.05.4.00013
92	Tanah Perumahan SETDAKO	245	2003	Durian II	15/11/2003	03.12.02.05.4.00098
93	Gedung Dharmawanita SETDAKO	225	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.02.03.03.4.0008
94	Tanah Ktr Lurah Aur Mulyo SETDAKO	350	2001	Kelurahan Aur Mulyo	20/09/2001	03.12.03.03.4.00001
95	Tanah Rumah Dinas Sekda SETDAKO	840	2003	Kelurahan Aur Mulyo	23/09/2003	03.12.03.03.2.00010
96	Tanah Perumahan SETDAKO	840	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00006
97	Tanah Perumahan SETDAKO	1.685	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00008
98	Tanah Perumahan SETDAKO	1.235	2002	Kelurahan Durian I	18/12/2002	03.12.02.06.4.00005
99	Sebidang Tanah Perumahan Dinas PU	5.080	2003	Desa Kolok Mudik	03/02/2003	03.12.02.02.4.00003
100	Tanah di Pasar Remaja (HPL) Dinas Perindagkop	22.300	2000	Kelurahan Pasar	28/03/2000	03.12.03.04.5.00001
101	Tanah Ex. Kantor Pos Dinas Perindagkop	1.150	2009	Pasar Remaja	30/07/2009	03.12.03.04.4.00003
102	Tanah Kosong di Kel. Sapan Dinas Perindagkop	1.500	1988	Kelok Betung	20/04/1988	B 8449898
103	Bangunan Workshop Dinas Perindagkop	380	1997	Talawi Hilir	05/05/1997	03.12.01.05.4.00004
104	Sebidang Tanah Perumahan DIPERTAHUT	14.600	2003	Desa Kolok Mudik	03/02/2003	03.12.02.02.4.00002
105	Tanah Kantor TU/Eks. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa DIPERTAHUT	14.500	2003	Desa Kolok Mudik	03/02/2003	03.12.02.02.4.00004
106	Tanah Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Barangin DIPERTAHUT	5.280	2003	Desa Kolok Nan Tuo	17/12/2003	03.12.02.01.4.00004
107	Tanah Poskeswan/ RRMC DIPERTAHUT	12.660	2003	Desa Kolok Nan Tuo	07/02/2003	03.12.02.01.4.00001
108	Tanah RPH Air Dingin & Rumah Dinas DIPERTAHUT	2.110	2003	Kelurahan Air dingin	07/02/2003	03.12.03.01.4.00002
109	Tanah Bangunan Kantor DINAS KESEHATAN KOTA	720	2002	Kelurahan Aur Mulyo	18/12/2002	03.12.03.03.4.00004
110	Tanah Gudang Farmasi	925	2002	Kelurahan Durian II	18/12/2002	03.12.02.05.4.00003
111	Tanah Bangunan Puskesmas PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	2.500	2003	Kelurahan Durian II	07/02/2003	03.12.02.05.4.00012
112	Tanah Pustu Kolok Mudik	3.640	2003	Desa Kolok Mudik	07/02/2003	03.12.02.02.4.00006
113	Tanah Pustu Lumindai	309	2003	Desa Lumindai	23/09/2003	03.12.02.10.2.0003
114	Tanah Bangunan Pustu Muaro Kalaban	320	2003	Desa Muaro Kalaban	17/12/2003	03.12.04.01.4.00010



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
115	Tanah Puskesmas Talawi	3.450	2003	Desa Talawi Hilir	07/02/2003	03.12.01.05.4.00011
116	Tanah Pustu Bukit Gadang	650	2002	Desa Bukit Gadang	18/12/2002	03.12.01.02.4.00002
117	Polindes Desa Batu Tanjung	450	2002	Desa Batu Tanjung	18/12/2002	03.12.01.04.4.00006
118	Tanah Bangunan Puskesmas Pembantu Air Dingin	183	2002	Kelurahan Air Dingin	18/12/2002	02.12.03.01.4.00002
119	Sebidang Tanah Perumahan	2.923	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00017
120	Sebidang Tanah Perumahan	1.235	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00018
121	Sebidang Tanah Perumahan	3.982	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00019
122	Sebidang Tanah Perumahan	2.147	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00020
123	Sebidang Tanah Perumahan	1.839	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00021
124	Sebidang Tanah Perumahan	1.232	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00022
125	Sebidang Tanah Perumahan	28.338	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00024
126	Sebidang Tanah Perumahan	4.777	2015	Kelurahan Durian II	06/01/2015	03.12.02.05.4.00025
127	Sebidang Tanah Pertanian (Sawah)	3.690	1993	Desa Balai Batu Sandaran	03/11/1993	03.12.02.14.4.00001
128	Sebidang Tanah Pertanian (Sawah)	2.215	1993	Desa Balai Batu Sandaran	03/11/1993	03.12.02.14.4.00002
129	Sebidang Tanah Pertanian	8.360	1994	Desa Tigo Tanjung	26/01/1994	03.12.01.06.4.00001
130	Sebidang Tanah Pertanian	1.085	1996	Talawi Hilir	15/08/1996	03.12.01.05.4.00003
131	Sebidang Tanah Perladangan	12.215	1993	Desa Talago Gunung	03/11/1993	03.12.02.05.4.00001
132	Sebidang Tanah Persawahan	3.790	1993	Desa Silungkang Oso	21/07/1993	03.12.04.03.4.00001
133	Sebidang Tanah Pertanian	620	1996	Talawi Mudik	10/07/1996	03.12.01.01.4.00001
134	Sebidang Tanah Pertanian	1.830	1996	Talawi Mudik	15/08/1996	03.12.01.01.4.00002
135	Sebidang Tanah Perumahan	499	2003	Desa Tumpuk Tengah	15/11/2003	03.12.01.06.4.00004
136	Sebidang Tanah Perkebunan	5.790	2003	Desa Tumpuk Tengah	15/11/2003	03.12.01.06.4.00002
137	Sebidang Tanah Perumahan	245	1986	Kelurahan Sungai Durian	26/03/1986	B 1546729
138	Sebidang Tanah Pertanian	1.250	2003	Desa Kolok Nan Tuo	15/11/2003	03.12.02.01.4.00002
139	Tanah Bangunan Permanen	11.260	2010	Desa Muaro Kalaban	09/06/2010	03.12.04.01.5.00001
140	Sebidang Tanah Pertanian	785	1994	Desa Lunto Barat	28/03/1994	03.12.03.18.4.00001
141	Sebidang Tanah Pertanian	3.435	2003	Desa Kolok Nan Tuo	15/11/2003	03.12.02.01.4.00003
142	Sebidang Tanah Pertanian (Sawah)	1.040	1993	Desa Lumindai	03/11/1993	03.12.02.15.4.00001
143	Sebidang Tanah Pertanian	6.320	1993	Desa Lumindai	27/12/1993	03.12.02.15.4.00002
144	Sebidang Tanah Pertanian	2.045	1993	Desa Lunto Timur	03/11/1993	03.12.03.17.4.00001



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
145	Sebidang Tanah Pertanian	2.880	1993	Desa Muaro Kalaban	22/09/1993	03.12.04.01.4.00005
146	Sebidang Tanah Pertanian	10.610	1993	Desa Kubang Barat	03/11/1993	03.12.03.15.4.00001
147	Sebidang Tanah Pertanian	10.610	1993	Desa Bukit Gadang	27/12/1993	03.12.01.02.4.00001
148	Sebidang Tanah Pertanian	750	1997	Desa Talawi Hilir	01/07/1997	03.12.01.10.4.00005
149	Sebidang Tanah Pertanian	2.012	1995	Desa Kubang Tengah	24/08/1995	03.12.03.14.4.00002
150	Sebidang Tanah Perumahan	1.575	2014	Desa Taratak Banchah	25/08/2014	03.12.04.02.4.00002
151	Sebidang Tanah Perumahan	617	2014	Desa Datar Mansiang	25/08/2014	03.12.01.07.4.00001
152	Sebidang Tanah Perumahan	12.930	2015	Kelurahan Pasar	07/05/2015	03.12.03.04.4.00004
153	Sebidang Tanah	3.819	2014	Desa Santur	25/08/2014	03.12.02.03.4.00012
154	Sebidang Tanah Perumahan	4.701	2014	Desa Santur	25/08/2014	03.12.02.03.4.00011
155	Sebidang Tanah Pertanian	14.290	1993	Desa Taratak Banchah	03/11/1993	03.12.02.02.4.00009
156	Sebidang Tanah Non Pertanian	20.000	2014	Desa Kolok Mudik	11/08/2014	03.12.02.02.4.00009
157	Sebidang Tanah Non Pertanian	600	2017	Desa Batu Tanjung	29/12/2017	03.12.01.04.4.00015
158	Sebidang Tanah Non Pertanian	5.660	2018	Desa Muaro Kalaban	19/03/2018	03.12.04.01.4.00017
159	Sebidang Tanah Non Pertanian	386	2017	Desa Tumpuk Tengah	29/12/2017	03.12.01.06.4.00006
160	Sebidang Tanah Non Pertanian	4.967	2018	Kelurahan Durian II	09/01/2018	03.12.02.05.4.00023
161	Sebidang Tanah Non Pertanian	4.415	2018	Desa Muaro Kalaban	09/01/2018	03.12.04.01.4.00009
162	Sebidang Tanah Non Pertanian	3.260	2017	Desa Sijantang Koto	29/12/2017	03.12.01.04.4.00002
163	Sebidang Tanah Non Pertanian	1.471	2017	Desa Kolok Mudik	29/12/2017	03.12.02.02.4.00010
164	Sebidang Tanah Non Pertanian	3.527	2018	Kelurahan Lubang Panjang	09/01/2018	03.12.02.02.4.00014
165	Sebidang Tanah Non Pertanian	1.408	2018	Desa Silungkang Duo	31/12/2018	03.12.04.04.4.00002
166	Sebidang Tanah Non Pertanian	638	2018	Desa Silungkang Duo	31/12/2018	03.12.04.04.4.00011
167	Sebidang Tanah Non Pertanian	799	2018	Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	31/12/2018	03.12.03.06.4.00005
168	Sebidang Tanah Non Pertanian	1.290	2018	Kelurahan Lubang Panjang	31/12/2018	03.12.02.07.4.00019
169	Sebidang Tanah Non Pertanian	1.012	2018	Desa Balai Batu Sandaran	31/12/2018	03.12.02.09.4.00003
170	Sebidang Tanah Perumahan	234	2016	Kelurahan Air Dingin	11/08/2016	03.12.03.01.1.00040
171	Sebidang Tanah Perumahan	763	2016	Desa Talawi Hilir	26/09/2016	03.12.01.05.4.00052
172	Tanah Perumahan 6 Bangunan Permanen	2.142	2016	Desa Silungkang Duo	18/10/2016	03.12.04.04.4.00001



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
173	Sebidang Tanah Perumahan	1.829	2016	Desa Kubang Utara Sikabu	26/09/2016	03.12.03.07.4.00002
174	Sebidang Tanah Perumahan	776	2016	Desa Kolok Nan Tuo	18/10/2016	03.12.02.01.4.00006
175	Tanah Perumahan Bangunan Permanen	160	2016	Desa Kubang Sirakuk Utara	18/10/2016	03.12.03.05.4.00001
176	Sebidang Tanah Non Pertanian	68.590	2019	Desa Kolok Mudik	08/08/2019	03.12.02.02.4.00013
177	Sebidang Tanah Kering	250	1994	Kelurahan Lubang Panjang	18/06/1994	03.12.02.10.4.0002
178	Sebidang Tanah Kering	1.880	1994	Pasar Baru Durian	18/06/1994	03.12.02.09.4.00002
179	Sebidang Tanah Non Pertanian	51.100	2019	Kolok Mudik	13/12/2019	03.12.02.02.4.00014
180	Tanah SDN 13 Sungai Durian	1.499	2020	Kel. Durian II	15/04/2020	03.12.02.05.4.00030
181	Tanah SDN 01 Pasar Kubang	1.885	2020	Desa Pasar Kubang	15/04/2020	03.12.03.09.4.00001
182	Tanah Jalan ke SMA 2 Talawi	827	2020	Desa Talawi Hilir	15/04/2020	03.12.01.05.4.00053
183	Tanah SDN 05 Kolok Mudik	3.014	2020	Desa Kolok Mudik	15/04/2020	03.12.02.02.4.00016
184	Tanah Perpustakaan M. Yamin	614	2020	Desa Talawi Mudik	15/04/2020	03.12.01.01.4.00006
185	Tanah Puskesmas Lunto	8.650	2020	Desa Kubang Tengah	15/04/2020	03.12.03.08.4.00004
186	Tanah Jalan ke SMA 3 Kolok	3.220	2020	Desa Kolok Mudik	15/04/2020	03.12.02.02.4.00017
187	Tanah SDN 12 Kubang Tengah	1.971	2019	Kubang Tengah	09/06/2020	03.12.03.08.4.00005
188	Tanah SDN 11 Muaro Kalaban	1.164	2020	Muaro Kalaban	15/06/2020	03.12.04.01.4.00019
189	Tanah SDN 11 Muaro Kalaban eks SDN 09	973	2020	Muaro Kalaban	15/06/2020	03.12.04.01.4.00018
190	Tanah DPKAD	2.491	2020	Lubang Panjang	15/10/2020	03.12.02.07.4.00020
191	Sebidang Tanah Non Pertanian	107	2020	Kubang Utara Sikabu	17/11/2020	03.12.03.07.4.00005
192	Sebidang Tanah Non Pertanian	952	2020	Kubang Utara Sikabu	17/11/2020	03.12.03.07.4.00003
193	Sebidang Tanah Non Pertanian	9.439	2020	Kubang Utara Sikabu	19/11/2020	03.12.03.07.4.00006
194	Sebidang Tanah Perumahan	693	2020	Kubang Tengah	08/09/2020	03.12.03.08.4.00006
195	Sebidang Tanah Non Pertanian	4.296	2020	Kubang Utara Sikabu	19/11/2020	03.12.03.07.4.00007
196	Sebidang Tanah Non Pertanian	365	2020	Kubang Utara Sikabu	17/11/2020	03.12.03.07.4.00004
197	Sebidang Tanah Non Pertanian	434	2020	Bukit Gadang	07/09/2020	03.12.01.02.4.00009
198	Sebidang Tanah Non Pertanian	140	2020	Bukit Gadang	07/09/2020	03.12.01.02.4.00010
199	Sebidang Tanah Non Pertanian	19	2020	Bukit Gadang	23/09/2020	03.12.01.02.4.00013
200	Sebidang Tanah Non Pertanian	1.441	2020	Bukit Gadang	07/09/2020	03.12.01.02.4.00011
201	Sebidang Tanah Non Pertanian	213	2020	Bukit Gadang	23/09/2020	03.12.01.02.4.00012



No	Nama dan Jenis Barang	Luas (m2)	Tahun	Alamat	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor
202	Sebidang Tanah Non Pertanian	373	2020	Kolok Nan Tuo	08/09/2020	03.12.02.01.4.00007
203	Sebidang Tanah Non Pertanian	96	2020	Bukit Gadang	07/09/2020	03.12.01.02.4.00008
204	Sebidang Tanah Non Pertanian	2.196	2020	Talawi Mudik	28/07/2020	03.12.01.01.4.00007
205	Sebidang Tanah Non Pertanian	48.370	2021	Batu Tanjuang	29/04/2021	03.12.01.04.4.00016
206	Sebidang Tanah Non Pertanian	30.000	2021	Batu Tanjuang	29/04/2021	03.12.01.04.4.00017
207	Sebidang Tanah Non Pertanian	6.450	2021	Tumpuk Tengah	23/08/2021	03.12.01.06.4.00010
208	Sebidang Tanah Non Pertanian	20.880	2021	Aur Mulyo	18/08/2021	03.12.03.03.4.00014
209	Sebidang Tanah Non Pertanian	65	2021	Aur Mulyo	11/10/2021	03.12.03.03.4.00015
210	Sebidang Tanah Non Pertanian	8.063	2022	Kolok Mudik	28/09/2022	03.12.02.02.4.00015
211	Sebidang Tanah Non Pertanian	18.131	2022	Silungkang Oso	26/12/2022	03.12.04.03.4.00005

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 310.810.851.982,32	Rp 287.713.321.015,71

Saldo Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 310.810.851.982,32 dan Rp 287.713.321.015,71. Terjadi penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 42.845.381.012,13 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp 19.747.850.045,52, sehingga mutasi bersih penambahan saldo nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 23.097.530.966,61 atau sebesar 7,43 %.

Tabel 5.49  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
287.713.321.015,71	42.845.381.012,13	19.747.850.045,52	23.097.530.966,61	310.810.851.982,32

### I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 42.845.381.012,13 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.50



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Penambahan Aset		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	17.339.104.607,00
2	Belanja Dana BOS	551.587.888,00
3	Belanja BLUD	327.698.406,00
4	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	100.000.000,00
4	Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	8.625.000,00
5	Hibah dari Pihak Ketiga	5.546.847.845,00
6	Mutasi dari SKPD lain	13.099.488.955,98
7	Koreksi Pencatatan	1.068.206.441,00
8	Penambahan dari Reklas	4.803.821.869,15
	JUMLAH	42.845.381.012,13

1. Belanja Modal

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp17.339.104.607,00 tersebar pada SKPD se-Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51  
Rincian Belanja Modal Masing-Masing SKPD

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	15.895.200,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	52.717.300,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.873.600,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	39.100.000,00
5	Inspektorat	7.924.000,00
6	Sekretariat DPRD	897.858.880,00
7	Kecamatan Lembah Segar	176.376.075,00
8	Kecamatan Talawi	20.504.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.553.500,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.005.180,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	94.461.000,00
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.707.056.259,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	232.802.520,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	214.076.000,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	88.184.500,00
16	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.296.743.738,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.526.736.260,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.404.504.350,00
19	Kecamatan Barangin	213.607.950,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	1.653.125.262,00
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	379.765.500,00
22	Dinas Perhubungan	57.397.913,00
23	Badan Kesbangpol & PBD	24.750.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.252.500,00
25	Sekretariat Daerah	744.070.630,00
26	Dinas Pendidikan	5.063.351.965,00
27	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	294.410.525,00
	JUMLAH	17.339.104.607,00

2. Belanja BOS



Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja BOS sebesar Rp551.587.888,00 pada tahun 2022 tersebar merata di sekolah di wilayah Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52  
Rincian Sekolah Penerima Belanja BOS

No	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMPN 1	19.138.000,00
2	SMPN 2	36.565.000,00
3	SMPN 3	28.570.000,00
4	SMPN 5	16.950.000,00
5	SMPN 6	14.934.000,00
6	SMPN 7	3.300.000,00
7	SMPN 9	2.359.200,00
8	SDN 01 Talawi Mudik	9.830.000,00
9	SDN 02 Talawi Hilir	11.200.000,00
10	SDN 03 Tumpuk Tengah	22.616.250,00
11	SDN 06 Bukit Gadang	900.000,00
12	SDN 08 Kumbayau	1.950.000,00
13	SDN 11 Sikalang	1.500.000,00
14	SDN 12 Talawi Mudik	1.900.000,00
15	SDN 13 Salak	19.081.500,00
16	SDN 14 Kumbayau	3.400.000,00
17	SDN 15 Kumanih Ateh	9.405.000,00
18	SDN 16 Sikalang	7.000.000,00
19	SDN 19 Sijantang Koto	16.596.000,00
20	SDN 02 sapan	7.694.000,00
21	SDN 03 Lubang Panjang	18.000.000,00
22	SDN 05 Kolok Mudik	8.065.000,00
23	SDN 06 Lumindai	12.845.000,00
24	SDN 11 Kampung Surian	2.553.000,00
25	SDN 12 Sapan	5.386.000,00
26	SDN 13 Sungai Durian	12.466.500,00
27	SDN 14 Talago Gunung	8.172.500,00
28	SDN 15 Lumindai	14.374.500,00
29	SDN 17 Pasar Baru Durian	9.900.000,00
30	SDN 19 Santur	20.000.000,00
31	SDN 25 Batu Sandaran	3.600.000,00
32	SDN 28 Santur	30.386.250,00
33	SDN 01 Pasar Kubang	1.485.000,00
34	SDN 02 Lunto Timur	32.789.900,00
35	SDN 05 Kubang Sirakuk	7.000.000,00
36	SDN 10 Tanah Lapang	9.200.000,00
37	SDN 13 Pasar Remaja	22.328.000,00
38	SDN 01 Silungkang Tigo	3.150.000,00
39	SDN 04 Silungkang Tigo	15.706.288,00
40	SDN 05 Muaro Kalaban	21.085.000,00
41	SDN 07 Muaro Kalaban	6.993.000,00
42	SDN 09 Silungkang Duo	3.000.000,00
43	SDN 11 Muaro Kalaban	30.200.000,00
44	SDN 12 Silungkang Duo	3.663.000,00
45	SDN 13 Silungkang Oso	14.350.000,00
	JUMLAH	551.587.888,00

### 3. Belanja BLUD

Rincian Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja BLUD sebesar Rp327.698.406,00 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.53  
Rincian Belanja BLUD

Jumlah Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Hardisk Server ITB + Case	1.285.000,00
1	Hardisk Server Jaringan SIMRS	1.100.000,00
2	Vac Stasion	26.247.000,00
1	Printer	2.450.000,00
2	Monitor LED	2.850.000,00
1	Monitor LED	8.151.000,00
1	Mixer	2.057.000,00
1	Blender	742.500,00
2	Kompur Gas	1.265.000,00
2	Magic com	1.430.000,00
1	Rubber Dam Kit	6.435.000,00
1	Speaker	280.000,00
3	Jam Dinding	240.000,00
1	Panci presto	495.000,00
2	Teflon	242.000,00
2	Mesin press	363.000,00
6	Jam Dinding	900.000,00
1	TP Link Switch 16 Port	300.000,00
1	Spectra UTP CATS 6	1.850.000,00
20	Cotton Filter	1.100.000,00
3	Piring 9 Les emas	478.500,00
12	Elemen mesin presto	105.600,00
5	Piring 6 HW	616.000,00
2	Kotak plastik	82.500,00
2,5	Gelas 212	123.750,00
25	Sendok makan	357.500,00
6	Sendok goreng	66.000,00
1	HS W& H RC 90 BC	2.287.488,00
3	Cement Spatulas ECO 1432/Flq 3	59.940,00
1	Dental probe 548.1 Medesy	239.760,00
10	Pincet dental 1024 Medesy	1.498.500,00
10	Sonde SE 555.23 Medesy	1.098.900,00
5	Sonde SE 555.9 Medesy	549.450,00
1	Alumunium dispensers eco-2335-8-R	89.910,00
1	Alumunium dispensers eco-2335-9-v	89.910,00
5	Aggat spatula	49.950,00
2	Lampu Spiritus Glass Dochem	119.880,00
4	Dappen disk	79.920,00
1	Ember besar	65.000,00
1	Kipas angin	350.000,00
1	AC DAIKIN 2 PK ( Standar-RV50CXV14)	8.415.000,00
1	AC DAIKIN 1 PK ( Standar-FTP25AV14)	4.785.000,00
1	AC DAIKIN 1 PK ( Standar-FTP25AV14)	4.785.000,00
1	AC Panasonic 1 PK	5.445.000,00
1	AC Beko 1 PK ( Standar BSFSA090)	4.717.500,00
2	AC DAIKIN 2 PK ( Thailand )	17.649.000,00
1	AC DAIKIN 1 PK ( Standar Malaysia-FTP25AV14)	4.773.000,00
1	Mesin potong Rumput Pro Tanaka	2.255.000,00
1	Mesin potong Rumput Yanaka	2.915.000,00
1	Kursi Kerja ( Kursi Putar )	1.100.000,00
1	Tendon / Penampungan Air Tedmon 1200 Liter	1.650.000,00
2	Tendon / Penampungan Air Tedmon 2200 Liter	6.993.000,00
1	Tendon / Penampungan Air Exxcell 1100 Liter	1.831.500,00
1	Tendon / Penampungan Air Tedmon 2200 Liter	3.829.500,00
1	Televisi LED Toshiba 32 inchi	3.052.500,00
1	Parabola + receiver Nex Parabola	832.500,00
1	Televisi LED Toshiba 43 inchi	2.497.500,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Kulkas SHARP 1 Pintu SJN 162	1.942.500,00
1	Parabola + receiver Nex Parabola	832.500,00
1	Kipas Angin Regency 20 inchi	650.000,00
1	Kipas Angin Sekai 1858	650.000,00
8	Kipas angin Miyako	3.552.000,00
3	Televisi LED Toshiba 32 inchi 525 KP	9.157.500,00
3	Kipas Angin Cosmos Type 16 WF	2.164.500,00
2	Kipas Angin Cosmos Type 16 WF	888.000,00
5	Parabola + receiver Nex Parabola	1.942.500,00
2	Bantal	177.600,00
2	AC DAIKIN 2 PK ( Standar-RV50CXV14)	18.093.000,00
1	Printer EPSON L3210 + Infus	2.299.000,00
2	Printer EPSON L3210 + Infus	4.798.000,00
1	Monitor LG LED 20 MK400H-B 19,5'	1.350.000,00
2	Hardisk Eksternal 2 Terra My Passport	2.140.000,00
1	TP LINK 16 PDRT	1.100.000,00
1	TP LINK 16 PDRT	1.100.000,00
1	PC Speaker Kisonli	150.000,00
1	Pointer Wireless	110.000,00
1	Bulldozer SSD 512 GB	1.250.000,00
1	Scanner HP Scanjet Pro 2600 F1	7.300.000,00
2	Kipas Angin Miyako 20 inchi KDB 201	1.250.000,00
1	Sofa Single Bed SFB 6611	4.551.000,00
2	Gelas Tadah Les	350.000,00
1	Bak Stainless	90.000,00
1	Sendok Kecil	15.000,00
12	Sendal Karet	480.000,00
1	Gantungan Hanger	175.000,00
1	Toples	100.000,00
1	Baki Melamin	45.000,00
3	Tensimeter Digital Omron	2.997.000,00
1	Stetoscope Littman	2.200.000,00
2	Timbangan Badan Jarum GEA	397.999,00
1	Tensimeter Jarum ABN Regal plus Mobile	3.877.999,00
2	Stetoskop Anak ABN	1.130.000,00
4	Tensimeter Jarum ABN DU 320	3.560.000,00
1	Laryngoscope	7.118.000,00
1	HD CCTV 500 GB SEAGATE	815.850,00
1	DVR CCTV HIK VIS 16 Channel	4.750.800,00
2	CAMERA 2 MP HIK VIS	1.110.000,00
2	CCTV Power Supply	765.900,00
1	CCTV Cable Infinity	1.909.200,00
2	TP LINK 5 PORT	300.000,00
1	TP LINK 16 PORT	1.100.000,00
1	Magill Forcep 17 cm, 6 ¼	1.881.600,00
1	Kulkas Obat GEA 2 Pintu	26.640.000,00
1	Kulkas Obat GEA 1 Pintu	15.540.000,00
2	Elitech Tensimeter	20.520.000,00
1	Elitech Nebulizer	5.656.000,00
1	Elitech Timbangan Bayi	4.404.000,00
1	Miller Laryngoscope	4.884.000,00
1	Infinity R6-6-CCTV CABEL	1.720.000,00
	JUMLAH	327.698.406,00

4. Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp100.000.000,00 pada tahun 2022 pada BLUD RSUD adalah Amico Oxygen Instalasi gas oxygen dan Flowmeter 15 ipm tidak



termasuk ZVB Alarm dan Bedhead Minimal 5 titik sesuai dengan SPK No. 11/SP/PPK/RSUD-SWL/2022.

5. Biaya Penunjang Kapitalisasi

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp8.625.000,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.54  
Rincian Biaya Penunjang  
Kapitalisasi Aset Tetap

No	SKPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Inspektorat	SPPD pembelian notebook	1.400.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SPPD pembelian AC, UPS, Printer, Hardisk External dan kendaraan	2.725.000,00
3	Sekretariat Daerah	Ongkos kirim pembelian 2 unit antenna	4.500.000,00
JUMLAH			8.625.000,00

6. Hibah dari Pihak Ketiga

Penambahan Aset Tetap peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dari pihak ketiga sebesar Rp5.546.847.845,00 dengan rincian:

- a. Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.529.196.805,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Hibah sebesar Rp523.906.500,00 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 20 Desember 2022 berupa Ventilator Invasive sebesar Rp507.506.500 dan Oxygen Concentrator seharga Rp16.400.000,00 dan 2) hibah sebesar Rp5.005.290.305,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KN.02.07/I.3/12613/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.55  
Rincian Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Pada RSUD

Jumlah Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Precision Encoder Monitor	66.000.000,00
1	Locker	7.500.000,00
2	Kasur/Spring Bed	33.200.000,00
10	Brancard	66.000.000,00
2	Infusion Pump	83.800.000,00
1	Operating Lamp	24.600.000,00
36	Standar Infus	37.422.000,00
3	Utility Trolley	9.000.000,00
1	Vena Sectie Set	23.300.000,00
1	Mouth Piece	12.023.000,00



1	Plastik Instrument	62.117.000,00
3	Tromol Gaas	2.211.000,00
1	Orthopedy Set	182.314.000,00
2	Mobile Operating Lamp	140.000.000,00
1	Electric Suction Pump	72.900.000,00
1	Emergency Trolley	10.700.000,00
2	Hernia Instrumen Set	118.784.000,00
2	Kursi Zeis	4.500.000,00
1	Laparatomi Set	118.360.000,00
1	Meja Gynokologie	4.400.000,00
1	Meja Operasi Minor	37.600.000,00
1	Instrument Trolley, Stainless Steel	7.500.000,00
1	Sterur Wira	29.205.000,00
2	Elektrocardiograph (ECG) 1 Chanel	43.200.000,00
1	Ultrasonic Nebulizer	16.500.000,00
1	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	504.870.000,00
1	Defibrilator	172.920.000,00
1	Glucometer Complete With Glucostic	1.700.000,00
2	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	93.430.000,00
1	ECG Record Single Channel	26.620.000,00
11	Wheel Chair ( Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	21.780.000,00
1	Patient Monitor	85.800.000,00
1	Electrocardiograph	190.000.000,00
1	Central Suction (Alat Kedokteran Jantung)	4.050.000,00
3	ECG 3 Channel	69.630.000,00
2	Kasur Anti Decubitus	6.000.000,00
20	Patient Strecher	160.380.000,00
1	Continous Suction Unit	4.050.000,00
1	Fotometer	120.428.000,00
1	Hematology Analyzer	100.000.000,00
1	Food Trolley	7.100.000,00
1	Hand Drill	16.912.500,00
1	X-Ray Fluorescence(XRP)	1.941.693.305,00
5	Automatic On/Off Time Switch	6.875.000,00
1	X-Ray Fluorescence Analyzer	105.374.500,00
3	Multi Parameter / Patient Simulator	150.000.000,00
1	Electric Scrw Driver	2.541.000,00
1	Ventilator Invasive	507.506.500,00
1	Oxygen Concentrator	16.400.000,00
	JUMLAH	5.529.196.805,00

- b. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp17.651.040,00 yang berasal dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Perjanjian Hibah BMN Nomor: 482/XI/PH-KOMPUTER DAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.56  
Rincian Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Pada Dinas PMPTSP

Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
PC All In One	1	12.364.385,00
Printer All In One	1	2.919.785,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paket Koneksi Internet	1	1.322.585,00
Modem Wifi Advan CPEROUTER START	1	1.044.285,00
JUMLAH	4	17.651.040,00

7. Mutasi Antar SKPD

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar

Rp 13.099.488.955,98, dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 8.  
Rincian Mutasi antara SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga (Rp)	Keterangan
1	PPKD	Dinas Komunikasi dan Informatika	831.278.511,99	BAST No: 134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
2	PPKD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	41.800.000,00	BAST NO. 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
3	PPKD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	311.292.120,00	BAST No. 134.4/014/BA/BPKAD-ASET/2022
4	PPKD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	269.000.000,00	BAST No 134.4/004/BA/BPKAD-ASET/2022
			9.816.009,00	BAST No 134.4/010/BA/BPKAD-ASET/2022
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	PPKD	269.000.000,00	BAST NO 300/01/BA/SatpolPP-Damkar/SWL-2022
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PPKD	73.000.000,00	BAST No. 028/38/BPKAD-SEKRE/2022
7	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PPKD	41.800.000,00	BAST No. 005/83/Barenlitbangda/SWL/2022
8	Badan Kesbangpol Dan PBD	PPKD	4.144.769.353,00	BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022
9	Sekretariat DPRD	PPKD	39.264.036,00	BAST No: 028/003/BA/Set. DPRD/2022
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PPKD	792.872.936,00	BAST No. 028/65/DPUPR-SWL/2022
11	Sekretariat Daerah	PPKD	801.830.474,99	BAST No. 028/444/BA/UMUM-SWL/2022
12	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rumah Sakit Umum Daerah	1.095.633.350,00	BAST No. 028/2422/ Dinkesdaldukkb-Inv/swl/XII/2022
13	PPKD	Dinas Perhubungan	790.854.936,00	BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
14	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.587.277.229,00	BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/2022

8. Koreksi Pencatatan

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan sebesar Rp1.068.206.441,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.57  
Rincian Koreksi Pencatatan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	59.994.000,00	Koreksi nilai saldo awal
2	Badan Kesbangpol & PBD	1.008.212.441,00	Aset belum tercatat
JUMLAH		1.068.206.441,00	

- Dinas Perhubungan sebesar Rp59.994.000,00 karena Penyesuaian saldo awal neraca tahun 2022.
- Badan Kesbangpol & PBD sebesar Rp1.008.212.441,00 karena belum tercatatnya aset hibah dari BNPB Pusat tahun 2016 sesuai dengan BAST Hibah Nomor PRJ-560/BNPB/9/2016

9. Penambahan dari Reklas

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena penambahan dari reklas sebesar Rp 4.803.821.869,15 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 10.  
Rincian Reklasifikasi

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		<u>28</u>	<u>141.430.268,59</u>	Gedung dan Bangunan
	HT Motorola T 62	5	8.434.769,80	
	Sound System	1	12.933.313,69	
	Horn Speaker Narae No.NSH 5050	6	8.603.465,20	
	Generator HondaET 120000	1	81.768.330,21	
	Papan Informasi	2	5.398.252,67	
	Titik Kumpul	2	4.048.689,50	
	Rambu Dilarang Berenang	8	4.048.689,50	
	Rambu Penunjuk Evakuasi	1	16.194.758,02	
	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup		<u>221</u>	<u>1.036.146.174,00</u>
Lampu Taman di sepanjang jalan muaro kalaban [ penyerahan dari DPU Tahun 2015		1	88.578.000,00	
lampu taman disepanjang jalan pasar remaja		1	60.401.000,00	
Lampu Taman Simpang Tugu Talawi		1	10.700.000,00	
Lampu Tambahan di Museum KA		1	4.885.200,00	
Lampu Tambahan di Sepanjang Jalan BPD		1	19.283.350,00	
Lampu Tali pada Bangunan Rangkiang Batas Kota		1	4.581.250,00	
Lampu Hias Taman		2	94.899.610,00	
Lampu Hias Taman Panorama Kelok Tarok		1	7.497.600,00	
Lampu Jembatan Lapangan Bola Kaki Kelurahan Tanah Lapang		1	14.982.000,00	
Lampu Hias Taman Koramil		1	29.946.400,00	
Lampu hias Taman Kota		1	99.121.000,00	
SURFACE MTD UP LIGHT PAR 38 CFL 18 W MAX WW C/W BRACKET		27	39.454.182,00	
Tiang Lampu Hias Model Antik		4	30.147.330,00	
BURRIAL MTD UP LIGHT PAR LED 10-11		8	33.293.488,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
	W (LAP.SEGITIGA)			
	STREET LIGHTING LED 60 W C/W POLE 9	8	108.016.776,00	
	SURFACE MTD UP LIGHT PAR 38 CFL 18 W MAX WW C/W BRACKET	30	44.364.030,00	
	Flus Ground MTD LED Marker 4W IP 66 DIA 15 [ lampu lapangan segitiga]	125	207.499.875,00	
	FOOD LIGHT GROUND MAUNTED FLOOD MH 150 W C/W BRACKET	1	4.356.698,00	
	STREET LIGHT HPS 250 w REPLASE SOX 90w	1	3.214.785,00	
	Lampu Taman Kota Sawahlunto [cv.fara ds]	1	72.538.000,00	
	Panel listtik Lapseg	4	58.385.600,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		<u>193</u>	<u>2.133.196.224,00</u>	Gedung dan Bangunan
	Concrete Pump (dosing pump)	3	19.980.000	
	Pompa Air	1	24.531.000	
	Pompa Air	1	20.979.000	
	pompa lainnya (dst)	4	15.540.000	
	Agitator	2	36.630.000	
	CCTV - Camera Control Television System	2	13.456.530	
	CCTV - Camera Control Television System	3	21.263.715	
	Papan Visual/Papan Nama	3	45.399.000	
	Penangkal Petir	1	22.462.071	
	A.C. Split	28	399.188.412	
	Televisi	1	2.481.516	
	Loudspeaker	7	15.940.729	
	Loudspeaker	13	7.357.145	
	Loudspeaker	1	6.149.844	
	Tiang Bendera	1	9.062.040	
	Kaca Hias	3	2.164.500	
	Tangki Air	4	6.993.000	
	Alat RT lain-lain (wastafet)	12	21.164.148	
	Alat RT lain-lain(kloset)	17	157.070.106	
	Alat RT lain-lain (paper holder)	17	9.435.000	
	Alat RT lain-lain (shower)	1	1.387.500	
	Alat RT lain-lain (bak cuci piring)	1	1.232.100	
	Pompa Kebakaran/Portable	2	78.247.008	
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	25.982.192	
	Power Amplifier	1	5.346.648	
	Unit Tranceiver FM	1	8.277.714	
	Network Monitoring System	1	26.361.612	
	Genset	1	224.220.000	
	Exhaust Fan	8	67.046.484	
	Controller PH	1	13.875.000	
	Tank	5	213.120.000	
	Fire Extinguisher	9	16.723.260	
	Control Panel	12	425.547.403	
	Flow Meter Water	1	6.460.200	
	External/ Portable Hardisk	1	3.650.346	
	Rak Server	1	6.493.500	
	Acces Point	1	3.131.385	
	Rackmount	1	6.155.838	
	Blower	2	91.020.000	
	Direct-Fired Chemical Reactor	1	43.290.000	
	Obstruction Light	1	1.720.278	
	Jet Washer Toto	16	6.660.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		<u>18</u>	<u>302.908.609,56</u>	Gedung dan Bangunan
	Meja pusat informasi	1	15.840.000,00	
	Meja loket	2	143.628.000,00	
	AC Celling Cassette	2	66.449.445,22	
	AC Split	3	25.500.920,86	
	AC Split	3	22.966.772,79	
	AC Split	1	6.529.302,90	
	AC Split	2	10.665.243,73	
	Exhause Fan	1	617.424,06	
	Lemari Kayu	1	3.052.500,00	
	Meja Kayu	1	2.775.000,00	
	Meja Panjang	1	4.884.000,00	
Sekretariat Daerah		<u>6</u>	<u>40.015.833,00</u>	Gedung dan Bangunan
	Drawer Vanity	1	23.272.260,00	
	Towel Shelf	1	4.238.091,00	
	Tissue Holder	1	873.015,00	
	In Wall Shower	1	1.202.685,00	
	Bath & Shower	1	5.728.932,00	
	Brass Rain Shower Head	1	4.700.850,00	
Dinas Pendidikan			<u>5.994.000,00</u>	Gedung dan Bangunan
	Lemari Panjang		1.998.000,00	
	Rak perlengkapan Anak		3.996.000,00	
Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Survei harga barang KB ke jawa oleh buk ema, buk tutik, dan ricca mayasari		14.463.560,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rumah Sakit Umum Daerah	Ventilator	2	1.129.667.200,00	Aset Lainnya (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain)
	JUMLAH	468	4.803.821.869,15	

## II. Penjelasan Mutasi Aset Berkurang

Penjelasan atas Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 19.747.850.045,52 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.58  
Rincian Pengurangan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan	42.736.700,00
2	Mutasi ke SKPD lain	12.853.288.945,98
3	Hibah ke Pihak Ketiga	612.457.500,00
4	Koreksi Pencatatan	138.132.216,00
5	Pengurangan Karena Reklas	6.101.234.683,54
	JUMLAH	19.747.850.045,52



1. Penghapusan

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin akibat dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut sebesar Rp42.736.700,00 tersebar pada SKPD seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel 5.59  
Rincian Penghapusan

SKPD	Nilai Penghapusan (Rp)	Dasar Penghapusan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.300.000,00	SK Penghapusan nomor : 188.45/246/Wako-Swl/2022
Dinas Pendidikan	15.436.700,00	SK WAKO No. 188.45/139/WAKO-SWL/2022
Jumlah	42.736.700,00	

a. Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin karena penghapusan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp27.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Suzuki Rc 100 tahun 1999 sebesar Rp3.400.000,00
2. Honda/Astrea Tahun 1996 sebesar Rp5.000.000,00
3. Sepeda/C86 Tahun 1996 sebesar Rp2.500.000,00
4. Yamaha/Force 1 Tahun 1996 sebesar Rp5.000.000,00
5. Honda/C 100 Tahun 1993 sebesar Rp3.400.000,00
6. Suzuki RC 100 tahun 1999 sebesar Rp8.000.000,00

b. Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin karena penghapusan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.436.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Layar Film/Proyektor sebesar Rp6.270.000,00
2. Layar Film/Proyektor sebesar Rp6.416.700,00
3. Monitor sebesar Rp2.750.000,00

2. Mutasi Antar SKPD

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.853.288.945,98 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Dari Satpol PP ke PPKD sebesar Rp269.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda 4 nissan terano BA 42 J dengan BAST No. 300/01/BA/SatpolPP-Damkar/SWL-2022
- b. Dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ke PPKD berupa Kendaraan dinas kijang Toyota roda 4 BA 1019 J sebesar Rp73.000.000,00 dengan BAST No.028/38/BPKAD-SEKRE/2022



- c. Dari Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah ke PPKD sebesar Rp41.800.000,00 berupa kendaraan dinas roda 2 kawasaki KLX BA 3001 J, Laptop dan Mesin Kopi dengan BAST No. 005/83/Barenlitbangda/SWL/2022
- d. Dari Badan Kesbangpol Dan PBD ke PPKD sebesar Rp3.898.569.349,00 dengan BAST No. BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022 dengan rincian sebagai berikut
- e. Dari Sekretariat DPRD ke PPKD sebesar Rp39.264.036,00 dengan BAST No: 028/003/BA/Set. DPRD/2022
- f. Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ke PPKD sebesar Rp790.854.936,00 dengan BAST No. 028/65/DPUPR-SWL/2022
- g. Dari Sekretariat Daerah ke PPKD sebesar Rp801.830.474,99 dengan BAST No. 028/444/BA/UMUM-SWL/2022
- h. Dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ke PPKD sebesar Rp1.095.633.350,00 dengan BAST No. 028/2422/ Dinkesdaldukkb-Inv/swl/XII/2022
- i. Dari PPKD sebesar Rp5.843.336.799,99 dengan rincian sebagai berikut:
  - ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp41.800.000,00 dengan BAST No. 134.4/002/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
  - ke Dinas Kominfo sebesar Rp831.278.501,99 dengan BAST No. 134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
  - ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp311.292.120,00 dengan BAST No. 134.4/BA/BPKAD-ASET/2022
  - ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp269.000.000,00 dengan BAST No. 134.4/004/BA/BPKAD-ASET/2022 berupa kendaraan dinas roda 4 Nissan Terano BA 42 J dan laptop sebesar Rp9.816.009,00 dengan BAST No. 134.4/010/BA/BPKAD-ASET/2022
  - ke Dinas Perhubungan sebesar Rp792.872.936,00 dengan BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/2022
  - ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.587.277.233,00 dengan BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/2022.



### 3. Hibah Ke Pihak Ketiga

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp612.457.500,00 pada Dinas Pendidikan karena hibah ke pihak ketiga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Hibah ke Pihak Ketiga Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tabel 5.60

Rincian Pengurangan Karena Hibah Ke Pihak Ketiga

Pihak Penerima Hibah	Nilai Aset yang Dihilangkan (Rp)	Dasar Hibah
SDS Santa Lusia	122.491.500,00	Pengadaan peralatan TIK DAK Sesuai BAST : 030//60/BAST/DAK-SD/Disdik-2/SWL 2022 Tgl 26 Des 2022
SDS Muhamadiyah	122.491.500,00	Pengadaan peralatan TIK DAK Sesuai BAST : 030//61/BAST/DAK-SD/Disdik-2/SWL 2022 Tgl 26 Des 2022
SDT Alam Talago	122.491.500,00	Pengadaan peralatan TIK DAK Sesuai BAST : 030//62/BAST/DAK-SD/Disdik-2/SWL 2022 Tgl 26 Des 2022
SDIT Cahaya Pelangi	122.491.500,00	Pengadaan peralatan TIK DAK Sesuai BAST : 030//63/BAST/DAK-SD/Disdik-2/SWL 2022 Tgl 26 Des 2022
SD Islam AL Mutaqin	122.491.500,00	Pengadaan peralatan TIK DAK Sesuai BAST : 030//63/BAST/DAK-SD/Disdik-2/SWL 2022 Tgl 26 Des 2022
JUMLAH	612.457.500,00	

### 4. Koreksi Pencatatan

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan sebesar Rp138.132.216,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.61

Rincian Koreksi Pencatatan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.912.500,00
2	Sekretariat Daerah	122.750.000,00
3	Badan Kesbangpol & PBD	5.469.716,00
	JUMLAH	138.132.216,00

- Koreksi pencatatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.912.500,00 merupakan koreksi nilai aset 1 unit Laptop ASUS A456U pembelian tahun 2016 karena double catat;
- Koreksi pencatatan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp122.750.000,00 merupakan koreksi nilai aset 1 unit kendaraan dinas BA 41 J karena double catat;
- Koreksi pencatatan pada Badan Kesbangpol & PBD sebesar Rp5.469.716,00 merupakan koreksi nilai aset 1 unit Mobil Rescue Mitsubishi B 9306 TSC .

### 5. Pengurangan karena Reklas

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi sebesar Rp6.101.234.683,54 dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.62  
Rincian Reklasifikasi

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		<u>23</u>	<u>3.400.000,00</u>	
		Kain Gorden	20	2.000.000,00	Ekstrakom
		Stand Mic	1	400.000,00	Ekstrakom
		Microphone	1	1.000.000,00	Ekstrakom
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Stand/Tripod Speaker	1	360.750,00	Ekstrakom
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		<u>86</u>	<u>328.251.976,00</u>	
		Mesin Ketik	1	1.650.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik	1	1.700.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik	1	1.400.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik	1	1.400.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik	2	5.535.000,00	Rusak Berat
		Lemari Besi/Metal	1	1.030.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	650.000,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi	1	1.650.000,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi	1	2.275.000,00	Rusak Berat
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.220.000,00	Rusak Berat
		Alat Sidik Jari	1	7.975.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.284.000,00	Rusak Berat
		A.C Split	1	3.575.000,00	Rusak Berat
		A.C Split	1	4.500.000,00	Rusak Berat
		A.C Split	2	1.333.333,00	Rusak Berat
		Televisi	1	5.770.000,00	Rusak Berat
		Camera Vidio	1	6.875.000,00	Rusak Berat
		Tangga Aluminium	1	750.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	1.505.250,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	3.080.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	4	7.700.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	1	2.117.500,00	Rusak Berat
		Microphone Mic	1	3.850.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Studio Audio Lainnya	1	560.000,00	Rusak Berat
		Digital Video Effect	1	1.570.000,00	Rusak Berat
		Layar Film/Proyektor	1	22.330.000,00	Rusak Berat
		Layar Film/Proyektor	1	6.050.000,00	Rusak Berat
		Telephone (PABX)	1	1.040.000,00	Rusak Berat
		Facsmile	1	2.500.000,00	Rusak Berat
		Facsmile	1	2.162.000,00	Rusak Berat
		Antene SHF Portable	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Screen Pembatas	1	594.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	2	15.840.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	2	15.180.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	2	22.620.700,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	16.000.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	3	19.305.000,00	Rusak Berat
		Laptop	1	15.950.000,00	Rusak Berat
		Laptop	2	28.985.000,00	Rusak Berat
		Laptop	1	10.725.000,00	Rusak Berat
		Monitor	2	2.708.000,00	Rusak Berat
		Monitor	1	971.500,00	Rusak Berat
		Printer	1	4.759.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Printer	1	1.748.000,00	Rusak Berat
		Printer	2	3.200.000,00	Rusak Berat
		Printer	6	8.250.000,00	Rusak Berat
		Printer	2	11.880.000,00	Rusak Berat
		Printer	5	19.250.000,00	Rusak Berat
		Printer	2	1.282.813,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	4	5.925.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	2	3.630.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	2	4.939.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	2	3.498.880,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	2	1.100.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer	1	2.388.000,00	Rusak Berat
4	Inspektorat			<u>6.810.500,00</u>	
		Mesin Pemotong Rumput		2.810.500,00	Rusak Berat
		A.C Split		4.000.000,00	Rusak Berat
5	Sekretariat DPRD		<u>28</u>	<u>45.189.000,00</u>	
		Kabel	25	43.734.000,00	Persediaan
		Ceret Stainless	1	475.000,00	Persediaan
		Ketel Air Panas	1	380.000,00	Persediaan
		Kuali Aluminium	1	600.000,00	Persediaan
6	Kecamatan Silungkang		<u>48</u>	<u>216.143.489,00</u>	
		Pompa Air	1	3.900.000,00	Rusak Berat
		Mini Bus (Mitsubishi/Colt T)	1	41.900.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Standard (14 -16 inci) Olympia	1	520.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Standard (14 -16 inci) Olympia	1	2.724.200,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi( Icon T6)	1	4.950.000,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi(Solution/X601)	1	6.655.000,00	Rusak Berat
		Meja Rapat (Donaty)	3	1.618.994,00	Rusak Berat
		Kursi Putar(Bigstar)	1	505.000,00	Rusak Berat
		Kursi Putar (Donaty)	4	2.118.284,00	Rusak Berat
		Kursi Putar (Chair Man)	2	1.700.554,00	Rusak Berat
		Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1.367.000,00	Rusak Berat
		A.C Window (LG)	1	6.433.000,00	Rusak Berat
		Televisi	1	1.000.000,00	Rusak Berat
		Televisi	1	8.211.667,00	Rusak Berat
		Wireless (Panasonic)	1	5.820.000,00	Rusak Berat
		Alat Rumah Tangga Lainnya ( Trali )	1	2.688.000,00	Rusak Berat
		Microphone/Wireless MIC	1	4.150.000,00	Rusak Berat
		Layar Film/Projector (Infocus)	1	16.900.000,00	Rusak Berat
		Handy Talky (HT)	1	870.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Antena Shf/Parabola	1	7.118.600,00	Rusak Berat
		Genset	1	7.392.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit (Pentium IV)	1	7.537.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit (Milenia/Pentium IV)	1	7.537.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit (GIC/Pentium IV)	1	7.245.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit (Dell)	1	11.310.350,00	Rusak Berat
		Laptop (Aspire)		4.620.000,00	Rusak Berat
		Laptop (Vaio)	1	13.625.000,00	Rusak Berat
		Laptop (Aspire)	1	9.955.000,00	Rusak Berat
		Printer (canon / IX 4000)	1	1.167.000,00	Rusak Berat
		printer (Deskjet /4355)	1	3.991.900,00	Rusak Berat
		Printer (canon / i255)	1	1.167.000,00	Rusak Berat
		Printer (Canon/Pixma 5270)	1	2.134.000,00	Rusak Berat
		Printer (MB 2570)	1	975.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Peralatan Personal Komputer Lainnya (AFC ERSYS)	1	1.980.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer Lainnya (APC-BACK-UPS Pro 550)	1	1.749.440,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	1.668.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer Lainnya (Prolink)	2	1.012.000,00	Rusak Berat
		Tenda	3	9.927.500,00	Rusak Berat
7	Kecamatan Lembah Segar		121	206.373.100,00	
		Lemari Penyimpanan	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Mesin Tik Manual Portable	1	2.750.000,00	Rusak Berat
		Mesin Tik Manual Portable	1	2.090.000,00	Rusak Berat
		Mesin Tik Manual Portable	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Mesin Tik Manual Portable	1	1.975.000,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi	1	4.950.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Kayu	7	4.200.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	3.180.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.500.000,00	Rusak Berat
		Televisi	1	2.500.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	7.355.000,00	Rusak Berat
		Printer	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	4.700.000,00	Rusak Berat
		Reciver	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	2	1.240.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	1	620.000,00	Rusak Berat
		Brangkas	1	1.020.000,00	Rusak Berat
		Papan Pengumuman	1	750.000,00	Rusak Berat
		Meja 1/2 Biro	4	4.190.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	2	3.200.000,00	Rusak Berat
		Kursi Putar	2	1.896.500,00	Rusak Berat
		Mesin Pemetong Rumput	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		AC Split	1	4.200.000,00	Rusak Berat
		AC Split	1	6.892.500,00	Rusak Berat
		Televisi	1	1.600.000,00	Rusak Berat
		Camera Film	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Mesin jahit	1	1.250.000,00	Rusak Berat
		Senapan Angin	2	2.000.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	4.500.000,00	Rusak Berat
		Gergaji Sinsaw	1	1.958.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	1	620.000,00	Rusak Berat
		Lemari kayu	3	2.250.000,00	Rusak Berat
		Lemari kayu	3	2.250.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.750.000,00	Rusak Berat
		Camera Film	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Gergaji Sinsaw	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Reciver	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	750.000,00	Rusak Berat
		Alat Sidik jari	1	14.650.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Kayu	1	2.733.500,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Kayu	1	1.250.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	750.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.000.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Kursi Putar	1	896.500,00	Rusak Berat
		Kursi Putar	2	1.799.600,00	Rusak Berat
		Televisi	1	1.800.000,00	Rusak Berat
		Camera Film	1	3.000.000,00	Rusak Berat
		Dispenser	1	540.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	4.950.000,00	Rusak Berat
		Laptop	1	3.535.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	750.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	4.510.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik manual Portabel(11- 13 inc	1	1.860.000,00	Rusak Berat
		Filing Kabinet Besi	1	1.080.000,00	Rusak Berat
		Brangkas	1	6.350.000,00	Rusak Berat
		Mesin Pemetong Rumput	1	1.772.500,00	Rusak Berat
		Televisi	1	2.150.000,00	Rusak Berat
		Televisi	1	975.000,00	Rusak Berat
		laptop	1	4.000.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	900.000,00	Rusak Berat
		Gergaji cincaw	1	1.958.000,00	Rusak Berat
		MesinKetik Manual Portable 11- 13 inc	1	620.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	750.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	1.000.000,00	Rusak Berat
		Meja kerja besi/Metal	1	5.995.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	1.860.000,00	Rusak Berat
		Televisi	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		PC.Unit	1	4.500.000,00	Rusak Berat
		Laptop	1	6.445.000,00	Rusak Berat
		Laptop	1	8.745.000,00	Rusak Berat
		CPU(peralatan Personal Computer	1	4.500.000,00	Rusak Berat
		CPU(peralatan Personal Computer	1	650.000,00	Rusak Berat
		Monitor	1	1.400.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	670.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	995.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	1.710.500,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Compoter	1	1.710.500,00	Rusak Berat
		Gorden	25	2.475.000,00	Rusak Berat
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		<u>52</u>	<u>230.624.290,00</u>	
		Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.750.000	Rusak Berat
		White Board	6	3.300.000	Rusak Berat
		Meja 1/2 Biro	1	1.150.000	Rusak Berat
		Meja 1/2 Biro	3	2.418.000	Rusak Berat
		Kursi Putar	1	810.000	Rusak Berat
		Kursi Putar	3	2.430.000	Rusak Berat
		Televisi	1	2.250.000	Rusak Berat
		Stabilisator	1	3.492.500	Rusak Berat
		Facsimile	1	4.900.500	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		P.C Unit	1	15.125.000	Rusak Berat
		P.C Unit	1	10.000.000	Rusak Berat
		P.C Unit	1	5.000.000	Rusak Berat
		P.C Unit	2	15.950.000	Rusak Berat
		P.C Unit	2	16.373.500	Rusak Berat
		P.C Unit	1	11.310.350	Rusak Berat
		Lap Top	1	15.977.500	Rusak Berat
		Lap Top	1	14.850.000	Rusak Berat
		Note Book	1	11.099.000	Rusak Berat
		Monitor	2	3.000.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.496.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.200.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	995.500	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.960.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.774.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.422.000	Rusak Berat
		Alat Komunikasi Sosial Lainnya (dst)	1	8.765.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.993.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.357.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.203.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.280.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.870.000	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.970.000	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.790.000	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	2	4.884.000	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.749.440	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	3	7.260.000	Rusak Berat
		Gordyn	1	19.469.000	Rusak Berat
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 BA 111 J	1	84.800.000,00	Rusak Berat
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		81	67.163.650,00	
		Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1446 AA	1	55.000.000,00	Rusak Berat
		Meteran Pengukur Tinggi	3	316.800,00	Ekstrakom
		meteran pengukur tinggi	9	950.400,00	Ekstrakom
		meteran pengukur tinggi	2	211.200,00	Ekstrakom
		Meteran pengukur tinggi	1	105.600,00	Ekstrakom
		Meteran Pengukur Tinggi	2	211.200,00	Ekstrakom
		Kotak Pengaduan	4	1.998.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		ID Card	10	1.443.000,00	Ekstrakom
		Papan Informasi	41	5.688.750,00	Ekstrakom
		Papan Informasi	1	499.500,00	Ekstrakom
		Meteran Pengukur Tinggi	7	739.200,00	Ekstrakom
11	Dinas Pariwisata		<u>11</u>	<u>4.753.421,54</u>	
		Kursi Rapat	10	4.500.000,00	Ekstrakom
		Power Suply 8 Port Hikvision DS-2FA1205-D8	1	253.421,54	Ekstrakom
12	Kecamatan Barangin		<u>48</u>	<u>21.476.495,00</u>	
		Kursi Rapat Futura	45	20.229.750,00	Ekstrakom
		Mic Meja	2	801.745,00	Ekstrakom
		Kursi Putar (2005)	1	445.000,00	Ekstrakom
13	Dinas Pendidikan		<u>925</u>	<u>363.977.973,00</u>	
		Wearles Acces Point ( TP LINK )	7	1.750.000,00	Ekstrakom
		Gorden	45	4.995.000,00	Ekstrakom
		Microfon	2	300.000,00	Ekstrakom
		Termogun	2	1.000.000,00	Ekstrakom
		Speaker multimedia s6-d9	5	615.000,00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	155	42,960,885.00	Ekstrakom
		Meja Siswa	155	56,466,810.00	Ekstrakom
		connector	1	197.500,00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	73	33,700,742.00	Ekstrakom
		Laspeaker cimiso	1	500,000.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Catur	1	300.000,00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Loudspeaker	1	150,000.00	Ekstrakom
		Microphon	1	150,000.00	Ekstrakom
		TRIPOD KAMERA	1	100.000,00	Ekstrakom
		STAND MIC	1	325.000,00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Loudspeker	2	600,000.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Jam Ukur (Meet Lock)	6	1,500,000.00	Ekstrakom
		Bola kaki [B10: 2,00]	2	600,000.00	Ekstrakom
		Bola basket	1	300,000.00	Ekstrakom
		Bola voly	1	300,000.00	Ekstrakom
		Pemukul kasti	2	400,000.00	Ekstrakom
		Bola kasti	1	250,000.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	1	15,696,236.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	32	14,772,928.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Connector	1	197,500.00	Ekstrakom
		bateray laptop dell vostro	1	300,000.00	Ekstrakom
		keyboard laptop dell vostro	1	150,000.00	Ekstrakom
		speaker	3	600,000.00	Ekstrakom
		kipas angin	3	900,000.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	105	48,473,670.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	105	48,473,670.00	Ekstrakom
		Conector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	36	16.619.544,00	Ekstrakom
		Conector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Conector	1	197,500.00	Ekstrakom
		Kursi Siswa	72	33.239.088	Ekstrakom
		Kursi kerja	73	31.959.400	Ekstrakom
14	RSUD		<u>319,5</u>	<u>3.081.071.709,00</u>	
		In+G237:G266cenerator ( Alat Kedokteran Umum Lainnya )	1	191.795.450,00	Rusak Berat
		Incenerator ( Alat Kedokteran Umum Lainnya )	1	264.304.000,00	Rusak Berat
		Precision Encoder Monitor	1	66.000.000,00	Rusak Berat
		Kasur/Spring Bed	2	33.200.000,00	Rusak Berat
		Brancard	10	66.000.000,00	Rusak Berat
		Infusion Pump	2	83.800.000,00	Rusak Berat
		Operating Lamp	1	24.600.000,00	Rusak Berat
		Standar Infus	36	37.422.000,00	Rusak Berat
		Utility Trolley	3	9.000.000,00	Rusak Berat
		Tromol Gaas	3	2.211.000,00	Rusak Berat
		Orthopedy Set	1	182.314.000,00	Rusak Berat
		Mobile Operating Lamp	2	140.000.000,00	Rusak Berat
		Electric Suction Pump	1	72.900.000,00	Rusak Berat
		Emergency Trolley	1	10.700.000,00	Rusak Berat
		Kursi Zeis	2	4.500.000,00	Rusak Berat
		Meja Gynokologie	1	4.400.000,00	Rusak Berat
		Meja Operasi Minor	1	37.600.000,00	Rusak Berat
		Instrument Trolley, Stainless Steel	1	7.500.000,00	Rusak Berat
		Sterur Wira	1	29.205.000,00	Rusak Berat
		Elektrocardiograph (ECG) 1 Chanel	2	43.200.000,00	Rusak Berat
		Ultrasonic Nebulizer	1	16.500.000,00	Rusak Berat
		Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	1	504.870.000,00	Rusak Berat
		Defibrilator	1	172.920.000,00	Rusak Berat
		Glucometer Complete With Glucostic	1	1.700.000,00	Rusak Berat
		Syringe Pump (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2	93.430.000,00	Rusak Berat
		ECG Record Single Channel	1	26.620.000,00	Rusak Berat
		Wheel Chair ( Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	11	21.780.000,00	Rusak Berat
		Patient Monitor	1	85.800.000,00	Rusak Berat
		Electrocardiograph	1	190.000.000,00	Rusak Berat
		Central Suction (Alat Kedokteran Jantung)	1	4.050.000,00	Rusak Berat
		ECG 3 Channel	3	69.630.000,00	Rusak Berat
		Kasur Anti Decubitus	2	6.000.000,00	Rusak Berat
		Patient Strecher	20	160.380.000,00	Rusak Berat
		Continous Suction Unit	1	4.050.000,00	Rusak Berat
		Fotometer	1	120.428.000,00	Rusak Berat
		Hematology Analyzer	1	100.000.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Food Trolley	1	7.100.000,00	Rusak Berat
		Automatic On/Off Time Switch	5	6.875.000,00	Rusak Berat
		Multi Parameter / Patient Simulator	3	150.000.000,00	Rusak Berat
		Electric Scruw Driver	1	2.541.000,00	
		Speaker	1	280.000,00	Ekstrakom
		Jam Dinding	3	240.000,00	Ekstrakom
		Panci presto	1	495.000,00	Ekstrakom
		Teflon	2	242.000,00	Ekstrakom
		Mesin press	2	363.000,00	Ekstrakom
		Jam Dinding	6	900.000,00	Ekstrakom
		dental probe	1	239.760,00	Ekstrakom
		pincet dental	10	1.498.500,00	Ekstrakom
		sonde SE	10	1.098.900,00	Ekstrakom
		sonde SE	5	549.450,00	Ekstrakom
		alumunium dispensers	1	89.910,00	Ekstrakom
		alumunium dispensers	1	89.910,00	Ekstrakom
		Kipas angin	1	350.000,00	Ekstrakom
		Kipas angin	8	3.552.000,00	Ekstrakom
		Kipas angin	2	888.000,00	Ekstrakom
		Parabola + receiver	5	1.942.500,00	Ekstrakom
		PC Speaker	1	150.000,00	Ekstrakom
		Panter Wireless	1	110.000,00	Ekstrakom
		Gantungan Hanger	1	175.000,00	Ekstrakom
		Timbangan Badan Jarum	2	397.999,00	Ekstrakom
		CCTV Power Supply	2	765.900,00	Ekstrakom
		Micro Instrument Set 110-303-Scalpel handle No.3 graduated in cm for blades FIG 10-17 isi 3	3	1.112.220,00	Ekstrakom
		Micro Instrument Set 122-003-IRIS SCISSORS 105MM,CURVED SHARP isi 3	3	1.484.070,00	Ekstrakom
		TP LINK 5 PORT	2	300.000,00	Ekstrakom
		TP Link Switch 16 Port	1	300.000,00	Ekstrakom
		Spectra UTP CATS 6	1	1.850.000,00	Persediaan
		Cotton Filter	20	1.100.000,00	Persediaan
		Piring 9 Les emas	3	478.500,00	Persediaan
		Elemen mesin presto	12	105.600,00	Persediaan
		Piring 6 HW	5	616.000,00	Persediaan
		Kotak plastik	2	82.500,00	Persediaan
		Gelas 212	2,5	123.750,00	Persediaan
		Sendok makan	25	357.500,00	Persediaan
		Sendok goreng	6	66.000,00	Persediaan
		Ember besar	1	65.000,00	Persediaan
		Aggat spatula	5	49.950,00	Persediaan
		Lampu Spiritus Glass Dochem	2	119.880,00	Persediaan
		Dappen disk	4	79.920,00	Persediaan
		Bantal	2	177.600,00	Persediaan
		Infinity R6-6-CCTV CABEL	1	1.720.000,00	Persediaan
		Gelas Tadah Les	2	350.000,00	Persediaan
		Bak Stainless	1	90.000,00	Persediaan
		Sendok Kecil	1	15.000,00	Persediaan
		Sendal Karet	12	480.000,00	Persediaan
		Toples	1	100.000,00	Persediaan
		Baki Melamin	1	45.000,00	Persediaan
		Cement Spatulas	3	59.940,00	Persediaan
15	PUPR		<u>54</u>	<u>22.885.000,00</u>	
		Ratchet Tie Down 15M (BENZ)	4	1.240.000,00	Ekstrakom
		Belanja Modal Mebel (kursi	50	21.645.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		rapat ) 50 bh			
16	DPKP2LH		<u>44</u>	<u>18.525.782,00</u>	
		Camera Outdoor	7	3.305.999,00	Ekstrakom
		Camera Indoor	25	10.283.637,00	Ekstrakom
		Power Suplly	4	1.401.622,00	Ekstrakom
		Vidio Balun	8	3.534.524,00	Ekstrakom
17	Koperindag		<u>39</u>	<u>90.048.833,00</u>	
		Jet washer toto	16	6.660.000,00	ekstrakom
		Global Positioning System (GPS)	1	7.991.500,00	Rusak Berat
		Gas Detector	1	16.000.000,00	Rusak Berat
		Mesin Absensi	1	4.950.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	750.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Standar (11-13)	1	990.000,00	Rusak Berat
		PC Unit	1	6.690.000,00	Rusak Berat
		PC Unit	1	8.888.333,00	Rusak Berat
		Laptop	1	16.880.000,00	Rusak Berat
		Printer	1	600.000,00	Rusak Berat
		Printer	2	4.499.000,00	Rusak Berat
		Printer	1	600.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Stabilizer	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Kursi Lipat	5	4.985.000,00	Rusak Berat
		Meja kerja	2	3.080.000,00	Rusak Berat
18	DPMTSPNaker		<u>1</u>	<u>1.802.730,00</u>	
		Tripot	1	480.145,00	Ekstrakom
		Paket koneksi internet		1.322.585,00	Persediaan
19	SETDAKO		<u>210</u>	<u>1.295.195.985,00</u>	
		VGA Splitar/Swicher	2	396.000,00	Ekstrakom
		Rf Reader	2	627.000,00	Ekstrakom
		Keyboard USB	2	960.000,00	Ekstrakom
		Switch	6	900.000,00	Ekstrakom
		Wireless	5	1.250.000,00	Ekstrakom
		Setrika	3	900.000,00	Ekstrakom
		kursi rapat	8	2.688.000,00	Ekstrakom
		Kabel UTP		6.600.000,00	Persediaan
		Kabel UTP		8.250.000,00	Persediaan
		Kabel Land		3.063.500,00	Persediaan
		Kabel VGA Panjang 40 meter		2.029.080,00	Persediaan
		Audio Cable		4.262.400,00	Persediaan
		Sedan	1	177.600.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.516.673,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Alat penghancur kertas	1	1.512.236,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	4.370.000,00	Rusak Berat
		Micro Bus	1	290.000.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	12.500.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	25.000.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	11.800.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Sepeda Motor	1	12.650.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	12.650.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	10.500.000,00	Rusak Berat
		Sepeda Motor	1	12.485.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Kursi Besi/Metal	1	2.200.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.260.000,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	1	825.000,00	Rusak Berat
		Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.300.000,00	Rusak Berat
		Meja Rapat	1	680.940,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pejabat Eeslon II	1	7.500.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pejabat Eeslon III	1	680.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	2	17.600.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	2	17.160.000,00	Rusak Berat
		Lap Top	2	27.160.000,00	Rusak Berat
		Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	3.300.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.300.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	3.740.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.235.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.155.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	4.125.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.685.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.087.500,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.402.500,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	3.402.140,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	5.190.000,00	Rusak Berat
		Camera Video	1	2.000.000,00	Rusak Berat
		Camera Video	1	1.500.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	1.701.249,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.422.106,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.300.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	605.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	860.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.376.000,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	6.952.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.375.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	10.312.500,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.235.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	869.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	990.000,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	2	2.057.142,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	880.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	4.070.000,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	1	1.028.570,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.375.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.320.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.050.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.422.106,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	4.646.667,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	3.750.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	980.000,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	2	2.057.142,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	1	825.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.250.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.375.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.474.000,00	Rusak Berat
		Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	1.560.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	874.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.950.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.155.000,00	Rusak Berat
		Filling Cabinet Besi	1	907.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.260.000,00	Rusak Berat
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.650.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.474.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.320.000,00	Rusak Berat
		Layar Film/Projector	1	7.975.000,00	Rusak Berat
		Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst)	1	4.900.000,00	Rusak Berat
		Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1.364.000,00	Rusak Berat
		Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	1	905.000,00	Rusak Berat
		Amplifier	1	565.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	4	1.499.960,00	Rusak Berat
		Telephone (PABX)	2	34.845.000,00	Rusak Berat
		Facsimile	1	1.637.500,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	7.820.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.791.250,00	Rusak Berat
		Rak Besi	1	990.000,00	Rusak Berat
		White Board Electronic	3	9.900.000,00	Rusak Berat



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	935.000,00	Rusak Berat
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.320.000,00	Rusak Berat
		Meja Rapat	1	65.000.000,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	1	1.028.571,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	6.804.290,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	20.070.000,00	Rusak Berat
		Loudspeaker	1	2.205.000,00	Rusak Berat
		Loudspeaker	1	2.715.000,00	Rusak Berat
		Sound System	1	14.115.000,00	Rusak Berat
		Sound System	1	4.500.000,00	Rusak Berat
		Wireless	1	11.970.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.450.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	3.000.000,00	Rusak Berat
		Layar Film/Projector	2	19.800.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	4.070.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.499.960,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.749.440,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.250.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	896.500,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.540.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	8.800.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	1	8.580.000,00	Rusak Berat
		P.C Unit	4	11.310.350,00	Rusak Berat
		Lap Top	2	24.750.000,00	Rusak Berat
		Lap Top	1	9.900.000,00	Rusak Berat
		Lap Top	1	8.470.000,00	Rusak Berat
		Lap Top	2	9.350.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	990.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000,00	Rusak Berat
		Kipas Angin	1	673.860,00	Rusak Berat
		Lap Top	1	3.000.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	3.750.000,00	Rusak Berat
		Meja Rapat	1	2.723.752,00	Rusak Berat
		Meja Komputer	1	2.057.142,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.260.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	680.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.485.000,00	Rusak Berat
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.430.000,00	Rusak Berat
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.133.158,00	Rusak Berat
		Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1.612.730,00	Rusak Berat
		Lap Top	1	9.350.000,00	Rusak Berat
		Lap Top	2	14.080.000,00	Rusak Berat
		Printer (Peralatan Personal)	1	874.000,00	Rusak Berat



No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Komputer)			
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	880.000,00	Rusak Berat
		A.C. Split	1	6.952.000,00	Rusak Berat
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.000.000,00	Rusak Berat
		Lemari Kayu	1	2.200.000,00	Rusak Berat
		Kursi Tamu	1	2.310.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	2.800.000,00	Rusak Berat
		Unit Power Supply	1	1.540.000,00	Rusak Berat
		Camera Video	4	8.800.000,00	Rusak Berat
		Camera Electronic	2	9.979.750,00	Rusak Berat
		Lap Top	1	8.800.000,00	Rusak Berat
		Tempat Tidur Kayu	1	45.327.035,00	Rusak Berat
		Lemari kayu	2	2.938.286,00	Rusak Berat
		Meubelair Lainnya	1	2.970.000,00	Rusak Berat
		Lemari Es	3	6.831.000,00	Rusak Berat
20	Dinas Kebudayaan		<u>2</u>	<u>12.380.000,00</u>	
		Tas Kamera	1	380.000,00	Ekstrakomp
		Kend Dinas roda 2 BA 6474 JB	1	12.000.000,00	Rusak Berat

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 454.028.196.643,72	Rp392.909.599.934,08

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp454.028.196.643,72 dan Rp392.909.599.934,08. Terjadi penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 72.408.700.006,25 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp 11.290.103.296,61, sehingga mutasi bersih nilai penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 61.118.596.709,64 atau sebesar 13,46%.

Tabel 5.63  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
392.909.599.934,08	72.408.700.006,25	(11.290.103.296,61)	61.118.596.709,64	454.028.196.643,72

#### I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Tetap Gedung Dan Bangunan sebesar Rp72.408.700.006,25 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



Tabel 5.64  
Rincian Penambahan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	41.516.117.750,58
2	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	3.011.063.935,00
3	Hibah dari Pihak Ketiga	199.000.000,00
4	Mutasi dari SKPD lain	2.604.523.528,58
5	Koreksi Pencatatan	2.365.933.000,00
6	Penambahan dari Reklas	22.712.061.792,09
	JUMLAH	72.408.700.006,25

1. Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp41.516.117.750,58 tersebar pada SKPD se-Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65  
Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Barangin	60.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.843.852.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.500.000,00
4	Dinas Pendidikan	5.949.200.750,58
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	20.465.879.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	123.895.000,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.063.791.000,00
	JUMLAH	41.516.117.750,58

#### Penjelasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- a. Belanja modal pada Kec. Barangin nilai kontrak Rp60.000.000,00 adalah Pengadaan Lanjutan Pembuatan/Pengadaan Pagar Lap. Rumah 4 RT 02/RW 03, Kel. Durian II dengan SPK No. 189.2/02/D.II-SWL/2022
- b. Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp9.843.852.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
  1. Pembangunan Kantor Desa Kubang Tengah nilai kontrak Rp79.3754.000,00 dengan SPK No. 64.B/CK-DPUPR/SWL-2022;
  2. Pembangunan Kantor Desa Silungkang Tigo nilai kontrak Rp833.507.000,00 dengan SPK No. 51.B/CK-DPUPR/SWL-2022;
  3. Pembangunan Kantor Desa Talawi Mudik nilai kontrak Rp891.200.000,00 dengan SPK No. 52.B/CK-DPUPR/SWL-2022;
  4. Pembangunan Pagar, Gerbang dan Pemasangan Paving Block Kantor Desa Tumpuk Tengah nilai kontrak Rp177.870.000,00 dengan SPK No. 43.A/CK-DPUPR/SWL-2022;



5. Pembangunan Puskesmas Desa Tumpuk Tengah nilai kontrak Rp1.464.160.000,00 dengan SPK No. 63.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
  6. Pembuatan Gerbang dan Pagar Pembatas Mall Pelayanan Publik (MPP) nilai kontrak Rp69.793.000,00 dengan SPK No. 125/CK-DPUPR/SWL-2022;
  7. Rehab Ruangan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nilai kontrak Rp98.104.000,00 dengan SPK No. 112/CK-DPUPR/SWL-2022;
  8. Lanjutan Pembangunan Gedung PSDKU Universitas Negeri Padang nilai kontrak Rp4.903.487.000,00 dengan SPK No.43.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
  9. Pembuatan Gedung TK di Desa Pasar Kubang nilai kontrak Rp167.770.000,00 dengan SPK No. 78/CK-DPUPR/SWL-2022;
  10. Pembuatan Lapangan Upacara bagi SDN 29 Lumindai nilai kontrak Rp197.830.000,00 dengan SPK No. 89/CK-DPUPR/SWL-2022;
  11. Pembangunan Kios Pasar Untuk relokasi Pasar Bagonjong nilai kontrak Rp197.743.000,00 dengan SPK No. 111/CK-DPUPR/SWL-2022;
  12. Pembangunan Pos Ronda RT 2 RW 2 Tangsi Gunung Kelurahan Air Dingin nilai kontrak Rp48.634.000,00 dengan SPK No. 24/CK-DPUPR/SWL-2022.
- c. Belanja modal pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp9.500.000,00 adalah Biaya Perencanaan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Segar.
- d. Belanja modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.949.200.750,58 adalah sebagai berikut:
1. Rehab Pembuatan lapangan upacara pada SMP 1 sebesar Rp107.904.400,00; dengan SPK No. 10/PPK/Disdik-2/SWL/2022;
  2. Rehab Toilet pada SMP 2 sebesar Rp767.969.200,00; dengan SPK No. 02/PPK-DAK/SMP/Disdik-2/SWL/2022;
  3. Rehab ruang guru pada SMP 2 senilai Rp221.926.279,00; dengan SPK No. 01/PPK-DAK/SMP/Disdik-2/SWL/2022;
  4. Rehab Toilet /Jamban pada SMP 4 senilai Rp195.255.853,00; dengan SPK No. 04/PPK-DAK/SMP/Disdik-2/SWL/2022;
  5. Rehab ruang Kelas pada SMP 4 senilai Rp655.417.161,00; dengan SPK No. 03/PPK-DAK/SMP/Disdik-2/SWL/2022;
  6. Rehab pagar pada SMP 5 senilai Rp149.985.500,00; dengan SPK No. 35.A/PPK-/Disdik-2/SWL/2022;



7. Rehab ruang kelas pada SDN 02 Lunto Timur senilai Rp200.424.000,00; dengan SPK No. 06/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
8. Pembuatan Pagar pada SDN 12 Kubang Barat Rp100.128.000,00; dengan SPK No. 23/PPK/Disdik-2 /SWL/2022;
9. Pembangunan Mushala pada SDN 07 Talago Gunung senilai Rp199.904.000,00; 47/PPK/disdik-2/SWL/2022;
10. Rehab ruang guru pada SDN 15 Lumindai senilai Rp97.139.114,00; dengan SPK No. 07/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
11. Rehab Ruang kelas pada Paud Terpadu Pembina Santur senilai Rp324.139.404,00; dengan SPK No. 05/PPK-DAK/Disdik-3/SWL/2022;
12. Rehab Ruang Kelas pada TK Pembina Salak senilai Rp112.909.752,00; dengan SPK No. 04/PPK/Disdik-3/SWL/2022;
13. Pembuatan pagar pada SDN 03 Tumpuk Tengah senilai Rp148.543.000,00; dengan SPK No. 67/PPK/Disdik-2/SWL/2022;
14. Rehab ruang kelas SDN 05 Tiga Tanjung senilai Rp596.617.000,00; dengan SPK No. 08/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
15. Pembuatan Pagar pada SDN 06 Bukik Gadang senilai Rp99.952.000,00; dengan SPK No. 31/PPK/Disdik-2/SWL/2022;
16. Lanjutan Pemasangan Paving Blok pada SDN 09 Talawi Hilir senilai Rp99.721.000,00; dengan SPK No. 75/PPK/Disdik-2/SWL/2022;
17. Rehab ruang kelas pada SDN 16 Sikalang senilai Rp200.410.415,00; dengan SPK No. 09/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
18. Rehab ruang kelas pada SDN 01 Silungkang Tigo senilai Rp596.617.000,00; dengan SPK No. 02/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
19. Rehab ruang kelas pada SDN 04 Silungkang Tigo senilai Rp596.607.172,58; dengan SPK No. 03/PPK--DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
20. Pembuatan pagar pada SDN 05 Muaro Kalaban senilai Rp74.990.000,00; dengan SPK No. 19.a/PPK/Disdik-2/SWL/2022;
21. Rehab ruang kelas pada SDN 08 Silungkang Duo senilai Rp101.349.500,00; dengan SPK No. 04/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;
22. Rehab ruang kelas pada SDN 13 Silungkang Oso senilai Rp201.378.000,00; dengan SPK No. 05/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022;



23. Pembangunan Pagar SDN 13 Silungkan Oso senilai Rp99.913.000,00; dengan SPK No. 39/PPK-DAK/SD/Disdik-2/SWL/2022.
- e. Belanja modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp20.465.879.000,00 adalah pembangunan sentra IKM di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin dengan SPK No. 03.C/SPK/PERIN/KOPERINDAG-SWL/2022.
- f. Belanja modal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp123.895.000,00 adalah pembangunan Pembuatan Pagar TPU dengan SPK No. 09/SPK/PERKIM/SWL-2022.
- g. Belanja modal pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp5.063.791.000,00 adalah Pembangunan Tourism Informasi Center (TIC) di kandi dengan SPK No. SP NO:12/PARPORA/ DEST/SWL-2022 DAN SPK NO: 19/PPK/PARPORA/DEST/SWL-2022.
2. Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp3.011.063.935,00 pada tahun 2022 tersebar pada SKPD se-Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66  
Rincian Belanja Barang dan Jasa  
Yang Diakui Sebagai Aset Tetap

SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Sekretariat DPRD		<u>332.090.000,00</u>	
	Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD	142.092.000,00	SPK No: 520/15/PPK-Set DPRD/2022
	Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD	189.998.000,00	SPK No: 520/18/PPK-SET DPRD/2022
Kecamatan Lembah Segar	Pembuatan Pos Ronda di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	50.000.000,00	SPK No.03/KS/Sarpras-KSS/CLS/2022 tgl 20-9-2022
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		<u>367.857.700,00</u>	
	Rehab pagar puskesmas Sungai durian	119.390.000,00	SPK No. 020/22/SPK/PPK-DINKESDALDUKKB/SWL/2022 tanggal 28-7-2022
	Rehab pagar puskesmas Lunto	99.226.000,00	SPK No.020/23/SPK/PPK-DINKESDALDUKKB/SWL/2022 tanggal 2-8-2022
	Rehab pagar puskesmas talawi	149.241.700,00	SPK No. 020/21/SPK/PPK-DINKESDALDUKKB/SWL/2022
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		<u>592.717.000,00</u>	
	Perbaikan Pagar Camping Ground	67.717.000,00	SPK



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
			No.45/PPK/PARPORA/DEST/SWL-2022
	Perbaikan Kandang Burung	165.869.000,00	SPK
	Perbaikan Kandang Siamang	171.675.000,00	No.47/PPK/PARPORA/DEST/SWL-2022
	Perbaikan Pagar Kandang Gajah	187.456.000,00	
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pemeliharaan Gedung Kantor	69.772.000,00	SPK No.19/SPK/DPMPSTP Naker-SWL/2022
Sekretariat Daerah		<u>392.170.085,00</u>	
	Rehab dan Pengecatan Balerong Rumah Dinas Walikota Sawahlunto	176.705.000,00	SPK No.112/SPK/PPK/UMUM-SWL/2022 tgl 6-12-2022
	Partisi dan interior sekda dan ruang istirahat wakil wako	49.420.800,00	
	Rehab kamar mandi ruang wakil wako	47.788.700,00	
	Partisi ruangan server bagian kominfo	20.630.500,00	
	Perbaikan gonjong koantor wako + upah tukang	25.016.100,00	
	Partisi dan interior ruangan UPBJ	28.416.000,00	
	Partisi dan ruangan tunggu VIP kantor wako	44.192.985,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<u>1.206.457.150,00</u>	
	Rehab Gedung Mall Pelayanan Publik	206.370.000,00	SPK No.03/CK-DPUPR/SWL-2022
	Rehab Gedung CK-TRTB, SDA-BM, Ex PJU & Alat Berat	196.419.000,00	SPK No.03/CK-DPUPR/SWL-2022
	Pembuatan Gudang Arsip BKPSDM	79.084.000,00	SPK No.2/CK-DPUPR/SWL-2022
	Rehab Sekolah TK AISYIYAH- Kelurahan Saringan	57.010.000,00	SPK No.87/CK-DPUPR/SWL-2022
	Penataan Gerbang Sawahlunto	104.104.000,00	SPK No.79/CK-DPUPR/SWL-2022
	Lanjutan Rehabilitasi Gedung Mall Pelayanan Publik	197.639.000,00	SPK No.122/CK-DPUPR/SWL-2022
	Rehab Kantor Kominfo Kesbangpol Dan Dishub	98.511.000,00	SPK No.130/CK-DPUPR/SWL-2022
	Rehab RumDin,WC Portable, Tempat Cuci Tangan Beton & Sekat SMPN 8 Lumindai	132.590.000,00	SPK No.128/CK-DPUPR/SWL-2022
	Pembelian toilet Portable PSDKU	24.148.150,00	-
	Rehab Gedung PKK Kota Sawahlunto	78.943.000,00	SPK No.48.A/CK-DPUPR/SWL-2022
	Rehab Gedung Pordasi	31.639.000,00	SPK No.66/CK-DPUPR/SWL-2022

3. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari hibah pihak ketiga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp199.000.000,00 berasal dari Hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan BAST Dukungan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata/Tourist Information Centre (TIC) di Pasar Songket, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Nomor: BA/10/DS.01.00/D.3/2022 dan Nomor: 556/10/PPK-Parpora-Dest/SWL-2022.



4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp2.604.523.528,58 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.67  
Rincian Mutasi antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga (Rp)	Keterangan
1	PPKD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	545.738.000,00	BAST No: 134.4/007/BA-BPKAD-ASET/SWL/2022  Finishing Pasar Songket pada Mall Pelayanan Publik
2	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	756.523.764,29	BAST No: 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022  1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	PPKD	545.738.000,00	BAST NO.028/605/BA/KOPERINDAG-SWL/2022  Finishing Pasar Songket pada Mall Pelayanan Publik
4	Badan Kesbangpol dan PBD	PPKD	756.523.764,29	BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022  1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen
JUMLAH			2.604.523.528,58	

5. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan sebesar Rp2.365.933.000,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.68  
Riacion Koreksi Pencatatan

No	SKPD	Jml Brg	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1	2.176.790.000,00	Aset belum tercatat
2	PPKD	1	189.143.000,00	Aset belum tercatat
JUMLAH		2	2.365.933.000,00	

- a. Koreksi pencatatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp2.176.790.000,00 merupakan koreksi nilai aset yang belum tercatat pada tahun 2021 yaitu rehab gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan SPK No. 01.1/MPP-DPMPTSPNaker/SWL-2021 dan
- b. Koreksi pencatatan pada PPKD sebesar Rp189.143.000,00 merupakan koreksi nilai aset yang belum tercatat pada tahun 2020 yaitu Nilai Rehabilitasi Pasar Silungkang yang telah dimutasikan ke Dinas Koperindag pada tahun 2020 berdasarkan BAST No.134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2020.



6. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena penambahan dari reklas sebesar Rp 22.712.061.792,09 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.69  
Rincian Reklasifikasi

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
1	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan & Lingkungan Hidup	Pembuatan pagar jalan RT 01 RW 02 Kel Saringan	1	33.224.274,09	Jalan, Irigasi & Jaringan
2	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			<u>8.970.268.420,00</u>	
		Penambahan Fasilitas Kandang Kuda Kandih	1	197.699.000,00	Jalan, Irigasi & Jaringan
		Pengecoran parkir TPU Kayu Gadang	1	54.923.000,00	Jalan, Irigasi & Jaringan
		Pembuatan pagar beton di jalan RT 01 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Utara	1	98.294.000,00	Jalan, Irigasi & Jaringan
		Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Samping Gudang PT BA	1	88.216.000,00	Jalan, Irigasi & Jaringan
		Perencanaan pembangunan kantor Desa Silungkang Tigo	1	39.864.000,00	KDP
		Perencanaan pembangunan kantor Desa Talawi Mudik	1	39.840.000,00	KDP
		Pembangunan lapangan bola kaki Ombilin	1	29.520.610,00	KDP
		Pembangunan gerbang batas kota Silungkang-Kabupaten Solok	1	10.000.000,00	KDP
		Pembangunan rest area dan gapura batas kota Sawahlunto - Kabupaten Solok	1	52.226.800,00	KDP
		Pembangunan rest area dan gapura batas kota Sawahlunto - Kabupaten Solok	1	51.976.800,00	KDP
		Honor pembangunan Taman Air Mancur Makam M. Yamin	1	6.725.000,00	KDP
		Biaya perencanaan rehabilitasi kantor TPP PKK Kota Sawahlunto	1	4.035.000,00	KDP
		Pembangunan Fasilitas Gedung Uji Kendaraan		19.850.000,00	
		Pembangunan Gedung Kantor Camat Silungkang(Perencanaan 2015)		1.600.000,00	
		Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Saringan		4.000.000,00	
		Pembangunan Lapangan Bola Kaki Ombilin		29.520.610,00	
		Pembangunan Gerbang Batas Kota Silungkang-Kabupaten Solok		10.000.000,00	
		Lanjutan Pembangunan Rumah Ketua Dprd		10.000.000,00	
		Pembangunan Tugu Simpang Bdn Dan Tugu Kecamatan Talawi		1.040.000,00	
		Lapangan Pacuan Kuda Tahun 2004		361.200.000,00	
		Lapangan Volly Tahun 2004		30.900.000,00	
		Lapangan Basket Tahun 2004		61.887.000,00	
		Lapangan Tenis Tahun 2004		399.900.000,00	
		Lanjutan Pemb.Lapangan Pacu Kuda Tahun 2005		636.141.000,00	
		Renovasi Lapangan Sepak Bola Tahun 2005		1.220.000.000,00	
		Pembangunan Pagar Trek Darurat Tahun 2006		99.330.000,00	
		Pembangunan Ruang Joki Dan Sidang		119.651.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Ruang Dewan Stewar			
		Pembangunan Shadding Tool Tahun 2006		72.338.000,00	
		Pembangunan Kandang Darurat 60 Pintu		96.979.000,00	
		Pembangunan Stewar Tower		44.989.000,00	
		Pembuatan Jurai Kandang Permanen Tahun 2006		34.990.000,00	
		Perbaikan Tewar Tower Dan Rehab Tangga		41.535.000,00	
		Rehab/Peningkatan Kandang Darurat 60 Pintu		98.101.000,00	
		Penambahan Kandang Semi Permanen 20 Pintu Tahun 2006		41.800.000,00	
		Pembangunan Wc Kandang 2 Unit		80.995.000,00	
		Areal Parkir Umum Dan Vip		145.974.000,00	
		Pemb. Kantor Dan Rumah Jaga Kawasan Kandih		198.660.000,00	
		Rehab Lapangan Bola Basket Muaro Kalaban		43.650.000,00	
		Rehab Rumah Dinas An Syafaruddin Syarif		24.950.000,00	
		Rehab Rumah Dinas An Adriwan		23.400.000,00	
		Pembangunan Tpa/Tpsa Sikalang		53.276.000,00	
		Pembuatan Km/Wc Darurat Smkn 02 Swi		30.990.000,00	
		Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 02 Sapan		30.990.000,00	
		Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 05 Kubang Sirakuk		31.000.000,00	
		Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 17 Pasar Baru Durian		31.000.000,00	
		Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Pemda Di Kec Barangin		222.239.000,00	
		Rehab 2 Buah Lapangan Tenis Saringan Tahun 2006		71.634.000,00	
		Pembangunan Wc Utama Tahun 2006		43.290.000,00	
		Pembuatan Kamar Mandi Umum Darurat Tahun 2006		48.432.000,00	
		Rehab Lapangan Basket Kampung Surian Dan Talawi Tahun 2006		28.490.000,00	
		Pembuatan Wc Di Kandih Tahun 2007		49.900.000,00	
		Penyempurnaan Lapangan Pacu Kuda Kandih Tahun 2007		197.595.000,00	
		Rehab Rumah Dinas & Pemb Pagar Camat Silungkang		49.840.000,00	
		Rehab Rumah Eks Camat Barangin		49.840.000,00	
		Rehab Eks Sdn 10 Tanah Lapang		146.796.000,00	
		Pembenahan Lap Pacu Kuda Tahun 2008		49.500.000,00	
		Rehab Kandang Kuda Kandih Tahun 2010		89.204.400,00	
		Rehab Kandang Kuda Kandih Athun 2010		208.143.600,00	
		Pembangunan Baru Kandang Kuda Kandih		304.808.000,00	
		Mushalla Di Lap Pacu Kuda Kandih		153.437.000,00	
		Driving Range Kandih		252.850.000,00	
		Pembangunan Prasarana Pelengkap Lapangan Pacu Kuda Kandih		1.020.032.950,00	
		Penataan Menara Masjid Ahung Kota Sawahlunto Tahun 2015		1.180.279.650,00	
3	Sekretariat Daerah	Perbaikan Kanopi Rumdis Sekda	1	22.752.750,00	Jalan, Irigasi & Jaringan
4	Kecamatan Barangin			<u>797.485.716,00</u>	
		Pembuatan lapangan futsal waringin kel. Lubang panjang (2013) penyerahan dari dpu		391.365.216,00	Aset Tetap Lainnya
		Kel.Durian I peningkatan MCK Kel. Durian I (2008) penyerahan dari DPU		83.673.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Kel.Durian I pembangunan sarana olahraga durian I (2011) penyerahan dari DPU		34.341.600,00	Aset Tetap Lainnya



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		Kel.Durian I pembangunan sarana olahraga durian 1 (2011) penyerahan dari dinas PU	80.130.400,00	Aset Tetap Lainnya
		Kel.Durian I pembangunan lapangan futsal durian 1 (2012) penyerahan dari dinas PU	102.650.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Kel.Durian I pembangunan lapangan bola voli pasar baru durian (2015) penyerahan dari dinas PU	105.325.500,00	Aset Tetap Lainnya
5	Kecamatan Lembah Segar		<u>95.391.000,00</u>	
		Peningkatan MCK tanjung sari	35.391.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Rehap Posyandu Melati RT 02 RW 01 dengan Nomor Kontrak : 02/KS/SAPRAS-TL/CLS /2022	30.000.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Rehap posyandu wista younger di rt 04 rw 02 dengan nomor kontrak : 03/ks/sapras-tl/cls/2022	30.000.000,00	Aset Tetap Lainnya
6	Kecamatan Silungkang	Rehab MCK Silungkang	49.840.000,00	Aset Tetap Lainnya
7	Kecamatan Talawi		<u>254.581.000,00</u>	
		pemeliharaan lapangan bola kaki talawi	49.814.000,00	Aset Tetap Lainnya
		pagar mees lapangan bola kaki talawi	51.283.000,00	Aset Tetap Lainnya
		tribune lapangan bola kaki talawi	153.484.000,00	Aset Tetap Lainnya
8	RSUD		<u>11.436.446.632,00</u>	
		Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	881.273.024,00	Aset Tetap Lainnya
		Rawat Inap Paru	298.473.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Poli dan Gudang Obat	246.106.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Renovasi Ruang Isolasi	147.964.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Instalasi Gawat Darurat (UGD)	35.840.000,00	Aset Tetap Lainnya
		ICU, UTD HD dan Fisioterapy	460.628.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Kamar Operasi	6.904.334.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Bedah dan Interne	1.484.992.400,00	Aset Tetap Lainnya
		Gedung Gizi	199.725.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Gudang Umum dan Laundry	777.111.208,00	Aset Tetap Lainnya
9	Dinas Pendidikan		<u>541.352.000,00</u>	
		Pembangunan gedung TK Restu Bunda Lumindai . Penyerahan aset dr DPU th 2015	118.444.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Daam MAN Sawahlunto	49.980.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Rehab TK Pertiwi M Kalaban. penyerahan aset DPU th 2015	29.900.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Pembuatan playgroup kayu gadang. penyerahan aset dr DPU th 2015	151.544.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Rehab berat kantor , WC dan Bak mandi kantor Kwarcab bumi. penyerahan aset dr DPU th 2015	49.949.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Pembangunan Paud Kolok nan tuo. penyerahan aset dr DPU tahun 2015	101.635.000,00	Aset Tetap Lainnya
		Rehab berat kantor UPTD Barangin	39.900.000,00	Aset Tetap Lainnya
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.430.000,00	Aset Tetap Lainnya
11	Dinas Kebudayaan		<u>415.290.000,00</u>	
		Konservasi Makam Syech Tumpok	207.550.000,00	Aset Tetap Lainnya
		"Konservasi Makam Syekh Tumpok	207.740.000,00	Aset Tetap Lainnya
		JUMLAH	22.712.061.792,09	



## II. Penjelasan Mutasi Berkurang

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 11.290.103.296,61 pada tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.70  
Rincian Pengurangan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan	2.489.207.108,00
2	Mutasi ke SKPD lain	2.604.523.528,58
3	Pengurangan Karena Reklas	6.196.372.660,03
JUMLAH		11.290.103.296,61

1. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat dilakukan penghapusan terhadap aset tersebut sebesar Rp2.489.207.108,00 tersebar pada SKPD seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 5.71  
Rincian Aset Penghapusan

SKPD	Nilai Penghapusan (Rp)	Dasar Penghapusan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	251.072.108,00	SK WAKO No.188.45/276/WAKO-SWL/2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	181.585.000,00	Keputusan Walikota No:188.45/228/WAKO-SWL/2022
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.056.550.000,00	SK.WAKO No.188.45/194/WAKO-SWL/2022
JUMLAH	2.489.207.108,00	

Penjelasan dari Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan

- a. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa 2 unit rumah dinas pada Puskesmas Talawi senilai Rp251.072.108,00.
  - b. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga ada penghapusan berupa 1 (satu) unit bangunan gedung jaga semi permanen taman satwa kandi tahun 2022 (ruangan tiket dan posko taman satwa kandi) senilai Rp181.585.000,00.
  - c. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adanya penghapusan berupa 2 unit bangunan rumah khusus di Parambahan Kec. Talawi senilai Rp949.278.000,00 dan Rp1.107.272.000,00.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena mutasi antara SKPD tahun 2022 sebesar Rp2.604.523.528,58 adalah sebagai berikut:
    - a. Pada Dinas Koperasi Usaha kecil, Perindustrian dan Perdagangan mutasi ke PPKD sebesar



Rp545.738.000,00 berupa Finishing pasar songket pada Mall Pelayanan Publik dengan BAST No. 028/605/BA/KOPERINDAG-SWL/2022.

- b. Pada Dinas KesbangPol-BPBD mutasi Ke PPKD sebesar Rp756.523.764,29 berupa 1 unit bangunan gedung kantor permanen dengan BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022.
- c. Pada PPKD mutasi ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp545.738.000,00 berupa Finishing pasar songket pada Mall Pelayanan Publik dengan BAST No. 134.4/007/BA-BPKAD-ASET/SWL/2022.
- d. Pada PPKD mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp756.523.764,29 berupa 1 unit bangunan gedung kantor permanen dengan BAST No. 134.4/15/BA-BPKAD-ASET/SWL/2022.

3. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi sebesar Rp 6.196.372.660,03 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.72  
Rincian Aset Reklasifikasi

SKPD	Nama Barang Yang Direklas	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perencanaan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Segar	1	9.500.000,00	Aset KDP
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		<u>28</u>	<u>1.342.862.161,47</u>	
	HT Motorola T 62	5	8.434.769,80	Aset Peralatan & Mesin
	Sound System	1	12.933.313,69	Aset Peralatan & Mesin
	Horn Speaker Narae No.NSH 5050	6	8.603.465,20	Aset Peralatan & Mesin
	Generator HondaET 120000	1	81.768.330,21	Aset Peralatan & Mesin
	Papan Informasi	2	5.398.252,67	Aset Peralatan & Mesin
	Titik Kumpul	2	4.048.689,50	Aset Peralatan & Mesin
	Rambu Dilarang Berenang	2	4.048.689,50	Aset Peralatan & Mesin
	Rambu Penunjuk Evakuasi	8	16.194.758,02	Aset Peralatan & Mesin
	Jalur Pendistrian	1	1.201.431.892,88	Aset Jalan, Irigasi & Jaringan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		<u>206</u>	<u>2.328.945.113,00</u>	
	Concrete Pump (dosing pump)	3	19.980.000	Aset Peralatan & Mesin
	Pompa Air	1	24.531.000	Aset Peralatan & Mesin
	Pompa Air	1	20.979.000	Aset Peralatan & Mesin
	pompa lainnya (dst)	4	15.540.000	Aset Peralatan & Mesin
	Agitator	2	36.630.000	Aset Peralatan & Mesin
	CCTV	2	13.456.530	Aset Peralatan & Mesin
	CCTV	3	21.263.715	Aset Peralatan & Mesin
	Papan Visual/Papan Nama	3	45.399.000	Aset Peralatan & Mesin
	Penangkal Petir	1	22.462.071	Aset Peralatan & Mesin
	A.C. Split	28	399.188.412	Aset Peralatan & Mesin
	Televisi	1	2.481.516	Aset Peralatan & Mesin
	Loudspeaker	7	15.940.729	Aset Peralatan & Mesin



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang Yang Direklas	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
	Loudspeaker	13	7.357.145	Aset Peralatan & Mesin
	Loudspeaker	1	6.149.844	Aset Peralatan & Mesin
	Tiang Bendera	1	9.062.040	Aset Peralatan & Mesin
	Kaca Hias	3	2.164.500	Aset Peralatan & Mesin
	Tangki Air	4	6.993.000	Aset Peralatan & Mesin
	Alat RT lain-lain (wastafet)	12	21.164.148	Aset Peralatan & Mesin
	Alat RT lain-lain(kloset)	17	157.070.106	Aset Peralatan & Mesin
	Alat RT lain-lain (paper holder)	17	9.435.000	Aset Peralatan & Mesin
	Alat RT lain-lain (shower)	1	1.387.500	Aset Peralatan & Mesin
	Alat RT lain-lain (bak cuci piring)	1	1.232.100	Aset Peralatan & Mesin
	Pompa Kebakaran/Portable	2	78.247.008	Aset Peralatan & Mesin
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	25.982.192	Aset Peralatan & Mesin
	Power Amplifier	1	5.346.648	Aset Peralatan & Mesin
	Unit Tranceiver FM	1	8.277.714	Aset Peralatan & Mesin
	Network Monitoring System	1	26.361.612	Aset Peralatan & Mesin
	Genset	1	224.220.000	Aset Peralatan & Mesin
	Exhaust Fan	8	67.046.484	Aset Peralatan & Mesin
	Controller PH	1	13.875.000	Aset Peralatan & Mesin
	Tank	5	213.120.000	Aset Peralatan & Mesin
	Fire Extinguisher	9	16.723.260	Aset Peralatan & Mesin
	Control Panel	12	425.547.403	Aset Peralatan & Mesin
	Flow Meter Water	1	6.460.200	Aset Peralatan & Mesin
	External/ Portable Hardisk	1	3.650.346	Aset Peralatan & Mesin
	Rak Server	1	6.493.500	Aset Peralatan & Mesin
	Acces Point	1	3.131.385	Aset Peralatan & Mesin
	Rackmount	1	6.155.838	Aset Peralatan & Mesin
	Blower	2	91.020.000	Aset Peralatan & Mesin
	Direct-Fired Chemical Reactor	1	43.290.000	Aset Peralatan & Mesin
	Obstruction Light	1	1.720.278	Aset Peralatan & Mesin
	Jet Washer Toto	16	6.660.000,00	Aset Peralatan & Mesin
	Lampu PJU Solar cell	13	195.748.889,00	Aset Jalan, Irigasi & Jaringan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		<u>18</u>	<u>302.908.609,56</u>	
	Meja pusat informasi	1	15.840.000,00	Aset Peralatan & Mesin
	Meja loket	2	143.628.000,00	Aset Peralatan & Mesin
	AC Celling Cassette	2	66.449.445,22	Aset Peralatan & Mesin
	AC Split	3	25.500.920,86	Aset Peralatan & Mesin
	AC Split	3	22.966.772,79	Aset Peralatan & Mesin
	AC Split	1	6.529.302,90	Aset Peralatan & Mesin
	AC Split	2	10.665.243,73	Aset Peralatan & Mesin
	Exhaust Fan	1	617.424,06	Aset Peralatan & Mesin
	Lemari Kayu	1	3.052.500,00	Aset Peralatan & Mesin
	Meja Kayu	1	2.775.000,00	Aset Peralatan & Mesin
	Meja Panjang	1	4.884.000,00	Aset Peralatan & Mesin
PPKD			<u>1.670.155.416,00</u>	
	Bangunan Kantor Permanen	1	1.600.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Bangunan Kantor Permanen	1	7.700.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Bangunan Kantor Permanen	2	23.850.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Bangunan Kantor Permanen	2	5.820.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Bangunan Kantor Permanen	1	4.035.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	13.009.141,00	Aset Ekstrakomptabel
	Taman lainnya	1	4.976.500,00	Aset Ekstrakomptabel
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	10.000.000,00	Aset Ekstrakomptabel
	Dinding pengaman depan mesjid al furqon kel. Saringan	1	207.430.750,00	
	Pembuatan lapangan parkir mesjid	1	153.628.225,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang Yang Direklas	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
	ostiqomah kolok nan tuo			
	Pembuatan lapangan parkir mesjid qubah duarian ii	1	158.436.000,00	
	Lanjutan pembuatan pagar mtsn talawi	1	199.891.000,00	
	Rehab mesjid al furqan lubang tembok	1	144.085.000,00	
	Rehab mesjid nurul ikhlas kelurahan tanah lapang	1	56.685.300,00	
	Pembuatan lapangan parkir dan kanopi mushola haswanatun hasanah (samping kantor lurah aur mulyo)	1	77.930.000,00	
	Lanjutan pembuatan lapangan parkir mesjid quba kel. Durian ii	1	199.861.100,00	
	Pembuatan pagar mesjid baitul amal sapan	1	149.737.500,00	
	Pembangunan front office negara kantor pengadilan negeri sawahlunto	1	48.479.500,00	
	Rehab bangunan gedung negara rumah dina scejaksanaan negeri swl	1	203.000.400,00	
	Dinding pengaman depan mesjid al furqon kel. Saringan	1	207.430.750,00	
<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>10</b>	<b>40.015.833,00</b>	
	Drawer Vanity	1	23.272.260	Aset Peralatan & Mesin
	Towel Shelf	1	4.238.091	Aset Peralatan & Mesin
	Tissue Holder	1	873.015	Aset Peralatan & Mesin
	In Wall Shower	1	1.202.685	Aset Peralatan & Mesin
	Bath & Shower	1	5.728.932	Aset Peralatan & Mesin
	Brass Rain Shower Head	1	4.700.850	Aset Peralatan & Mesin
<b>Dinas Pendidikan</b>			<b>23.106.000,00</b>	
- Paud Terpadu Pembina Santur	Lemari Panjang		1.998.000,00	Aset Peralatan & Mesin
	Rak perlengkapan Anak		3.996.000,00	Aset Peralatan & Mesin
- SDN 8 Kumbayau	Rumah dinas 2		17.112.000,00	Aset Ekstrakomp
<b>Kecamatan Barangin</b>				
	Pengadaan lanjutan pembuatan/pengadaan pagar lapangan rumah 4 RT 02/RW 03 Kelurahan Durian II	1	60.000.000,00	Aset Jalan, Irigasi & Jaringan
<b>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>			<b>418.879.527,00</b>	
	Tempat cuci tangan TK. Pertiwi Salak	1	10.434.280,00	Aset Ekstrakomptabel
	Pembuatan ruang gelar perkara reskrim Polres SWL	1	198.733.000,00	Aset yang dihibahkan ke Pihak Lain
	Pembangunan pos jaga Polres sawahlunto	1	199.277.967,00	Aset yang dihibahkan ke Pihak Lain
	Tempat cuci tangan TK. Pertiwi Salak	1	10.434.280,00	Aset Ekstrakomptabel

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp824.741.314.840,56	Rp764.019.670.567,95

Saldo Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp824.741.314.840,56 dan Rp764.019.670.567,95. Terjadi penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.955.289.618,70 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp60.233.645.346,09, sehingga mutasi bersih nilai



penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp60.721.644.272,61 atau sebesar 7,36% .

Tabel 5.73  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
764.019.670.567,95	120.955.289.618,70	(60.233.645.346,09)	60.721.644.272,61	824.741.314.840,56

## I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.570.661.125,80 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.74  
Rincian Penambahan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	57.231.799.760,00
2	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	3.906.891.540,00
3	Mutasi dari SKPD lain	56.905.298.213,00
4	Penambahan dari Reklas	2.911.300.105,70
JUMLAH		120.955.289.618,70

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp57.231.799.760,00 tersebar pada SKPD se-Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75  
Rincian Belanja Modal

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Lembah Segar	985.985.810,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	1.460.691.250,00
3	Kecamatan Barangin	498.458.000,00
4	Dinas Perhubungan	479.181.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	53.757.504.900,00
6	Badan Kesbangpol & PBD	47.553.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.425.000,00
JUMLAH		57.231.799.760,00

### 1. Penjelasan dari Belanja Modal

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp985.985.810,00 adalah sebagai berikut :



1. Pembuatan Plat Beton Penutup Saluran RT 01,02 dan RW 01 di Kelurahan Tanah Lapang sebesar Rp129.900.000,00 dengan SPK No. 01/KS/SARPRAS-TL/CLS/2022 tgl 15-6-2022;
2. Pembuatan Daam di RT 01 RW 02 di Kelurahan Air Dingin sebesar Rp75.000.000,00 dengan SPK No. 01/Sarpras-AD/SWL/2022 tgl 09-08-2022;
3. Peningkatan/Pembuatan Jalan di RT 01 RW 02 di Kelurahan Air Dingin sebesar Rp50.000.000,00 dengan SPK No. 02/Sarpras-AD/SWL/2022 tgl 09-08-2022;
4. Pembuatan Daam di RW 01 RW 02 di Kelurahan Air Dingin sebesar Rp14.300.000,00 dengan SPK No. 03/Sarpras-AD/SWL/2022 tgl 14-11-2022;
5. Pembuatan Jalan di RW 01 RW 02 di Kelurahan Air Dingin sebesar Rp55.000.000,00 dengan SPK No. 03/Sarpras-AD/SWL/2022 tgl 14-11-2022;
6. Pembuatan Perbaikan Cor Jalan Beton di RW 01,02 dan 03 di Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp30.000.000,00 dengan SPK No. 04/KS/Sarpras-AM/CLS/2022 /tgl 12-7-2022;
7. Pembuatan Coran Bertulang di RT 04 RW 02 di Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp55.000.000,00 dengan SPK No. 02/KS/Sarpras-AM/cls/2022 /tgl 12-7-2022;
8. Perbaikan Daam Di RW 01, RW 02, RW 03 di Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp60.000.000,00 dengan SPK No. 03/KS/Sarpras-AM/ClS/2022/ Tgl 12-7-2022;
9. Pembuatan/Perbaikan Riol di RW 01, RW 02 dan RW 03 di Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp65.000.000,00 dengan SPK No. 01/KS/Sarpras-AM/ClS/2022 Tgl 12-7-2022;
10. Pembuatan Jalan di RT 03 RW 02 di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan sebesar Rp129.936.560,00 dengan SPK No. 01/KS/Sarpras-KSS/CLS/2022 tgl 25-7-2022;
11. Pembuatan Riol di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan sebesar Rp69.999.250,00 dengan SPK No. 02/KS/Sarpras-KSS/CLS/2022 tgl 22-8-2022;
12. Pembuatan Daam dan Jalan RW 01 RW II di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara sebesar Rp114.400.000,00 dengan SPK No. 01/KS/Sarpras-KSU/CLS/2022 tgl 20-7-2022;
13. Pembuatan saluran air di RT 001 RW 003 di Kelurahan Pasar sebesar Rp75.000.000,00 dengan SPK No. 02/KS/sarpras-PS/CLS/2022 TGL 23-5-2022;
14. Pembuatan Saluran dan Daam di RT 001 RW 003 di Kelurahan Pasar sebesar Rp62.450.000,00 dengan SPK No. 01/KS/SAPRAS-PS/CLS/2022 TGL 23-5-2022.



- b. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.460.691.250,00 adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Bronjong RT 02 RW 03 Pondok Batu Kelurahan Pasar sebesar Rp79.082.000,00 dengan SPK No. 16/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  2. Pembuatan Daam RT 04 RW 02 Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp95.722.000,00 dengan SPK No. 15/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  3. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan RT 02 RW 02 Kampung Teleng Kelurahan Pasar sebesar Rp75.342.000,00 dengan SPK No. 13/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  4. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan RT 03 RW 01 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara sebesar Rp49.481.000,00 dengan SPK No. 17/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  5. Peningkatan Jalan Bangdes RT 02 RW 03 Pondok Batu Kelurahan Pasar sebesar Rp98.506.000,00 dengan SPK No. 11/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  6. Peningkatan Jalan Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban sebesar Rp48.799.000,00 dengan SPK No. 12/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  7. Pembuatan Jalan Sementara dan Dinding Penahan Tanah Jalan TPA Kayu Gadang sebesar Rp206.927.000,00 dengan SPK No. 05/SPK/DAK-LH/DPKP2LH/SWL/2022;
  8. Pembuatan Daam jalan RT 01 RW 02 Kelurahan Saringan sebesar Rp69.390.658,30 dengan SPK No. 8/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  9. Pembuatan riol jalan RT 01 RW 02 Kelurahan Saringan sebesar Rp12.527.067,61 dengan SPK No. 08/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  10. Pembuatan pagar jalan RT 01 RW 02 Kelurahan Saringan sebesar Rp33.224.274,09 dengan SPK No. 08/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  11. Pembangunan dinding penahan tanah Desa Muaro Kalaban sebesar Rp50.885.250,00 dengan SPK No. 01/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  12. Pembangunan Drainase Lingkungan Rumah Atis ke Batang Ombilin Desa Rantih sebesar Rp132.846.000,00 dengan SPK No. 04/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  13. Pembangunan Drainase Lingkungan Batu Gadang Dusun Sawah Tambang sebesar Rp68.078.000,00 dengan SPK No. 01/SPK/PERKIM/SWL-2022;



14. Pembuatan Daam RT 04 RW 02 Kelurahan Aur Mulyo sebesar Rp65.439.000,00 dengan SPK No. 05/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  15. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Perumahan Maju Bersama Desa Santur sebesar Rp142.583.000,00 dengan SPK No. 03/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  16. Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 02 Kelurahan Lubang Panjang sebesar Rp70.706.000,00 dengan SPK No. 02/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  17. Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 02 Kampung Teleng Kelurahan Pasar Rp90.186.000,00 dengan SPK No. 06/SPK/PERKIM/SWL-2022;
  18. Pembangunan Drainase Lingkungan RT 02 RW 02 Kelurahan Durian II sebesar Rp70.967.000,00 dengan SPK No. 07/SPK/PERKIM/SWL-2022.
- c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Barangin sebesar Rp498.458.000,00 adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan Pembuatan Drainase RT 01 /RW 01, Kelurahan Durian I sebesar Rp71.000.000,00 dengan SPK No. 188.49/20/D.I-SWL/2022;
  2. Pengadaan Pembuatan Saluran Air RT 01/RW 01, Kelurahan Durian I sebesar Rp71.100.000,00 dengan SPK No. 188.49/20/D.I-SWL/2022;
  3. Pengadaan Pembuatan Riol RT 01 RW 03 Kelurahan Durian II sebesar Rp111.425.000,00 dengan SPK No. 188.49/20/D.I-SWL/2022;
  4. Pengadaan Pembuatan Daam dan Saluran RT 02/RW 03, Kelurahan Lubang Panjang sebesar Rp83.093.020,00 dengan SPK No. 188.49/1/LB.PJG-SWL/2022;
  5. Pengadaan Pembuatan Daam RT 03/RW 02, Kelurahan Lubang Panjang sebesar Rp66.839.980,00 dengan SPK No. 188.49/1/LB.PJG-SWL/2022;
  6. Pengadaan Pembuatan Riol dan Pengecoran Jalan RT 01/RW 01, Kelurahan Saringan sebesar Rp30.000.000,00 dengan SPK No. 188.49/1/SR-SWL/2022;
  7. Pengadaan Pembuatan Riol RT 01/RW 03, Kelurahan Saringan sebesar Rp65.000.000,00 dengan SPK No. 188.49/1/SR-SWL/2022.
- d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp479.181.800,00 adalah sebagai berikut :
1. Lampu jalan Muaro Kalaban sebesar Rp50.476.633,00 dengan SPK No. 03/PPKPJU-MKB/DISHUB-SWL/2022;



2. Lampu jalan Talawi Mudik sebesar Rp146.019.833,00 dengan SPK No. 03/PPKPJU-TLWMDK/DISHUB-SWL/2022;
  3. Lampu Jalan Silungkang sebesar Rp50.207.833,00 dengan SPK No.03/PPKPJU-SLKG/DISHUB-SWL/2022 ;
  4. Lampu jalan kec. Lembah Segar sebesar Rp81.581.833,00 dengan SPK No. 03/PPKPJU-L.SGR/DISHUB-SWL/2022;
  5. Lampu jalan Talawi Hilie sebesar Rp99.546.833,00 dengan SPK No. 03/PPKPJU-TLWHLR/DISHUB-SWL/2022;
  6. Lampu jalan Kolok Mudik sebesar Rp51.348.835,00 dengan SPK No. 03/PPKPJU-KLK/DISHUB-SWL/2022.
- e. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp53.757.504.900,00 adalah sebagai berikut :
1. Ganti rugi tanah sebesar Rp288.685.000,00;
  2. Belanja Modal Jalan Kota (Jalan Muaro Kalaban-Pondok Kapur) sebesar Rp5.504.584.000,00 dengan SPK No. 35.B/BM-DPUPR/SWL-2022;
  3. Belanja Modal Jalan Kota (Jalan Simpang Kubang-Lunto) sebesar Rp4.668.548.000,00 dengan SPK No. 26/BM-DPUPR/SWL-2022;
  4. Belanja Modal Jalan Kota (Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Lubuk Pinang Perumnas Kolok) sebesar Rp197.805.000,00 dengan SPK No. 15/BM-DPUPR/SWL-2022;
  5. Lanjutan pembukaan jalan dan bangunan pelengkap dari Batu Tajam menuju Dusun Lontiak Malaweh Desa Pasa Kubang sebesar Rp78.366.000,00 dengan SPK No. 05/BM-DPUPR/SWL-2022;
  6. Biaya Perencanaan (Pembukaan akses jalan ke Guo Janjian Talago Gunung) sebesar Rp3.300.000,00;
  7. Pembukaan Jalan di Dusun Ketaping sebesar Rp197.824.000,00 dengan SPK No. 32/BM-DPUPR/SWL-2022;
  8. Pembukaan jalan dibelakang Kantor Camat Barangin sebesar Rp77.775.000,00 dengan SPK No. 59/BM-DPUPR/SWL-2022;
  9. Belanja Modal Jalan Kota (Jalan Kelok Maut-RPH) sebesar Rp1.888.520.000,00 dengan SPK No. 49.A/BM-DPUPR/SWL-2022;



10. Belanja Modal Jalan Kota (Lanjutan Pengecoran Jalan Tapian Ambar Atas Desa Talawi Mudik) sebesar Rp147.783.000,00 dengan SPK No. 11/BM-DPUPR/SWL-2022;
11. Biaya Perencanaan (Pelebaran Jalan Polindes-Kantor Desa Kumbayau) sebesar Rp9.500.000,00;
12. Belanja Modal Jalan Kota (Pelebaran Jalan Simpang Empat Kumbayau ke Kandang Batu (099)) sebesar Rp147.730.000,00 dengan SPK No. 07/BM-DPUPR/SWL-2022;
13. Belanja Modal jalan Kota (Pembuatan Dinding Penahan Tanah Limau Jao Dusun Luak Mani) sebesar Rp159.229.000,00 dengan SPK No. 04/BM-DPUPR/SWL-2022;
14. Belanja Modal jalan Kota (Pembukaan dan Pengecoran Jalan Lokuang Dusun Tengah Sawah) sebesar Rp162.533.000,00 dengan SPK No. 56/BM-DPUPR/SWL-2022;
15. Pengecoran Beton Tumbuk Serta Pelengkap dari Loban ke Puskesmas Pembantu Batu Kualii Dusun Ujung Karang/Tanjung Sago Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi sebesar Rp94.279.000,00 dengan SPK No. 53/BM-DPUPR/SWL-2022;
16. Pengecoran jalan dan Bangunan Pelengkap jalan Loban ke Lontiak Juar Dusun Ujung Karang Desa BatuTanjung (229) sebesar Rp177.802.000,00 dengan SPK No. 41/BM-DPUPR/SWL-2022;
17. Pengecoran Jalan Dari Luak Molik ke Kosiek Beserta Bangunan Pelengkap di Dusun Tanjung Mulia Desa Tumpuk Tangah Kec. Talawi sebesar Rp147.824.000,00 dengan SPK No. 09/BM-DPUPR/SWL-2022;
18. Pengecoran Jalan di Dusun Kampung Baru sebesar Rp197.733.000,00 dengan SPK No. 31/BM-DPUPR/SWL-2022;
19. Pengecoran Jalan Kayu Gadang -Sikalang sebesar Rp98.125.000,00 dengan SPK No. 01/BM-DPUPR/SWL-2022;
20. Belanja Modal Jalan Kota (Pengecoran Jalan Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban) sebesar Rp73.283.000,00 dengan SPK No. 40/BM-DPUPR/SWL-2022;
21. Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan berserta Sarana dan Prasarana Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu) sebesar Rp98.460.000,00 dengan SPK No. 43/BM-DPUPR/SWL-2022;



22. Peningkatan Jalan beserta Sarana dan Prasarana Pelengkap Dusun Air Gantang Desa Kubang Utara Sikabu) sebesar Rp78.410.000,00 dengan SPK No. 42/BM-DPUPR/SWL-2022;
23. Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan beserta Sarana dan Prasarana Pelengkap Jalan Menuju Lubuak Antuan) sebesar Rp78.279.000,00 dengan SPK No. 10/BM-DPUPR/SWL-2022;
24. Peningkatan Jalan beserta Sarana dan Prasarana Pelengkap Batu Lombu Dusun Polak Datai Desa Kubang Tengah sebesar Rp58.243.000,00 dengan SPK No. 17/BM-DPUPR/SWL-2022;
25. Peningkatan jalan, Dam dan Bangunan Pelengkap Dusun Guguak Pauah Kandang Kabau Lurah Nuang Desa Kubang Tengah sebesar Rp107.828.000,00 dengan SPK No. 44/BM-DPUPR/SWL-2022;
26. Belanja Modal Jalan Kota ( Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap Dandang Batu Nan Godang Dusun Guguak Pauah (136)) sebesar Rp46.635.000,00 dengan SPK No. 52/BM-DPUPR/SWL-2022;
27. Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Luak manih menuju Guguak Pauah Kubang Tengah) sebesar Rp88.234.000,00 dengan SPK No. 50/BM-DPUPR/SWL-2022;
28. Peningkatan Jalan di Dusun Rumbio sebesar Rp177.670.000,00 dengan SPK No. 16.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
29. Peningkatan Jalan di Kaniki Dusun Talang Tului sebesar Rp197.716.000,00 dengan SPK No. 08.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
30. Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan Simpang Jagung-SMA 3 Kolok Mudik) sebesar Rp970.350.000,00 dengan SPK No. 60/BM-DPUPR/SWL-2022;
31. Peningkatan Jalan Pangincuang Pudiong Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak sebesar Rp198.016.000,00 dengan SPK No. 58.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
32. Biaya perencanaan Rekonstruksi Jalan(Jalan Muaro Kalaban-Pondok Kapur (014) sebesar Rp85.171.000,00;
33. Belanja Modal Jalan Kota (Bangunan pelengkap jalan Lunto-Lumindai (045)) sebesar Rp94.300.000,00 dengan SPK No. 19.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
34. Muaro Kalaban-Taratak Bancah (050) (DAK REGULER) sebesar Rp6.321.095.000,00 dengan SPK No. 38.B/BM-DPUPR/SWL-2022;



35. Pemasangan Daam Penahan Tanah Jalan dan Pembuatan Drainase di Surau Lomba Dusun Tigo Tingka Desa Lunto Timur sebesar Rp94.291.000,00 dengan SPK No. 06/BM-DPUPR/SWL-2022;
36. Belanja Modal Jalan Kota (Pembuatan Daam dan Riol di Jalan Manan Jati Gunung Timbago RT 01 RW 02 Kel. Saringan) sebesar Rp88.328.000,00 dengan SPK No. 13/BM-DPUPR/SWL-2022;
37. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Batang Kumanih ke Sawah Dalam Dusun Bonow Kumanih Ateh Desa Tumpuk Tangah sebesar Rp46.186.000,00 dengan SPK No. 68/BM-DPUPR/SWL-2022;
38. Pembuatan Dinding Penahan Tanah dari Lontiak Juar ke Guguak Cibodak Desa Batu Tanjung (228) sebesar Rp177.454.000,00 dengan SPK No. 57. A/BM-DPUPR/SWL-2022;
39. Pembuatan rehab jalan cor beton dan daam RT 04 RW 02 kelurahan kubang sirakuk utara sebesar Rp98.278.000,00 dengan SPK No. 12/BM-DPUPR/SWL-2022;
40. Pembuatan Saluran Drainase di Jalan Utama Desa (Perbatasan Lunto) dan Perbatasan BBS sebesar Rp147.850.000,00 dengan SPK No. 45/BM-DPUPR/SWL-2022 ;
41. Belanja Modal Jalan Kota (Pengecoran bahu jalan SPMN 2 menuju Kampung Surian) sebesar Rp147.799.000,00 dengan SPK No. 14.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
42. Penedhaman dibawah bak Pamsimas belakang Dusun Luak Badai Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp94.312.000,00 dengan SPK No. 47.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
43. Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan dan Pengecoran Bahu Jalan SMP 06-Pintu Lubang Desa Muaro Kalaban ) sebesar Rp46.637.000,00 dengan SPK No. 37/BM-DPUPR/SWL-2022;
44. Belanja Modal Jalan Kota (Rehab daam dan riol jalan microwave Desa Silungkang Oso (117)) sebesar Rp73.316.000,00 dengan SPK No. 48/BM-DPUPR/SWL-2022;
45. Rehab Jalan pasar Talawi - Batu Kualii sebesar Rp487.862.000,00 dengan SPK No. 51.A/BM-DPUPR/SWL-2022;



46. Rehab Jalan Sopan Tanah - Tigo Tanjung sebesar Rp482.131.000,00 dengan SPK No. 55.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
47. SDN 09 - Sawah Taratak Hilir (158) (DAK REGULER) sebesar Rp1.443.888.000,00 dengan SPK No. 29.A/BM-DPUPR/SWL-2022;
48. Simpang Puskesmas-Microwave (117) (DAK REGULER) sebesar Rp2.590.273.000,00 dengan SPK No. 27/BM-DPUPR/SWL-2022;
49. Simpang Santur-SMEA Talawi (052) (DAK REGULER) sebesar Rp7.450.406.000,00 dengan SPK No. 33.B/BM-DPUPR/SWL-2022;
50. Jalan Pasar Tanjung Mulia - Guguak Galo (070) sebesar Rp187.363.000,00 dengan SPK No. 64/BM-DPUPR/SWL-2022;
51. Jalan Sikalang Tamda Rantih (073) sebesar Rp177.408.000,00 dengan SPK No. 61/BM-DPUPR/SWL-2022;
52. Pembuatan Daam beserta Bangunan Pelengkap di Dusun Kandang Desa Lunto Barat sebesar Rp173.728.000,00 dengan SPK No. 65/BM-DPUPR/SWL-2022;
53. Pembuatan Daam di atas kantor Camat Lembah Segar Kel. Aur Mulyo sebesar Rp147.694.000,00 dengan SPK No. 63/BM-DPUPR/SWL-2022;
54. Honor Perencana (Lanjutan Pembangunan Jalan Perbatasan Desa Lunto Timur dan Kubang Tengah (Batu Lombu)) sebesar Rp3.300.000,00;
55. Pemasangan Daam Samping Rumah Legino RT 01 RW 04 Durian II sebesar Rp88.289.000,00 dengan SPK No. 33/CK-DPUPR/SWL-2022;
56. Pembangunan Daam Aliran Sungai Sarosa Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah sebesar Rp122.770.000,00 dengan SPK No. 69/CK-DPUPR/SWL-2022;
57. Pembangunan DAM Sawah Taratak Mudiak Dekat Rumah Doni Sate Silungkang sebesar Rp73.342.000,00 dengan SPK No. 62/CK-DPUPR/SWL-2022;
58. Pembangunan Dinding Penahan tanah Ruang Gizi RSUD Sawahlunto sebesar Rp395.597.860,00 dengan SPK No. 49.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
59. Pembangunan Jalan Beton Tumbuk Beserta Bangunan Pelengkap dari Gudang Pupuk ke Sungai Bay Desa Batu Tanjung sebesar Rp98.315.000,00 dengan SPK No. 85. A/CK-DPUPR/SWL-2022;
60. Pembangunan Jalan dari Guguak Cibodak ke Sawah Pucuak Desa Talawi Hilie sebesar Rp117.857.000,00 dengan SPK No. 45/CK-DPUPR/SWL-2022;



61. Pembangunan jalan dari kobun karambia menuju Guguk Lintang Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp88.284.000,00 dengan SPK No. 28/CK-DPUPR/SWL-2022;
62. Pembangunan Jalan Drainase dan Daam Menuju Puncak Sawter Desa Muaro Kalaban sebesar Rp147.869.000,00 dengan SPK No. 61/CK-DPUPR/SWL-2022;
63. Pembuatan Daam Badan Jalan di Belakang Rumah Sukamto Wandu RT 02 RW 02 Tansi Gunung Kel. Air Dingin sebesar Rp68.312.000,00 dengan SPK No. 20/CK-DPUPR/SWL-2022;
64. Pembuatan Daam dan Riol di RT 04 RW 02 Kel. Aur Mulyo Kec. Lembah Segar sebesar Rp147.780.000,00 dengan SPK No. 31/CK-DPUPR/SWL-2022;
65. Pembuatan Daam dan Riol dusun Karang Anyar Desa Santur sebesar Rp78.339.000,00 dengan SPK No. 86/CK-DPUPR/SWL-2022;
66. Honor Perencana (Pembuatan Daam dan saluran jalan sawah godang Desa Lumindai ) sebesar Rp3.300.000,00 dengan SPK No. 86/CK-DPUPR/SWL-2022;
67. Pembuatan Daam di RT 04 RW 02 Pondok Kapur Kel. Kubang Sirakuk Selatan sebesar Rp147.830.000,00 dengan SPK No. 56/CK-DPUPR/SWL-2022
68. Honor Perencana (Pembuatan Daam di RW 01 KEL. Kubang Sirakuk Utara) sebesar Rp6.725.000,00;
69. Pembuatan Daam di TPU Lubang Panjang sebesar Rp147.670.000,00 dengan SPK No. 18/CK-DPUPR/SWL-2022;
70. Pembuatan Daam Jalan Ruas Dusun Kampung Baru Ke Padang Malintang sebesar Rp88.178.000,00 dengan SPK No. 19.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
71. Pembuatan Dam dan Rehap Drainase di Belakang Mushalla Mujaddadiyah Kampung Teleng RT 001/RW 002 sebesar Rp98.242.000,00 dengan SPK No. 47/CK-DPUPR/SWL-2022;
72. Pembuatan Jalan Beton Tumbuk ke Area Pemotongan Hewan Qurban di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudik Kec.Barangin sebesar Rp73.289.000,00 dengan SPK No. 38/CK-DPUPR/SWL-2022;
73. Pembuatan Jalan Lontiak - Tombang - Talago Desa Lunto Timur sebesar Rp. 62.274.000,00 dengan SPK No. 78.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
74. Pembuatan pagar beton di jalan RT 01 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Utara sebesar Rp98.294.000,00 dengan SPK No. 54/CK-DPUPR/SWL-2022;



75. Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Samping Gudang PT BA sebesar Rp88.216.000,00 dengan SPK No. 22/CK-DPUPR/SWL-2022;
76. Pembukaan dan Pengerasan Jalan Menuju Rencana Museum Songket dan TPU di Dusun Lubuak Nan Godang Silungkang Tigo sebesar Rp73.168.000,00 dengan SPK No. 78.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
77. Pembukaan Jalan Baru di Kenagarian Kolok Kecamatan Barangin sebesar Rp197.614.000,00 dengan SPK No. 14/CK-DPUPR/SWL-2022;
78. Pembukaan Jalan Dekat Rumah Tuak Bili di Sumpahan sebesar Rp73.286.000,00 dengan SPK No. 35/CK-DPUPR/SWL-2022;
79. Pembukaan jalan Lurah Duri - Guguak Sulah Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tangah sebesar Rp122.868.000,00 dengan SPK No. 58/CK-DPUPR/SWL-2022;
80. Pengecoran Jalan dan pembuatan Drainase Desa Santur sebesar Rp97.977.000,00 dengan SPK No. 34/CK-DPUPR/SWL-2022;
81. Pengecoran Jalan dari depan mushalla Wustho ke Posyandu Kasih Ibu Kel. Kubang Sirakuk Selatan sebesar Rp98.133.000,00 dengan SPK No. 23/CK-DPUPR/SWL-2022;
82. Pengecoran Jalan dari Rumah Agus sampai Ladang Pak Bahar RT 01 RW 01 Kel. Saringan sebesar Rp98.295.000,00 dengan SPK No. 32/CK-DPUPR/SWL-2022;
83. Pengecoran Jalan di RT 04 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Utara sebesar Rp78.258.000,00 dengan SPK No. 55/CK-DPUPR/SWL-2022;
84. Peningkatan jalan Belimbing Sungkai Desa Muaro Kalaban sebesar Rp73.338.000,00 dengan SPK No. 58/CK-DPUPR/SWL-2022;
85. Peningkatan Jalan beserta bangunan pelengkap dari Luak Karak ke Pulei Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah sebesar Rp132.763.000,00 dengan SPK No. 17/CK-DPUPR/SWL-2022;
86. Peningkatan Jalan Beserta Bangunan Pelengkap di Belakang Homestay Oma Tangsi Gunung RT 01 RW 02 Kel. Air Dingin sebesar Rp98.344.000,00 dengan SPK No. 46/CK-DPUPR/SWL-2022;
87. Honor Perencana (Peningkatan jalan Beserta Bangunan Pelengkap di pemukiman masyarakat Desa Tarata Bancah) sebesar Rp3.300.000,00
88. Peningkatan Jalan Beton Tumbuk Dari Surau Bungo ke Sungai Kandung Desa Batu Tanjung sebesar Rp98.289.000,00 dengan SPK No. 88.A/CK-DPUPR/SWL-2022;



89. Peningkatan Jalan Bungo Rayo Talago Desa Lunto Timur sebesar Rp147.710.000,00 dengan SPK No. 30/CK-DPUPR/SWL-2022;
90. Peningkatan Jalan dan Pembuatan Jembatan Sentra Produksi Dusun Sawah Talang, Sungai Loban, Tambun Batu Desa Muaro Kalaban sebesar Rp98.314.000,00 dengan SPK No. 100/CK-DPUPR/SWL-2022;
91. Peningkatan jalan Dari andi perabot menuju kelurahan saringan sebesar Rp117.669.000,00 dengan SPK No. 26.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
92. Peningkatan Jalan Dari Simpang Buk Ninin ke Sawah Dalam Dusun Padang Malintang Desa Santur sebesar Rp98.332.000,00 dengan SPK No. 44/CK-DPUPR/SWL-2022;
93. Peningkatan Jalan Guguak Tuo Desa Lunto Barat sebesar Rp122.863.000,00 dengan SPK No. 72/CK-DPUPR/SWL-2022;
94. Honor Perencana (Peningkatan jalan sarana dan prasarana Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu) sebesar Rp3.300.000,00
95. Peningkatan jalan sarana dan prasarana jalan Lubuak Nago Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp78.339.000,00 dengan SPK No. 75/CK-DPUPR/SWL-2022;
96. Peningkatan Jalan sarana dan Prasarana jalan Parik Buayan Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah sebesar Rp78.291.000,00 dengan SPK No. 82/CK-DPUPR/SWL-2022;
97. Peningkatan jalan sarana dan Prasarana Kebun Karambia Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp78.291.000,00 dengan SPK No. 41/CK-DPUPR/SWL-2022;
98. Honor Perencana (Peningkatan Jalan Sentra Produksi sawah tambang, Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban) sebesar Rp3.300.000,00;
99. Honor Perencana (Peningkatan Jalan Surau Lomba - Kumpanai Desa Lunto Timur ) sebesar Rp3.300.000,00;
100. Rehab Jalan Beserta Bangunan Pelengkap Dari Goduang ke Batang Kumani Dusun Bonou Desa Tumpuk Tengah sebesar Rp98.343.000,00 dengan SPK No. 70/CK-DPUPR/SWL-2022;
101. Rehab Jalan beserta bangunan pelengkap di SD Pasar Baru Kel. Durian I sebesar Rp117.844.000,00 dengan SPK No. 12/CK-DPUPR/SWL-2022;



102. Pelebaran Jalan di Tangsi Gunung RT 01 RW 01 Kel. Durian I sebesar Rp98.103.000,00 dengan SPK No. 109/CK-DPUPR/SWL-2022;
103. Pembangunan Daam dan Riol di Sumur Waru RT 04 Kel. Durian I sebesar Rp98.069.000,00 dengan SPK No. 107/CK-DPUPR/SWL-2022;
104. Pembangunan Jalan dari PAUD Kasih Ibu Menuju Buah Bungo Atas sebesar Rp69.694.000,00 dengan SPK No. 127/CK-DPUPR/SWL-2022;
105. Pembuatan Daam dan Saluran di Sawah Tambang, Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban sebesar Rp97.805.000,00 dengan SPK No. 119/CK-DPUPR/SWL-2022;
106. Pengecoran dan Penedaaman Jalan ke Kuburan Waringin sebesar Rp98.053.000,00 dengan SPK No. 115/CK-DPUPR/SWL-2022;
107. Pengecoran Jalan dan Bangunan Pelengkap di desa muaro kalaban sebesar Rp72.787.000,00 dengan SPK No. 129/CK-DPUPR/SWL-2022;
108. Pengecoran Jalan di Perumnas Lembah Santur sebesar Rp98.353.000,00 dengan SPK No. 105/CK-DPUPR/SWL-2022;
109. Peningkatan Jalan Kantor BNN sebesar Rp98.055.000,00 dengan SPK No. 95.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
110. Peningkatan Jalan Ke Makam syech Tompok sebesar Rp98.074.000,00 dengan SPK No. 118/CK-DPUPR/SWL-2022;
111. Peningkatan/Pembuatan Jalan Menuju Workshop BLK Kota Sawahlunto sebesar Rp78.359.000,00 dengan SPK No. 106/CK-DPUPR/SWL-2022;
112. Perbaikan Jalan dan Riol Komplek Perumahan Lembah Santur II Blok O sebesar Rp98.085.000,00 dengan SPK No. 120/CK-DPUPR/SWL-2022;
113. Pembangunan Jembatan Dan Jalan Di Air Taganang Air Gantang Desa Sikabu sebesar Rp51.635.000,00 dengan SPK No. 54/BM-DPUPR/SWL-2022;
114. Pembuatan Dinding Penahan Tanah di Kaki Jembatan Anak Sungai Tambilik Mudiak Lurah Rp177.825.000,00 dengan SPK No. 18/BM-DPUPR/SWL-2022;
115. Rehabilitasi Jembatan Dusun Guguak Palam sebesar Rp197.870.000,00 dengan SPK No. 46/BM-DPUPR/SWL-2022;
116. Pembangunan Kincir Air Dari Rangka Baja Untuk Kelompok Tani Desa Talawi Hilir sebesar Rp178.358.000,00 dengan SPK No. 23/SPK-PJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;
117. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kolok Mudik sebesar Rp98.595.000,00 dengan SPK No. 20/SPK-PJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;



118. Pembangunan Jaringan Irigasi Sibolin Dusun Tanjung Medan Desa Lunto Barat sebesar Rp98.594.000,00 dengan SPK No. 18/SPK-PJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;
119. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi (Pembangunan Jaringan Irigasi Sungai Abu dan Bangunan Pelengkap) sebesar Rp198.329.000,00 dengan SPK No. 19/SPK-PJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;
120. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi (Pembangunan Jaringan Irigasi Talawi Mudik) sebesar Rp123.298.000,00 dengan SPK No. 24/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
121. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi (Peningkatan Jaringan Irigasi Di Dusun Gunung Balai Desa Balai Batu Sandaran) sebesar Rp198.270.000,00 dengan SPK No. 22/SPK-PJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;
122. Rehabilitasi Bendung Sawah Lawas Mudik Desa Talago Gunung sebesar Rp553.691.000,00 dengan SPK No. 28.A/SDA-DPUPR/SWL-2022;
123. Rehabilitasi Irigasi Lubuk Durian Buah Balai Desa Lunto Timur sebesar Rp98.595.000,00 dengan SPK No. 15/SPK-RJIP/SDA-DPUPR/SWL-2022;
124. Lanjutan Normalisasi Anak Sungai di Sungai Loban Dekat Sumur Bor Desa Muaro Kalaban sebesar Rp88.573.000,00 dengan SPK No. 33/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
125. Normalisasi Sungai di RT 04 RW 02 Kel. Durian I sebesar Rp173.255.000,00 dengan SPK No. 17.A/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
126. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Aliran Sungai Dari Kaloden Ke Sialang, Dusun Sialang Desa Kumbayau sebesar Rp123.347.000,00 dengan SPK No. 14/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
127. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban sebesar Rp78.596.000,00 dengan SPK No. 04/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
128. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Lurah Dumarang Desa Kolok Mudik sebesar Rp98.596.000,00 dengan SPK No. 21/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
129. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Padang Sarai Desa Kolok Mudik sebesar Rp98.594.000,00 dengan SPK No. 11/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;



130. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Laweh Saiyo Desa Talago Gunung sebesar Rp78.595.000,00 dengan SPK No. 10/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
131. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Taluak Sungai Malakutan Desa Talago Gunung sebesar Rp58.539.000,00 dengan SPK No. 29/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
132. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sawah Tobiang Desa Kolok Mudik sebesar Rp78.630.000,00 dengan SPK No. 12/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
133. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sepanjang Batang Lasi Desa Silungkang Tigo sebesar Rp198.345.000,00 dengan SPK No. 31. A/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
134. Pemasangan Dinding Penahan Sungai/Tebing Di Sungai Malakutan Desa Kolok Nan Tuo sebesar Rp198.269.000,00 dengan SPK No. 05/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
135. Pembuatan Bronjong Di Sepanjang Aliran Sungai Daerah Kincir Dusun Tengah Sawah Silungkang Duo sebesar Rp198.286.000,00 dengan SPK No. 13/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
136. Pembuatan Daam di Pinggir Batang Lunto Inpress Desa Lunto Timur sebesar Rp98.594.000,00 dengan SPK No. 06/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
137. Pembuatan Dinding Penahan Tebing Masjid Nurul Hidayah Salak Dusun Pulau Ambacang di Sungai Ombilin Desa Salak sebesar Rp198.326.000,00 dengan SPK No. 07/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
138. Penedamaman Anak Lurah Di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban sebesar Rp73.574.000,00 dengan SPK No. 33/SPK-NRS/SDA-DPUPR/SWL-2022;
139. Pembangunan Embung Di Desa Kumbayau sebesar Rp173.259.000,00 dengan SPK No. 09/SPK-PEPA/SDA-DPUPR/SWL-2022;
140. Pembangunan Embung Di Lontiak Dusun Ronggung Desa Bukik sebesar Rp173.324.000,00 dengan SPK No. 16.A/SPK-PEPA/SDA-DPUPR/SWL-2022;
141. Pembangunan Penampungan Air Baku Dusun Parigi sebesar Rp198.352.000,00 dengan SPK No. 35/SPK-PUAB/SDA-DPUPR/SWL-2022;



142. Lanjutan Pembuatan Riol Sawah Karambia Polak Godang Sapan Kincuang desa Kolok Mudik sebesar Rp107.838.000,00 dengan SPK No. 29/CK-DPUPR/SWL-2022;
143. Pembuatan Drainase dari rumah Eni Sapitri dusun pasar mudik desa Lumindai sebesar Rp98.293.000,00 dengan SPK No. 94/CK-DPUPR/SWL-2022;
144. Pembuatan Drainase di Belimbing Dusun Balai-Balai Desa Muaro kalaban sebesar Rp73.328.000,00 dengan SPK No. 78/CK-DPUPR/SWL-2022;
145. Pembuatan Drainase di Sawah Tambang Desa Muaro kalaban sebesar Rp73.260.000,00 dengan SPK No. 58/CK-DPUPR/SWL-2022;
146. Pembuatan Drainase Sapan Tiri Mangkiruang sebesar Rp98.291.000,00 dengan SPK No. 39/CK-DPUPR/SWL-2022;
147. Pembuatan Riol Daam Gendong Dari Guguk Palan ke Lontiak Dusun Dalimo Gadang sebesar Rp98.270.000,00 dengan SPK No. 83/CK-DPUPR/SWL-2022;
148. Pembuatan Riol Samping Rumah Miron Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp48.617.000,00 dengan SPK No. 59/CK-DPUPR/SWL-2022;
149. Pembuatan Riol Tepi Jalan Dekat Rumah Pak Bas Dari SMP 6 Menuju Polsek Muaro Kalaban sebesar Rp73.128.000,00 dengan SPK No. 01.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
150. Peningkatan Saluran Drainase Sawahlung Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban sebesar Rp68.289.000,00 dengan SPK No. 37/CK-DPUPR/SWL-2022;
151. Rehabilitasi Saluran Drainase di RT 03 RW 05 Kelurahan Saringan sebesar Rp88.239.000,00 dengan SPK No. 63.A/CK-DPUPR/SWL-2022;
152. Pembuatan Riol dan Penahan Tebing Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu sebesar Rp74.779.000,00 dengan SPK No. 126/CK-DPUPR/SWL-2022;
153. Peningkatan dan Optomalisasi SPAM Kota Sawahlunto Spesifikasi : Peningkatan dan Optomalisasi SPAM Kota Sawahlunto sebesar Rp2.968.665.000,00 dengan SPK No. 03.B/CK-DPUPR-DDUB/SWL-2022;
154. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaian di Desa Balai Batu Sandaran (DAK) sebesar Rp190.890.000,00 dengan SPK No. 03/DAK-AIR BERSIH/SWL-2022;
155. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaian di Desa Bukit Gadang (DAK) sebesar Rp384.660.000,00 dengan SPK No. 01.A/CK-DPUPR/SWL-2022;



156. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kubang Utara Sikabu (DAK) sebesar Rp339.660.000,00 dengan SPK No. 04/DPUPR/DAK-AIRBERSIH/SWL-2022;
157. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Muaro Kalaban (DAK) sebesar Rp861.033.800,00 dengan SPK No. 01/CK-DPUPR-DAK/SWL-2022;
158. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Sikalang (DAK) sebesar Rp199.890.000,00 dengan SPK No. 01/DAK-AIR BERSIH /SWL-2022;
159. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Silungkang Oso (DAK) sebesar Rp226.890.000,00 dengan SPK No. 02/DAK-AIR BERSIH/SWL-2022;
160. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Silungkang Tigo (DAK) sebesar Rp272.160.000,00 dengan SPK No.06/DAK-AIR BERSIH/SWL-2022;
161. Honor Perencana (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kelurahan Durian I (DAK)) sebesar Rp22.500.000,00;
162. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Tumpuk Tengah (DAK) sebesar Rp249.390.000,00 dengan SPK No.05/DAK-AIR BERSIH /SWL-2022;
163. Jasa pemindahan utilitas PLN, Telokm dan PDAM sebesar Rp159.442.240,00;
- f. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan KesbangPol & BPD adalah belanja modal pembuatan cek daam sebesar Rp47.553.000,00;
- g. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah belanja honor perencanaan pembuatan cek daam sebesar Rp2.425.000,00.
- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp3.906.891.540,00 pada tahun 2022 tersebar pada SKPD se-Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76  
Rincian Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Asset Tetap

No	SKPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Lembah Segar	Perbaikan Riol RT 04 RW 02	40.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		<u>3.866.891.540,00</u>
		Pemeliharaan Jalan Sawah Rasau-Sangkar Puyuh	65.811.000,00
		Pemeliharaan jalan Simpang Napar - Resort Wisata (Pengaspalan)	205.665.000,00
		Pemeliharaan Jalan Polak Datar - Silungkang	47.482.400,00
		Pemeliharaan Jalan M.Yamin - Bukit Gadang	70.041.000,00
		Pemeliharaan Jalan Kelok Cendol - Saringan	64.792.000,00
		Pemeliharaan Jalan Sungai Abu- Guguak Lalang	63.952.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
		Pemeliharaan Jalan Cemara - Air Dingin	71.039.000,00
		Pemel Jln Puskesmas Kampung Teleng Simalukuik	179.419.000,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Napar-Resort Wisata	14.547.220,00
		Pemeliharaan Jalan Kelok Sago-Sapan	42.522.820,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Sapan-Kelok Cendol	42.120.000,00
		Pemeliharaan Jalan Kantor Desa Sikabu-Simpang Embung	38.636.400,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Embung-Sumpahan	44.213.600,00
		Pemeliharaan Jalan Gulang-Gulang – Karang anyar	37.925.400,00
		Pemeliharaan Jalan Pasar Talawi-Batu Kual	39.086.000,00
		Pemeliharaan Jalan Batu Kual-Kumbayau	33.750.800,00
		Pemeliharaan Jalan Tigo Tanjuang - Datar Mansiang	48.251.800,00
		Pemeliharaan Jalan SP. Masjid Tigo Tanjuang - Tanah Kuning	46.901.000,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Lurah Antunik - Bungo	51.184.200,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Kubang-Lunto	46.161.200,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Masjid Syuhada - Air Dingin	50.406.800,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Kubang-Lontiak Maloweh	43.567.000,00
		Pemeliharaan Jalan Simpang Balimbiang-Sapan Cabai	36.796.500,00
		Pemeliharaan Jalan Tumpuk Tengah - Datar Mansiang	47.943.600,00
		Pemeliharaan Jalan Pasar Tanjung Mulia - Guguk Galo	44.468.600,00
		Pemeliharaan Jembatan Sikalang - Tamda Rantih	52.752.800,00
		Pemeliharaan Jembatan Pasar Sapan - Simp. Surian	66.487.000,00
		Pemeliharaan Jembatan Mesjid Jamik Munawwarah	33.790.400,00
		Rehab Jalan Desa Kolok Mudiak	55.414.000,00
		Lanjutan Bronjong Mess Arga	104.070.000,00
		Pembuatan Daam dan Saluran Di Desa Kolok Mudik	54.661.000,00
		Perbaikan Lintasan Pacu Kuda Kandih dan Sarana Lainnya	197.733.000,00
		Peningkatan Jalan Durian I	146.929.000,00
		Penambahan Fasilitas Kandang Kuda Kandih	197.699.000,00
		Rehab Jalan Kokes Rusunnawa	157.509.000,00
		Pengecoran Parkir TPU Kayu Gadang	54.923.000,00
		Operasional/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Batang Piruko	110.256.800,00
		Operasional/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Koto Tinggi	82.963.200,00
		Operasional / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Subangko dan bandar Panjang	189.161.000,00
		Operasional / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sawah Lurah Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir	101.501.000,00
		Optimalisasi SPAM Dusun Luak Badai Indah Desa Kubang Utara Sikabu	48.842.000,00
		Optimalisasi SPAM Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu	76.710.000,00
		Optimalisasi SPAM Dusun Polak Datai Desa Kubang Tengah	47.225.000,00
		Optimalisasi SPAM Kota Sawahlunto	147.946.000,00
		Pemasangan Daam di Puskesmas Tumpuk Tengah	180.700.000,00
		Pemasangan Bronjong di Puskesmas Tumpuk Tengah	190.874.000,00
		Pembuatan Drainase Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak	43.889.000,00
		Perbaikan Drainase Kelurahan Saringan	48.171.000,00
		JUMLAH	3.906.891.540,00

- 3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp56.905.298.213,00, dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.77  
Rincian Mutasi Antara SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesbangpol dan PBD	PPKD	14.993.784.116,00	BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PPKD	12.817.737.148,00	BAST No. 028/67/DPUPR-SWL/2022
3	PPKD	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.234.702.685,00	BAST No:134.4/003/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
4	PPKD	Dinas Perhubungan	12.817.737.148,00	BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
5	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.041.337.116,00	BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
JUMLAH			56.905.298.213,00	

- 4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena penambahan dari reklas sebesar Rp2.911.300.105,70 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.78  
Rincian Reklasifikasi Aset

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jalur Pendistrian	1	1.201.431.892,88	Gedung & Bangunan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Lampu PJU Solar cell	13	195.748.889,00	Gedung & Bangunan
Kecamatan Barangin	Pengadaan Lanjutan Pembuatan / Pengadaan Pagar Lap. Rumah 4 RT 02/RW 03, Kel. Durian II	1	60.000.000,00	Gedung & Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			<u>1.454.119.323,82</u>	
	Biaya perencanaan pembuatan dan rehab riol disepanjang jalan khatib sulaiman dari SMP 9 sawahlunto ke tonggak pela		9.100.447,00	KDP
	Lanjutan pengerasan jalan rambut desa kumbayau ke lontiak desa tumpuk tengah (biaya perencanaan)		5.380.000,00	KDP
	Lanjutan jalan dari pandan perkuburan sawah tengah ke perumnas tali mato dusun talago desa talawi hilir (perencanaan)		3.590.000,00	KDP
	Pembuatan riol stasiun desa silungkang tigo dusun stasiun (perencanaan)		5.380.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembangunan jalan dari batu tajam ke lubuk pinang		3.830.521,00	KDP
	Biaya perencanaan lanjutan jalan dari jambu ke parik desa tumpuk tengah		5.136.723,00	KDP
	Biaya perencanaan perbaikan jalan sarana pendukung lainnya dibatu poca ke batang lunto bawah desa lumindai		3.830.522,00	KDP
	Biaya perencanaan pengecoran bahu jalan di desa tarak bancah kecamatan silungkang		5.136.722,00	KDP
	Biaya perencanaan pemasangan daam pengaman SD 17 dan perbaikan jalan		3.362.500,00	KDP



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
	Biaya perencanaan lanjutan jalan muko longguo ke binjai kampung atas tumpuk tengah		5.138.842,00	KDP
	Biaya perencanaan bandar pasar talawi plat deker desa talawi mudik		3.793.841,00	KDP
	Biaya perencanaan sambungan riol di jalan pisang kolek atas dusun rumbio desa silungkang oso		2.102.431,00	KDP
	Biaya perencanaan pelebaran jalan rumah minar ke jembatan gantung desa rantih		3.793.841,00	KDP
	Biaya perencanaan coran dan daam dari rumah rundo ke sawah sariak ladang laweh desa talago gunung		3.092.429,00	KDP
	Biaya perencanaan coran dan daam jalan ke tanjung dusun batu tajam		2.267.429,00	KDP
	Biaya perencanaan coran jalan dusun luak mani menuju dusun guguk pauah		3.793.842,00	KDP
	Biaya perencanaan peningkatan jalan roda 4 lokasi kuak ke lokuang panai desa lunto timur		5.138.842,00	KDP
	Biaya perencanaan pengerasan jalan dan daam puncak ngalau tinggi diatas rumah atuak Bili sumpahan		2.267.429,00	KDP
	Biaya perencanaan lanjutan pengecoran beton tumbuk jalan lubuk simalukuik menuju dusun padang elok		3.793.842,00	KDP
	Biaya perencanaan pemasangan bronjong lokasi tapuang gadang dekat rumah pak mali dusun guguk bungo desa lumindai		5.138.842,00	KDP
	Biaya perencanaan cor jalan sambungan lurah kumbuh cubadak desa tumpuk tengah		3.004.156,00	KDP
	Biaya perencanaan cor jalan sambungan lurah kumbuh parik desa tumpuk tengah / kumbayau		5.138.842,00	KDP
	Biaya perencanaan cor sambungan jalan karak ke silundang desa tumpuk tengah		3.092.429,00	KDP
	Biaya perencanaan pesangan daam dan dan rehab sumber air bersih di luak godang-padang elok desa kubang utara sikabu		3.004.156,00	KDP
	Biaya perencanaan pemasangan batu bronjong lurah panjang, panjang 30 m, tinggi 3,5 meter dusun buki obang desa tumpuk tengah		3.793.842,00	KDP
	Pembuatan daam tebing dekat ponimin tanjung sari		3.300.000,00	KDP
	Jalan /dinding penahan rt 01-rt05 kel aur mulyo		6.000.000,00	KDP
	Pembuatan Jalan Lingkungan Jalan Raya Lunto Ke Sungai Langsi Desa Lunto Barat		2.230.000,00	KDP
	Jalan Lantiak Kumaniah Ke Lakuang Masjid Desa Tumpuk Tengah (Biaya Perencanaan)		5.380.000,00	KDP
	Biaya Perencanaan Riol Jalan Dusun Guguk Pauah KeLubek		5.136.724,00	KDP
	Biaya Perencanaan-Lanjutan Jalan Dari Jambu Ke Parik Desa Tumpuk Tengah		5.136.723,00	KDP
	Biaya Pengecoran-Cor Jalan Simpang Desa Tumpuk Tengah		3.794.413,00	KDP
	Biaya Pengecoran-Pengerasan Jalan Bukik Kubang Menuju Kaniki Dusun Dalimo Gadang Desa Pasar Kubang		2.771.149,00	KDP



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas dari
	Jalan lakuk ke laing dusun bonou desa tumpuk tengah		29.883.929,92	KDP
	Pembangunan bandar dari puskesmas sampai ombilin dusun talago/dusun kubang gajah		4.750.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembuatan bronjong lubuak piliang silungkang tigo		4.035.000,00	KDP
	Pembuatan riol belakang pasar sapan-batas durian 1 rt 01/rw 01 kelurahan durian 1		5.380.000,00	KDP
	Biaya perencanaan rehabilitas irigasi dan pembuatan tali bandar sawah lubuk perahu dusun gugauk balang desa talago gunung		3.725.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembangunan irigasi batang mindai dari batu godang ke paliang desa lumindai		5.680.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembangunan irigasi sawah dari lubuk durian ke binjai di desa lunto timur		3.926.680,00	KDP
	Pembuatan Dam Tepi Lurah Sungkiang Dusun Stasiun Desa Silungkang Tigo (Perencanaan)		2.230.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembuatan daam pinggir sungai dekat rumah pak muni almarhum (mantan ketua rt 03)pondokbatu		2.775.000,00	KDP
	Biaya perencanaan pembuatan daam daerah akiran sungai batang lunto lokasi lubuak ampalu desa lunto timur		4.385.000,00	KDP
	Biaya perencan riol jalan dusun gugauk pauah ke lubek		5.136.724,00	KDP
	Peningkatan sarana prasarana penyediaan air minum di desa batu tanjung - sikalang (dakipd)		50.403.000,00	KDP
	Peningkatan / Rehab Drainase Di Kelurahan Tanah Lapang		4.000.000,00	KDP
	Jembatan Gantung Dari Sawah Baru Ke Lumbu Dan Sipajar Desa Talawi Hilir		800.329.018,00	KDP
	Pembuatan Saluran Primer Kel Air Dingin		6.000.000,00	KDP
	Jalan /Dinding Penahan RT 01-RT 05 Kel Aur Mulyo		6.000.000,00	KDP
	Pembuatan jalan lingkungan jalan raya lunto ke sibolin Desa Lunto Barat		2.230.000,00	KDP
	jalan lakuk ke laing dusun bonou desa tumpuk tengah		2.988.392,90	KDP
	Sanitasi Desa Muaro Kalaban		4.000.000,00	KDP
	Peningkatan sarana prasarana penyediaan air minu dii Kel Lb. Panjang		9.963.100,00	KDP
	Peningkatan rehab/ drainase di Kel. Tanah Lapang		4.000.000,00	KDP
	Pembuatan Saluran premier Kel. air dingin		6,000,000.00	KDP
	Pembuatan Jalan Kuda Dari Kandang Tahun 2006		43,445,000.00	Aset Renovasi
	Jaringan Listrik Kandang		28,205,000.00	Aset Renovasi
	Penyanggah Darurat Jembatan Gapersil		26,980,000.00	Aset Renovasi
	Pengadaan Lampu Penerangan Dan Instalasi Listrik Tahun 2006		49,835,000.00	Aset Renovasi
	Pembuatan Saluran Tanah Tahun 2006		48,798,000.00	Aset Renovasi
	Pembuatan Saluran Beton Tahun 2006		152,184,000.00	Aset Renovasi
	JUMLAH		2.911.300.105,70	



## II. Penjelasan Mutasi Berkurang

Penjelasan atas Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp60.233.645.346,09 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.79  
Rincian Pengurangan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi ke SKPD lain	56.905.298.213,00
2	Koreksi Pencatatan	1.311.663.685,00
3	Pengurangan Karena Reklas	2.016.683.448,09
JUMLAH		60.233.645.346,09

1. Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.905.298.213,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar SKPD di atas.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena koreksi pencatatan sebesar Rp1.311.663.685,00 dapat dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.80  
Rincian Koreksi Pencatatan

No	SKPD	Jml Brg	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1	1.234.702.685,00	- Rekonstruksi Kawasan Bantingan.
		1	76.961.000,00	- Jasa pemindahan utilitas PLN, Telkom dan PDAM.
JUMLAH		2	1.311.663.685,00	

- Koreksi pencatatan pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang sebesar Rp1.234.702.685,00 merupakan koreksi nilai aset yang dobel pencatatan dengan Badan Kesbangpol & PBD tahun 2021 yaitu Pekerjaan Rekonstruksi Kawasan Bantingan.
  - Koreksi pencatatan pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang sebesar Rp76.961.000,00 merupakan koreksi nilai aset yang merupakan belanja jasa pemindahan utilitas PLN, Telkom dan PDAM tahun 2022 yang tidak bisa diakui sebagai aset.
3. Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi sebesar Rp2.016.683.448,09 dijelaskan dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.81  
Rincian Aset Reklasifikasi

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup		222	1.069.370.448,09	
		Lampu Taman di sepanjang jalan muaro	1	88.578.000,00	Aset Peralatan & Mesin



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		kalaban			
		Lampu taman disepanjang jalan pasar remaja	1	60.401.000,00	
		Lampu Taman Simpang Tugu Talawi	1	10.700.000,00	
		Lampu Tambahan diMuseum KA	1	4.885.200,00	
		Lampu Tambahan di Sepanjang Jalan BPD	1	19.283.350,00	
		Lampu Tali pada Bangunan Rangkaian Batas Kota	1	4.581.250,00	
		Lampu Hias Taman	2	94.899.610,00	
		Lampu Hias Taman Panorama Kelok Tarok	1	7.497.600,00	
		Lampu Jembatan Lapangan Bola Kaki Kelurahan Tanah Lapang	1	14.982.000,00	
		Lampu Hias Taman Koramil	1	29.946.400,00	
		Lampu hias Taman Kota	1	99.121.000,00	
		Surface MTD Up Light Par 38 Cfl 18 W Max Ww C/W Bracket	27	39.454.182,00	
		Tiang Lampu Hias Model Antik	4	30.147.330,00	
		Burrial MTD up light par led 10-11 w (lap.segitiga)	8	33.293.488,00	
		Street lighting led 60 w c/w pole 9	8	108.016.776,00	
		Surface mtd up light par 38 cfl 18 w max ww c/w bracket	30	44.364.030,00	
		Flus Ground MTD LED Marker 4W IP 66 DIA 15 [ lampu lapangan segitiga]	125	207.499.875,00	
		Food light ground maunted flood mh 150 w c/w bracket	1	4.356.698,00	
		Street light hps 250 w replase sox 90w	1	3.214.785,00	
		Lampu Taman Kota Sawahlunto [ cv.farads ]	1	72.538.000,00	
		Panel listrik Lapseg	4	58.385.600,00	
		Pembuatan pagar jalan RT 01 RW 02 Kel Saringan	1	33.224.274,09	Aset Gedung & Bangunan
2	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		<u>16</u>	<u>947.313.000,00</u>	
		Biaya Perencana ( Pembukaan akses jalan ke Guo Janjian Talago Gunung)	1	3.300.000,00	KDP
		Biaya Perencanaan (Pelebaran Jalan Polindes - Kantor Desa Kumbayau)	1	9.500.000,00	
		Biaya perencanaan Rekonstruksi Jalan( Jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapur (014)	1	85.171.000,00	
		Honor Perencana (Lanjutan Pembangunan Jalan Perbatasan Desa Lunto Timur dan Kubang Tengah (Batu Lombu)	1	3.300.000,00	
		Honor Perencana (Pembuatan Daam dan saluran jalan sawah godang Desa Lumindai)	1	3.300.000,00	
		Honor Perencana (Pembuatan Daam di RW 01 KEL. Kubang Sirakuk Utara)	1	6.725.000,00	
		Honor Perencana (Peningkatan jalan Beserta Bangunan Pelengkap di pemukiman masyarakat Desa Tarata Bancah)	1	3.300.000,00	
		Honor Perencana (Peningkatan jalan sarana dan prasarana Dusun Pondok	1	3.300.000,00	



No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu)			
		Honor Perencana (Peningkatan Jalan Sentra Produksi sawah tambang, Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban)	1	3.300.000,00	
		Honor Perencana (Peningkatan Jalan Surau Lomba - Kumpanai Desa Lunto Timur )	1	3.300.000,00	
		Honor Perencana (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaian di Kelurahan Durian I (DAK))	1	22.500.000,00	
		Penambahan Fasilitas Kandang Kuda Kandih	1	197.699.000,00	Aset Gedung & Bangunan
		Pengecoran parkir TPU Kayu Gadang	1	54.923.000,00	
		Pembuatan pagar beton di jalan RT 01 RW 02 Kel. Kubang Sirakuk Utara	1	98.294.000,00	
		Pembuatan Pagar Pengaman Jalan Samping Gudang PT BA	1	88.216.000,00	
		Pengecoran Jalan Dan Daam Dusun Lontiak Malaweh Desa Pasar Kubang	1	72.500.000,00	Aset Rusak Berat
		ganti rugi tanah	1	271.578.000,00	KIB A
		ganti rugi tanah	1	17.107.000,00	KIB A
		JUMLAH	240	2.016.683.448,09	

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 29.123.398.855,35	Rp51.784.205.565,35

Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.123.398.855,35 dan Rp51.784.205.565,35. Terjadi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp510.764.351,00 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp 23.171.571.061,00, sehingga mutasi bersih nilai pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 ini adalah sebesar Rp(22.660.806.710,00) atau sebesar -77,81%.

Tabel 5.82  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
51.784.205.565,35	510.764.351,00	(23.171.571.061,00)	(22.660.806.710,00)	29.123.398.855,35

#### I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp510.764.351,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



Tabel 5.83  
Rincian Penambahan Aset

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	99.958.900,00
2	Belanja Dana BOS	347.441.451,00
3	Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	60.000.000,00
4	Mutasi dari SKPD lain	3.364.000,00
JUMLAH		510.764.351,00

1. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp99.958.900,00 pada tahun 2022 tersebar hanya pada 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84  
Rincian Belanja Modal

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24.983.950,00
2	Dinas Pendidikan	74.974.950,00
JUMLAH		99.958.900,00

Penjelasan Belanja modal Aset tetap lainnya sebanyak Rp99.958.900,00 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp24.983.950,00 adalah sebagai berikut :
  - 185 Paket Buku Umum Lain-lain sebesar Rp10.999.325,00
  - 73 Paket Buku Agama lainnya sebesar Rp2.997.650,00
  - 29 Paket Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebesar Rp1.995.600,00
  - 37 Paket Buku Ilmu Bahasa Lain-lain sebesar Rp2.997.850,00
  - 32 Paket Buku Matematika dan Pengetahuan Alam lainnya sebesar Rp1.997.725,00
  - 49 Paket Buku Ilmu Pengetahuan Praktis lainnya sebesar Rp1.998.250,00
  - 12 Paket Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga sebesar Rp1.997.550,00
- b. Pada Dinas Pendidikan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp74.974.950,00 adalah sebagai berikut:
  - 6 unit Snare Drum sebesar Rp10.762.560,00
  - 8 unit Marching Band sebesar Rp12.369.840,00
  - 4 unit BassDrum sebesar Rp6.682.200,00
  - 2 unit Quarto sebesar Rp6.062.820,00
  - 1 unit Quint tom sebesar Rp3.526.470,00
  - 3 unit Cymbal sebesar Rp2.783.880,00



- 2 unit Stick Mayoret sebesar Rp1.731.600,00
  - 6 unit Terompet sebesar Rp16.703.280,00
  - 30 stel Seragam Pasukan sebesar Rp12.887.100,00
  - 2 stel Seragam Mayoret sebesar Rp976.800,00
  - 1 stel Gitapati sebesar Rp488.400,00
2. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp347.441.451,00 pada tahun 2022 tersebar merata di sekolah di wilayah Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85  
Rincian Sekolah Penerima Belanja BOS

No	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMPN 1	36.815.200,00
2	SMPN 2	34.284.000,00
3	SMPN 3	36.180.000,00
4	SMPN 4	4.900.000,00
5	SMPN 5	12.495.000,00
6	SMPN 6	78.890.870,00
7	SMPN 7	7.068.700,00
8	SMPN 8	11.325.000,00
9	SMPN 9	1.002.800,00
10	SDN 01 Talawi Mudik	4.602.300,00
11	SDN 02 Talawi Hilir	3.650.000,00
12	SDN 03 Tumpuk Tengah	3.310.208,00
13	SDN 04 Rantih	1.508.700,00
14	SDN 05 Tigo Tanjung	2.718.400,00
15	SDN 06 Bukit Gadang	776.200,00
16	SDN 07 Talawi Hilir	7.856.000,00
17	SDN 09 Talawi Hilir	4.225.900,00
18	SDN 11 Sikalang	2.566.500,00
19	SDN 12 Talawi Mudik	2.512.200,00
20	SDN 16 Sikalang	3.926.100,00
21	SDN 18 Batu Kual	3.507.500,00
22	SDN 19 Sijantang Koto	1.443.500,00
23	SDN 02 sapan	2.080.000,00
24	SDN 03 Lubang Panjang	19.638.500,00
25	SDN 05 Kolok Mudik	1.034.100,00
26	SDN 06 Lumindai	3.124.400,00
27	SDN 11 Kampung Surian	990.000,00
28	SDN 12 Sapan	2.633.400,00
29	SDN 13 Sungai Durian	1.187.400,00
30	SDN 14 Talago Gunung	4.677.500,00
31	SDN 15 Lumindai	4.690.600,00
32	SDN 19 Santur	1.815.000,00
33	SDN 25 Batu Sandaran	2.083.000,00
34	SDN 27 Talago Gunung	550.000,00
35	SDN 28 Santur	2.390.073,00
36	SDN 01 Pasar Kubang	2.286.100,00
37	SDN 02 Lunto Timur	6.735.500,00
38	SDN 05 Kubang Sirakuk	1.538.000,00
39	SDN 06 Kubang Tengah	425.800,00
40	SDN 10 Tanah Lapang	6.547.000,00
41	SDN 11 Pondok Batu	1.053.000,00
42	SDN 12 Kubang Barat	1.999.300,00
43	SDN 13 Pasar Remaja	4.112.000,00
44	SDN 15 Lunto Timur	148.500,00



No	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
45	SDN 17 Air Dingin	1.751.800,00
46	SDN 01 Silungkang Tigo	532.400,00
47	SDN 05 Muaro Kalaban	3.490.600,00
48	SDN 07 Muaro Kalaban	1.039.400,00
49	SDN 08 Silungkang Duo	713.500,00
50	SDN 11 Muaro Kalaban	2.014.500,00
51	SDN 12 Silungkang Duo	595.000,00
	JUMLAH	347.441.451,00

3. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp60.000.000,00 pada tahun 2022 terdapat pada SKPD Kecamatan Lembah Segar adalah Rehab Posyandu Melati RT 2 RW 1 sebesar Rp30.000.000,- dengan SPK Nomor: 02/KS/SARPRAS\_TL/CLS/2022 tgl 21-11-2022 dan Rehab Posyandu Wista Younger di RT 4 RW 2 sebesar Rp30.000.000,- dengan SPK Nomor: 03/KS/SARPRAS\_TL/CLS/2022 tgl 21-11-2022.
4. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp3.364.000,00, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.86  
Rincian Aset Mutasi antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesbangpol BPBD	PPKD	1.682.000,00	BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022
2	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.682.000,00	BAST No. 134.4/ 015/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
		JUMLAH	3.364.000,00	

Penjelasan aset tetap lainnya karena mutasi antar SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Dari Kesbangpol PBD ke PPKD senilai Rp1.682.000,00 berupa :
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp59.500,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp68.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp99.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp65.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp80.500,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp82.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp88.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp98.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp154.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp137.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp71.500,00



- 1 unit Buku hukum sebesar Rp143.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp219.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp75.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp65.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp57.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp60.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp58.500,00
- b. Dari PPKD ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.682.000,00 berupa:
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp59.500,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp68.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp99.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp65.000,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp80.500,00
  - 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp82.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp88.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp98.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp154.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp137.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp71.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp143.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp219.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp75.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp65.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp57.000,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp60.500,00
  - 1 unit Buku hukum sebesar Rp58.500,00

## **II. Penjelasan Mutasi Berkurang**

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 23.171.571.061,00 dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.87  
Rincian Pengurangan Aset

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi ke SKPD lain	3.364.000,00
2	Koreksi Pencatatan	217.723,00
3	Pengurangan Karena Reklas	23.167.989.338,00
	JUMLAH	23.171.571.061,00

1. Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.364.000,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Dari Kesbangpol BPBD ke PPKD senilai Rp1.682.000,00 berupa :

- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp59.500,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp68.000,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp99.000,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp65.000,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp80.500,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp82.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp88.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp98.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp154.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp137.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp71.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp143.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp219.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp75.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp65.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp57.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp60.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp58.500,00

b. Dari PPKD ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.682.000,00 berupa :

- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp59.500,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp68.000,00



- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp99.000,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp65.000,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp80.500,00
- 1 unit Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp82.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp88.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp98.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp154.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp137.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp71.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp143.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp219.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp75.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp65.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp57.000,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp60.500,00
- 1 unit Buku hukum sebesar Rp58.500,00

2. Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi pencatatan sebesar Rp217.723,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan nilai buku pengadaan tahun 2015 yang belum tercatat ke dalam aset Ekstrakomptabel.
3. Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi sebesar Rp23.167.989.338,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.88  
Rincian Aset Reklasifikasi

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Inspektorat	- Buku Management dan Perkantoran	7	2.122.500,00	Rusak Berat
2	Sekretariat DPRD		<u>28</u>	<u>973.689,00</u>	
		- Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1	29.035,00	Ekstrakom
		- Buku Umum Lain-lain	8	309.100,00	Ekstrakom
		- Buku Agama islam	2	93.668,00	Ekstrakom
		- Buku Hukum	17	541.886,00	Ekstrakom
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		<u>173</u>	<u>6.500.100,00</u>	
		- Buku Umum Lain lain	84	3.020.800,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Lainnya	11	434.200,00	Ekstrakom
		- Buku Ilmu Sosial Lain lain	6	252.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku Ilmu Bahasa Lain lain	16	642.950,00	Ekstrakom
		- Buku Matematika dan Pengetahuan Alam lainnya	14	557.050,00	Ekstrakom
		- Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	3	129.600,00	Ekstrakom
		- Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga	39	1.463.500,00	Ekstrakom
4	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			<u>465.190.000,00</u>	
		- Hak Cipta Vidio dan Produksi	1	49.900.000,00	Aset Tidak Berwujud
		- Konservasi Makam Syech Tumpok		207.550.000,00	
		- "Konservasi Makam Syekh Tumpok		207.740.000,00	
5	Sekretariat Daerah	- Perbaikan Kanopi Rumdis Sekda	1	22.752.750,00	Gedung & Bangunan
6	Kecamatan Barangin			<u>797.485.716,00</u>	
		- pembuatan lapangan futsal waringin kel. lubang panjang (2013) penyerahan dari DPU		391.365.216,00	Gedung & Bangunan
		- Kel.Durian I peningkatan MCK Kel. Durian I (2008) penyerahan dari DPU		83.673.000,00	Gedung & Bangunan
		- Kel.Durian I pembangunan sarana olahraga durian I (2011) penyerahan dari DPU		34.341.600,00	Gedung & Bangunan
		- Kel.Durian I pembangunan sarana olahraga durian 1 (2011) penyerahan dari dinas PU		80.130.400,00	Gedung & Bangunan
		- Kel.Durian I pembangunan lapangan futsal durian 1 (2012) penyerahan dari dinas PU		102.650.000,00	Gedung & Bangunan
		- Kel.Durian I pembangunan lapangan bola voli pasar baru durian (2015) penyerahan dari dinas PU		105.325.500,00	Gedung & Bangunan
7	Kecamatan Lembah Segar			<u>110.266.000,00</u>	
		- pembangunan kopel/gerbang TPU air dingin		14.875.000,00	Gedung & Bangunan
		- peningkatan MCK tanjung sari		35.391.000,00	Gedung & Bangunan
		- Rehap Posyandu Melati RT 02 RW 01 dengan Nomor Kontrak : 02/KS/SAPRAS-TL/CLS /2022		30.000.000,00	Gedung & Bangunan
		- Rehap Posyandu Wista Younger Di Rt 04 Rw 02 Dengan Nomor Kontrak : 03/Ks/Sapras-TI/ClS/2022		30.000.000,00	Gedung & Bangunan
8	Kecamatan Silungkang	- Rehab MCK Silungkang		49.840.000,00	Gedung & Bangunan
9	Kecamatan Talawi			<u>254.581.000,00</u>	
		- pemeliharaan lapangan bola kaki talawi		49.814.000,00	Gedung & Bangunan
		- pagar mees lapangan bola kaki talawi		51.283.000,00	Gedung & Bangunan
		- tribun lapangan bola kaki talawi		153.484.000,00	Gedung & Bangunan
10	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang			<u>8.905.728.600,00</u>	
		- Lanjutan Pembangunan Panti Asuhan		131.500.000,00	
		- Pembuatan Pelataran Parkir Tahun 2005		22.350.000,00	
		- Pembangunan Rumah Garin		39.915.000,00	
		- Rehab Koramil Silungkang Tahun 2006		49.885.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Rehab Kantor Camat Silungkang		49.900.000,00	
		- Pekerjaan Tambahan Pemasangan Instalasi Penerangan Lapangan Tenis Saringan Dan Lapangan Basket Muaro Kalaban		4.663.750,00	
		- Pagar Tk Pembina		9.871.000,00	
		- Pekerjaan Km Darurat Sd 03 Aur Tajungkang		1.265.000,00	
		- Pekerjaan Wc Darurat Sd 01 Talawi		900.000,00	
		- Penyambungan Pipa Jaringan Air Bersih Smkn 2 Sawahlunto		3.239.800,00	
		- Pemasangan Tedmond Sd 10 Sawahlunto		1.644.000,00	
		- Pembuatan Pagar Pembatas Arena Karate Tahun 2006		4.950.000,00	
		- Pembongkaran Arena Pencak Silat Dan Gulat Tahun 2006		2.190.000,00	
		- Pekerjaan Perbaikan Instalasi Listrik Tempat Pemandokan Kontingen Tahun 2006		8.601.450,00	
		- Pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Arena Pertandingan Tahun 2006		2.585.000,00	
		- Pekerjaan Wc Darurat Tj Ampalu Tahun 2006		1.884.000,00	
		- Lapangan Pacuan Kuda Tahun 2004		361.200.000,00	
		- Lapangan Volly Tahun 2004		30.900.000,00	
		- Lapangan Basket Tahun 2004		61.887.000,00	
		- Lapangan Tenis Tahun 2004		399.900.000,00	
		- Lanjutan Pemb.Lapangan Pacu Kuda Tahun 2005		636.141.000,00	
		- Renovasi Lapangan Sepak Bola Tahun 2005		1.220.000.000,00	
		- Pembangunan Pagar Trek Darurat Tahun 2006		99.330.000,00	
		- Pembangunan Ruang Joki Dan Sidang Ruang Dewan Stewar		119.651.000,00	
		- Pembangunan Shadding Tool Tahun 2006		72.338.000,00	
		- Pembangunan Kandang Darurat 60 Pintu		96.979.000,00	
		- Pembangunan Stewar Tower		44.989.000,00	
		- Pembuatan Jurai Kandang Permanen Tahun 2006		34.990.000,00	
		- Perbaikan Tewar Tower Dan Rehab Tangga		41.535.000,00	
		- Rehab/Peningkatan Kandang Darurat 60 Pintu		98.101.000,00	
		- Penambahan Kandang Semi Permanen 20 Pintu Tahun 2006		41.800.000,00	
		- Pembangunan Wc Kandang 2 Unit		80.995.000,00	
		- Areal Parkir Umum Dan Vip		145.974.000,00	
		- Pemb. Kantor Dan Rumah Jaga Kawasan Kandih		198.660.000,00	
		- Rehab Lapangan Bola Basket Muaro Kalaban		43.650.000,00	
		- Rehab Rumah Dinas An Syafaruddin Syarif		24.950.000,00	
		- Rehab Rumah Dinas An Adriwan		23.400.000,00	
		- Pembangunan Tpa/Tpsa Sikalang		53.276.000,00	
		- Pembuatan Km/Wc Darurat Smkn 02 Swl		30.990.000,00	
		- Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 02 Sapan		30.990.000,00	
		- Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 05 Kubang		31.000.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		Sirakuk			
		- Pembuatan Km/Wc Darurat Sdn 17 Pasar Baru Durian		31.000.000,00	
		- Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Pemda Di Kec Barangin		222.239.000,00	
		- Rehab 2 Buah Lapangan Tenis Saringan Tahun 2006		71.634.000,00	
		- Pembangunan Wc Utama Tahun 2006		43.290.000,00	
		- Pembuatan Kamar Mandi Umum Darurat Tahun 2006		48.432.000,00	
		- Rehab Lapangan Basket Kampung Surian Dan Talawi Tahun 2006		28.490.000,00	
		- Pembuatan Wc Di Kandih Tahun 2007		49.900.000,00	
		- Penyempurnaan Lapangan Pacu Kuda Kandih Tahun 2007		197.595.000,00	
		- Rehab Rumah Dinas & Pemb Pagar Camat Silungkang		49.840.000,00	
		- Rehab Rumah Eks Camat Barangin		49.840.000,00	
		- Rehab Eks Sdn 10 Tanah Lapang		146.796.000,00	
		- Pembenahan Lap Pacu Kuda Tahun 2008		49.500.000,00	
		- Rehab Kandang Kuda Kandih Tahun 2010		89.204.400,00	
		- Rehab Kandang Kuda Kandih Athun 2010		208.143.600,00	
		- Pembangunan Baru Kandang Kuda Kandih		304.808.000,00	
		- Mushalla Di Lap Pacu Kuda Kandih		153.437.000,00	
		- Driving Range Kandih		252.850.000,00	
		- Pembangunan Prasarana Pelengkap Lapangan Pacu Kuda Kandih		1.020.032.950,00	
		- Penataan Menara Mesjid Ahung Kota Sawahlunto Tahun 2015		1.180.279.650,00	
		- Pembuatan Jalan Kuda Dari Kandang Tahun 2006		43.445.000,00	
		- Jaringan Listrik Kandang		28.205.000,00	
		- Penyanggah Darurat Jembatan Gapersil		26.980.000,00	
		- Pengadaan Lampu Penerangan Dan Instalasi Listrik Tahun 2006		49.835.000,00	
		- Pembuatan Saluran Tanah Tahun 2006		48.798.000,00	
		- Pembuatan Saluran Beton Tahun 2006		152.184.000,00	
11	RSUD			<u>11.436.446.632,00</u>	
		- Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit		881.273.024,00	
		- Rawat Inap Paru		298.473.000,00	
		- Poli dan Gudang Obat		246.106.000,00	
		- Renovasi Ruang Isolasi		147.964.000,00	
		- Instalasi Gawat Darurat (UGD)		35.840.000,00	
		- ICU, UTD HD dan Fisioterapy		460.628.000,00	
		- Kamar Operasi		6.904.334.000,00	
		- Bedah dan Interne		1.484.992.400,00	
		- Gedung Gizi		199.725.000,00	
		- Gudang Umum dan Laundry		777.111.208,00	
12	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan			<u>136.107.500,00</u>	
		- Ikan Hias Air Tawar Budidaya		94.587.500,00	
		- Ikan Air Payau Budidaya		29.920.000,00	
		- Ikan Air Payau Budidaya		11.600.000,00	
13	Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan	- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan		95.430.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
	tenaga kerja				
14	Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga	- Rehab Fasade Information Centre		5.500.000,00	
15	Dinas Pendidikan		<u>7.601</u>	<u>879.064.851,00</u>	
		Pembangunan gedung TK Restu Bunda Lumindai . Penyerahan aset dr DPU th 2015		118.444.000,00	
		Daam MAN Sawahlunto		49.980.000,00	
		Rehab TK Pertiwi M Kalaban. penyerahan aset DPU th 2015		29.900.000,00	
		Pembuatan playgroup kayu gadang. penyerahan aset dr DPU th 2015		151.544.000,00	
		Rehab berat kantor , WC dan Bak mandi kantor Kwarcab bumi. penyerahan aset dr DPU th 2015		49.949.000,00	
		Pembangunan Paud Kolok nan tuo. penyerahan aset dr DPU tahun 2015		101.635.000,00	
		Rehab berat kantor UPTD Barangin		39.900.000,00	
		Rehab TK Tyoibah Talawi. Penyerahan aset DPU. tahun 2015		39.950.000,00	
		Rehab berat ruang kelas SMK Muhamadyah 2 lokal . penyerahan Aset Dr DPU tahun 2015		100.000.000,00	
		Pembangunan sasana Tinju . penyerahan aset dr DPU th 2015		12.012.000,00	
	SMP 1	- Buku siswa PPKN kls VII	130	1.768.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa B.Indonesia kls VII	130	2.600.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa Matematika kls VII	130	4.368.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa IPA kls VII	130	3.107.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa IPS kls VII	130	3.276.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa Informatika kls VII	130	3.276.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa PABP kls VII	130	3.276.000,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PPKN kls VII	2	53.800,00	Ekstrakom
		- Buku Guru B.Indonesia kls VII	2	86.000,00	Ekstrakom
		- Buku Guru IPA kls VII	2	80.600,00	Ekstrakom
		- Buku Guru IPS kls VII	2	89.800,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Seni Musik kls VII	2	67.600,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PJOK kls VII	2	85.200,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Informasi kls VII	2	76.800,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PABP kls VII	2	86.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa PJOK kls VII	130	5.850.000,00	Ekstrakom
		- Rabana	1	1.400.000,00	Ekstrakom
6	SMP 2	- Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII	190	3.800.000,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII	2	86.000,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru IPA untuk SMP kelas VII	2	80.600,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru IPS untuk SMP kelas VII	2	89.800,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru Informatika untuk SMP kelas VII	2	76.800,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru PAI untuk SMP kelas VII	2	86.000,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru PJOK untuk SMP kelas VII	2	85.200,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru PKN untuk SMP kelas VII	2	53.800,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru Seni Musik untuk SMP	2	67.600,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		kelas VII			
		- Buku panduan guru seni rupa untuk SMP kelas VII	2	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru Seni tari untuk SMP kelas VII	2	71.400,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru Seni Teater untuk SMP kelas VII	2	63.000,00	Ekstrakom
		- Buku pengetahuan alam untuk SMP kelas VII	190	4.541.000,00	Ekstrakom
		- Buku pengetahuan sosial untuk SMP kelas VII	190	4.788.000,00	Ekstrakom
		- Informatika untuk SMP kelas VII	190	4.788.000,00	Ekstrakom
		- Matematika untuk SMP kelas VII	190	6.384.000,00	Ekstrakom
		- PAI untuk SMP kelas VII	190	4.788.000,00	Ekstrakom
		- PKN untuk SMP kelas VII	190	2.584.000,00	Ekstrakom
7	SMP 6	- Buku Interaktif - PJOK Kelas VII SMP/MTs	100	4.500.000,00	Ekstrakom
		- Bahasa indonesia utk smp kls vii	100	1.123.600,00	Ekstrakom
		- Panduan guru Bahasa indonesia utk smp kls vii	10	166.140,00	Ekstrakom
		- English in mind second edition student book starter grade 7	100	883.000,00	Ekstrakom
		- English in mind second edition teacher resource book starter grade 7	10	107.110,00	Ekstrakom
		- Matematika utk smp kls vii	100	1.599.400,00	Ekstrakom
		- Panduan guru matematika utk smp kls vii	10	194.320,00	Ekstrakom
		- IPA utk smp kls vii	100	1.354.200,00	Ekstrakom
		- Panduan guru ipa utk smp kls vii	10	152.050,00	Ekstrakom
		- IPS utk smp kls vii	100	1.436.500,00	Ekstrakom
		- Panduan guru ips utk smp kls vii	10	170.370,00	Ekstrakom
		- Panduan guru seni musik utk smp kls vii	10	129.150,00	Ekstrakom
		- Panduan guru seni tari utk smp kls vii	10	133.730,00	Ekstrakom
		- Panduan guru seni teater utk smp kls vii	10	119.990,00	Ekstrakom
		- Panduan guru pendidikan jasmani , olahraga, dan kesehatan utk smp kls vii	10	161.210,00	Ekstrakom
		- Informatika utk smp kls vii	100	1.430.200,00	Ekstrakom
		- Panduan guru informatika utk smp kls vii	10	147.470,00	Ekstrakom
		- Panduan guru seni rupa utk smp kls vii	10	87.930,00	Ekstrakom
		- Pend agama islam dan budi pekerti utk smp kls vii	100	1.431.100,00	Ekstrakom
		- Panduan guru pend agama islam dan budi pekerti utk smp kls vii	10	165.430,00	Ekstrakom
		- Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan utk smp kls vii	100	739.300,00	Ekstrakom
		- Panduan guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan utk smp kls vii	10	101.670,00	Ekstrakom
		- Buku Interaktif - PAI dan Budi Pekerti Kelas VII SMP/MTs	100	5.000.000,00	Ekstrakom
8	SMP 7	- Bahasa Indonesia Untuk SMP kelas VII	22	440.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia SMP kelas VII	1	43.000,00	Ekstrakom
		- Buku Guru IPA kls 7	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku GURU IPS kls 7	1	44.900,00	Ekstrakom
		- BUKU GURU Informatika	1	38.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PAI	1	43.000,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Penjaskes kls 7	1	42.600,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PPKN	1	26.900,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku Siswa IPA kls 7	22	525.800,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa IPS kls 7	22	554.400,00	Ekstrakom
		- BUKU Siswa Informatika	22	554.400,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Matematika	22	739.200,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa PAI	22	554.400,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa PPKN	22	299.200,00	Ekstrakom
		- buku interaktif PJOK	22	990.000,00	Ekstrakom
		- Buku umum	1	30.000,00	Ekstrakom
9	SMP 8	- Buku kurikulum Merdeka B.Indonesia SMP Kls VII	30	600.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka Matematika SMP Kls VII	30	1.008.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka IPA SMP Kls VII	30	717.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka IPS SMP Kls VII	30	756.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka Informatika SMP Kls VII	30	756.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka PAI & budi pekerti SMP Kls VII	30	756.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru B.Indonesia SMP Kls VII	1	43.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru IPA SMP Kls VII	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru IPS SMP Kls VII	1	44.900,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru Seni Tari SMP Kls VII	1	35.700,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru PJOK SMP Kls VII	1	42.600,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru Informatika SMP Kls VII	1	38.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru PAI & Budi pekerti SMP Kls VII	1	43.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka PKN SMP Kls VII	30	408.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru PKN SMP Kls VII	1	26.900,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka PJOK SMP Kls VII	30	1.350.000,00	Ekstrakom
		- Buku kurikulum Merdeka Informatika SMP Kls VII	25	2.950.000,00	Ekstrakom
10	SMP 9	- Buku Bhs untu Siswa	5	100.000,00	Ekstrakom
		- Buku Bhs untu guru	1	43.000,00	Ekstrakom
		- Buku ipa guru	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Ips guru	1	44.900,00	Ekstrakom
		- Buku TIK guru	1	38.400,00	Ekstrakom
		- Buku PJOK	1	42.600,00	Ekstrakom
		- PPKN	1	26.900,00	Ekstrakom
		- IPA Siswa	5	119.500,00	Ekstrakom
		- IPS Siswa	5	126.000,00	Ekstrakom
		- TIK siswa	5	126.000,00	Ekstrakom
		- MTK Siswa	5	168.000,00	Ekstrakom
		- PPK Siswa	5	68.000,00	Ekstrakom
11	SDN 01 Pasar Kubang	- Buku siswa tema 1	11	253.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 2	10	170.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 3	12	190.800,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 4	12	222.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 5	13	265.200,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 6	12	295.200,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 7	13	319.800,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku siswa tema 8	14	264.600,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 9	13	305.500,00	Ekstrakom
12	SD Negeri 02 Lunto Timur	- Kurikulum merdeka	1	2.974.895,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 2	1	975.105,00	Ekstrakom
		- Buku siswa tema 3	1	2.785.500,00	Ekstrakom
13	SDN 06 Kubang Tengah	- Buku tema	18	425.800,00	Ekstrakom
14	SDN 10 Tanah Lapang	- Buku agama kls 4	30	480.000,00	Ekstrakom
		- Buku agama kls 5	30	480.000,00	Ekstrakom
		- Buku agama kls 6	30	480.000,00	Ekstrakom
15	SDN NEGERI 11 Pondok Batu	- Buku Agama Kls 6	6	228.000,00	Ekstrakom
16	SDN 12 Kubang Barat	- Buku b hs ind kls 1	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Buku matematika kls 1	5	96.500,00	Ekstrakom
		- Buku guru matematika kls 1	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Buku pjok kls 4	1	48.000,00	Ekstrakom
17	SDN 17 Air Dingin	- Buku ilmu pengetahuan dll	66	1.201.800,00	Ekstrakom
18	SDN 03 Lubang Panjang	- Kelas 2 Tema 5 : Pengalamanku	25	615.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 2 Tema 6 : Merawat Hewan dan Tumbuhan	25	615.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 2 Tema 7 : Kebersamaan	25	615.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 2 Tema 8 : Keselamatan Dirumah dan Perjalanan	25	615.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 3 Tema 5 : Cuaca	20	502.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 3 tema 6 : Energi dan Perubahannya	20	460.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 3 Tema 7 : Perkembangan teknologi	20	492.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 3 Tema 8 : Praja Muda Karana	20	492.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Tema 6 : Cita - Citaku	30	612.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Tema 7 : Indahnya keberagaman Negeriku	30	567.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Tema 8 : Daerah Tempat Tinggalku	30	657.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Tema 9 : Kayanya Negeriku	30	600.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Tema 6 : Panas dan perpindahannya	30	738.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Tema 7 : Peristiwa dalam kehidupan	30	738.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Tema 8 : Lingkungan sahabat kita	30	567.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Tema 9 : Benda - Benda di sekitar kita	30	705.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 Tema 6 : Menuju masyarakat	35	609.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 tema 7 : Kepemimpinan	35	647.500,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 Tema 8 : Bumiku	35	609.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 Tema 9 : Menjelajah angkasa luar	35	913.500,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Pendidikan olahraga kesehatan	30	627.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Pendidikan olahraga kesehatan	30	645.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 Pendidikan olahraga kesehatan	30	668.500,00	Ekstrakom
		- Kelas 4 Senang belajar matematika	30	573.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 5 Senang belajar matematika	30	663.000,00	Ekstrakom
		- Kelas 6 Senang belajar matematika	33	644.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Tema kls 1Pengalaman ku	40	920.000,00	Ekstrakom
		- Tema 6 Kls 1 lingkungan bersih sehat dan Asri	40	753.000,00	Ekstrakom
		- Tema 7 Kls 1 Benda hewan dan tanaman di sekitarku	40	856.000,00	Ekstrakom
		- Tema 8 Kls 1 Peristiwa Alam	40	920.000,00	Ekstrakom
19	SDN 05 Kolok Mudik	- Buku Kurikulum Merdeka	32	800.400,00	Ekstrakom
20	SDN 06 Lumindai	- Buku Tema Agama	150	2.145.000,00	Ekstrakom
21	SDN 12 Sapan	- B.Indo SD Kelas 1 /Aku Bisa/KM	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 1/Belajar bersama temanmu/KM	5	96.500,00	Ekstrakom
		- PAI SD Kelas 1/KM	6	118.000,00	Ekstrakom
		- B. Indo SD Kelas 4/Lihat sekitar/KM	6	160.800,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 4 Vol 1/Belajar bersama teman/KM	6	106.200,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 4 Vol 2/Belajar bersama teman/KM	6	106.200,00	Ekstrakom
		- IPAS SD Kelas 4/KM	6	164.400,00	Ekstrakom
		- PAI SD Kelas 4/KM	1	141.600,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 1 Buku Guru /Belajar bersama temanmu/KM	1	28.800,00	Ekstrakom
		- PAI SD Kelas 1 Buku Guru /KM	1	40.300,00	Ekstrakom
		- PPKN SD Kelas 1 Buku Guru/KM	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa SD Kelas 1 Buku Guru/KM	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Seni Musik SD Kelas 1 Buku Guru/KM	1	32.400,00	Ekstrakom
		- B. Indo SD Kelas 4 Buku Guru /Lihat sekitar/KM	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 4 Vol 1 Buku Guru /KM	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Matematika SD Kelas 4 Vol 2 Buku Guru /KM	1	21.900,00	Ekstrakom
		- IPAS SD Kelas 4 Buku Guru /KM	1	48.400,00	Ekstrakom
		- PAI SD Kelas 4 Buku Guru /KM	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa SD Kelas 4 Buku Guru/KM	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Seni Musik SD Kelas 4 Buku Guru/KM	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Seni Budaya SD Kelas 1 /KM	1	49.000,00	Ekstrakom
		- Seni Budaya SD Kelas 4 /KM	1	49.000,00	Ekstrakom
		- PJOK SD Kelas 1/KM	1	48.000,00	Ekstrakom
		- PJOK SD Kelas 4/KM	1	48.000,00	Ekstrakom
22	SDN 13 Sungai Durian	- Buku Pegangan Siswa Kelas 6 Tema 1-9	27	539.400,00	Ekstrakom
23	SDN 14 Talago Gunung	- Buku siswa kelas 2 tema 1	10	214.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 2	10	261.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 3	10	189.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 4	10	235.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 5	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 6	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 7	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 2 tema 8	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 1	10	219.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 2	10	235.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 3	10	261.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 4	10	214.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 5	10	251.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku siswa kelas 3 tema 6	10	230.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 7	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas 3 tema 8	10	246.000,00	Ekstrakom
		- Buku guru kelas 6 tema 1	1	28.000,00	Ekstrakom
		- Buku guru kelas 6 tema 2	1	26.000,00	Ekstrakom
		- Buku guru kelas 6 tema 3	1	27.500,00	Ekstrakom
		- Buku guru kelas 6 tema 5	1	29.500,00	Ekstrakom
		- Buku guru kelas 3 tema 2	1	27.500,00	Ekstrakom
		- Buku PAI kelas 3	10	204.000,00	Ekstrakom
24	SDN 15 Lumindai	- Bahasa Indonesia : Aku Bisa !	25	670.000,00	Ekstrakom
		- Belajar Bersama temanmu Untuk Matematika Sekolah Dasar	25	482.500,00	Ekstrakom
		- My Next Words Grade 1 - Student's Book for Elementary School	25	320.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	25	590.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	15	354.000,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar	15	402.000,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	15	411.000,00	Ekstrakom
		- Belajar Bersama Temanmu Matematika – Volume 1	15	265.500,00	Ekstrakom
		- Belajar Bersama Temanmu Matematika – Volume 2	15	265.500,00	Ekstrakom
		- " My Next Words Grade 4 Student's Book for Elementary School "	15	204.000,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- teacher book-my next words grade 1	1	15.400,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru PAI dan budi pekerti	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Musik	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Tari	1	40.700,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Teater	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Matematika– Volume 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Matematika– Volume 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Teacher Book – My Next Words Grade 4	1	15.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Musik	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Tari	1	49.000,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Teater	1	40.100,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
25	SDN 25 Balai Batu Sandaran	- Bahasa Indonesia : Aku Bisa !	7	187.600,00	Ekstrakom
		- Belajar Bersama temanmu Untuk Matematika Sekolah Dasar	7	135.100,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	7	165.200,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	10	236.000,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar	10	268.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		– Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	10	274.000,00	Ekstrakom
		– Belajar Bersama Temanmu Matematika – Volume 1	10	177.000,00	Ekstrakom
		– Belajar Bersama Temanmu Matematika – Volume 2	10	177.000,00	Ekstrakom
		– Buku panduan guru matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		– Buku panduan guru PAI dan budi pekerti	1	40.300,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	43.500,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	1	45.300,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar	1	48.400,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Matematika– Volume 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Matematika– Volume 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		– Buku Panduan Guru Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
26	SDN 28 Santur	– B INDO 1(Kinerja 2022)	10	152.800,00	Ekstrakom
		– MTK 1(Kinerja 2022)	10	89.570,00	Ekstrakom
		– PAI 1(kinerja 2022)	10	132.260,00	Ekstrakom
		– B ING 1 (kinerja 2022)	10	72.670,00	Ekstrakom
		– PG PAI 1(Kinerja 2022)	1	15.148,00	Ekstrakom
		– PG B INDO 1(Kinerja 2022)	1	18.879,00	Ekstrakom
		– PG MTK 1(Kinerja 2022)	1	9.375,00	Ekstrakom
		– PG PJOK 1(Kinerja 2022)	1	18.199,00	Ekstrakom
		– PG Seni Rupa 1(Kinerja 2022)	1	9.086,00	Ekstrakom
		– PG Seni Musik 1(Kinerja 2022)	1	11.417,00	Ekstrakom
		– PG Seni Tari 1(Kinerja 2022)	1	14.215,00	Ekstrakom
		– PG B Ing 1 (Kinerja 2022)	1	5.330,00	Ekstrakom
		– PG Pend Pancasila 1(Kinerja 2022)	1	13.131,00	Ekstrakom
		– PG Seni Teater 1 (Kinerja 2022)	1	12.350,00	Ekstrakom
		– IPAS 4 (Kinerja 2022)	10	157.210,00	Ekstrakom
		– B Indo 4 (Kinerja 2022)	10	152.620,00	Ekstrakom
		– MTK I 4 (Kinerja 2022)	10	82.000,00	Ekstrakom
		– MTK II 4 (Kinerja 2022)	10	82.000,00	Ekstrakom
		– PAI 4 (Kinerja 2022)	10	133.730,00	Ekstrakom
		– B ing 4 (Kinerja 2022)	10	76.160,00	Ekstrakom
		– PG PAI 4 (Kinerja 2022)	1	19.791,00	Ekstrakom
		– PG MTK I 4 (Kinerja 2022)	1	7.892,00	Ekstrakom
		– PG B Indo 4 (Kinerja 2022)	1	16.530,00	Ekstrakom
		– PG IPAS 4 (Kinerja 2022)	1	16.530,00	Ekstrakom
		– PG Seni rupa 4 (Kinerja 2022)	1	8.609,00	Ekstrakom
		– PG MTK II 4 (Kinerja 2022)	1	7.157,00	Ekstrakom
		– PG PJOK 4 (Kinerja 2022)	1	17.441,00	Ekstrakom
		– PG Seni Musik 4 (Kinerja 2022)	1	12.336,00	Ekstrakom
		– PG Seni Tari 4 (Kinerja 2022)	1	16.995,00	Ekstrakom
		– PG Seni Teater 4 (Kinerja 2022)	1	13.734,00	Ekstrakom
		– PG B ing 4 (Kinerja 2022)	1	4.954,00	Ekstrakom
		– PG Pancasila 4 (Kinerja 2022)	1	14.954,00	Ekstrakom
		– Interaktif Pancasila 1 (Kinerja 2022)	1	50.000,00	Ekstrakom
		– Interaktif Seni rupa 1 (Kinerja 2022)	1	35.000,00	Ekstrakom
		– Interaktif Seni Musik 1 (Kinerja 2022)	1	35.000,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Interaktif Seni Tari 1 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Seni Teater 1 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Pancasila 4 (Kinerja 2022)		50.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Seni Rupa 4 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Seni Musik 4 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Seni Tari 4 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
		- Interaktif Seni Teater 4 (Kinerja 2022)		35.000,00	Ekstrakom
27	SDN 01 Talawi Mudik	- SBDP Kelas 1	2	90.000,00	Ekstrakom
		- PJOK Kelas 1	1	46.600,00	Ekstrakom
		- SBDP Kelas 4	2	90.000,00	Ekstrakom
		- PJOK Kelas 4	1	46.500,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
		- Umum - Buku	1	28.000,00	Ekstrakom
		- Umum - Buku	1	32.000,00	Ekstrakom
		- Umum - Buku	1	29.500,00	Ekstrakom
		- Umum - Buku	1	32.000,00	Ekstrakom
		- Umum - Buku	1	27.500,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam	1	17.200,00	Ekstrakom
28	SDN 02 Talawi Hilir	- Buku siswa kelas II tema 5	14	344.400,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas II tema 6	4	98.400,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas II tema 7	15	369.000,00	Ekstrakom
		- Buku siswa kelas II tema 8	21	516.600,00	Ekstrakom
		- Matematika - Buku	14	282.800,00	Ekstrakom
		- Buku Agama Islam [B10: 18,00]	18	234.000,00	Ekstrakom
		- Matematika - Buku	24	484.800,00	Ekstrakom
29	SDN 03 Tumpuk Tengah	- Buku Matematika kelas 1	20	179.140,00	Ekstrakom
		- Buku PAI kelas 1	20	264.520,00	Ekstrakom
		- Buku Bahasa Indonesia 1	20	305.600,00	Ekstrakom
		- Buku PG Bahasa Indonesia Kelas 1	1	18.879,00	Ekstrakom
		- Buku PG Matematika Kelas 1	1	9.375,00	Ekstrakom
		- Buku PG PKn Kelas 1	1	15.148,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Rupa	1	9.086,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Tari	1	14.215,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Teater	1	12.350,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Musik	1	11.417,00	Ekstrakom
		- Buku PG PAI Kelas 1	1	13.131,00	Ekstrakom
		- Buku PG Bahasa Inggris kelas 1	1	5.330,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Bahasa Inggris Kelas 1	1	7.267,00	Ekstrakom
		- Buku IPAS Kelas IV	10	157.210,00	Ekstrakom
		- Buku Bahasa Indonesia Kelas IV	10	152.620,00	Ekstrakom
		- Buku Matematika Vol. 1 Kelas IV	10	82.000,00	Ekstrakom
		- Buku Matematika Vol 2 Kelas IV	10	82.000,00	Ekstrakom
		- Buku PAI Kelas IV	10	133.730,00	Ekstrakom
		- Buku PG Matematika Vol 1 Kelas IV	1	7.892,00	Ekstrakom
		- Buku PG Bahasa Indonesia Kelas IV	1	16.530,00	Ekstrakom
		- Buku PG IPAS Kelas IV	1	16.530,00	Ekstrakom
		- Buku PG Matematika Vol 2 Kelas IV	1	7.157,00	Ekstrakom
		- Buku PG PKn Kelas IV	1	19.791,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku PG Seni Rupa Kelas IV	1	8.609,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Tari Kelas IV	1	16.995,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Teater Kelas IV	1	13.734,00	Ekstrakom
		- Buku PG Seni Musik Kelas IV	1	12.336,00	Ekstrakom
		- Buku siswa Bahasa Inggris Kelas IV	1	7.616,00	Ekstrakom
		- Buku interaktif seni rupa kelas 1	1	35.000,00	Ekstrakom
		- Buku interaktif seni rupa kelas 1	1	35.000,00	Ekstrakom
		- Buku interaktif P5 kelas IV	1	45.000,00	Ekstrakom
30	SDN 04 Rantih	- Bahasa Indonesia	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	5	64.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	5	118.000,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	7	123.900,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	7	123.900,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Alam dan Sosial	7	191.800,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	7	187.600,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	7	95.200,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	7	165.200,00	Ekstrakom
		- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Seni Musik	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.000,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
31	SDN 05 Tigo Tanjung	- Bahasa Indonesia - Aku bisa !	11	294.800,00	Ekstrakom
		- Belajar bersama temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar	11	212.300,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	11	259.600,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	13	306.800,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia : Lihat sekitar	13	348.400,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan alam dan sosial	13	356.200,00	Ekstrakom
		- Belajar bersama temanmu Matematika- Volume 1	13	230.100,00	Ekstrakom
		- Belajar bersama temanmu Matematika- Volume 2	13	230.100,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru PAI dan Budi Pekerti	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru seni musik	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan guru Bahasa Indonesia : lihat sekitar	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku pendidikan guru matematika- volume 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Buku pendidikan guru matematika- volume 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Buku Panduan Guru seni musik	1	35.200,00	Ekstrakom
32	SDN 06 Bukit Gadang	- Buku Guru Matematika Kelas I	1	28.800,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Buku Guru PPKn Kelas I	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Pendidikan Agama Islam Kelas I	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Seni Rupa Kelas I	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru IPAS Kelas I	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Matematika Volume 1 Kelas IV	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Matematika Volume 2 Kelas IV	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas IV	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Agama Islam Kelas IV	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Seni Rupa Kelas IV	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Tema 1 Kelas II	1	17.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Tema 2 Kelas II	1	21.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Tema 3 Kelas II	1	19.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Tema 4 Kelas II	1	19.300,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Matematika Kelas I	11	212.300,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Agama Islam Kelas I	1	23.600,00	Ekstrakom
33	SDN 07 Talawi Hilir	- Matematika	11	212.300,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	11	294.800,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	11	259.600,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	11	539.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	12	576.000,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	16	283.200,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	16	283.200,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	16	428.800,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	16	377.600,00	Ekstrakom
		- Buku Seni Budaya	16	784.000,00	Ekstrakom
		- IPAS	16	438.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	17	816.000,00	Ekstrakom
		- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- PPKN	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Seni Budaya	1	24.200,00	Ekstrakom
34	SDN 09 Talawi Hilir	- Bahasa Indonesia	28	750.400,00	Ekstrakom
		- Matematika	28	540.400,00	Ekstrakom
		- PAI BP	28	660.800,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	16	428.800,00	Ekstrakom
		- PAI BP	16	377.600,00	Ekstrakom
		- Matematika V1	16	283.200,00	Ekstrakom
		- Matematika V2	16	283.200,00	Ekstrakom
		- IPAS	16	438.400,00	Ekstrakom
		- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- PAI BP	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- PPKN	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Matematika V1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- PAI BP	1	45.300,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Matematika V2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- IPAS	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
35	SDN 11 Sikalang	- Buku Guru PAI Kelas 1	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Pancasila kelas 1	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Matematika Kelas 1	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Seni Musik Kelas 1	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa PAI kelas 1	6	141.600,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa B. Indonesia kelas 1	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Matematika Kelas 1	6	115.800,00	Ekstrakom
		- Buku Guru PAI Kelas 4	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Buku Guru B. Indonesia kelas 4	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Matematika Kelas 4	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Matematika Kelas 4	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Buku Guru IPAS Kelas 4	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Buku Guru Seni Musik Kelas 4	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa PAI kelas 4	6	141.600,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa B. Indonesia kelas 4	6	160.800,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Matematika Kelas 4	7	123.900,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa Matematika Kelas 4	7	123.900,00	Ekstrakom
		- Buku Siswa IPAS	12	328.800,00	Ekstrakom
36	SDN 12 Talawi Mudik	- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Bp	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.400,00	Ekstrakom
		- Seni rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Seni Musik	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan Alam dan sosial	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama islam dan Bp	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.000,00	Ekstrakom
		- Seni rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Seni Musik	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	15	402.000,00	Ekstrakom
		- Matematika	15	289.500,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Bp	15	354.000,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	8	214.400,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	8	141.600,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	8	141.600,00	Ekstrakom
		- Ilmu Pengetahuan Alam dan sosial	8	219.200,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam dan Bp	8	188.800,00	Ekstrakom
37	SDN 16 Sikalang	- Bg Matematika Kls 1	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Bg Ppkn Kelas 1	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Bg Pai Kelas 1	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Bs Seni Budaya Kelas 1	6	294.000,00	Ekstrakom
		- Bg Seni Rupa Kelas 1	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Bs Pjok Kelas 1	7	336.000,00	Ekstrakom
		- Bg Matematika V.1 Kelas 4	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Bg Matematika V.2 Kelas 4	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Bg Bahasa Indonesia Kls 4	1	48.400,00	Ekstrakom



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Gb Pai Kelas 4	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Bs Seni Budaya Kelas 4	5	245.000,00	Ekstrakom
		- Bg Seni Tari Kelas 4	1	49.000,00	Ekstrakom
		- Bg Ipas Kelas 4	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Bs Pjok Kelas 4	6	288.000,00	Ekstrakom
		- Bs Matematika Kelas 1	6	115.800,00	Ekstrakom
		- Bs Bahasa Indonesia Kelas 1	6	160.800,00	Ekstrakom
		- Bg Pai Kelas 1	6	141.600,00	Ekstrakom
		- Bs Matematika V.1 Kelas 4	5	88.500,00	Ekstrakom
		- Bs Matematika V.2 Kelas 4	5	88.500,00	Ekstrakom
		- Bs Bahasa Indonesia Kls 4	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Bs Pai Kelas 4	5	118.000,00	Ekstrakom
		- Bs Ipas Kelas 4	5	137.000,00	Ekstrakom
38	SDN 18 Batu Kual	- Matematika	1	19.300,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	1	26.800,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	12.800,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	23.600,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	49.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	1	48.000,00	Ekstrakom
		- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- PPKN	1	43.500,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- Seni Musik	1	32.400,00	Ekstrakom
		- Seni Tari	1	40.700,00	Ekstrakom
		- Seni Teater	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	1	48.000,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	9	159.300,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	9	159.300,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	9	241.200,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	9	122.400,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	9	212.400,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	9	441.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	9	432.000,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 1	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Matematika Vol 2	1	21.900,00	Ekstrakom
		- Bahasa Indonesia	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Bahasa Inggris	1	15.000,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Agama Islam	1	45.300,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
		- Seni Musik	1	35.200,00	Ekstrakom
		- Seni Tari	1	49.000,00	Ekstrakom
		- Seni Teater	1	40.100,00	Ekstrakom
		- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	1	47.700,00	Ekstrakom
39	SDN 19 Sijantang Koto	- PKN		43.500,00	Ekstrakom
		- Matematika	1	28.800,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	26.400,00	Ekstrakom
		- PAI	1	40.300,00	Ekstrakom
		- Matematika V1	1	24.500,00	Ekstrakom



No	SKPD	Nama Barang	Jml Brg	Nilai (Rp)	Reklas ke
		- Matematika V2	1	24.200,00	Ekstrakom
		- IPAS	1	48.800,00	Ekstrakom
		- B. Indonesia	1	48.400,00	Ekstrakom
		- Seni Rupa	1	24.200,00	Ekstrakom
		- B. Indonesia	5	134.000,00	Ekstrakom
		- Matematika	5	96.500,00	Ekstrakom
		- PAI Bp	5	118.000,00	Ekstrakom
		- B. Indonesia	6	160.800,00	Ekstrakom
		- Matematika V1	6	106.200,00	Ekstrakom
		- Matematika V2	6	106.200,00	Ekstrakom
		- IPAS	6	164.400,00	Ekstrakom
		- PAI Bp	6	141.600,00	Ekstrakom
40	SDN 01 Silungkang Tigo	- Buku tema	26	532.400,00	Ekstrakom
41	SDN 05 Muaro Kalaban	- Buku siswa dan guru	148	3.490.600,00	Ekstrakom
42	SDN 07 Muaro Kalaban	- Buku pegangan guru	2	927.700,00	Ekstrakom
43	SDN 08 Silungkang Duo	- Buku siswa dan guru	21	473.500,00	Ekstrakom
44	SDN 11 Muaro Kalaban	- Buku siswa	105	2.014.500,00	Ekstrakom

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.129.517.623,17	Rp3.731.106.853,99

Saldo Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.129.517.623,17 dan Rp3.731.106.853,99. Terjadi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp156.496.000,00 dan pengurangan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.758.085.230,82, sehingga terjadi penurunan nilai aset KDP sebesar Rp(1.601.589.230,82) atau sebesar -75,21%.

Tabel 5.89  
Rincian Mutasi Aset

31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Des 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.731.106.853,99	156.496.000,00	(1.758.085.230,82)	(1.601.589.230,82)	Rp 2.129.517.623,17



## I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset KDP sebesar Rp156.496.000,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai aset KDP pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berasal dari reklas belanja modal gedung sebesar Rp9.500.000,00 yaitu belanja Perencanaan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Segar.
2. Penambahan nilai aset KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berasal dari reklas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp146.996.000,00 adalah sebagai berikut :
  - a. Biaya Perencana (Pembukaan akses jalan ke Guo Janjian Talago Gunung) sebesar Rp3.300.000,00
  - b. Biaya Perencanaan (Pelebaran Jalan Polindes-Kantor Desa Kumbayau) sebesar Rp9.500.000,00
  - c. Biaya perencanaan Rekonstruksi Jalan(Jalan Muaro Kalaban-Pondok Kapur (014) sebesar Rp85.171.000,00
  - d. Honor Perencana (Lanjutan Pembangunan Jalan Perbatasan Desa Lunto Timur dan Kubang Tengah (Batu Lumbu)) sebesar Rp3.300.000,00
  - e. Honor Perencana (Pembuatan Daam dan saluran jalan sawah godang Desa Lumindai) sebesar Rp3.300.000,00
  - f. Honor Perencana (Pembuatan Daam di RW 01 Kelurahan. Kubang Sirakuk Utara) sebesar Rp6.725.000,00
  - g. Honor Perencana (Peningkatan jalan Beserta Bangunan Pelengkap di pemukiman masyarakat Desa Tarata Bancah) sebesar Rp3.300.000,00
  - h. Honor Perencana (Peningkatan jalan sarana dan prasarana Dusun Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu) sebesar Rp3.300.000,00
  - i. Honor Perencana (Peningkatan Jalan Sentra Produksi sawah tambang, Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban) sebesar Rp3.300.000,00
  - j. Honor Perencana (Peningkatan Jalan Surau Lomba-Kumpanai Desa Lunto Timur) sebesar Rp3.300.000,00
  - k. Honor Perencana (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaian di Kelurahan Durian I (DAK) sebesar Rp22.500.000,00



## II. Penjelasan Mutasi Berkurang

1. Penjelasan atas Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.635.050.143,82 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebabkan karena aset tersebut telah selesai proses pengerjaannya, ada yang direklas ke aset tetapnya (aset peralatan & mesin, aset gedung & bangunan atau aset jalan, irigasi dan jaringan dan ke Aset Lain-lain) atau dikapitalisasikan ke aset induknya (untuk biaya perencanaan/lanjutan pekerjaan), yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.90  
Rincian Aset Reklasifikasi

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Perencanaan pembangunan kantor Desa Silungkang Tigo	39.864.000,00	Gedung dan Bangunan
2	Perencanaan pembangunan kantor Desa Talawi Mudik	39.840.000,00	Gedung dan Bangunan
3	Pembangunan lapangan bola kaki Ombilin	29.520.610,00	Gedung dan Bangunan
4	Pembangunan gerbang batas kota Silungkang-Kabupaten Solok	10.000.000,00	Gedung dan Bangunan
5	Pembangunan rest area dan gapura batas kota Sawahlunto - Kabupaten Solok	52.226.800,00	Gedung dan Bangunan
6	Pembangunan rest area dan gapura batas kota Sawahlunto - Kabupaten Solok	51.976.800,00	Gedung dan Bangunan
7	Honor pembangunan Taman Air Mancur Makam M. Yamin	6.725.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
8	Biaya perencanaan pembuatan dan rehab riol disepanjang jalan khatib sulaiman dari SMP 9 sawahlunto ke tonggak pela	9.100.447,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
9	Lanjutan pengerasan jalan rambutan desa kumbayau ke lontiak desa tumpuk tengah (biaya perencanaan)	5.380.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
10	Lanjutan jalan dari pandan perkuburan sawah tengah ke perumnas tali mato dusun talago desa talawi hilir (perencanaan)	3.590.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
11	Pembuatan riol stasiun desa silungkang tigo dusun stasiun (perencanaan)	5.380.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
12	Biaya perencanaan pembangunan jalan dari batu tajam ke lubuk pinang	3.830.521,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
13	Biaya perencanaan lanjutan jalan dari jambu ke parik desa tumpuk tengah	5.136.723,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
14	Biaya perencanaan perbaikan jalan sarana pendukung lainnya dibatu poca ke batang lunto bawah desa lumindai	3.830.522,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
15	Biaya perencanaan pengecoran bahu jalan di desa tarak bancah kecamatan silungkang	5.136.722,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
16	Biaya perencanaan pemasangan daam pengaman SD 17 dan perbaikan jalan	3.362.500,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
17	Biaya perencanaan lanjutan jalan muko longguo ke binjai kampung atas tumpuk tengah	5.138.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
18	Biaya perencanaan bandar pasar talawi plat deker desa talawi mudik	3.793.841,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
19	Biaya perencanaan sambungan riol di jalan pisang kolek atas dusun rumbio desa silungkang oso	2.102.431,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
20	Biaya perencanaan pelebaran jalan rumah minar ke jembatan gantung desa rantih	3.793.841,00	Jalan Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Reklas ke
21	Biaya perencanaan coran dan daam dari rumah rundo ke sawah sariak ladang laweh desa talago gunung	3.092.429,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
22	Biaya perencanaan coran dan daam jalan ke tanjung dusun batu tajam	2.267.429,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
23	Biaya perencanaan coran jalan dusun luak mani menuju dusun guguk pauah	3.793.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
24	Biaya perencanaan peningkatan jalan roda 4 lokasi kuak ke lokuang panai desa lunto timur	5.138.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
25	Biaya perencanaan pengerasan jalan dan daam puncak ngalau tinggi diatas rumah atuak Bili sumpahan	2.267.429,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
26	Biaya perencanaan lanjutan pengecoran beton tumbuk jalan lubuk simalukuik menuju dusun padang elok	3.793.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
27	Biaya perencanaan pemasangan bronjong lokasi tapuang gadang dekat rumah pak mali dusun guguk bungo desa lumindai	5.138.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
28	Biaya perencanaan cor jalan sambungan lurah kumbuh cubadak desa tumpuk tengah	3.004.156,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
29	Biaya perencanaan cor jalan sambungan lurah kumbuh parik desa tumpuk tengah / kumbayau	5.138.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
30	Biaya perencanaan cor sambungan jalan karak ke silundang desa tumpuk tengah	3.092.429,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
31	Biaya perencanaan pesangan daam dan dan rehab sumber air bersih di luak godang-padang elok desa kubang utara sikabu	3.004.156,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
32	Biaya perencanaan pemasangan batu bronjong lurah panjang, panjang 30 m, tinggi 3,5 meter dusun bukik obang desa tumpuk tengah	3.793.842,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
33	Pembuatan daam tebing dekat ponimin tanjung	3.300.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
34	Jalan / dinding penahan Rt 01-RW 05 Kel Aur Mulyo	6.000.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
35	Pembuatan jalan lingkungan jalan raya lunto ke sungai langsi desa lunto barat	2.230.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
36	Biaya perencanaan Jalan lantiak kumanih ke lakuang masjid desa tumpuk tengah	5.380.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
37	Biaya perencanaan riol jalan dusun guguk pauh ke lubek	5.136.724,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
38	Biaya perencanaan lanjutan jalan dari jambu ke parik desa tumpuk tengah	5.136.723,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
39	Biaya pengecoran jalan simpang desa tumpuk tengah	3.794.413,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
40	Biaya pengecoran pengerasan jalan bukik kubang menuju kaniki dusun dalimo gadang desa pasar kubang	2.771.149,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
41	Jalan lakuk ke laing dusun bonou desa tumpuk tengah	29.883.929,92	Jalan Irigasi dan Jaringan
42	Pembangunan bandar dari puskesmas sampai ombilin dusun talago/dusun kubang gajah	4.750.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
43	Biaya perencanaan pembuatan bronjong lubuak piliang silungkang tigo	4.035.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
44	Pembuatan riol belakang pasar sapan-batas durian 1 rt 01/rw 01 kelurahan durian 1	5.380.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
45	Biaya perencanaan rehabilitas irigasi dan pembuatan tali bandar sawah lubuk perahu dusun guguk balang desa talago gunung	3.725.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
46	Biaya perencanaan pembangunan irigasi batang mindai dari batu godang ke paliang desa lumindai	5.680.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
47	Biaya perencanaan pembangunan irigasi sawah dari lubuk durian ke binjai di desa lunto timur	3.926.680,00	Jalan Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Reklas ke
48	Pembuatan dam tepi lurah sungkiang dusun stasiun desa silungkang tigo (perencanaan)	2.230.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
49	Biaya perencanaan pembuatan daam pinggir sungai dekat rumah pak muni almarhum (mantan ketua rt 03) pondok batu	2.775.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
50	Biaya perencanaan pembuatan daam daerah akiran sungai batang lunto lokasi lubuak ampalu desa lunto timur	4.385.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
51	Biaya perencan riol jalan dusun guguak pauah ke lubek	5.136.724,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
52	Peningkatan sarana prasarana penyediaan air minum di desa batu tanjung - sikalang (dak ipd)	50.403.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
53	Peningkatan / Rehab drainase di kel tanah lapang	4.000.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
54	Pembuatan saluran primer kel air dingin	6.000.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
55	Jembatan gantung dari sawah baru ke lumbu dan sipajar desa Talawi Hilir	800.329.018,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
56	Biaya perencanaan rehabilitasi kantor TPP PKK Kota Sawahlunto	4.035.000,00	Jalan Irigasi dan Jaringan
57	Pembangunan Gedung Dppkad(Sondir)	7,700,000.00	Rusak Berat
58	Pembangunan Gedung Bkd(Sondir)	7,700,000.00	Rusak Berat
59	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kupitan(M Kalaban-Kab Sijunjung)	10,000,000.00	Rusak Berat
60	Pengadaan Lampu High Masttugu Kecamatan Talawi	10,000,000.00	Rusak Berat
61	Pembuatan Menara Suar Rt02 Rw 01 Kel Tanah Lapang	3,590,000.00	Rusak Berat
62	Pembukaan Jalan Sentra Produksi Dan Wisata Dari Kubu Harimau Ke Talago (Puncak Teletabis) Desa Lunto Timur	3,590,000.00	Rusak Berat
63	Pembuatan Jalan Lingkungan Jalan Raya Lunto Ke Sungai Langsi Desa Lunto Barat	2,230,000.00	Rusak Berat
64	Jembatan Sawah Binjai Dusun Koto	4,390,000.00	Rusak Berat
65	Jembatan Sawah Binjai Dusun Koto	10,000,000.00	Rusak Berat
66	Dana Sisa Dak Infrastruktur Irigasi Tahun 2015 Optimalisasi Jaringan Irigasi Kincir Angin Batang Ombilin Di Sawah Tapian Ambar Dan Sawah Lurah Desa Talawi Mudik	6,000,000.00	Rusak Berat
67	Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Desa Batu Tanjung - Sikalang (Dak Ipd)	50,403,000.00	Rusak Berat
68	Sanitasi Desa Talawi Hilir	4,000,000.00	Rusak Berat
69	Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Desa Batu Tanjung-Sikalang(Dak Ipd)	50,403,000.00	Rusak Berat
70	Peningkatan Sarana Prasana Penyediaan Air Minum Di Ladang Laweh -Kelok Sago(Dak Ipd)	50,173,000.00	Rusak Berat
71	Jalan /Dinding Penahan Rt 01-Rt05 Kel Aur Mulyo	6,000,000.00	KIB D
72	Pembuatan Jalan Lingkungan Jalan Raya Lunto Ke Sibolin Desa Lunto Barat	2,230,000.00	KIB D
73	Jalan Lakuk Ke Laing Dusun Bonou Desa Tumpuk Tengah	2,988,392.90	KIB D
74	Sanitasi Desa Muaro Kalaban	4,000,000.00	KIB D
75	Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Kel Lubang Panjang(Dak Reguler)	9,963,100.00	KIB D
76	Peningkatan / Rehab Drainase Di Kelurahan Tanah Lapang	4,000,000.00	KIB D



No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Reklas ke
77	Pembuatan Saluran Primer Kel Air Dingin	6,000,000.00	KIB D
78	Pembangunan Fasilitas Gedung Uji Kendaraan	19,850,000.00	KIB C
79	Pembangunan Gedung Kantor Camat Silungkang(Perencanaan 2015)	1,600,000.00	KIB C
80	Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Saringan	4,000,000.00	KIB C
81	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Ombilin	29,520,610.00	KIB C
82	Pembangunan Gerbang Batas Kota Silungkang-Kabupaten Solok	10,000,000.00	KIB C
83	Lanjutan Pembangunan Rumah Ketua Dprd	10,000,000.00	KIB C
84	Pembangunan Tugu Simpang Bdn Dan Tugu Kecamatan Talawi	1,040,000.00	KIB C
	JUMLAH	<u>1.635.050.143.82</u>	

2. Penjelasan atas Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.463.560,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Survei Harga Barang Kb Ke Jawa yang telah selesai pengerjaannya dan di reklas ke KIB B.

3. Penjelasan atas pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp92.042.327,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang di reklasifikasi ke rusak berat berupa :

- a. pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka survey harga dan spesifikasi pengadaan kendaraan bermotor khusus truk sampah sebesar Rp600.000,00
- b. Honorarium Pembuatan Bangunan Grase Alat Berat sebesar Rp6.000.000,00
- c. honorarium pengadaan fasilitas umum (pembuatan taman kota) sebesar Rp3.000.000,00
- d. pengecoran jalan dan pemasangan pagar kawat makam di RT 03/RW 02 Kel.Durian I sebesar Rp135.000,00
- e. Pengecoran jalan dan bangunan pelengkap Perumnas Baru Kampung Baru sebesar Rp390.000,00
- f. Pengecoran jalan dan bangunan pelengkap Perumnas Baru Kampung Baru sebesar Rp470.000,00
- g. pengecoran jalan dan bangunan pelengkap di belakang Kantor Balai kota sebesar Rp367.600,00
- h. peningkatan jalan lingkungan di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang sebesar Rp2.838.175,00



- i. peningkatan jalan dan bangunan pelengkap RT 4 RW2 tanjung Sari kel. Aur mulyo sebesar Rp3.820.025,00
  - j. peningkatan jalan dan bangunan pelengkap di kawasan TPA Kayu gadang sebesar Rp3.747.680,00
  - k. Honorarium perencanaan teknis sebesar Rp4.000.000,00
  - l. Honorarium perencanaan teknis sebesar Rp1.500.000,00
  - m. Pembayaran Biaya Personil Keg Perencanaan Teknis Paket Perencanaan 50jt sd 100jt dan Keg Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Rehabilitasi WC Umum Kel. Pasar an. Zambri Yanto, Cs sebesar Rp2.230.000,00
  - n. Pembuatan Daam dan riol RT 01 RW 02 Kampung Teleng Kel. Pasar sebesar Rp2.476.775,00
  - o. pembuatan daam musholla Nurul amal rt01/rw01 kel durian 2 sebesar Rp330.000,00
  - p. pembuatan Daam dan Drainase di Kelurahan tanah lapang dan Kelurahan kubang sirakuk utara sebesar Rp263.000,00
  - q. Pembuatan Daam di RW 01 dan Rw 02 Kelurahan Air Dingin sebesar Rp2.039.275,00
  - r. Pembayaran Biaya Personil Keg Perencanaan Teknis Paket Perencanaan 50jt sd 100jt Keg Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas Pekerjaan Pembuatan Saluran RT 02 RW1 Gunung Timbago, Kel Saringan an Cosmas Sarianto, Cs sebesar Rp2.230.000,00
  - s. pembuatan saluran di RT 1 RW 2 Kelurahan durian 1 sebesar Rp313.000,00
  - t. Pembuatan Drainase/Riol Mulai dari Arah Mushalla Alfalah Dusun Air Gantang Sampai dengan Menuju Arah Jalan ke dusun Padang Elok Kubang Utara Sikabu sebesar Rp2.476.775,00
  - u. Pembuatan Drainase Di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban sebesar Rp3.015.022,00
  - v. Biaya konsultan perencanaan pembuatan taman samping GPK sebesar Rp49.800.000,00
4. Penjelasan atas pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.529.200,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang di reklasifikasi ke rusak berat berupa :



- a. SPPD dalam rangka survey awal penataan desa wisata Rantih sebesar Rp9.179.200,00
- b. Honorarium Tim Perencana Teknis penataan kebun buah kandi sebesar Rp4.000.000,00
- c. honorarium pptk, ppk, panitia pengadaan kegiatan pengadaan alat band sebesar Rp3.350.000,00

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 5.91  
Rincian Penyusutan Golongan Aset Tetap

Uraian Kelompok Aset Tetap	Nilai Perolehan	Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022 (Audited)	Koreksi tambah/kurang akm penyusutan 1 Jan 2022	Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 setelah Koreksi (SIMDA BMD)	Beban Penyusutan	Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022	Nilai Buku 31 Des 2022
Tanah	131.184.641.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.184.641.205,70
Peralatan dan Mesin	310.810.851.982,32	211.399.838.028,38	(5.615.048.383,87)	206.247.962.348,51	24.223.913.140,00	230.471.875.488,51	80.338.976.493,81
Gedung dan Bangunan	454.028.196.643,72	193.605.312.735,02	(1.102.384.957,02)	212.502.927.778,00	17.371.858.731,00	229.874.786.509,00	224.153.410.134,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	824.741.314.840,56	415.912.006.356,99	(1.259.153.100,60)	414.652.853.256,39	30.644.082.912,71	445.296.936.169,10	379.444.378.671,46
Aset Tetap Lainnya	29.123.398.855,35	255.704.632,00	40.257.835.260,00	20.513.539.892,00	839.250.886,00	21.352.790.778,00	7.770.608.077,35
KDP	2.129.517.623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.517.623,17
JUMLAH	1.752.017.921.150,82	821.172.861.752,39	32.744.421.522,51	853.917.283.274,90	73.079.105.669,71	926.996.388.944,61	825.021.532.206,21

Penjelasan dari seluruh akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Nilai Perolehan adalah sebesar Rp1.752.017.921.150,82. Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar Rp73.079.105.669,71. Nilai beban penyusutan tersebut diperoleh dari pengurangan antara Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022 sebesar Rp926.996.388.944,61 dengan Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 setelah Koreksi (SIMDA BMD) sebesar Rp853.917.283.274,90. Sementara Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 setelah Koreksi (SIMDA BMD) sebesar Rp853.917.283.274,90 tersebut berasal dari penjumlahan Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022 (Audited) sebesar Rp821.172.861.752,39 dengan koreksi tambah/kurang akumulasi penyusutan 1 Jan



2022 sebesar Rp32.744.421.522,51. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022 adalah sebesar Rp825.021.532.206,21 yang diperoleh dari pengurangan nilai peolehan dengan saldo akumulasi penyusutan 31 Desember 2022.

### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai aset lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp31.920.474.024,45, terdiri dari tagihan jangka panjang berupa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp445.501.143,00, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp7.171.276.700,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.041.738.699,00, Aset Lain-Lain berupa aset rusak/usang sebesar Rp25.673.129.427,45, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.264.709.917,00, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.147.493.640,00, dan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp3.001.031.612,00.

#### 5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp445.501.143,00.

Aset Lainnya	Saldo Awal 2021	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo Akhir 2022
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	445.501.143,00	00,00	00,00	445.501.143,00

**Tabel 5.92**  
Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2022	Pembayaran /Koreksi Tahun 2022	Saldo Akhir
I	<b>Ali yusman</b> Utang Ali Yusman yang mana yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKTJM sehingga dipindahkan dari piutang TPTGR ke Aset lainnya Koreksi Kurang Catat Pembayaran tahun 2016	66.502.000,00		66.502.000,00
II	<b>BPO TKI</b> - Zainal Syamsa Rp59.000.000,00 - Samadi Soredjo Rp64.260.000,00 - Hairil Lasmi Rp63.760.000,00 - Uspardi Rp55.260.000,00 - Afdalisman Rp60.260.000,00 - Andrio an Marajo Rp. 64.260.000	366.732.000,00		366.732.000,00
III	<b>Ali akbar</b> Ditetapkan dengan SKTJM sebesar Rp. 9.257.143.- pembayaran Tanggal 26 Juli 2016 Rp. 3.600.000,-	5.657.143,00	-	5.657.143,00
IV	<b>Asnovaweri</b> Ditetapkan dengan penerbitan SKTJM pada Desember 2014 sebesar Rp. 8.610.000 yang bersangkutan telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan rincian: 1 Tanggal 30 maret 2015 1.000.000	6.610.000,00		6.610.000,00



No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2022	Pembayaran /Koreksi Tahun 2022	Saldo Akhir
2	Tanggal 7 Oktober 2016	1.000.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>445.501.143,00</b>		<b>445.501.143,00</b>

#### 5.3.1.4.2 Aset Kemitraan Pihak Ketiga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp7.171.276.700,00	Rp8.300.943.900,00

Saldo Aset Kemitraan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.171.276.700,00 dan Rp8.300.943.900,00. Terjadi penambahan nilai aset kemitraan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dan pengurangannya sebesar Rp1.129.667.200,00, sehingga mutasi bersih aset kemitraan pada tahun 2022 sebesar Rp(1.129.667.200,00) atau sebesar 13,61%.

**Tabel 5.93**  
**Rincian Mutasi**

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
8.300.943.900,00	0,00	(1.129.667.200,00)	(1.129.667.200,00)	7.171.276.700,00

#### Penjelasan Berkurang

Pengurangan saldo Aset Kemitraan Pihak Ketiga adalah koreksi pencatatan sebesar Rp1.129.667.200,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar berupa 2 unit ventilator yang dipinjamkaikan kepada Rumah Sakit Universitas Andalas Padang dengan Berita Acara Pinjam Pakai Alat Ventilator Nomor : 1385/RSUD-SWL/2021.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk usaha perhotelan yaitu Hotel Parai.

#### Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga 1 Jan 2022 adalah sebesar Rp4.671.591.700. Nilai Beban Penyusutan sebesar Rp475.901.940,00. Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022 sebesar Rp5.147.493.640,00.



### 5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp4.041.738.699,00	Rp4.503.861.199,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.041.738.699 dan Rp4.503.861.199,00. Terjadi penambahan nilai aset tidak berwujud sebesar Rp49.900.000,00 dan pengurangannya sebesar Rp512.022.500,00, sehingga mutasi bersih aset tidak berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp(462.122.500,00) atau sebesar -11,43%.

Tabel 5.94  
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
4.503.861.199,00	49.900.000,00	(512.022.500,00)	(462.122.500,00)	4.041.738.699

#### I. Penjelasan Bertambah

- Penambahan saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp49.900.000,00 pada Dinas Kebudayaan berasal dari Reklas dari Aset Tetap Lainnya (KIB E).

Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari aplikasi (software), lisensi, hasil kajian serta hak cipta. Penjelasan atas aset tidak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95  
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			<b><u>327.587.200,00</u></b>
		Simstem Operasi Client Acces Lisensi APBD sebanyak 5 buah bidang Keuangan DPPKAD	2010	74.949.900,00
		Internet Security pada Bidang Keuangan DPPKAD Kota Sawahlunto	2010	3.300.000,00
		Software SIPKD	2012	18.750.000,00
		Sistem Operasi Windows 8 sebanyak 3 buah pada Bidang Keuangan DPPKAD	2013	4.950.000,00
		Oracle Data Base Standar Edtion sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	23.732.500,00
		Internet Developer Swich sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBBB DPPKAD	2013	78.679.700,00
		Windows Server 2012 64 bit sebanyak 1(satu) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	10.742.600,00
		Remote Deskstop sebanyak 5 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	5.423.000,00
		Client Acces Lisensi (CAL) sebanyak 5(lima) buah pada Bidang PBB DPPKAD	2013	1.908.500,00
		Mop Info ( V.12 ) sebanyak 1 buah pada Bidang PBB DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	41.250.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
		Software Barang Milik Daerah pada Bidang Asset DPPKAD Kota Sawahlunto	2013	49.000.000.00
		Sistem Operasi Windows Server 2012 R2 pada DPPKAD Kota Sawahlunto	2015	14.901.000.00
2	Dinas Pendidikan			<b><u>76.300.772.00</u></b>
		Windows 7 sebanyak 50 buah dan Antivirus pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	2013	58.960.000.00
		Anti virus	2020	17.340.772.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah			<b><u>82.500.000.00</u></b>
		Software Bridjing BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2015	49.500.000.00
		Software Nomor Antrian Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto	2014	33.000.000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Software	2019	97.504.000.00
5	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil			<b><u>14.514.150.00</u></b>
		Macro Media. Antivirus. Windows 2000 Profesional SP4 Adobe Photoshop Pada Dinas Capil	2014	3.166.000.00
		Microsoft Corporation (Capil)	2017	11.348.150.00
6	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman. Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	Software BLH	2016	51.736.000.00
7	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian Dan Perdagangan	Software pada Dinas Perindagkopnaker	2012	54.978.000.00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Software Arsip	2016	38.500.000.00
9	Dinas Pariwisata. Pemuda Dan Olahraga			<b><u>338.410.577.00</u></b>
		Kajian Master Plan Geopark	2020	218.110.000.00
		Kajian Penyusunan Site Plan Batu Runcing	2019	120.300.577.00
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Windows Server 2 (dua) buah pada BKD Kota Sawahlunto	2015	28.215.000.00
11	Badan Perencanaan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah			<b><u>2.783.073.000.00</u></b>
		Dokumen Perencanaan E-Planing	2017	49.610.000.00
		Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif I	2017	39.028.000.00
		Dokumen Perencanaan Penataan Kampung Produktif II	2017	39.028.000.00
		Dokumen Perencanaan Peninjauan kembali (PK) RTRW 2012-2032	2017	149.875.000.00
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2017	149.930.000.00
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	2017	149.050.000.00
		Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2017	157.465.000.00
		Dokumen Perencanaan Grand Design Smart City	2017	98.200.000.00
		Aplikasi E-planning	2018	49.830.000.00
		Aplikasi Rencana Aksi	2018	29.810.000.00
		Aplikasi Penyusunan Profil Kotaku	2018	39.723.750.00
		Aplikasi E-Monev	2018	49.907.000.00
		Rencana Induk RIPPARDA	2018	197.445.000.00
		Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	2018	48.295.500.00
		Penyusunan Perencanaan Kampung Produktif Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban	2018	39.545.000.00



No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
		Perencanaan Kawasan Perbatasan Pedesaan	2018	192.879.000,00
		Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya	2018	34.952.500,00
		Penyusunan Dokumentasi Revisi RT RW 2012-2032 Kota Sawahlunto	2018	348.260.000,00
		Penyusunan Peta Kawasan Kumuh	2018	34.952.500,00
		Dokumen Evaluasi RUPD	2019	89.500.000,00
		Dokumen Pengelolaan E Planning	2019	59.565.000,00
		Dokumen Fasilitas Program Nasional Berbasis Masyarakat	2019	39.930.000,00
		Dokumen Penyusunan Database Jalan Lingkungan	2019	197.780.000,00
		Dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk Drainase Kota	2019	190.575.000,00
		Dokumen Fasilitas Penetapan Kebijakan Revisi Perda RT RW 2012-2023 Kota Sawahlunto	2019	49.940.000,00
		Dokumen Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	2019	59.485.250,00
		Dokumen lanjutan Grand Design Smart city Kota Sawahlunto	2019	59.532.000,00
		Dokumen revisi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RTRW Kota Sawahlunto	2021	49.967.500,00
		Konversi Aplikasi / Sistem Informasi E-Monev	2021	49.247.000,00
		Kajian Dokumen KLHS RPJMD	2021	39.765.000,00
12	Dinas Perhubungan			<b>98.520.000,00</b>
		SIM PKB Dishub	2018	38.570.000,00
		Aplikasi Pemeriksaan SIMPKB berbasis BLU-e	2021	59.950.000,00
13	Dinas Kebudayaan	Karya Musik	2021	49.900.000,00

## II. Penjelasan Mutasi Berkurang

Pengurangan saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp512.022.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berasal dari koreksi pencatatan karena belanja tersebut tidak termasuk belanja aset tidak berwujud.

### Penyusutan Aset Tidak Berwujud

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Rp3.264.709.917,00	Rp2.415.706.555,20

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah sebesar Rp631.802.194,00. Nilai beban penyusutan tersebut diperoleh dari pengurangan antara Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022 sebesar Rp3.264.709.917,00 dengan Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 setelah Koreksi (SIMDA BMD) sebesar Rp2.415.706.555,20. Sementara Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 setelah Koreksi (SIMDA BMD) sebesar Rp2.572.213.684,00 berasal dari penjumlahan Saldo Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022 (Audited) sebesar Rp2.415.706.555,20 dengan Koreksi tambah/kurang akumulasi penyusutan 1 Jan 2022



sebesar Rp156.507.128,80. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 adalah sebesar Rp777.028.782,00. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.96  
Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 1 Jan 2022	KOREKSI PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN AUDITED 01-01-22	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-12-2022	NILAI BUKU
1	Barenlitbangda	2.783.073.000,00	1.603.631.850,00	203.651.232,00	1.807.283.082,00	509.575.751,00	2.316.858.833,00	466.214.167,00
2	BKPSDM	28.215.000,00	28.215.000,00	0,00	28.215.000,00	0,00	28.215.000,00	0,00
3	BPKAD	327.587.200,00	327.587.200,00	0,00	327.587.200,00	0,00	327.587.200,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.514.150,00	12.244.520,00	378.272,00	12.622.792,00	1.891.358,00	14.514.150,00	0,00
5	Dinas Pendidikan	76.300.772,00	62.428.154,40	(58.092.953,40)	4.335.201,00	3.468.170,00	68.497.410,00	7.803.362,00
6	Dinas Arsip	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
7	Dpkp2lh	51.736.000,00	51.736.000,00	0,00	51.736.000,00	0,00	51.736.000,00	0,00
8	Pariwisata	338.410.577,00	91.742.230,80	5.640.178,20	97.382.409,00	67.682.115,00	165.064.524,00	173.346.053,00
9	Perhubungan	98.520.000,00	23.142.000,00	1.642.000,00	24.784.000,00	19.704.000,00	44.488.000,00	54.032.000,00
10	Perindagkop	54.978.000,00	54.978.000,00	0,00	54.978.000,00	0,00	54.978.000,00	0,00
11	Dinas Pekerjaan Umum	97.504.000,00	39.001.600,00	1.625.067,00	40.626.667,00	19.500.800,00	60.127.467,00	37.376.533,00
12	Kebudayaan	49.900.000,00	0,00	1.663.333,00	1.663.333,00	9.980.000,00	11.643.333,00	38.256.667,00
13	RSUD	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00
	<b>Total Akumulasi Atb</b>	<b>4.041.738.708,00</b>	<b>2.415.706.555,20</b>	<b>156.507.128,80</b>	<b>2.572.213.684,00</b>	<b>631.802.194,00</b>	<b>3.264.709.917,00</b>	<b>777.028.782,00</b>

#### 5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

##### 5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp25.673.129.427,45	Rp 17.661.765.000,45

Nilai saldo Aset Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.661.765.000,45 yang merupakan Saldo Awal Aset Rusak Berat pada tahun 2022 sedangkan Saldo Akhir Aset Rusak Berat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp25.673.129.427,45. Terjadi penambahan nilai Aset Rusak Berat sebesar Rp8.624.608.910,00 dan pengurangan nilai aset Rusak Berat sebesar Rp613.244.483,00 sehingga mutasi bersih aset rusak berat tahun 2022 sebesar Rp8.011.364.427,00 atau sebesar 45%.

Tabel 5.97  
Rincian Mutasi

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
17.661.765.000,45	8.624.608.910,00	(613.244.483,00)	8.011.364.427,00	25.673.129.427,45



## I. Penjelasan Mutasi Tambah

1. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB penambahan aset rusak berat sebesar Rp55.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1446 AA.
2. Pada Rumah Sakit Umum Daerah penambahan aset rusak berat sebesar Rp3.055.325.450 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98  
Penambahan Rusak Berat RSUD

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Incenerator ( Alat Kedokteran Umum Lainnya )	1	191.795.450,00
2	Incenerator ( Alat Kedokteran Umum Lainnya )	1	264.304.000,00
3	Precision Encoder Monitor	1	66.000.000,00
4	Kasur/Spring Bed	2	33.200.000,00
5	Brancard	10	66.000.000,00
6	Infusion Pump	2	83.800.000,00
7	Operating Lamp	1	24.600.000,00
8	Standar Infus	36	37.422.000,00
9	Utility Trolley	3	9.000.000,00
10	Tromol Gaas	3	2.211.000,00
11	Orthopedy Set	1	182.314.000,00
12	Mobile Operating Lamp	2	140.000.000,00
13	Electric Suction Pump	1	72.900.000,00
14	Emergency Trolley	1	10.700.000,00
15	Kursi Zeis	2	4.500.000,00
16	Meja Gynokologie	1	4.400.000,00
17	Meja Operasi Minor	1	37.600.000,00
18	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	7.500.000,00
19	Sterur Wira	1	29.205.000,00
20	Elektrocardiograph (ECG) 1 Chanel	2	43.200.000,00
21	Ultrasonic Nebulizer	1	16.500.000,00
22	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	1	504.870.000,00
23	Defibrilator	1	172.920.000,00
24	Glucometer Complete With Glucostic	1	1.700.000,00
25	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2	93.430.000,00
26	ECG Record Single Channel	1	26.620.000,00
27	Wheel Chair ( Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	11	21.780.000,00
28	Patient Monitor	1	85.800.000,00
29	Electrocardiograph	1	190.000.000,00
30	Central Suction (Alat Kedokteran Jantung)	1	4.050.000,00
31	ECG 3 Channel	3	69.630.000,00
32	Kasur Anti Decubitus	2	6.000.000,00
33	Patient Strecher	20	160.380.000,00
34	Continous Suction Unit	1	4.050.000,00
35	Fotometer	1	120.428.000,00
36	Hematology Analyzer	1	100.000.000,00
37	Food Trolley	1	7.100.000,00
38	Automatic On/Off Time Switch	5	6.875.000,00
39	Multi Parameter / Patient Simulator	3	150.000.000,00
40	Electric Scruw Driver	1	2.541.000,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp984.239.965,00 berupa
  - a. Coran jalan dan daam Dusun Lontiak Malaweh Desa Pasar Kubang sebesar Rp72.500.000,00



- b. Pembangunan Gedung DPPKAD (Sondir) Sebesar Rp7.700.000,00
  - c. Pembangunan Gedung BKD (Sondir) Sebesar Rp7.700.000,00
  - d. Pembangunan Gerbang Batas Kota Kupitan (M Kalaban-Kab Sijunjung) sebesar Rp10.000.000,00
  - e. Pengadaan Lampu High Masttugu Kecamatan Talawi sebesar Rp10.000.000,00
  - f. Pembuatan Menara Suar Rt02 Rw 01 Kel Tanah Lapang sebesar Rp3.590.000,00
  - g. Pembukaan Jalan Sentra Produksi Dan Wisata Dari Kubu Harimau Ke Talago (Puncak Teletabis) Desa Lunto Timur sebesar Rp3.590.000,00
  - h. Pembuatan Jalan Lingkungan Jalan Raya Lunto Ke Sungai Langsi Desa Lunto Barat sebesar Rp2,230,000.00
  - i. Jembatan Sawah Binjai Dusun Koto sebesar Rp4,390,000.00
  - j. Jembatan Sawah Binjai Dusun Koto sebesar Rp10.000.000,00
  - k. Dana Sisa Dak Infrastruktur Irigasi Tahun 2015 Optimalisasi Jaringan Irigasi Kincir Angin Batang Ombilin Di Sawah Tapian Ambar Dan Sawah Lurah Desa Talawi Mudik sebesar Rp6.000.000,00
  - l. Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Desa Batu Tanjung - Sikalang (Dak Ipd) sebesar Rp50,403,000.00
  - m. Sanitasi Desa Talawi Hilir sebesar Rp4.000.000,00
  - n. Peningkatan Sarana Prasarana Penyediaan Air Minum Di Desa Batu Tanjung-Sikalang(Dak Ipd) sebesar Rp50,403,000.00
  - o. Peningkatan Sarana Prasana Penyediaan Air Minum Di Ladang Laweh -Kelok Sago(Dak Ipd) sebesar Rp50,173,000.00
  - p. Lanjutan Pembangunan Panti Asuhan sebesar Rp131.500.000,00
  - q. Pembuatan Pelataran Parkir Tahun 2005 sebesar Rp22.350.000,00
  - r. Pembangunan Rumah Garin sebesar Rp39.915.000,00
  - s. Rehab Koramil Silungkang Tahun 2006 sebesar Rp49.885.000,00
  - t. Pembuatan Ruang Gelar Perkara Reskrim Polres Swl sebesar Rp198.733.000,00
  - u. Pembangunan Pos Jaga Polres Sawahlunto sebesar Rp199.277.965,00
  - v. Rehab Kantor Camat Silungkang sebesar Rp49.900.000,
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp83.388.833,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.99  
Penambahan Rusak Berat

No	Nama Barang	Jml Barang	Nilai (Rp)
1	Global Positioning System (GPS)	1	7.991.500,00
2	Gas Detector	1	16.000.000,00
3	Mesin Absensi	1	4.950.000,00
4	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2.000.000,00
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	750.000,00
6	Mesin Ketik Manual Standar (11-13)	1	990.000,00
7	PC Unit	1	6.690.000,00
8	PC Unit	1	8.888.333,00
9	Laptop	1	16.880.000,00
10	Printer	1	600.000,00
11	Printer	2	4.499.000,00
12	Printer	1	600.000,00
13	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00
14	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00
15	Stabilizer	1	1.485.000,00
16	Kursi Lipat	5	4.985.000,00
17	Meja kerja	2	3.080.000,00

5. Dinas Kebudayaan sebesar Rp12.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda 2 BA 6474 JB.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp328.251.976,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.100  
Penambahan Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Mesin Ketik	1	1.650.000
2	Mesin Ketik	1	1.700.000
3	Mesin Ketik	1	1.400.000
4	Mesin Ketik	1	1.400.000
5	Mesin Ketik	2	5.535.000
6	Lemari Besi/Metal	1	1.030.000
7	Lemari Kayu	1	650.000
8	Mesin Absensi	1	1.650.000
9	Mesin Absensi	1	2.275.000
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.220.000
11	Alat Sidik Jari	1	7.975.000
12	Kursi Tamu	1	2.284.000
13	A.C Split	1	3.575.000
14	A.C Split	1	4.500.000
15	A.C Split	2	1.333.333
16	Televisi	1	5.770.000
17	Camera Vidio	1	6.875.000
18	Tangga Alumunium	1	750.000
19	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	1.505.250
20	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	3.080.000
21	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	4	7.700.000
22	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	1	2.117.500
23	Microphone Mic	1	3.850.000
24	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	560.000
25	Digital Video Effect	1	1.570.000
26	Layar Film/Proyektor	1	22.330.000
27	Layar Film/Proyektor	1	6.050.000
28	Telephone (PABX)	1	1.040.000
29	Facsmile	1	2.500.000
30	Facsmile	1	2.162.000



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
31	Antene SHF Portable	1	1.485.000
32	Screen Pembatas	1	594.000
33	P.C Unit	2	15.840.000
34	P.C Unit	2	15.180.000
35	P.C Unit	2	22.620.700
36	P.C Unit	1	16.000.000
37	P.C Unit	3	19.305.000
38	Laptop	1	15.950.000
39	Laptop	2	28.985.000
40	Laptop	1	10.725.000
41	Monitor	2	2.708.000
42	Monitor	1	971.500
43	Printer	1	4.759.000
44	Printer	1	1.748.000
45	Printer	2	3.200.000
46	Printer	6	8.250.000
47	Printer	2	11.880.000
48	Printer	5	19.250.000
49	Printer	2	1.282.813
50	Peralatan Personal Komputer	4	5.925.000
51	Peralatan Personal Komputer	2	3.630.000
52	Peralatan Personal Komputer	2	4.939.000
53	Peralatan Personal Komputer	2	3.498.880
54	Peralatan Personal Komputer	2	1.100.000
55	Peralatan Personal Komputer	1	2.388.000

7. Pada PPKD ada penambahan rusak berat sebesar Rp1.699.034.775,00 berupa :
- Mutasi dari KesbangPol & PBD berupa kendaraan dinas roda 4 BA 111 J seharga Rp84.800.000,00
  - Mutasi dari KesbangPol & PBD berupa kendaraan dinas roda 2 seharga Rp15.070.000,00.
  - Dinding Pengaman Depan Masjid Al Furqon Kel. Saringan Seharga Rp207.430.750,00
  - Pembuatan Lapangan Parkir Masjid Ostiqomah Kolok Nan Tuo Sebesar Rp153.628.225,00
  - Pembuatan Lapangan Parkir Masjid Qubah Duarian Ii Sebesar Rp158.436.000,00
  - Lanjutan Pembuatan Pagar Mtsn Talawi Sebesar Rp199.891.000,00
  - Rehab Masjid Al Furqan Lubang Tembok Sebesar Rp144.085.000,00
  - Rehab Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tanah Lapang Sebesar Rp56.685.300,00
  - Pembuatan Lapangan Parkir Dan Kanopi Mushola Haswanatun Hasanah (Samping Kantor Lurah Aur Mulyo) Sebesar Rp77.930.000,00
  - Lanjutan Pembuatan Lapangan Parkir Masjid Quba Kel. Durian Ii Sebesar Rp199.861.100,00
  - Pembuatan Pagar Masjid Baitul Amal Sapan Sebesar Rp 149.737.500,00



- l. Pembangunan Front Office Negara Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto Sebesar Rp 48.479.500,00
  - m. Rehab Bangunan Gedung Negara Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Swl Sebesar Rp203.000.400,00
8. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp230.624.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.750.000
2	White Board	6	3.300.000
3	Meja 1/2 Biro	1	1.150.000
4	Meja 1/2 Biro	3	2.418.000
5	Kursi Putar	1	810.000
6	Kursi Putar	3	2.430.000
7	Televisi	1	2.250.000
8	Stabilisator	1	3.492.500
9	Facsimile	1	4.900.500
10	P.C Unit	1	15.125.000
11	P.C Unit	1	10.000.000
12	P.C Unit	1	5.000.000
13	P.C Unit	2	15.950.000
14	P.C Unit	2	16.373.500
15	P.C Unit	1	11.310.350
16	Lap Top	1	15.977.500
17	Lap Top	1	14.850.000
18	Note Book	1	11.099.000
19	Monitor	2	3.000.000
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.496.000
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.200.000
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	995.500
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.960.000
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.774.000
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.422.000
26	Alat Komunikasi Sosial Lainnya (dst)	1	8.765.000
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.993.000
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.357.000
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.203.000
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.280.000
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.870.000
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.970.000
33	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.790.000
34	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	2	4.884.000
35	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.749.440
36	Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	3	7.260.000
37	Gordyn	1	19.469.000

9. Inspektorat Kota sebesar Rp8.933.000,00 berupa Mesin Pemotong Rumput seharga Rp2.810.500,00, AC split seharga Rp4.000.000,00 dan buku management dan perkantoran seharga Rp2.122.500,00
10. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.263.270.005,00 dari hasil inventarisasi aset dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.102  
Penambahan Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Sedan	1	177.600.000
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.516.673
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000
5	Alat penghancur kertas	1	1.512.236
6	A.C. Split	1	4.370.000
7	Micro Bus	1	290.000.000
8	Sepeda Motor	1	12.500.000
9	Sepeda Motor	1	25.000.000
10	Sepeda Motor	1	11.800.000
11	Sepeda Motor	1	12.650.000
12	Sepeda Motor	1	12.650.000
13	Sepeda Motor	1	10.500.000
14	Sepeda Motor	1	12.485.000
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.000.000
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.485.000
17	Kursi Besi/Metal	1	2.200.000
18	Kursi Tamu	1	2.260.000
19	Meja Komputer	1	825.000
20	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.300.000
21	Meja Rapat	1	680.940
22	Meja Kerja Pejabat Eeslon II	1	7.500.000
23	Meja Kerja Pejabat Eeslon III	1	680.000
24	P.C Unit	2	17.600.000
25	P.C Unit	2	17.160.000
26	Lap Top	2	27.160.000
27	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	3.300.000
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.300.000
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	3.740.000
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.235.000
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.155.000
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	4.125.000
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.685.000
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.087.500
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.402.500
37	A.C. Split	1	3.402.140
38	A.C. Split	1	5.190.000
39	Camera Video	1	2.000.000
40	Camera Video	1	1.500.000
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	1.701.249
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.422.106
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.300.000
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	605.000
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	860.000
46	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.376.000
47	A.C. Split	1	6.952.000
48	Unit Power Supply	1	1.375.000
49	P.C Unit	1	10.312.500
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.235.000
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	869.000
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	990.000
53	Meja Komputer	2	2.057.142
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	880.000
55	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	4.070.000
56	Meja Komputer	1	1.028.570
57	Unit Power Supply	1	1.375.000
58	Unit Power Supply	1	1.320.000



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.050.000
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.422.106
61	P.C Unit	1	4.646.667
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000
63	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	3.750.000
64	Lemari Kayu	1	980.000
65	Meja Komputer	2	2.057.142
66	Meja Komputer	1	825.000
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.250.000
68	Unit Power Supply	1	1.375.000
69	Unit Power Supply	1	1.474.000
70	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	1.560.000
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	874.000
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.485.000
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.950.000
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1.155.000
75	Filling Cabinet Besi	1	907.000
76	Kursi Tamu	1	2.260.000
77	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.650.000
78	Unit Power Supply	1	1.474.000
79	Unit Power Supply	1	1.320.000
80	Layar Film/Projector	1	7.975.000
81	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst)	1	4.900.000
82	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	1.364.000
83	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	1	905.000
84	Amplifier	1	565.000
85	Unit Power Supply	1	1.499.960
86	Telephone (PABX)	1	34.845.000
87	Facsimile	1	1.637.500
88	P.C Unit	1	7.820.000
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.791.250
90	Rak Besi	1	990.000
91	White Board Electronic	1	9.900.000
92	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	935.000
93	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.320.000
94	Meja Rapat	1	65.000.000
95	Meja Komputer	1	1.028.571
96	A.C. Split	2	6.804.290
97	A.C. Split	2	20.070.000
98	Loudspeaker	1	2.205.000
99	Loudspeaker	2	2.715.000
100	Sound System	1	14.115.000
101	Sound System	1	4.500.000
102	Wireless	1	11.970.000
103	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2.450.000
104	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	3.000.000
105	Layar Film/Projector	1	19.800.000
106	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	4.070.000
107	Unit Power Supply	1	1.499.960
108	Unit Power Supply	1	1.749.440
109	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2.250.000
110	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	896.500
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.540.000
112	P.C Unit	1	8.800.000
113	P.C Unit	1	8.580.000
114	P.C Unit	1	11.310.350
115	Lap Top	1	24.750.000
116	Lap Top	1	9.900.000
117	Lap Top	1	8.470.000



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
118	Lap Top	1	9.350.000
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.375.000
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	990.000
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	825.000
122	Kipas Angin	1	673.860
123	Lap Top	1	3.000.000
124	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	3.750.000
125	Meja Rapat	4	2.723.752
126	Meja Komputer	2	2.057.142
127	Kursi Tamu	1	2.260.000
128	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	680.000
129	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.485.000
130	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	1.430.000
131	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2.133.158
132	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1.612.730
133	Lap Top	1	9.350.000
134	Lap Top	1	14.080.000
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	874.000
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	880.000
137	A.C. Split	1	6.952.000
138	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.000.000
139	Lemari Kayu	1	2.200.000
140	Kursi Tamu	1	2.310.000
141	Unit Power Supply	1	2.800.000
142	Unit Power Supply	1	1.540.000
143	Camera Video	1	8.800.000
144	Camera Electronic	1	9.979.750
145	Lap Top	2	8.800.000
146	Tempat Tidur Kayu	1	45.327.035
147	Lemari kayu	1	2.938.286
148	Meubelair Lainnya	1	2.970.000
149	Lemari Es	1	6.831.000

11. Pada Kecamatan Silungkang sebesar Rp216.143.489,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.103  
Penambahan Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Pompa Air	1	3.900.000,00
2	Mini Bus (Mitsubishi/Colt T)	1	41.900.000,00
3	Mesin Ketik Manual Standard (14 -16 inci) Olympia	1	520.000,00
4	Mesin Ketik Manual Standard (14 -16 inci) Olympia	1	2.724.200,00
5	Mesin Absensi( Icon T6)	1	4.950.000,00
6	Mesin Absensi(Solution/X601)	1	6.655.000,00
7	Meja Rapat (Donaty)	3	1.618.994,00
8	Kursi Putar(Bigstar)	1	505.000,00
9	Kursi Putar (Donaty)	4	2.118.284,00
10	Kursi Putar (Chair Man)	2	1.700.554,00
11	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1.367.000,00
12	A.C Window (LG)	1	6.433.000,00
13	Televisi	1	1.000.000,00
14	Televisi	1	8.211.667,00
15	Wireless (Panasonic)	1	5.820.000,00
16	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Trali )	1	2.688.000,00
17	Microphone/Wireless MIC	1	4.150.000,00
18	Layar Film/Projector (Infocus)	1	16.900.000,00
19	Handy Talky (HT)	1	870.000,00
20	Peralatan Antena Shf/Parabola	1	7.118.600,00



21	Genset	1	7.392.000,00
22	P.C Unit (Pentium IV)	1	7.537.000,00
23	P.C Unit (Milenia/Pentium IV)	1	7.537.000,00
24	P.C Unit (GIC/Pentium IV)	1	7.245.000,00
25	P.C Unit (Dell)	1	11.310.350,00
26	P.C Unit (Acer)	1	4.620.000,00
27	Laptop (Vaio)	1	13.625.000,00
28	Laptop (Aspire)	1	9.955.000,00
29	Printer (canon / IX 4000)	1	1.167.000,00
30	printer (Deskjet /4355)	1	3.991.900,00
31	Printer (canon / i255)	1	1.167.000,00
32	Printer (Canon/Pixma 5270)	1	2.134.000,00
33	Printer (MB 2570)	1	975.000,00
34	Peralatan Personal Komputer Lainnya (AFC ERSYS)	1	1.980.000,00
35	Personal Komputer Lainnya (APC-BACK-UPS Pro 550)	1	1.749.440,00
36	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	1.668.000,00
37	Peralatan Personal Komputer Lainnya (Prolink)	2	1.012.000,00
38	Tenda	3	9.927.500,00

12. Pada Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp.203.898.100,00 hasil dari inventarisasi aset dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104  
Penambahan Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
	<b>Kantor Camat Lembah Segar</b>		<b><u>38.000.000,00</u></b>
1	Lemari Penyimpanan	1	1.500.000,00
2	Mesin Tik Manual Portable	1	2.750.000,00
3	Mesin Tik Manual Portable	1	2.090.000,00
4	Mesin Tik Manual Portable	1	2.000.000,00
5	Mesin Tik Manual Portable	1	1.975.000,00
6	Mesin Absensi	1	4.950.000,00
7	Meja Kerja Kayu	7	4.200.000,00
8	Kursi Tamu	1	1.500.000,00
9	Kursi Tamu	1	3.180.000,00
10	Kursi Tamu	1	2.500.000,00
11	Televisi	1	2.500.000,00
12	P.C Unit	1	7.355.000,00
13	Printer	1	1.500.000,00
	<b>Kelurahan Aur Mulyo</b>		<b><u>42.559.000,00</u></b>
1	Sepeda Motor	1	4.700.000,00
2	Reciver	1	1.500.000,00
3	Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	2	1.240.000,00
4	Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	1	620.000,00
5	Brangkas	1	1.020.000,00
6	Papan Pengumuman	1	750.000,00
7	Meja 1/2 Biro	4	4.190.000,00
8	Kursi Tamu	2	3.200.000,00
9	Kursi Putar	2	1.896.500,00
10	Mesin Pemetong Rumput	1	1.500.000,00
11	AC Split	1	4.200.000,00
12	AC Split	1	6.892.500,00
13	Televisi	1	1.600.000,00
14	Camera Film	1	1.500.000,00
15	Mesin jahit	1	1.250.000,00
16	Senapan Angin	2	2.000.000,00
17	P.C Unit	1	4.500.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
	<b>Kelurahan Kubang Sirakuk Utara</b>		<b><u>11.328.000,00</u></b>
1	Gergaji Sinsaw	1	1.958.000,00
2	Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	1	620.000,00
3	Lemari kayu	3	2.250.000,00
4	Lemari kayu	3	2.250.000,00
5	Kursi Tamu	1	2.750.000,00
6	Camera Film	1	1.500.000,00
	<b>Kel. Air Dingin</b>		<b><u>47.914.600</u></b>
1	Gergaji Sinsaw	1	2.000.000,00
2	Reciver	1	2.000.000,00
3	Lemari Kayu	1	750.000,00
4	Alat Sidik jari	1	14.650.000,00
5	Meja Kerja Kayu	1	2.733.500,00
6	Meja Kerja Kayu	1	1.250.000,00
7	Kursi Tamu	1	750.000,00
8	Kursi Tamu	1	2.000.000,00
9	Kursi Putar	1	896.500,00
10	Kursi Putar	2	1.799.600,00
11	Televisi	1	1.800.000,00
12	Camera Film	1	3.000.000,00
13	Dispenser	1	540.000,00
14	P.C Unit	1	4.950.000,00
15	Laptop	1	3.535.000,00
16	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	750.000,00
17	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	4.510.000,00
	<b>Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan</b>		<b><u>19.087.500</u></b>
1	Mesin Ketik manual Portabel(11-13 inc	3	1.860.000,00
2	Filing Kabinet Besi	1	1.080.000,00
3	Brangkas	2	6.350.000,00
4	Mesin Pemetong Rumput	1	1.772.500,00
5	Televisi	1	2.150.000,00
6	Televisi	1	975.000,00
7	laptop	1	4.000.000,00
8	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	900.000,00
	<b>Kel. Pasar</b>		<b><u>45.009.000,00</u></b>
1	Gergaji cincaw	1	1.958.000,00
2	MesinKetik Manual Portable 11-13 inc	5	620.000,00
3	Lemari Kayu	1	750.000,00
4	Lemari Kayu	1	1.000.000,00
5	Meja kerja besi/Metal	1	5.995.000,00
6	Kursi Tamu	1	1.860.000,00
7	Televisi	1	1.500.000,00
8	PC.Unit	1	4.500.000,00
9	Laptop	1	6.445.000,00
10	Laptop	1	8.745.000,00
11	CPU(peralatan Personal Computer	1	4.500.000,00
12	CPU(peralatan Personal Computer	1	650.000,00
13	Monitor	1	1.400.000,00
14	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	670.000,00
15	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	995.000,00
16	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	1.710.500,00
17	Printer (Peralatan Personal Compoter	1	1.710.500,00



13. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp99.870.000,00 yang berasal dari mutasi PPKD berupa kendaraan dinas roda 4 BA 111 J seharga Rp84.800.000,00 dan kendaraan dinas roda 2 BA 6991 JA seharga Rp15.070.000,00.
14. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp139.950.000,00 reklas dari aset renovasi berupa Rehab TK Tyoibah Talawi sebesar Rp39.950.000,00 dan Rehab berat ruang kelas SMK Muhamadyah 2 lokal sebesar Rp100.000.000,00
15. Pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp92.042.327,00 yang di reklas dari KDP berupa :
  - a. pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka survey harga dan spesifikasi pengadaan kendaraan bermotor khusus truk sampah sebesar Rp600.000,00
  - b. Honorarium Pembuatan Bangunan Grase Alat Berat sebesar Rp6.000.000,00
  - c. honorarium pengadaan fasilitas umum (pembuatan taman kota) sebesar Rp3.000.000,00
  - d. pengecoran jalan dan pemasangan pagar kawat makam di RT 03/RW 02 Kel.Durian I sebesar Rp135.000,00
  - e. Pengecoran jalan dan bangunan pelengkap Perumnas Baru Kampung Baru sebesar Rp390.000,00
  - f. Pengecoran jalan dan bangunan pelengkap Perumnas Baru Kampung Baru sebesar Rp470.000,00
  - g. pengecoran jalan dan bangunan pelengkap di belakang Kantor Balaikota sebesar Rp367.600,00
  - h. peningkatan jalan lingkungan di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang sebesar Rp2.838.175,00
  - i. peningkatan jalan dan bangunan pelengkap RT 4 RW2 tanjung Sari kel. Aur mulyo sebesar Rp3.820.025,00
  - j. peningkatan jalan dan bangunan pelengkap di kawasan TPA Kayu gadang sebesar Rp3.747.680,00
  - k. Honorarium perencanaan teknis sebesar Rp4.000.000,00
  - l. Honorarium perencanaan teknis sebesar Rp1.500.000,00
  - m. Pembayaran Biaya Personil Keg Perencanaan Teknis Paket Perencanaan 50jt sd 100jt dan Keg Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Rehabilitasi WC Umum Kel. Pasar an. Zambri Yanto, Cs sebesar Rp2.230.000,00



- n. Pembuatan Daam dan riol RT 01 RW 02 Kampung Teleng Kel. Pasar sebesar Rp2.476.775,00
  - o. pembuatan daam musholla Nurul amal rt01/rw01 kel durian 2 sebesar Rp330.000,00
  - p. pembuatan Daam dan Drainase di Kelurahan tanah lapang dan Kelurahan kubang sirakuk utara sebesar Rp263.000,00
  - q. Pembuatan Daam di RW 01 dan Rw 02 Kelurahan Air Dingin sebesar Rp2.039.275,00
  - r. Pembayaran Biaya Personil Keg Perencanaan Teknis Paket Perencanaan 50jt sd 100jt Keg Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas Pekerjaan Pembuatan Saluran RT 02 RW1 Gunung Timbago, Kel Saringan an Cosmas Sariato, Cs sebesar Rp2.230.000,00
  - s. pembuatan saluran di RT 1 RW 2 Kelurahan durian 1 sebesar Rp313.000,00
  - t. Pembuatan Drainase/Riol Mulai dari Arah Mushalla Alfalah Dusun Air Gantang Sampai dengan Menuju Arah Jalan ke dusun Padang Elok Kubang Utara Sikabu sebesar Rp2.476.775,00
  - u. Pembuatan Drainase Di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban sebesar Rp3.015.022,00
  - v. Biaya konsultan perencanaan pembuatan taman samping GPK sebesar Rp49.800.000,00
16. Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp16.529.200,00 reklas dari KDP berupa :
- a. SPPD dalam rangka survey awal perencanaan penataan Desa Wisata Rantih sebesar Rp9.179.200,00
  - b. Honorarium Tim Perencana Teknis Penataan kebun buah kandi sebesar Rp4.000.000,00
  - c. honorarium pptk, ppk, panitia pengadaan kegiatan pengadaan alat band sebesar Rp3.350.000,00.
17. Pada Dinas Pertanian sebesar Rp136.107.500,00 reklas dari aset tetap lainnya berupa ikan hias air tawar dan ikan air payau budidaya.

## **II. Penjelasan Mutasi Kurang Nilai Aset Rusak berat sebagai berikut:**

Penjelasan dari mutasi kurang nilai aset rusak berat sebesar Rp613.244.483,00 disebabkan oleh adanya mutasi antar SKPD dan penghapusan.

1. Pengurangan aset rusak berat karena mutasi antar SKPD sebesar Rp114.940.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.105  
Rincian Mutasi Antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Nama Barang	Harga (Rp)
1	Badan Kesbangpol BPBD	PPKD	Kendaraan dinas Roda 4 BA 111 J	84.800.000,00
			Kendaraan dinas roda 2	15.070.000,00
2	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kendaraan dinas roda 2	15.070.000,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>114.940.000,00</b>

2. Pengurangan aset rusak berat karena penghapusan sebesar Rp498.304.483,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.106  
Rincian Penghapusan Aset Rusak Berat

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah Brg	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan
I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		<b>88</b>	<b>197.180.193,00</b>	No.188.45/202/WAKO- SWL/2022 tanggal 28 Juli 2022
	1	Global Positioning System (GPS)	1	7.991.500,00	
	2	Gas Detector	1	16.000.000,00	
	3	Mesin Absensi	1	4.950.000,00	
	4	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2.000.000,00	
	5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	750.000,00	
	6	Mesin Ketik Manual Standar (11-13)	1	990.000,00	
	7	PC Unit	1	6.690.000,00	
	8	PC Unit	1	8.888.333,00	
	9	Laptop	1	16.880.000,00	
	10	Printer	1	600.000,00	
	11	Printer	2	4.499.000,00	
	12	Printer	1	600.000,00	
	13	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00	
	14	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.500.000,00	
	15	Stabilizer	1	1.485.000,00	
	16	Kursi Lipat	5	4.985.000,00	
	17	Meja kerja	2	3.080.000,00	
	18	Global Positioning System (GPS)	1	10.989.000,00	
	19	Gas Detector	1	25.987.500,00	
	20	Handy Talky	3	1.740.000,00	
	21	Brandkas	1	2.000.000,00	
	22	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	990.000,00	
	23	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1.000.000,00	
	24	P.C Unit/ Komputer PC	1	7.100.000,00	
	25	P.C Unit/ Komputer PC	1	3.530.000,00	
	26	P.C Unit/ Komputer PC	1	2.500.000,00	
	27	P.C Unit/ Komputer PC	1	1.760.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah Brg	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan
	28	Personal Komputer Lain-lain	1	920.000,00	
	29	Personal Komputer Lain-lain	1	720.000,00	
	30	Printer	2	800.000,00	
	31	Printer	1	1.560.000,00	
	32	Printer	3	5.962.000,00	
	33	Printer	1	4.455.000,00	
	34	Printer	2	1.800.000,00	
	35	Printer	2	1.800.000,00	
	36	Printer	2	4.499.000,00	
	37	Printer	1	3.388.000,00	
	38	Printer	4	1.496.000,00	
	39	UPS	1	2.090.000,00	
	40	UPS	4	1.980.000,00	
	41	UPS	1	460.000,00	
	42	UPS	1	1.485.000,00	
	43	Facsimile	1	702.000,00	
	44	Helm Standar	1	1.160.000,00	
	45	Helm Standar	1	1.000.000,00	
	46	Kursi Putar	1	575.000,00	
	47	Gordyn	2	3.250.000,00	
	48	Karpet	1	750.000,00	
	49	Kipas Angin	2	650.000,00	
	50	Lap Top	1	1.200.000,00	
	51	Mouse	1	695.000,00	
	52	Pesawat Telephone	1	1.500.000,00	
	53	Pesawat Telephone	2	1.300.000,00	
	54	Mantel	1	810.000,00	
	55	Mantel	2	1.500.000,00	
	56	Alat Labolatorium lain-lain	2	5.286.000,00	
	57	Mesin Jahit	1	383.700,00	
	58	Printer	1	468.160,00	
	59	Kompor Minyak Tanah	1	500.000,00	
	60	Papan Tulis	1	300.000,00	
	61	Kipas Angin	1	300.000,00	
	62	Kipas Angin	1	450.000,00	
II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		<u>52</u>	<u>230.624.290,00</u>	Nomor: 188.45/254/WAKO-SWL/2022
	1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.750.000	
	2	White Board	6	3.300.000	
	3	Meja 1/2 Biro	1	1.150.000	
	4	Meja 1/2 Biro	3	2.418.000	
	5	Kursi Putar	1	810.000	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah Brg	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan
6		Kursi Putar	3	2.430.000	
7		Televisi	1	2.250.000	
8		Stabilisator	1	3.492.500	
9		Facsimile	1	4.900.500	
10		P.C Unit	1	15.125.000	
11		P.C Unit	1	10.000.000	
12		P.C Unit	1	5.000.000	
13		P.C Unit	2	15.950.000	
14		P.C Unit	2	16.373.500	
15		P.C Unit	1	11.310.350	
16		Lap Top	1	15.977.500	
17		Lap Top	1	14.850.000	
18		Note Book	1	11.099.000	
19		Monitor	2	3.000.000	
20		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.496.000	
21		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.200.000	
22		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	995.500	
23		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.960.000	
24		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.774.000	
25		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.422.000	
26		Alat Komunikasi Sosial Lainnya (dst)	1	8.765.000	
27		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.993.000	
28		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.357.000	
29		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.203.000	
30		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.280.000	
31		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.870.000	
32		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.970.000	
33		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.790.000	
34		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	2	4.884.000	
35		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	1	1.749.440	
36		Peralatan Personal Komputer lainnya (UPS)	3	7.260.000	
37		Gordyn	1	19.469.000	
III	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		14	68.000.000,00	SK No. 189.2/310/WAKO-SWL/2008
	1	Sepeda Motor	1	2.500.000,00	
	2	Sepeda Motor	1	3.000.000,00	
	3	Sepeda Motor	1	3.000.000,00	
	4	Sepeda Motor	1	3.500.000,00	
	5	Sepeda Motor	1	3.500.000,00	



No	SKPD	Nama Barang	Jumlah Brg	Nilai (Rp)	No. SK Penghapusan
6		Sepeda Motor	1	4.500.000,00	
7		Sepeda Motor	1	5.000.000,00	
8		Sepeda Motor	1	5.500.000,00	
9		Sepeda Motor	1	6.000.000,00	
10		Sepeda Motor	1	6.000.000,00	
11		Sepeda Motor	1	6.000.000,00	
12		Sepeda Motor	1	6.500.000,00	
13		Sepeda Motor	1	6.500.000,00	
14		Sepeda Motor	1	6.500.000,00	
IV	Dinas Pendidikan	Monitor	1	2.500.000,00	SK No. 188.45/139/WAKO-SWL/2022

#### 5.3.1.4.4.2 Aset Ekstrakomptabel

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 17.099.608.244,40	Rp16.237.290.895,73

Nilai Aset Ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.237.290.895,73 yang merupakan Saldo Awal Aset Ekstrakomptabel pada tahun 2022 sedangkan Saldo Akhir Aset ekstrakomptabel pada tahun 2022 adalah sebesar Rp17.099.608.244,40. Terjadi penambahan nilai Aset ekstrakomptabel sebesar Rp937.013.962,17 dan pengurangan nilai aset ekstrakomptabel sebesar Rp74.696.613,50 sehingga mutasi bersih aset ekstrakomptabel sebesar Rp862.317.348,67 atau sebesar 5,04%.

Bertambah dan berkurangnya Aset Ekstrakomptabel selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107  
Rincian Mutasi

31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
16.237.290.895,73	937.013.962,17	(74.696.613,50)	862.317.348,67	17.099.608.244,40

#### I. Penjelasan Mutasi Bertambah

Penjelasan dari mutasi penambahan nilai Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp 937.013.962,17 disebabkan oleh reklas dari Aset Tetap, mutasi antar SKPD dan koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan penambahan sebesar Rp 578.852.824,00 dengan rincian reklas dari belanja modal peralatan mesin sebesar Rp332.018.573,00, reklas belanja modal aset tetap lainnya berupa buku sebesar Rp185.750.851,00, reklas dari KIB B (Kursi Siswa SMP 73 buah (dari DAK) tahun 2021) sebesar Rp 31.959.400,00, reklas dari KIB C (rumah dinas 2) sebesar Rp 17.112.000,00 dan reklas dari KIB E (Pembangunan Sasana Tinju . penyerahan aset dari DPU tahun 2015) sebesar Rp 12.012.000,00.



2. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp61.945.022,63 yang berasal dari reklas belanja modal peralatan mesin sebesar Rp12.163.650,00 dan reklas dari Puskesmas Sungai Durian ke Puskesmas Talawi sebanyak Rp35.551.841,64, ke Puskesmas Kolok sebesar Rp7.784.610,07 dan Puskesmas Lunto sebesar Rp6.444.920,92.
3. Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp17.614.119,00 reklas dari belanja modal peralatan mesin.
4. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 75.113.280,00 dengan rincian reklas dari belanja modal peralatan dan mesin Rp22.885.000,00, serta reklas tambah ke Ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp10.434.280,00, reklas dari KIB E sebesar Rp 41.794.000,00
5. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH penambahan aset Ekstrakomptabel sebesar Rp18.743.505,00 berasal dari belanja modal peralatan mesin sebesar Rp18.525.782,00 dan reklas tambah ke aset lainnya berupa buku sebesar Rp217.723,00
6. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.001.050,00 berasal dari reklas tambah ke peralatan mesin sebesar Rp500.000,00 dan reklas tambah ke aset tetap lainnya sebesar Rp6.501.050,00
7. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp360.750,00 ke peralatan dan mesin
8. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.018.000,00 karena adanya mutasi dari PPKD dengan BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022 ke peralatan dan mesin
9. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 6.660.000,00 reklas tambah dari belanja modal peralatan dan mesin
10. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp480.145,00 ke peralatan dan mesin
11. Pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp380.000,00 reklas dari belanja modal peralatan dan mesin
12. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 10.253.421,54 ke peralatan dan mesin sebesar Rp4.753.421,54 dan reklas dari KIB E (fasade information centre) Rp 5.500.000,00
13. Pada PPKD penambahan sebesar Rp81.452.151,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Hibah dari KAN Kec. Talawi sebesar Rp10,00 dengan BAST No. 62/KAN-TLW/IV-2022



- Mutasi dari PUPR sebesar Rp2.018.000,00 dengan BAST No. 028/65/DPUPR-SWL/2022
  - Mutasi dari KesbangPol&PBD sebesar Rp5.479.000,00 dengan BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022 dan buku sebesar Rp231.000,00
  - Mutasi dari Setdako sebesar Rp2.733.500,00 dengan BAST No. 028/444/BA/UMUM-SWL/2022
  - Koreksi di gedung dan bangunan sebesar Rp70.990.641,00
14. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp 7.721.000,00 merupakan reklas tambah dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp5.033.000,00, dan reklas dari KIB B (terdiri dari 8 kursi) sebesar Rp 2.688.000,00 ,
  15. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp973.689,00 menambah ke aset tetap lainnya berupa buku
  16. Pada Kecamatan Barangin sebesar Rp 21.476.495,00 reklas tambah dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp21.031.495,00, dan reklas dari KIB B (kursi putar) sebesar Rp 445.000,00.
  17. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika ada penambahan Ekstrakomptabel mutasi dari PPKD sebesar Rp2.733.500,00 ke peralatan dan mesin
  18. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada penambahan sebesar Rp5.710.000,00 mutasi dari PPKD sebesar Rp5.479.000,00 pada peralatan mesin dan sebesar Rp231.000,00 pada aset tetap lainnya
  19. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.400.000,00 reklas dari belanja modal peralatan mesin.
  20. Pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto ada koreksi sebesar Rp19.250.000,00 pada aset gedung dan bangunan (rumah genset).
  21. Pada Kecamatan Lembah Segar penambahan ekstrakomp sebesar Rp 14.875.000 reklas dari KIB E (pembangunan kopel/gerbang TPU Air Dingin)
  22. Pada Kec. Talawi penambahan ekstrakom sebesar Rp10,00 reklas dari KIB C (hibah KAN Talawi)

## II. Penjelasan Mutasi Kurang

Penjelasan dari mutasi kurang nilai Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp74.696.613,50 disebabkan oleh adanya mutasi antar SKPD, koreksi catat, reklas antar UPB dan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:



1. Penjelasan pengurangan aset Ekstrakomptabel karena mutasi antar SKPD sebesar Rp20.923.010,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108  
Rincian Mutasi antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Peralatan Mesin Harga (Rp)	Aset Tetap Lainnya Harga (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPKD	2.018.000,00	0,00	BAST no: 028/65/DPUPR-SWL/2022
2	Sekretariat Daerah	PPKD	2.733.500,00	0,00	028/444/BA/UMUM-SWL/2022
3	KesbangPol & PBD	PPKD	5.479.000,00	231.000,00	Mutasi ke PPKD BAST No. 028/182/BA.KBP-PBD/SWL/2022
4	PPKD	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.733.500,00	0,00	BAST No.134.4/013/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
5	PPKD	Dinas Perhubungan	2.018.000,00	0,00	BAST No. 134.4/012/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
6	PPKD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.479.000,00	231.000,00	BAST No. 134.4/015/BA/BPKAD-ASET/2022
7	PPKD	Kec. Talawi		10,00	BAST No. 134.4/006/BA/BPKAD-ASET/SWL/2022
		JUMLAH	20.461.000,00	462.010,00	

2. Pengurangan aset Ekstrakomptabel karena koreksi catat sebesar Rp2.992.230,87 dengan rincian sebagai berikut
  - a. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp2.972.230,87 karena double catat pada tahun sebelumnya
  - b. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp20.000,00 karena double catat pada tahun sebelumnya
3. Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkurang sebesar Rp49.781.372,63 karena mutasi antar UPB.
4. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ada penghapusan sebesar Rp 1.000.000,00 berdasarkan SK. Penghapusan No.188.45/202/WAKO-SWL tanggal 28 Juli 2022.

#### 5.3.1.4.6 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.001.031.612,00	0,00

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.001.031.612,00 merupakan pokok Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan pada tahun 2022 dari RKUN ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke



Daerah (TDF-TKD) yang ada di Bank Indonesia yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.258.769.005,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp1.742.262.607,00.

### 5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.326.295.623,69 meliputi kewajiban jangka pendek sebesar Rp10.159.629.182,66 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp8.166.666.441,03, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2022 (Rp.)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp.)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	10.159.629.182,66	11.590.811.435,33
Kewajiban Jangka Panjang	8.166.666.441,03	9.333.333.111,03
<b>Total Kewajiban</b>	<b>18.326.295.623,69</b>	<b>20.924.144.546,36</b>

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	<b>Tahun 2022 (Rp.)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp.)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	10.159.629.182,66	11.590.811.435,33

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.159.629.182,66, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.109**  
**Data Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK)	115.659.557,00	-	27.468.174,00	88.191.383,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00
Pendapatan Diterima Dimuka	19.699.725,33	23.778.706,66	19.699.725,33	23.778.706,66
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.019.739.839,00	135.222.596,00	1.019.739.839,00	135.222.596,00
Utang Belanja Barang	9.269.045.648,00	8.745.769.829,00	9.269.045.648,00	8.745.769.829,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.590.811.435,33</b>	<b>10.071.437.799,66</b>	<b>11.502.620.052,33</b>	<b>10.159.629.182,66</b>

#### 5.1.1.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp88.191.383,00 terdiri dari Uang Jaminan Sewa Rusunawa sebesar Rp85.125.000,00 dan pajak restoran atas belanja Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah



Pertama (SMP) yang belum disetorkan pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp66.383,00, sehingga masih berada di tangan bendahara BOS masing-masing sekolah

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa pada OPD Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.

#### 5.1.1.2.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>
Utang Dalam Negeri	1.166.666.668,00	1.166.666.666,66

Utang Dalam Negeri Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp.1.166.666.668,00 merupakan Hutang Pokok Dalam Negeri atas Pinjaman Bank Dunia.

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka

	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>
Pendapatan Diterima Dimuka	23.778.706,66	19.699.725,33

Pendapatan Diterima Dimuka pada akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp23.778.706,66 merupakan Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebesar Rp19.052.679,66 dan sewa menyewa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Kas dan Rumah ATM Balaikota Sawahlunto sesuai dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT. Bank Nagari Cabang Sawahlunto Nomor: 030/233/Setdako-SWL/2022 dan Nomor PKS/012/SW/06-2022 tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2024 sebesar Rp4.726.027,00 pada Sekretariat Daerah.

#### 5.1.1.2.4 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

	<u>Tahun 2022 (Rp.)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp.)</u>
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	135.222.596,00	1.019.739.839,00

Utang belanja gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp135.222.596,00 berupa utang: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh 21, tunjangan BPJS kesehatan 4%, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, tunjangan jaminan kematian, tunjangan Tapera PK, pembulatan, IWP 4%, dan PPh Pasal 21 atas pembayaran TPP THR 2022. Utang ini tersebar pada 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



1	Dinas Pendidikan	24.973.564,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	76.518.812,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	60.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	97.228,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	497.214,00
6	Dinas Perhubungan	-
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.268.253,00
8	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman	2.187.500,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.438.796,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	851.600,00
11	Sekretariat Daerah	535.000,00
12	Sekretariat Dewan	6.965.695,00
13	Kecamatan Talawi	185.000,00
14	Kecamatan Barangin	1.936.819,00
15	Kecamatan Silungkang	2.214.408,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.727.356,00
17	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	6.233.767,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.531.584,00
<b>Total (Rp)</b>		<b>135.222.596,00</b>

Rincian utang belanja gaji dan tunjangan Tahun 2022 dapat dirinci sebagaimana berikut:

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp24.973.564,00 merupakan Rapel Gaji Guru dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

-	Gaji Pokok PNS	20.838.240,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	2.302.752,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	185.000,00
-	Tunjangan Beras	383.403,00
-	Tunjangan Khusus PNS	188.519,00
-	Pembulatan	774,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	661.548,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	290.049,00
-	Iuran Jaminan Kematian PNS	109.572,00
-	Tunjangan Tapera	13.707,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.973.564,00</b>

- b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp76.518.812,00, terdiri dari:

-	Gaji Pokok PNS	16.975.336,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	1.953.562,00
-	Tunjangan Jabatan PNS	6.359.800,00
-	Tunjangan Fungsional PNS	10.959.400,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	(740.000,00)



- Tunjangan Beras	1.516.127,00
- Tunjangan Khusus PNS	16.285.871,00
- Pembulatan	1.342,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	483.661,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.019.526,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	6.058.705,00
- Rapel Tunjangan Fungsional PPPK (RSUD)	12.849.500,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Desember (RSUD)	1.795.982,00
- <b>Jumlah</b>	<b>76.518.812,00</b>

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.60.000,00 merupakan kekurangan Tunjangan Fungsional PNS atas nama Reza Adrano, A.Md yang harus dibayarkan pada tahun 2023 akibat penyesuaian jabatan fungsional.

d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	81.300,00
- Tunjangan Keluarga PNS	11.382,00
- Pembulatan	60,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.706,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	195,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	585,00
- <b>Jumlah</b>	<b>97.228,00</b>

e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp.497.214,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	473.600,00
- Pembulatan	124,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.944,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.137,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	3.409,00
- <b>Jumlah</b>	<b>497.214,00</b>

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp.1.268.253,00 yang terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	246.700,00
- Tunjangan Keluarga PNS	20.398,00
- Tunjangan Fungsional PNS	5.000,00
- Pembulatan	90,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	993.695,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	593,00



-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	1.777,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.268.253,00</b>
g.	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman sebesar Rp.2.187.500,00 merupakan kekurangan pembayaran Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Bulan November dan Desember akibat kekurangan anggaran.	
h.	Sekretariat Daerah sebesar Rp.535.000,- merupakan utang Tunjangan Fungsional atas nama Fajri Abdilla, S.Kom sebesar Rp.355.000,00 dan Minarti Juwita, A.Md sebesar Rp.180.000,00.	
i.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.6.233.767,00 yang terdiri dari :	
-	Gaji Pokok PNS	351.300,00
-	Tunjangan Fungsional PNS	5.550.000,00
-	Tunjangan Khusus PNS	92.826,00
-	Pembulatan	217,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	236.052,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	843,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	2.529,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.233.767,00</b>
j.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.3.531.584,00 yang terdiri dari :	
-	Gaji Pokok PNS	471.600,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	66.024,00
-	Pembulatan	(40,00)
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.989.472,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.132,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	3.396,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.531.584,00</b>
k.	Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.965.695,00 yang terdiri dari :	
-	Gaji Pokok PNS	6.134.820,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	429.408,00
-	Tunjangan Khusus PNS	104.967,00
-	Pembulatan	138,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	237.478,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.710,00
-	Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	44.174,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.965.695,00</b>



l. Kecamatan Barangin sebesar Rp.1.936.819,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	1.311.300,00
- Tunjangan Keluarga PNS	183.582,00
- Tunjangan Fungsional PNS	370.000,00
- Pembulatan	(450,00)
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.796,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.150,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	9.441,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.936.819,00</b>

m. Kecamatan Silungkang sebesar Rp.2.214.408,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	1.775.580,00
- Tunjangan Keluarga PNS	248.640,00
- Tunjangan Khusus PNS	92.148,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.976,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.272,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	12.792,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.214.408,00</b>

n. Kecamatan Talawi sebesar Rp.185.000,00 merupakan Tunjangan Fungsional Umum atas nama Marianis karena terdapat kekurangan penganggaran Fungsional Umum PNS pada Anggaran Tahun 2022.

o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.851.600,00 merupakan Tunjangan Fungsional atas nama Resfaliza, SE bulan Juli sampai dengan Oktober Tahun 2022 yang sebelumnya berdinis pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.

p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.4.438.796,00 merupakan utang Belanja Asuransi Kesehatan PNS pada Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2022 yang tidak teranggarkan pada Anggaran Tahun 2022

q. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.2.727.356 merupakan Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang tidak teranggarkan pada Anggaran Tahun 2022.

#### 5.1.1.2.5 Utang Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.745.769.829,00 terdiri dari belanja barang sebesar Rp6.845.000,00, utang belanja jasa sebesar Rp174.553.596,00, dan utang belanja barang dan jasa BLUD. Rincian utang belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 sebagai berikut:



**Tabel 5.110**  
**Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022**

No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2022 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2021 (Rp.)
1	Listrik	64.365.921,00	72.706.828,00
2	Air	49.545.650,00	31.821.000,00
3	Telp	10.361.801,00	7.354.789,00
4	Internet	5.344.500,00	12.344.558,00
5	Pelayanan Kesehatan	-	2.817.406.820,00
6	Bahan habis pakai BLUD	-	5.013.039.656,00
7	Sewa dengan PT BA	-	1.040.850.500,00
8	BBM	6.845.000,00	-
9	Barang Jasa BLUD	8.564.371.233,00	-
10	Belanja Tenaga Kesehatan	32.747.002,00	-
11	Sewa dengan PT KAI	-	-
12	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan	12.188.722,00	-
13	BPJS	-	984.171.196,00
14	STNK	-	8.553.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.745.769.829,00</b>	<b>9.988.248.447,00</b>

#### 5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Barang

Utang belanja barang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.845.000,00 merupakan utang belanja bahan bakar minyak tahun 2022 pada Sekretariat DPRD kepada SPBU PT. Mundam Sijunjung Sati.

#### 5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Jasa

Utang belanja jasa Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp174.553.596,00, terdiri dari utang jasa tenaga kesehatan, utang tagihan air, utang tagihan telepon, utang tagihan air, utang tagihan listrik, utang belanja kawat/faximili/internet/TV berlangganan, dan utang belanja pembayaran pajak, bea, perizinan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis	Hutang Jangka Pendek Tahun 2022 (Rp.)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2021 (Rp.)
1	Listrik	64.365.921,00	72.706.828,00
2	Air	49.545.650,00	31.821.000,00
3	Telp	10.361.801,00	7.354.789,00
4	Internet	5.344.500,00	12.344.558,00
5	Pelayanan Kesehatan	-	2.817.406.820,00
6	Bahan habis pakai BLUD	-	5.013.039.656,00
7	Sewa dengan PT BA	-	1.040.850.500,00
8	Jasa Tenaga Kesehatan	32.747.002,00	-
9	Sewa dengan PT KAI	-	-
10	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan	12.188.722,00	-
11	BPJS	-	984.171.196,00
12	STNK	-	8.553.100,00



	Jumlah	174.553.596,00	9.988.248.447,00
1. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp32.747.002,00 merupakan tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan April sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp32.261.002,00 dan Tagihan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp486.000,00 pada Dinas Perhubungan.			
2. Utang Listrik Tahun 2022 sebesar Rp.64.365.921,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 pada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			2.262.732,00
b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			11.188.825,00
c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			15.236.326,00
d. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman			8.842.380,00
e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			320.000,00
f. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			7.206.510,00
g. Sekretariat DPRD			9.260.042,00
h. Kecamatan Barangin			6.129.129,00
i. Kecamatan Lembah Segar			1.187.148,00
j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1.343.679,00
k. Dinas Komunikasi dan Informatika			1.389.150,00
<b>Jumlah</b>			<b>64.365.921,00</b>
3. Utang Air tahun 2022 sebesar Rp49.545.650,00 merupakan tagihan air bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Dinas Pendidikan			9.722.000,00
b. Rumah Sakit Umum Daerah			21.085.800,00
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			412.200,00
d. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			59.000,00
e. Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran			181.700,00
f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			439.900,00
g. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			946.000,00
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			152.500,00
i. Dinas Perhubungan			99.700,00
j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			200.100,00
k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			263.750,00



l.	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2.088.950,00
m.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.740.150,00
n.	Sekretariat Daerah	4.981.800,00
o.	Inspektorat	121.700,00
p.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.500,00
q.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.300,00
r.	Sekretariat DPRD	2.756.300,00
s.	Kecamatan Barangin	796.400,00
t.	Kecamatan Lembah Segar	286.500,00
u.	Kecamatan Silungkang	191.800,00
v.	Kecamatan Talawi	470.900,00
w.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	258.100,00
x.	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.600,00
<b>Total</b>		<b>49.545.650,00</b>

4. Utang Telepon Tahun 2022 sebesar Rp.10.361.801,00 merupakan tagihan telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 pada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	77.372,00
b.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	4.698.750,00
c.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	200.000,00
d.	Sekretariat Dprd	3.572.315,00
e.	Kecamatan Silungkang	371.300,00
f.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.442.064,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.361.801,00</b>

5. Utang Internet Tahun 2022 sebesar Rp.5.334.500,00 merupakan tagihan internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 pada 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.500.000,00
b.	Kecamatan Barangin	3.844.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.344.500,00</b>

6. Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp12.188.722,00 terdiri dari Utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.11.603.222,00 pada SKPD Dinas Kebudayaan yang terdiri dari PBB Museum Gudang Ransum sebesar Rp.11.322.607,00 dan PBB Infobox sebesar Rp.280.615,00 dan Utang Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebesar Rp.585.500,00 yaitu pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.282.900,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.302.600,00.



### 5.3.2.1.5.3 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.564.371.233,00 merupakan utang tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Hutang Belanja Pegawai BLUD</b>		
1	Hutang Jasa Pelayanan	
	a. Jasa Pelayanan Covid	1.924.980.000,00
	b. Jasa Pelayanan Covid 2022	267.148.000,00
	c. Jasa Pelayanan November 2022	827.684.266,00
	d. Jasa Pelayanan Desember 2022	803.186.606,00
	e. TCM Oktober 2022	1.250.000,00
2	Hutang Honorarium Tim Verifikator Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19	12.000.000,00
<b>B. Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>		
1	Hutang Belanja Rujukan Pasien	2.850.000,00
2	Hutang Belanja Insentif Pelayanan Pasien Haemodialisa	1.117.200,00
3	Hutang Tagihan Rujukan Parsial Pasien BPJS	7.750.000,00
4	Hutang Belanja Alat Tulis Kantor	3.363.300,00
5	Hutang Belanja Jasa Transaksi Keuangan	7.139.918,00
6	Hutang Belanja Obat-obatan	1.815.505.407,00
7	Hutang Belanja Bahan Laboratorium	819.160.788,00
8	Hutang Belanja Bahan Habis Pakai	1.990.735.748,00
<b>C. Hutang Belanja Modal BLUD</b>		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	80.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.564.371.233,00</b>

### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	<b>Tahun 2022 (Rp.)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp.)</b>
<b>Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN</b>	<b>8.166.666.441,03</b>	<b>9.333.333.111,03</b>

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.166.666.441,03 merupakan sisa kewajiban atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor:7760-IND Nomor:SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.111**  
**Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2022**

Uraian	Saldo Awal 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
Utang Pokok	9.333.333.111,03	-	1.166.666.668,00	8.166.666.441,03
<b>Jumlah</b>	<b>9.333.333.111,03</b>	<b>-</b>	<b>1.166.666.668,00</b>	<b>8.166.666.441,03</b>



### 5.3.3 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp979.146.621.507,66. Apabila dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun anggaran 2021 sebesar Rp972.540.970.505,83, maka terdapat kenaikan nilai ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp6.605.651.001,83 atau 0,68%. Adapun rincian ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
SILPA	12.203.137.642,38	38.835.367.301,76
Cadangan Piutang	3.621.849.548,28	2.331.601.944,38
Cadangan Persediaan	20.184.205.715,40	13.441.424.208,90
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	151.154.663,83	177.925.663,96
Dana yg harus disediakan untuk utang jk pendek	(10.159.629.182,66)	(11.590.811.435,33)
Bukan SILPA	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi jk Panjang	104.370.563.330,81	104.963.129.655,56
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	825.021.532.206,20	809.890.893.290,38
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	31.920.474.024,45	23.824.772.987,25
Dana yg harus disediakan untuk utang jk Panjang	(8.166.666.441,03)	(9.333.333.111,03)
R/K PPKD	-	-
<b>Ekuitas</b>	<b>979.146.621.507,66</b>	<b>972.540.970.505,83</b>



## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional.

### 5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Sawahlunto dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.112**  
**Rincian Pendapatan – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	67.294.080.695,29	51.334.886.322,45
2	Pendapatan Transfer	554.074.858.160,00	538.147.448.116,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.652.405.400,00	8.418.079.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>624.021.344.255,29</b>	<b>597.900.414.238,45</b>

Pendapatan LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp624.021.344.255,29. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp597.900.414.238,45 terdapat kenaikan sebesar Rp26.120.930.016,84 atau 4,377%, dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Asli Daerah-LO</b>	<b>67.294.080.695,29</b>	<b>51.334.886.322,45</b>

Pendapatan Asli Daerah–LO pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp67.294.080.695,29 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp51.334.886.322,45 terdapat kenaikan sebesar Rp15.959.194.372,84 atau 31,09%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar penerimaan pajak yang seharusnya menjadi hak pada Tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.113**  
**Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.214.472.042,74	5.018.237.726,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.271.342.019,33	2.855.365.013,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan	13.477.268.009,00	10.820.173.680,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	43.330.998.624,22	32.641.109.903,45
	<b>Jumlah</b>	<b>67.294.080.695,29</b>	<b>51.334.886.322,45</b>

**A. Pendapatan Pajak Daerah**

	<u><b>Tahun 2022 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2021 (Rp)</b></u>
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>7.214.472.042,74</b>	<b>5.018.237.726,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp2.196.234.316,74 atau 43,77%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.114**  
**Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	255.030.245,80	246.231.076,80	8.799.169,00
2	Pajak Restoran	985.966.047,60	980.344.413,60	5.621.634,00
3	Pajak Hiburan	61.170.000,00	137.837.350,00	(76.667.350,00)
4	Pajak Reklame	45.912.393,00	42.746.805,34	3.165.587,66
5	Pajak Penerangan Jalan	3.735.969.454,00	3.747.216.080,00	(11.246.626,00)
6	Pajak Parkir	511.000,00	511.000,00	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	74.030.951,00	74.030.951,00	-
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.678.826.713,00	1.388.991.641,00	289.835.072,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	596.643.117,00	596.562.725,00	80.392,00
	<b>Total</b>	<b>7.434.059.921,40</b>	<b>7.214.472.042,74</b>	<b>219.587.878,66</b>

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:

- Adanya piutang pajak hotel Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp34.698.709,00 dan piutang pajak hotel Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sebesar Rp43.497.878,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.799.169,00.
- Adanya piutang pajak restoran Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp12.006.204,00 dan piutang pajak restoran Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sebesar Rp17.262.221,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.256.017,00.



3. Adanya piutang pajak hiburan Tahun sebelumnya yang belum diterima pada tahun 2022 sebesar Rp270.963.000,00, dan bertambahnya piutang pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp76.667.350,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp76.667.350,00.
4. Adanya piutang pajak reklame Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp1.900.800 dan Pendapatan pajak reklame diterima dimuka Tahun 2021 sebesar Rp16.366.392,00. Kemudian adanya piutang pajak reklame Tahun 2021 yang diterima tahun 2022 sebesar Rp2.380.100,00 dan pendapatan reklame diterima dimuka Tahun 2022 sebesar Rp19.052.679,66 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.165.587,66.
5. Adanya piutang pajak penerangan jalan Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp312.921.369,00 dan piutang pajak penerangan jalan Tahun 2021 yang diterima tahun 2022 sebesar Rp301.674.743,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.246.626,00.
6. Selisih penyajian sebesar Rp289.835.072,00 dikarenakan adanya penambahan yakni piutang PBB-P2 Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp150.007.185,00 dan adanya pengurangan piutang PBB-P2 Tahun sebelumnya akibat penghapusan piutang dan pelunasan PBB-P2 sebesar Rp439.842.257,00.
7. Adanya piutang BPHTB Tahun 2021 yang diterima pada Tahun 2022 sebesar Rp80.392,00.

## B. Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>3.271.342.019,33</b>	<b>2.855.365.013,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp415.977.006,33. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp3.271.342.019,33 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp3.543.204.313,00, yaitu sebesar Rp271.862.293,67.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.115**  
**Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.289.541.700,00</b>	<b>1.096.082.200,00</b>	<b>193.459.500,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	356.182.700,00	356.182.700,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	124.303.000,00	124.303.000,00	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	176.200.000,00	176.200.000,00	-



No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	537.933.500,00	344.474.000,00	193.459.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52.522.500,00	52.522.500,00	-
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.400.000,00	42.400.000,00	-
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.229.490.331,00</b>	<b>2.151.087.537,33</b>	<b>78.402.793,67</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.322.054.331,00	1.243.651.537,33	78.402.793,67
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	-
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.862.000,00	55.862.000,00	-
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	847.974.000,00	847.974.000,00	-
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>24.172.282,00</b>	<b>24.172.282,00</b>	<b>-</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	24.172.282,00	24.172.282,00	-
	<b>Jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>3.543.204.313,00</b>	<b>3.271.342.019,33</b>	<b>271.862.293,67</b>

Penjelasan selisih LRA dan LO adalah sebagai berikut:

1. Selisih sebesar Rp.193.459.500 disebabkan adanya piutang retribusi pelayanan pasar (retribusi kios) tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp3.339.967.000,00 dan piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sebesar Rp3.533.426.500,00.
2. Selisih sebesar Rp78.402.793,67 disebabkan karena adanya penambahan piutang piutang retribusi sewa rumah dinas yang belum diterima Tahun 2022 sebesar Rp4.388.400,00, piutang retribusi sewa kendaraan dinas Tahun 2022 sebesar Rp2.750.000,00, dan terdapat pendapatan diterima dimuka tahun 2021 berupa penerimaan pembayaran sewa gedung *Payment Point* Bank Mandiri Syariah sebesar Rp3.333.333,33. Kemudian dikurangi dengan penerimaan piutang retribusi sewa rumah dinas sebesar Rp1.648.500,00, pembayaran atas kontribusi Hotel Parai Tahun 2021 sebesar Rp82.500.000,00 dan penerimaan pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 atas pembayaran Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT. Bank Nagari Cabang Sawahlunto Nomor: 030/233/Setdako-SWL/2022 dan Nomor PKS/012/SW/06-2022 tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2024 sebesar Rp4.726.027,00.



### C. Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>13.477.268.009,00</b>	<b>10.820.173.680,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp2.657.094.329,00.

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat perbedaan jumlah antara Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

### D. Lain-Lain PAD yang Sah

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>43.330.998.624,22</b>	<b>32.641.109.903,45</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp10.689.888.720,77.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA dengan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.116**  
**Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA dan LO Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	24.850.000,00	24.850.000,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	82.500.000,00	82.500.000,00	-
3	Jasa Giro	470.516.220,36	471.244.061,36	(727.841,00)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.586.600,00	5.586.600,00	-
5	Pendapatan Bunga	3.250.591.108,00	3.250.591.108,00	-
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	264.745.133,86	264.745.133,86	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	139.594.941,00	139.594.941,00	-
8	Pendapatan BLUD	38.183.078.019,00	39.046.886.780,00	(863.808.761,00)
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>42.466.462.022,22</b>	<b>43.330.998.624,22</b>	<b>(864.536.602,00)</b>

Perbedaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA dan LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp864.536.602,00 berasal dari adanya penambahan piutang lainnya yang terdiri dari



piutang pelayanan kesehatan RSUD (PLN Solok, BPJS Desember 2022, Klaim Pending BPJS) Tahun 2022 yang belum diterima sejumlah Rp1.866.220.844,00 dan pengurangan karena adanya penerimaan Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD (BPJS/JKN, Ambulance BPJS dan Pensiunan PT. BA) Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sejumlah Rp1.002.412.083,00, dan adanya piutang Lain-lain PAD yang Sah berupa Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (DBH-TDF) yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar Rp727.841,00.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp554.074.858.160,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp538.147.448.116,00 terdapat kenaikan sebesar Rp15.927.410.044,00 atau sebesar 2,96%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.117**  
**Pendapatan Transfer (LO) Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No.	Uraian Pendapatan Transfer	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	494.673.039.900,00	442.021.996.681,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	25.142.847.000,00	67.399.071.910,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	34.258.971.260,00	28.726.379.525,00
<b>Jumlah</b>		<b>554.074.858.160,00</b>	<b>538.147.448.116,00</b>

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp494.673.039.900,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp25.142.847.000,00, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp34.258.971.260,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp494.673.039.900,00 terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebesar Rp39.874.677.779,00, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebesar Rp340.799.183.261,00, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik sebesar Rp74.358.095.142,00, dan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik sebesar Rp39.641.083.718,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp25.142.847.000,00 terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.044.166.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp20.098.731.000,00.

Sementara, Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp34.258.971.260,00.

Terdapat perbedaan penyajian saldo Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.001.031.612,00. Jumlah tersebut merupakan pokok Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian



Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-46/PK/PK.2/2023 Perihal : Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

### 5.4.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.652.405.400,00 dan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp8.418.079.800,00 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 5.118**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.652.405.400,00	8.418.079.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.652.405.400,00</b>	<b>8.418.079.800,00</b>

Nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.652.405.400,00 merupakan nilai Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Untuk penyajian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 tidak terdapat perbedaan nilai antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

### 5.4.2 BEBAN – LO

Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp585.546.775.639,06, lebih kecil bila dibandingkan dengan beban-LO tahun 2021 sebesar Rp592.645.382.295,24, yang mana terdapat penurunan sebesar Rp7.098.606.656,18.

Perbandingan Beban – LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.119**  
**Rincian Beban – LO Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	258.353.333.659,00	241.566.612.550,00
2	Beban Persediaan	61.554.591.586,50	54.213.219.652,61
3	Beban Jasa	77.836.694.478,42	91.886.872.721,75
4	Beban Pemeliharaan	7.716.018.343,71	16.536.505.964,57
5	Beban Perjalanan Dinas	29.235.487.808,00	22.380.529.104,00
6	Beban Bunga	891.962.272,00	796.043.279,27
7	Beban Hibah	13.406.303.678,00	13.936.860.663,00
8	Beban Bantuan Sosial	3.831.150.000,00	2.396.000.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	12.305.132,72	310.208.047,87
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.223.913.140,00	23.337.747.148,86
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.051.820.353,00	16.841.174.753,00
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.615.214.412,71	40.887.810.397,51
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.588.250.886,00	-



14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	475.901.940,00	-
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	641.322.994,00	647.500.599,80
16	Beban Bagi Hasil	1.046.900.955,00	885.532.503,00
17	Beban Bantuan Keuangan	57.065.604.000,00	66.022.764.910,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>585.546.775.639,06</b>	<b>592.645.382.295,24</b>

Sementara perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.120**  
**Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	259.237.850.902,00	258.353.333.659,00	884.517.243,00
2	Beban Persediaan	64.743.991.116,00	61.554.591.586,50	3.189.399.529,50
3	Beban Jasa	82.022.971.179,00	77.836.694.478,42	4.186.276.700,58
4	Beban Pemeliharaan	14.657.583.914,00	7.716.018.343,71	6.941.565.570,29
5	Beban Perjalanan Dinas	29.235.487.808,00	29.235.487.808,00	-
6	Beban Bunga	891.962.272,00	891.962.272,00	-
7	Beban Hibah	14.110.242.166,00	13.406.303.678,00	703.938.488,00
8	Beban Bantuan Sosial	3.831.150.000,00	3.831.150.000,00	-
9	Beban Penyisihan Piutang	-	12.305.132,72	(12.305.132,72)
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	24.223.913.140,00	(24.223.913.140,00)
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	17.051.820.353,00	(17.051.820.353,00)
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	30.615.214.412,71	(30.615.214.412,71)
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	1.588.250.886,00	(1.588.250.886,00)
14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	475.901.940,00	(475.901.940,00)
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	641.322.994,00	(641.322.994,00)
16	Beban Bagi Hasil	1.046.900.955,00	1.046.900.955,00	-
17	Beban Bantuan Keuangan	57.065.604.000,00	57.065.604.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>526.843.744.312,00</b>	<b>585.546.775.639,06</b>	<b>(58.703.031.327,06)</b>

#### 5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp258.353.333.659,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.786.721.109,00 bila dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2021 sebesar Rp241.566.612.550,00. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban pegawai – LO dengan belanja pegawai – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

**Tabel 5.121**  
**Data Mutasi Beban Pegawai Tahun 2022**

No	SKPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2022 (+)	Utang Pegawai 2021 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	83.785.251.503,00	24.973.564,00	938.345.133,00	82.871.879.934,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	26.045.149.991,00		60.374.140,00	25.984.775.851,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	45.618.346.681,00	76.518.812,00	13.190.000,00	45.681.675.493,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.500.159.593,00	60.000,00		5.500.219.593,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2022 (+)	Utang Pegawai 2021 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.270.179.702,00		846.747,00	4.269.332.955,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	5.378.937.646,00			5.378.937.646,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153.822.000,00	4.438.796,00		158.260.796,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.197.522.644,00	97.228,00		3.197.619.872,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.786.345.200,00	497.214,00	1.455.000,00	8.785.387.414,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.347.096.356,00			2.347.096.356,00
11	Dinas Perhubungan	2.243.616.405,00			2.243.616.405,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	102.522.000,00	2.727.356,00		105.249.356,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.213.710.892,00	1.268.253,00		3.214.979.145,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.217.313.715,00			3.217.313.715,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2.327.989.038,00	2.187.500,00	3.071.900,00	2.327.104.638,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.471.002.822,00			2.471.002.822,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.860.230.481,00			2.860.230.481,00
18	Sekretariat Daerah	11.377.657.719,00	535.000,00	1.392.576,00	11.376.800.143,00
19	Inspektorat	5.706.907.675,00		499.200,00	5.706.408.475,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	4.197.546.518,00	6.233.767,00	565.143,00	4.203.215.142,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.018.586.561,00	3.531.584,00		6.022.118.145,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.387.423.790,00			3.387.423.790,00
23	Sekretariat DPRD	10.140.369.614,00	6.965.695,00		10.147.335.309,00
24	Kecamatan Barangin	4.119.027.917,00	1.936.819,00		4.120.964.736,00
25	Kecamatan Lembah Segar	5.970.924.898,00			5.970.924.898,00
26	Kecamatan Silungkang	2.085.041.177,00	2.214.408,00		2.087.255.585,00
27	Kecamatan Talawi	2.007.463.764,00	185.000,00		2.007.648.764,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.707.704.600,00	851.600,00		2.708.556.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>259.237.850.902,00</b>	<b>135.222.596,00</b>	<b>1.019.739.839,00</b>	<b>258.353.333.659,00</b>

Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp884.517.243,00 disebabkan adanya penambahan Beban Pegawai-LO sebesar Rp135.222.596,00 meliputi Utang Gaji Pokok PNS Tahun 2022 pada 17 (tujuh belas) SKPD dan pengurangan Beban Pegawai- LO pada Tahun 2022 yang merupakan pembayaran utang gaji tahun sebelumnya sebesar Rp1.019.739.839,00.



### 5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp61.554.591.586,50 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp54.213.219.652,61. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban persediaan – LO dengan belanja persediaan– LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

**Tabel 5.122**  
**Data Mutasi Beban Persediaan Tahun 2022**

No	SKPD	Persediaan Awal	Pembelian (+)	Persediaan Akhir (-)	Hutang 2021 (-)	Hutang 2022 (+)	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	9 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7
1	Dinas Pendidikan	70.129.700,00	3.998.613.105,00	55.547.021,00			4.013.195.784,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	4.036.707.590,80	5.149.580.312,00	3.094.064.777,99			6.092.223.124,81
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.141.978.224,10	14.968.919.313,00	3.684.277.961,24	5.013.039.656,00	8.564.371.233,00	17.977.951.152,86
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.132.829.816,00	8.116.737.378,00	12.425.615.579,00			823.951.615,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	23.010.000,00	2.323.978.022,00	13.413.500,00			2.333.574.522,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	494.600,00	406.255.545,00	3.076.000,00	4.794.600,00		398.879.545,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		81.806.485,00	267.000,00			81.539.485,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.966.000,00	975.218.169,00	5.622.150,00			971.562.019,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	254.759.050,00	3.634.943.665,00	291.674.136,17			3.598.028.578,83
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.689.628,00	497.930.218,00	193.548.565,00			583.071.281,00
11	Dinas Perhubungan	1.688.000,00	374.481.513,00	6.273.930,00			369.895.583,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika		98.216.770,00	1.020.000,00			97.196.770,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	184.051.300,00	2.270.487.233,00	151.651.420,00			2.302.887.113,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	428.000,00	812.032.327,00	642.000,00			811.818.327,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	27.814.000,00	1.602.484.081,00	34.855.450,00			1.595.442.631,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	555.000,00	247.120.995,00	225.000,00			247.450.995,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	141.751.250,00	3.380.107.752,00	62.493.735,00			3.459.365.267,00
18	Sekretariat Daerah	26.277.240,00	8.086.019.157,00	51.266.400,00			8.061.029.997,00
19	Inspektorat	5.446.000,00	232.334.349,00	13.855.800,00			223.924.549,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.399.750,00	713.602.621,00	1.040.000,00			714.962.371,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Persediaan Awal	Pembelian (+)	Persediaan Akhir (-)	Hutang 2021 (-)	Hutang 2022 (+)	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	9 = 3 + 4 - 5 - 6 + 7
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.009.050,00	1.239.569.478,00	48.237.700,00			1.255.340.828,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.002.000,00	372.458.305,00	2.035.920,00			372.424.385,00
23	Sekretariat DPRD	33.756.010,00	1.908.646.812,00	28.600.670,00		6.845.000,00	1.920.647.152,00
24	Kecamatan Barangin	23.000,00	910.725.572,00	44.500,00			910.704.072,00
25	Kecamatan Lembah Segar	560.000,00	1.388.823.544,00	989.000,00			1.388.394.544,00
26	Kecamatan Silungkang	3.733.000,00	194.188.134,00	926.500,00			196.994.634,00
27	Kecamatan Talawi	931.000,00	254.445.375,00	1.704.000,00			253.672.375,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.435.000,00	504.264.886,00	11.237.000,00			498.462.886,00
<b>JUMLAH</b>		<b>13.441.424.208,90</b>	<b>64.743.991.116,00</b>	<b>20.184.205.715,40</b>	<b>5.017.834.256,00</b>	<b>8.571.216.233,00</b>	<b>61.554.591.586,50</b>

Beban Persediaan – LO Tahun 2022 sebesar Rp61.554.591.586,50 berasal dari penambahan dari persediaan awal Tahun 2022 sebesar Rp13.441.424.208,90, pembelian selama Tahun 2022 sebesar Rp64.743.991.116,00, Hutang Tahun 2022 sebesar Rp8.571.216.233,00 berupa hutang BBM pada Sekretariat DPRD dan hutang barang pada RSUD. Sementara pengurangan Beban Persediaan–LO berasal dari Persediaan akhir Tahun 2021 sebesar Rp20.184.205.715,40 dan hutang Tahun 2021 berupa hutang barang pada BLUD RSUD dan Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran sebesar Rp5.017.834.256,00.

### 5.4.2.3 Beban Jasa

Beban jasa-LO pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp77.836.694.478,42 berkurang bila dibandingkan dengan realisasi beban jasa Tahun 2021 sebesar Rp91.886.872.721,75 Apabila dibandingkan antara beban jasa – LO dengan belanja jasa– LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

**Tabel 5.123**  
**Data Mutasi Beban Jasa Tahun 2022**

No	SKPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2022	Utang Jasa 2021	Beban Dibayar Dimuka 2021 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2022 (-)	BEBAN BARANG JASA
1	2	3	4	5	6	7	7 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7
1	Dinas Pendidikan	7.690.353.515,00	9.722.000,00	7.933.200,00		3.661.233,00	7.688.481.082,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	19.144.344.011,00		1.664.600,00		22.885.150,00	19.119.794.261,00
3	RSUD	2.250.305.582,00	21.085.800,00	2.817.406.820,00		6.319.146,00	(552.334.584,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.173.915.581,00	412.200,00	764.200,00		8.374.604,00	4.165.188.977,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.715.112.062,00	59.000,00	59.000,00		11.831.825,00	4.703.280.237,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	2.248.809.532,00	181.700,00	320.000,00		2.193.817,00	2.246.477.415,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2022	Utang Jasa 2021	Beban Dibayar Dimuka 2021 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2022 (-)	BEBAN BARANG JASA
1	2	3	4	5	6	7	7 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	379.554.735,00	3.346.443,00			3.372.463,00	379.528.715,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.646.207.631,00	439.900,00	3.387.650,00		5.063.370,83	1.638.196.510,17
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.566.549.268,00	3.286.104,00	3.182.556,00		8.353.954,00	1.558.298.862,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.736.135,00	152.500,00	152.500,00		1.963.983,00	398.772.152,00
11	Dinas Perhubungan	4.666.018.614,00	32.846.702,00	29.500,00		3.688.271,00	4.695.147.545,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	353.322.133,00	1.576.750,00				354.898.883,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.252.282.527,00	11.388.925,00	11.603.956,00		3.685.567,00	3.248.381.929,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.173.149.605,00	20.198.826,00	6.947.490,00		2.783.958,00	1.183.616.983,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1.848.912.824,00	22.534.552,00	33.858.805,00		1.618.638,00	1.835.969.933,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	464.856.044,00	320.000,00	6.244.752,00		1.197.558,00	457.733.734,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.199.761.154,00	12.646.660,00	16.320.500,00		2.350.383,00	3.193.736.931,00
18	Sekretariat Daerah	11.510.326.156,00	4.981.800,00	12.551.058,00		32.913.542,00	11.469.843.356,00
19	Inspektorat	251.608.115,00	121.700,00	68.900,00		2.010.442,00	249.650.473,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	514.030.821,00	-	-		2.561.450,00	511.469.371,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.399.534.333,00	29.500,00	1.301.110.797,00	35.809.309,25	4.674.188,00	1.129.588.157,25
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.321.456.861,00	73.300,00	73.300,00		1.982.287,00	1.319.474.574,00
23	Sekretariat DPRD	1.863.207.503,00	15.588.657,00	15.508.912,00		10.918.929,00	1.852.368.319,00
24	Kecamatan Barangin	1.620.321.585,00	10.770.029,00	2.322.872,00		1.275.104,00	1.627.493.638,00
25	Kecamatan Lembah Segar	1.522.657.945,00	1.473.648,00	298.500,00		1.807.146,00	1.522.025.947,00
26	Kecamatan Silungkang	220.511.975,00	563.100,00	518.400,00		1.100.092,00	219.456.583,00
27	Kecamatan Talawi	326.448.123,00	470.900,00	277.300,00		1.313.796,00	325.327.927,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.298.676.809,00	282.900,00	2.879.374,00		1.253.767,00	1.294.826.568,00
<b>JUMLAH</b>		<b>82.022.971.179,00</b>	<b>174.553.596,00</b>	<b>4.245.484.942,00</b>	<b>35.809.309,25</b>	<b>151.154.663,83</b>	<b>77.836.694.478,42</b>

Selisih Beban jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA Tahun 2022 sebesar Rp4.186.276.700,58 berasal dari penambahan Utang Jasa Tahun 2022 sebesar Rp174.553.596,00 dan beban dibayar dimuka Tahun 2021 sebesar Rp35.809.309,25 dikurangi utang jasa Tahun 2021 sebesar Rp4.245.484.942,00 dan beban dibayar dimuka Tahun 2022 sebesar Rp151.154.663,83.



#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.716.018.343,71 lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp16.536.505.964,57. Apabila dibandingkan antara beban pemeliharaan-LO dengan belanja pemeliharaan-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp6.941.565.570,29 yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tabel berikut:

**Tabel 5.124**  
**Data Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022**

No	SKPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan Sesuai LRA	Beban Dibayar Dimuka 2021 (+)	Hutang Jasa 2021 (-)	Reklas ke Aset (-)	Beban Pemeliharaan
1	2	3	4	6	4	5
1	Dinas Pendidikan	719.086.325,00	4.348.633,33			723.434.958,33
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	885.341.620,00	25.580.721,00		367.857.700,00	543.064.641,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	195.449.870,00	15.356.495,83		100.000.000,00	110.806.365,83
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.219.369.266,00	8.413.237,50		5.073.348.690,00	1.154.433.813,50
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	698.817.615,00	12.296.662,50			711.114.277,50
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	148.420.962,00	2.958.042,00			151.379.004,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.042.350,00				11.042.350,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79.855.700,00	2.524.137,50			82.379.837,50
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	362.024.168,00	9.920.571,00			371.944.739,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.612.030,00	2.694.795,83			138.306.825,83
11	Dinas Perhubungan	216.725.166,00	1.668.421,00			218.393.587,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	131.779.983,00	3.316.758,00			135.096.741,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	192.325.000,00	2.544.841,67		69.772.000,00	125.097.841,67
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	720.248.869,00	1.696.658,00			721.945.527,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.559.000,00	1.249.258,00			71.808.258,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.098.135.935,00	2.905.475,00		592.717.000,00	508.324.410,00
18	Sekretariat Daerah	1.110.089.618,00	22.835.970,72		392.170.085,00	740.755.503,72
19	Inspektorat	39.855.060,00	1.320.813,00			41.175.873,00



No	SKPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan Sesuai LRA	Beban Dibayar Dimuka 2021 (+)	Hutang Jasa 2021 (-)	Reklas ke Aset (-)	Beban Pemeliharaan
1	2	3	4	6	4	5
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	79.279.350,00	1.721.771,00			81.001.121,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	231.921.740,00	5.092.700,00			237.014.440,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.192.900,00	1.857.813,00			60.050.713,00
23	Sekretariat DPRD	724.611.633,00	3.954.004,00		332.090.000,00	396.475.637,00
24	Kecamatan Barangin	74.368.980,00	1.958.545,83			76.327.525,83
25	Kecamatan Lembah Segar	232.091.420,00	2.219.754,00		150.000.000,00	84.311.174,00
26	Kecamatan Silungkang	27.249.650,00	1.186.792,00			28.436.442,00
27	Kecamatan Talawi	19.783.000,00	1.452.971,00			21.235.971,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	175.346.704,00	1.040.512,00	5.726.450,00		170.660.766,00
<b>JUMLAH</b>		<b>14.657.583.914,00</b>	<b>142.116.354,71</b>	<b>5.726.450,00</b>	<b>7.077.955.475,00</b>	<b>7.716.018.343,71</b>

Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada Tahun 2022 sebesar Rp6.941.565.570,29 berasal dari adanya penambahan beban dibayar dimuka Tahun 2021 sebesar Rp142.116.354,71 dikurangi hutang jasa Tahun 2021 sebesar Rp5.726.450,00 dan reklasifikasi pemeliharaan ke kelompok aset sebesar Rp7.077.955.475,00.

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp29.235.487.808,00. Dan tidak terdapat perbedaan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA.

#### 5.4.2.6 Beban Bunga

Beban bunga-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp891.962.272,00 lebih besar dibandingkan dengan beban bunga-LO Tahun 2021 sebesar Rp796.043.279,27. Sementara antara Beban Bunga-LO dan Belanja Bunga-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah. Beban bunga-LO Tahun 2022 tersebut berada pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto** yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah atas kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 yang dibayarkan berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S1053/WPB.03/2022 tanggal 17 Mei 2022 melalui SP2D Nomor: 08.14/04.0/000178/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2022 sebesar Rp364.262.493,00 serta pembayaran bunga utang dan denda kepada Pemerintah berdasarkan Surat Tagihan Nomor : S-2097/WPB.03/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp527.699.779,00 melalui SP2D Nomor :



08.14/04.0/000411/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 10 November 2022. Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontsruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investari. Didalam Perjanjian tersebut Pihak Pemerintah Kota Sawahlunto wajib membayarkan Bunga Pinjaman Pada tanggal 15 Mei 2021 dan 15 November 2021.

#### **5.4.2.7 Beban Hibah**

Beban Hibah-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp13.406.303.678,00 lebih kecil dibandingkan dengan beban hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp13.936.860.663,00,00. Beban hibah-LO dan belanja hibah-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp703.938.488,00 yang disebabkan karena adanya reklasifikasi dari belanja hibah BOS ke kelompok aset tetap.

#### **5.4.2.8 Bantuan Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.831.150.000,00 lebih besar dibandingkan dengan beban bantuan sosial-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.396.000.000,00. Beban bantuan sosial-LO dan belanja bantuan sosial-LRA Tahun 2022 tidak terdapat perbedaan jumlah.

#### **5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.305.132,72. Nilai beban penyisihan piutang hanya terdapat pada Laporan Operasional, sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp.0,00, yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang pada **RSUD** atas Pelayanan Kesehatan RSUD sebesar Rp9.331.104,22, dan beban penyisihan piutang pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Rp2.974.028,50.

#### **5.4.2.10 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusunan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp.24.223.913.140,00 lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp23.337.747.148,86. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasiolal yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:



**Tabel 5.125**  
**Data Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	4.115.010.606,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	3.559.377.771,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.542.795.560,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	969.330.329,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	745.557.059,00
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebakaran	612.029.399,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.031.040.347,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.295.575,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	318.963.820,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	190.954.230,00
11	Dinas Perhubungan	739.158.045,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.901.254,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	431.246.373,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	365.780.007,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	155.165.565,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	253.632.623,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	337.012.355,00
18	Sekretariat Daerah	1.251.939.254,00
19	Inspektorat	39.947.428,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	121.021.662,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.014.601.276,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.920.362,00
23	Sekretariat DPRD	607.839.005,00
24	Kecamatan Barangin	190.939.123,00
25	Kecamatan Lembah Segar	312.288.328,00
26	Kecamatan Silungkang	15.373.669,00
27	Kecamatan Talawi	21.501.854,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.290.261,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.223.913.140,00</b>

#### 5.4.2.11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp17.051.820.353,00, lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp16.841.174.753,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.126**  
**Data Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	5.163.667.337,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.303.489.993,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	548.604.697,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	852.530.625,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.717.121.956,00



No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	5.112.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.251.368,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	448.401.343,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	400.188.504,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.057.828,00
11	Dinas Perhubungan	194.149.202,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.075.822.324,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	407.487.213,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	32.311.050,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.633.707,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.033.727.031,00
18	Sekretariat Daerah	590.299.694,00
19	Inspektorat	2.982.892,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	0,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	264.947.787,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.598.684,00
23	Sekretariat DPRD	158.010.271,00
24	Kecamatan Barangin	303.193.837,00
25	Kecamatan Lembah Segar	187.330.104,00
26	Kecamatan Silungkang	93.929.500,00
27	Kecamatan Talawi	56.971.206,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17.051.820.353,00</b>

#### 5.4.2.12 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp30.615.214.412,71 yang dapat diuraikan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.127**  
**Data Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022**

No	SKPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	29.615.241,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	405.507.946,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.088.753,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.098.955.775,66
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.016.799.712,05
6	Satuan Polisi Pamong Prama dan Pemadam Kebekaran	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.167.726.652,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	43.379.565,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Dinas Perhubungan	247.124.456,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	-



15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	-
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.240.409.742,00
18	Sekretariat Daerah	-
19	Inspektorat	-
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.813.387.330,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Sekretariat DPRD	-
24	Kecamatan Barangin	566.746.973,00
25	Kecamatan Lembah Segar	970.472.267,00
26	Kecamatan Silungkang	-
27	Kecamatan Talawi	-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30.615.214.412,71</b>

#### 5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.064.152.826,00. Nilai beban penyusutan aset tetap lainnya hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.128**  
**Data Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	51.120.747,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.592.800,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	475.901.940,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66.668.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
11	Dinas Perhubungan	141.310.640,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	33.312.966,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	17.495.500,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	50.714.133,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.112.668.700,00
18	Sekretariat Daerah	5.536.150,00
19	Inspektorat	-
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	39.937.200,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
23	Sekretariat DPRD	-
24	Kecamatan Barangin	37.894.050,00
25	Kecamatan Lembah Segar	2.000.000,00
26	Kecamatan Silungkang	-
27	Kecamatan Talawi	-
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.064.152.826,00</b>



#### 5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp641.322.994,00. Nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut diperoleh dari pengurangan antara Amortisasi Aset Tak Berwujud Akhir Tahun 2022 sebesar Rp3.262.975.887,00 dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud Setelah Dikoreksi Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.621.652.893,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.129**  
**Data Amortisaasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022**

No	SKPD	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	Koreksi catat	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Setelah Koreksi	Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	Beban Amortisasi
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6 - 5
1	Dinas Pendidikan	62.428.154,40	867.055,60	63.295.210,00	66.763.380,00	3.468.170,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	82.500.000,00		82.500.000,00	82.500.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.001.600,00	1.625.067,00	40.626.667,00	60.127.467,00	19.500.800,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	51.736.000,00		51.736.000,00	51.736.000,00	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.244.520,00	378.272,00	12.622.792,00	14.514.150,00	1.891.358,00
11	Dinas Perhubungan	23.142.000,00	1.642.000,00	24.784.000,00	44.488.000,00	19.704.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.978.000,00		54.978.000,00	54.978.000,00	-
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman		(7.857.467,00)	(7.857.467,00)	11.643.333,00	19.500.800,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.500.000,00		38.500.000,00	38.500.000,00	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	91.742.230,80	5.640.178,20	97.382.409,00	165.064.524,00	67.682.115,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.603.631.850,00	203.651.232,00	1.807.283.082,00	2.316.858.833,00	509.575.751,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	327.587.200,00		327.587.200,00	327.587.200,00	-
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.215.000,00		28.215.000,00	28.215.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.415.706.555,20</b>	<b>205.946.337,80</b>	<b>2.621.652.893,00</b>	<b>3.262.975.887,00</b>	<b>641.322.994,00</b>

#### 5.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Nilai Beban Bagi Hasil-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA sebesar Rp1.046.900.955,00 yang terdiri dari



Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp637.792.686,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp409.108.269,00.

#### **5.4.2.16 Beban Bantuan Keuangan**

Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp57.065.604.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2021 yakni sebesar Rp66.022.764.910,00,00. Nilai Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan-LRA .

#### **5.4.3 Beban Luar Biasa (Beban Tak Terduga – LO)**

Beban Tak Terduga-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 adalah sebesar Rp.294.991.005,00. Nilai Beban Tak Terduga-LO sama dengan Belanja Tak Terduga-LRA yang berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya Bencana Alam, pembayaran Belanja Tidak Terduga Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Bantuan Sosial Biaya Pengobatan.

#### **5.4.4 Surplus/Defisit – LO**

Surplus/defisit-LO menggambarkan selisih pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan – LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi surplus – LO sebesar Rp38.179.577.611,23.



## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kota Sawahlunto menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp93.483.640.896,62. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk sebesar Rp620.622.376.213,62 dikurangi dengan arus keluar kas sebesar Rp527.138.735.317,00 yang terdiri dari :

	TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2021 (Rp.)
Arus Kas Masuk	620.622.376.213,62	597.810.673.087,45
Arus Kas Keluar	527.138.735.317,00	513.574.008.534,27
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>93.483.640.896,62</b>	<b>84.236.664.553,18</b>
<b>Arus Kas Masuk sebesar Rp620.622.376.213,62 terdiri dari:</b>		
1 Penerimaan Pajak Daerah	7.434.059.921,40	5.993.540.247,00
2 Penerimaan Retribusi Daerah	3.543.204.313,00	2.731.559.922,00
3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.477.268.009,00	10.806.423.680,00
4 Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	42.441.612.022,22	31.713.621.322,45
5 Penerimaan Dana Bagi Hasil	36.873.646.167,00	28.949.393.592,00
6 Penerimaan Dana Alokasi Umum	340.799.183.261,00	341.393.550.000,00
7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	74.358.095.142,00	36.226.376.563,00
8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	39.641.083.718,00	35.452.676.526,00
9 Penerimaan Dana Insentif	5.044.116.000,00	37.290.036.000,00
10 Penerimaan Dana Desa	20.098.731.000,00	30.109.035.910,00
11 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	33.658.971.260,00	28.726.379.525,00
12 Penerimaan Bantuan Keuangan	600.000.000,00	0,00
13 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	2.652.405.400,00	8.418.079.800,00
<b>Arus Kas Keluar sebesar Rp527.138.735.317,00 terdiri dari:</b>		
1 Pembayaran Pegawai	259.237.850.902,00	240.644.834.014,00
2 Pembayaran Barang dan Jasa	190.660.034.017,00	186.235.989.165,00
3 Pembayaran Bunga	891.962.272,00	796.043.279,27
4 Pembayaran Belanja Hibah	14.110.242.166,00	13.936.860.663,00
5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	3.831.150.000,00	2.396.000.000,00
6 Pembayaran Tak Terduga	294.991.005,00	2.655.984.000,00



7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.046.900.955,00	885.532.503,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	57.065.604.000,00	66.022.764.910,00

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus keluar kas bersih dari aktivitas investasi selama Tahun 2022 sebesar (Rp118.489.829.424,00) merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

	TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2021 (Rp.)
Arus Kas Masuk	24.850.000,00	230.191.100,00
Arus Kas Keluar	118.514.679.424,00	88.611.045.938,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(118.489.829.424,00)</b>	<b>(88.380.854.838,00)</b>

**Arus Kas Masuk sebesar Rp24.850.000,00 terdiri dari :**

1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	7.049.000,00
2	Penjualan Aset Lainnya	24.850.000,00	223.142.100,00

**Arus Kas Keluar sebesar Rp118.514.679.424,00 terdiri dari :**

1	Perolehan Peralatan dan Mesin	17.666.803.013,00	20.880.045.268,00
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	41.516.117.751,00	14.804.687.034,00
3	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.231.799.760,00	49.683.258.936,00
4	Perolehan Aset Tetap Lainnya	99.958.900,00	243.054.700,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus keluar kas bersih dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2022 sebesar (Rp1.598.572.958.00).



Selama Tahun Anggaran 2022 terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp38.093.710,00 yang merupakan pengembalian pinjaman dana bergulir dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.636.666.668,00 merupakan pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan No.S-1053/WPB.03/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Atas Kewajiban berdasarkan Surat Tagihan No.S-2097/WPB.03/2022 tanggal 14 Oktober 2022, dan penyaluran pinjaman daerah kepada UPTD Dana Bergulir sebesar Rp470.000.000,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2021 (Rp.)
Arus Kas Masuk	38.093.710,00	26.460.000,00
Arus Kas Keluar	1.636.666.668,00	1.231.666.666,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(1.598.572.958,00)</b>	<b>(1.205.206.666,00)</b>
<b>Arus Kas Masuk sebesar Rp38.093.710,00 terdiri dari:</b>		
1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	38.093.710,00	26.460.000,00
<b>Arus Kas Keluar sebesar Rp1.636.666.668,00 terdiri dari :</b>		
1 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
2 Pemberian Pinjaman Daerah	470.000.000,00	65.000.000,00

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2022 adalah berupa penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp37.541.584.993,00** yang merupakan Iuran Wajib Pajak (IWP;1%) sebesar Rp1.569.449.461,00, Iuran Wajib Pajak (IWP;4%) sebesar Rp6.258.797.980,00, pajak pusat semester I sebesar Rp4.359.979.149,00, dan pajak pusat semester II sebesar Rp25.353.358.403,00.

#### 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/penurunan kas Tahun 2022 sebesar (Rp26.604.761.485,38) diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	93.483.640.896,62	84.236.664.553,18
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(118.489.829.424,00)	(85.380.854.838,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(1.598.572.958,00)	(4.205.206.666,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	-	-
<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(26.604.761.485,38)</b>	<b>(5.349.396.950,82)</b>



### 5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp38.719.707.744,76.

### 5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.114.946.259,38 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.5.6.1 Saldo Akhir Kasda

Saldo akhir kasda sebesar Rp1.025.783.629,40 merupakan saldo DAK Non Fisik tahun 2022 di Rekening Bank Nagari.

#### 5.5.6.2 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan RSUD adalah sebesar Rp464.046,00.

#### 5.5.6.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)

Saldo akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) adalah sebesar Rp10.090.642.931,98.

#### 5.5.6.4 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas) adalah sebesar Rp92.913.685, dengan rincian sebagai berikut:

KAS BLUD PUSKESMAS	No Rekening	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	10.768.606,00	-
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	24.165.376,00	-
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	7.316.765,00	-
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	3.217.029,00	-
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	5.377.819,00	-
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	42.068.090,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>92.913.685,00</b>	<b>-</b>

#### 5.5.6.5 Saldo Kas pada JKN Puskesmas

Saldo Kas pada JKN Puskesmas adalah sebesar Rp650.047.260,00 dapat dirinci sebagai berikut:

KAS JKN/FKTP PUSKESMAS	No Rekening	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00436.8	53.014.016,00	51.773.963,00
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00437.1	45.194.360,00	25.609.901,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00434.4	118.546.805,00	109.817.946,00
Puskesmas Kolok	1100.0101.00438.0	1.844.569,00	1.000.130,00



<b>KAS JKN/FKTP PUSKESMAS</b>	<b>No Rekening</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Puskesmas Lunto	1100.0101.00435.6	18.077.166,00	16.265.809,00
Puskesmas Talawi	1100.0101.00439.3	413.370.344,00	413.370.255,00
<b>Jumlah</b>		<b>650.047.260,00</b>	<b>617.838.004,00</b>

#### 5.5.6.6 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo akhir Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp195.004.707,00 merupakan saldo kas BOS Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Sekolah</b>	<b>Saldo Kas</b>
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>82.472.975,00</b>
- Kas BOS di Bank Nagari	72.708.232,00
- Kas tunai di Bendahara BOS	9.764.743,00
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>112.531.732,00</b>
- Kas BOS di Bank Nagari	110.551.859,00
- Kas tunai di Bendahara BOS	1.979.873,00
<b>Jumlah</b>	<b>195.004.707,00</b>

#### 5.5.6.7 Saldo Akhir Kas di BOP PAUD

Saldo akhir kas di BOP PAUD adalah sebesar Rp60.000.000,00.



## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 5.130**  
**Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>972.540.970.505,83</b>	<b>954.746.572.126,94</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT - LO</b>	<b>38.179.577.611,23</b>	<b>2.599.047.943,22</b>
RK PPKD	550.203.348.617,00	490.350.546.917,80
RK SKPD	(550.203.348.617,00)	(490.350.546.917,80)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		2.220.793.016,89
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(31.573.926.609,40)	12.974.557.418,78
LAIN - LAIN	.	
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>979.146.621.507,66</b>	<b>972.540.970.505,83</b>

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan perubahan ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp972.540.970.505,83 yang merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2021.

Surplus/defisit-LO pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp38.179.577.611,23 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

RK PPKD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp550.203.348.617,00 dan RK SKPD adalah sebesar (Rp550.203.348.617,00).

Pada LPE terdapat dampak akumulatif akibat koreksi selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp31.573.926.609,40, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.131**  
**Dampak Akumulatif Koreksi pada LPE**

Uraian	Jumlah
<b>Koreksi LPE</b>	<b>(31.573.926.609,40)</b>
<b>Koreksi Tambah</b>	<b>92.563.515.106,84</b>
Belanja Dana BOS	-
Belanja BLUD	-



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Jumlah
Belanja Barang dan Jasa Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	-
Biaya Penunjang Kapitalisasi Aset Tetap	8.625.000,00
Hibah dari Pihak Ketiga	5.916.295.845,00
Mutasi dari OPD lain dan UPB	73.594.916.697,56
Koreksi Pencatatan	3.649.169.081,24
Reklasifikasi Ke Ekstrakom	2.328.945.113,00
Reklase dari Belanja Hibah Ke Belanja Modal	-
Reklasifikasi Kelompok Aset	4.802.939.333,04
Koreksi asset Tak Berwujud	49.900.000,00
Koreksi Asset Rusak Berat	2.204.866.570,00
Koreksi Penyusutan Tak Berwujud	7.857.467,00
<b>Koreksi Kurang</b>	<b>(89.587.288.877,94)</b>
Belanja Modal Yang Dieliminasi Dari Aset Tetap	-
Penghapusan	(2.914.086.708,00)
Hibah ke Pihak Ketiga	(612.457.500,00)
Mutasi dari OPD lain dan UPB	(73.055.364.828,56)
Koreksi Pencatatan	(1.452.488.624,00)
Reklasifikasi Ke Ekstrakom	(2.018.000,00)
Reklasifikasi Kelompok Aset	(13.734.276.972,58)
Koreksi asset Tak Berwujud	-
Koreksi Asset Rusak Berat	2.195.290.358,00
Koreksi Penyusutan Tak Berwujud	(11.886.602,80)
<b>Koreksi Ekuitas</b>	<b>(34.550.152.838,30)</b>
Akumulasi Penyusutan Aset	(33.880.633.561,17)
Selisih kurang/lebih SILPA Dana Bos/BLUD	4.945.971.218,00
Hutang jangka Panjang Lainnya	-
Koreksi Utang Bunga	-
Koreksi Perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	-
Koreksi tambah/kurang Kas Bendaharaan Penerimaan	(516.911.491,02)
Koreksi Tambah Aset Lainnya	-
Koreksi Kurang Aset Lainnya	-
Koreksi Invesatasi Non permanen	(287.147.530,00)
Koreksi Aseet Tak Berwujud	
Koreksi Aseet Rusak Berat	
Selisih Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
koreksi hutang jangka pendek	-
Koreksi Penyertaan Modal	(3.008.394.923,50)
Koreksi Penyisihan Piutang	(636.369.880,61)
Selisih Kewajiban Jangka Panjang	(1.166.666.670,00)
Koreksi Amortisasi Aseet Tak Berwujud	-



## BAB VI

### Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

#### 6.1 Aset Bersejarah

Kota Sawahlunto merupakan kota lama dimana sebagian besar bangunannya masih berbentuk bangunan lama dan bersejarah, bangunan ini sebagian besar dimiliki oleh PT. Bukit Asam dan PT Kereta Api.

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budaya, berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam dua kategori yaitu koleksi berupa barang bergerak dan benda cagar budaya berupa barang tidak bergerak.

Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap lainnya dan telah diregister dalam Koleksi Museum sesuai Ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan Aset Bersejarah berupa barang tidak bergerak (benda cagar budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan inventarisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar sampai dengan Tahun 2011, cagar budaya tidak bergerak di Kota Sawahlunto berjumlah 74 (tujuh puluh empat) buah dan dalam tahun 2018 telah reinventarisasi sehingga kondisi akhir Tahun 2018 masih sama dengan kondisi akhir Tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Daftar Aset Bersejarah Kota Sawahlunto**

No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
1	Barangin	1) Kantor Pusat UPO 2) Mess Bujangan I 3) Mess Bujangan II (W-1) 4) Kantor Polsekta 5) Kantor Periska 6) Gedung Pertemuan PT.TBO (Gedung 100 Jendela) 7) Asrama Karyawan PT.TBO 8) Rumah Adat Kolok 9) Rumah Pak Jumalik 10) Rumah Pak Situmorang 11) Rumah Karyawan PT.TBO 12) Masjid Nurul Huda 13) Pasar Durian 14) Mess Canada 15) Mess Australia 16) Makam Belanda 17) Rumah Hunian W-30 18) Rumah Hunian W-29 19) Rumah Hunian W-28 20) Lubang Terowongan Saringan 21) Rumah Absetter 22) Sizing Plant dan Bengkel Utama 23) Saringan Tua 24) Gedung Kompres II 25) Lubang Gtransport Cemara
2	Lembah Segar	1) Rumah Dinas Kapolsek 2) Rumah Ibu Yanti 3) Rumah dr. Ichsan 4) Gedung Kebudayaan (eks. Bank Mandiri/BDN)



No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
		5) Kantor Pegadaian 6) Kantor Koperasi PT.TBO 7) Gereja Katholik 8) Asrama Susteran St. Lucia 9) Sekolah Santa Lucia 10) Asrama Karyawan PT.TBO 11) Bangunan Penjagalan Sapi 12) Rumah Dajmi Ismail 13) Mess Bujangan 14) Rumah Fak Sin Kek 15) Rumah Barisan Muka 16) Poliklinik Ombilin (Eks.) 17) RSUD Sawahlunto 18) Rumah Dinas Dokter RSUD/ dr. Nyoman 19) Rumah Kel. Baini 20) Rumah Ketua Pengadilan 21) Rumah Ketua Kejaksaan 22) Rumah Dinas Walikota 23) Rumah Dinas Kejaksaan 24) Rumah Hanafi/Rumah Dinas Kesehatan 25) Rumah Karyawan PJKA 26) Stasiun Kereta Api Sawahlunto 27) Wisma Ombilin 28) Perpustakaan Adinegoro (eks. Bioskop) 29) Eks. Gudang Ransum (Museum) 30) Mesjid Agung Nurul Islam 31) Sentral Listrik Masjid Agung Nurul Islam 32) Rumah Dinas Kepala DKK 33) Rumah Dinas Pengadilan 34) Lubang Tambang Mbah Soero
3	Silungkang	1) Rumah Adat Silungkang 2) Tugu Silungkang 3) Komplek Makam Keramat Silungkang 4) Stasiun Kereta Api Silungkang 5) Terowongan KA (Lubang Kalam) 6) Stasiun KA Muaro Kalaban
4	Talawi	1) Makam Keramat Batu Tanjung 2) Bangunan Asrama (PLTU) 3) Rumah Tinggi/Karyawan PT.TBO 4) Kompleks Sentral Lama 5) Poliklinik Tugu Mandiri 6) Rumah Pak Sofyan 7) Rumah Gadang Talawi 8) Makam Syech Kolok 9) Makam Syech Tumpok

## 6.2 Pinjam Pakai/Sewa Pakai Aset Pihak Lain

### a. PT. BA (UPO)

Sawahlunto adalah kota lama yang merupakan daerah bekas tambang batu bara yang dikelola oleh PT. BA (UPO), dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan Sewa Pakai aset tanah dan bangunan milik PT.BA, diantara sewa pakai tersebut masih ada menunggu proses jawaban dari PT. BA.

### b. PT. Kereta Api Indonesia

Pemerintah Kota Sawahlunto juga melakukan Perjanjian Sewa Pakai dengan PT. Kereta Api Indonesia berupa 9 unit/bidang tanah yang digunakan untuk menunjang infrastruktur Kota Sawahlunto.



### **6.3 Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Sawahlunto oleh Pihak ketiga**

Dalam menunjang kegiatan operasional instansi vertikal, pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi peminjaman aset berupa kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat).

### **6.4 Daftar Hapus dan Lelang Aset Pemda Kota Sawahlunto Tahun 2019**

Menindaklanjuti Barang yang hilang, rusak berat yang tidak bisa digunakan lagi untuk operasional kedinasan, telah dilaksanakan penghapusan dan pelelangan Barang Milik Daerah dengan terbitnya beberapa Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain:

- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/139/WAKO-SWL/2022 Tanggal 22 April 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/194/WAKO-SWL/2022 Tanggal 13 Juli 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/202/WAKO-SWL/2022 Tanggal 28 Juli 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/228/WAKO-SWL/2022 Tanggal 02 September 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/246/WAKO-SWL/2022 Tanggal 10 Oktober 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/254/WAKO-SWL/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
- Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.188.45/254/WAKO-SWL/2022 Tanggal 09 November 2022.



## BAB VII PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, meskipun rencana tersebut belum tercapai 100%. Berbagai keberhasilan telah diraih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan dan hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada DPRD, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. Disamping itu akan dapat pula diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah memperoleh dan menggunakan/memanfaatkan sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan pihak yang menggunakannya dapat memahami Laporan Keuangan secara keseluruhannya.

